



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW kota, serta memperhatikan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis lima tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan Pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.
17. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Supervisi adalah proses pembinaan secara bersama-sama yang dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil jika terjadi penyimpangan.
27. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar tercapainya pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kota Pontianak.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - c. ketentuan peralihan; dan
 - d. ketentuan penutup.

BAB III RPJMD

Pasal 3

Sistematika penulisan RPJMD adalah sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam:

- a. Renstra Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan;
- b. RKPD tahunan; dan
- c. Renja Perangkat Daerah tahunan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Bagian Kesatu

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kota;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
- c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RPJMD

Pasal 8

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
 - b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
 - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak;
 - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota Pontianak;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah selaras dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJM Nasional sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Pontianak;
 - c. program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain disekitarnya;
 - d. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak selaras dengan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota lain disekitarnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak, berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota lain disekitarnya.

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJMD

Pasal 14

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mencakup program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Walikota.

Bagian Keempat Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang kota.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota.
- (5) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar di tingkat kota, provinsi dan nasional; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat kota dan provinsi yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan provinsi dan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Pasal 23

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Juni 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (7/2019)

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007-2027 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, penyusunan RKPD dan digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

4. Pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan:

- a. *Teknokratik*, yaitu Menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *Partisipatif*, yaitu Melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. *Politis*, yaitu Program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon *Kepala* Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam RPJMD;
- d. *Bottom up-top down*, yaitu Penyelarasan melalui musyawarah yang dilakukan mulai dari Desa, Kecamatan, kota, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

5. Tahapan

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 terdiri dari:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;
- c. Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang;

- d. Perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Kalimantan Barat;
- e. Penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Kalimantan Barat;

6. Muatan.

Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 terdiri dari:

- a. Visi, Misi dan Program Walikota;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;
- d. Kebijakan umum;
- e. Program Perangkat Daerah;
- f. Program lintas Perangkat Daerah;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

perubahan kebijakan tingkat kota yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung diantaranya adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menyebabkan terjadinya kontradiksi antara program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan perubahan rencana tata ruang, serta perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang menyebabkan terjadinya perubahan penanggungjawab urusan pemerintahan dan program-program prioritas serta indikator kinerja yang telah disusun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



**BAPPEDA
KOTA PONTIANAK**



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA PONTIANAK**

TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan bagian dari periode keempat pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana tahunan dalam periode tersebut, sehingga dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang tersusun secara strategis, konsisten dan konheren, sehingga arah pembangunan lima tahun melalui program-program strategis akan lebih terarah.

Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun, DPRD Kota Pontianak serta semua pihak yang terlibat secara bersama-sama dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini. Pemerintah Kota Pontianak berharap dukungan dan partisipasi aktif dari segenap stakeholder Kota Pontianak untuk dapat mengimplementasikan dan mengawasi RPJMD ini, sehingga Pembangunan Kota Pontianak yang direncanakan dapat tercapai.

Pontianak, Juni 2019

Walikota Pontianak



EDI RUSDI KAMTONO

DAFTAR ISI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2020-2024**

LAMPIRAN

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	lii
Daftar Gambar	Vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
I.1. Latar Belakang	I.2
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.2
I.3. Hubungan Antar Dokumen	I.4
I.4. Maksud dan Tujuan	I.5
I.5. Sistematika Penulisan	I.6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	VIII.1
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II.1
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II.3
2.1.3. Topografi	II.4
2.1.4. Geologi	II.4
2.1.5. Hidrologi	II.5
2.1.6. Klimatologi	II.6
2.1.7. Penggunaan Lahan	II.7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.12
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.12
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	II.12
2.2.1.2. Laju Inflasi	II.18
2.2.1.3. PDRB Perkapita	II.19
2.2.1.4. Indeks Gini	II.20
2.2.1.5. Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson)	II.20
2.2.1.6. Persentase Penduduk di Garis Kemiskinan	II.20
2.2.1.7. Rasio Kesenjangan Kemiskinan	II.24
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II.24
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II.24
2.2.2.2. Pendidikan	II.25
2.2.2.3. Kesehatan	II.27
2.2.2.4. Ketenagakerjaan	II.29
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II.31
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II.32
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II.32

	2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II.37
	2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II.41
	2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.41
	2.4.2.	Fokus Iklim Berinvestasi	II.45
	2.4.3.	Fokus Sumber Daya Manusia	II.47
BAB III		GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III.1
	3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III.1
	3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III.2
	3.1.2.	Neraca Daerah	III.8
	3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III.18
	3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III.18
	3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III.19
	3.3.	Kerangka Pendanaan	III.21
	3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III.22
	3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III.30
BAB IV		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH	IV.1
	4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV.1
	4.2.	Isu Strategis	IV.3
	4.2.1.	Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja	IV.3
	4.2.2.	Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	IV.4
	4.2.3.	Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur	IV.4
	4.2.4.	Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IV.5
	4.2.5.	Isu Global dan Nasional serta Keterkaitannya dengan Visi Kota Pontianak	IV.5
BAB V		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
	5.1.	Visi	V.2
	5.2.	Misi	V.2
	5.3.	Tujuan dan Sasaran	V.3
BAB VI		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI.1
	6.1.	Strategi	VI.1
	6.2.	Arah Kebijakan	VI.23
	6.3.	Program Pembangunan Daerah	VI.42
BAB VII		KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII.1
	7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	VII.1
	7.2.	Rencana Program Perangkat Daerah	VII.1
BAB VIII		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII.1
BAB IX		PENUTUP	IX.1
		DAFTAR TABEL	
		DAFTAR GAMBAR	
		DAFTAR GRAFIK	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel.II.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Pontianak	II.2
Tabel.II.2	Jumlah Kelurahan, RukunWarga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2017	II.3
Tabel.II.3	Sungai/Parit Menurut Kecamatan di Kota Pontianak	II.6
Tabel.II.4	Suhu Udara, Kelembaban dan Tekanan Udara di Kota Pontianak Tahun 2017	II.7
Tabel.II.5	Kecepatan Arah Angin dan Arah Angin di Kota Pontianak Tahun 2017	II.7
Tabel.II.6	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di kota Pontianak Tahun 2018	II.9
Tabel.II.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.13
Tabel.II.8	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam juta Rupiah) Tahun 2015-2017	II.14
Tabel.II.9	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah) Tahun 2015-2017	II.15
Tabel.II.10	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2017	II.
Tabel.II.11	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2017	II.16
Tabel.II.12	Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2017	II.19
Tabel.II.13	Produk Domestik Regional Bruto PerKapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2015-2017	II.19
Tabel.II.14	Gini Ratio Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.20
Tabel.II.15	PDRB Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016	II.21
Tabel.II.16	PDRB Per Kapita Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016	II.21
Tabel.II.17	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016	II.22
Tabel.II.18	Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2015-2016	II.22
Tabel.II.19	Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2017	II.23

Tabel.II.20	Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.31
Tabel.II.21	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Pontianak Tahun 2017	II.32
Tabel.II.22	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2017	II.33
Tabel.II.23	Rasio Guru Terhadap Murid di Kota Pontianak Tahun 2017	II.33
Tabel.II.24	Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit di Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.34
Tabel.II.25	Persentase Anak Usia 2-5 Tahun yang Pernah DiSususi dan Lamanya Disusui di Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.34
Tabel.II.26	Jumlah 10 Besar Penyakit Yang Ditangani oleh Puskesmas di Kota Pontianak Tahun 2017	II.35
Tabel.II.27	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif di Kota Pontianak Tahun 2017	II.35
Tabel.II.28	Wanita Berusia 15-49 Tahun Status Kawin Dengan Alat/Dara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.36
Tabel.II.29	Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2017	II.36
Tabel.II.30	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak	II.36
Tabel.II.31	Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak Tahun 2017	II.38
Tabel.II.32	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Panganan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2012-2016	II.41
Tabel.II.33	Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Pontianak Tahun 2016	II.43
Tabel.II.34	Tingkat Hunian Kamar Hotel (TPK) Menurut Bulan di Kota Pontianak Tahun 2014-2016	II.44
Tabel.II.35	Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2016	II.45
Tabel.II.36	Jumlah Pelanggan Air PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kota Pontianak Tahun 2014-2016	II.45
Tabel.II.37	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan (Crime Total) Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2012-2015	II.46
Tabel.II.38	Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2015	II.47
Tabel.II.39	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Pontianak Tahun 2014-2015	II.48
Tabel.II.40	Ketentuan Upah Minimum yang Berlaku di kota Pontianak Tahun 2014-2018	II.49
Tabel.III.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-Tahun 2019	III.3

Tabel.III.2	Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2013-31 Desember 2017 (Audited)	III.10
Tabel.III.3	Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2015-31 Desember 2019	III.13
Tabel.III.4	Rasio Lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017	III.14
Tabel.III.5	Rasio Quick Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017	III.15
Tabel.III.6	Rasio Utang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017	III.16
Tabel.III.7	Rasio Utang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017	III.16
Tabel.III.1	Perhitungan Rasio Aktivitas Realisasi Anggaran Pada Kota Pontianak Periode Tahun 2015-2019	III.17
Tabel.III.2	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2015-2019	III.18
Tabel.III.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.19
Tabel.III.4	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.20
Tabel.III.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2017-2019	III.20
Tabel.III.6	Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.21
Tabel.III.7	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	III.28
Tabel.III.8	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	III.30
Tabel.III.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	III.31
Tabel.V.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	V.5
Tabel.VI.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VI.4
Tabel.VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024....	VI.25
Tabel.VI.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VI.44
Tabel.VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VII.1
Tabel.VII.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VII.3
Tabel.VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VIII.1
Tabel. VIII.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024	VIII.2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.II.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya di berbagai level Pemerintahan	I.5
Gambar.II.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak	II.1
Gambar.II.2. Peta Geografis Kota Pontianak	II.4
Gambar.II.3. Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya	II.8
Gambar.II.4. Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak	II.11

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik.II.1	Persentase Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2017	II.2
Grafik.II.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Nasional 2015-2017	II.12
Grafik.II.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017	II.18
Grafik.II.4	Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap) Kota Pontianak Tahun 2015-2018	II.24
Grafik.II.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.25
Grafik.II.6	Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Periode 2015-2016	II.26
Grafik.II.7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.26
Grafik.II.8	AngkaHarapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pontianak Tahun 2015-2017	II.27
Grafik.II.9	Anak Usia Harapan Hidup di Kota Pontianak Periode 2015-2017	II.27
Grafik.II.10	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.28
Grafik.II.11	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.28
Grafik.II.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.29
Grafik.II.13	Tingkat Pengangguran di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.30
Grafik.II.14	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak Periode 2015-2018	II.30
Grafik.II.15	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Pontianak Periode 2015-2017	II.32
Grafik.II.16	Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kota Pontianak Tahun 2017	II.37
Grafik.II.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air Minum di Kota Pontianak Tahun 2017	II.37
Grafik.II.18	Produksi Tanaman Sayuran di Kota Pontianak Tahun 2017	II.39
Grafik.II.19	Populasi Ternak Kota Pontianak (ekor) Tahun 2017	II.39
Grafik.II.20	Perkembangan Jumlah Perusahaan di Kota Pontianak	II.40
Grafik.II.21	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Pontianak Tahun 2016	II.40
Grafik.II.22	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2016 (Km)	II.42
Grafik.II.23	Proporsi Kontribusi Per Jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak Tahun 2015	II.47
Grafik.III.1	Komposisi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Volume APBD Tahun 2015-2019	III.2
Grafik.III.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun	III.6

	2015-2019	
Grafik.III.3	Perkembangan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.7
Grafik.III.4	Persentase Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah Kota Pontianak	III.7
Grafik.III.5	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019	III.8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri sebagai Daerah otonom. Kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi yang mencakup semua bidang pemerintahan urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (tahunan).

Guna memberikan arah dan landasan pembangunan Kota Pontianak dalam periode terakhir (tahun ke-empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Adapun penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dilakukan melalui lima pendekatan, yakni pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi, misi dan program pembangunan oleh Walikota terpilih, serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD. Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan di Kota Pontianak. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam Musrenbang yang melibatkan para stakeholder yang ada di Kota Pontianak.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
 28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Nomor 49).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, sinkron dan sinergi antar

daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025. RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan RPJMD terakhir dalam periode RPJPD Tahun 2005-2025 yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024, yang menjabarkan RPJMD dalam program strategis dan kegiatan untuk menangani isu strategis dan mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, diantaranya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, arah pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik Kota Pontianak.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penyusunan RPJMD Kota Pontianak berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Penyusunan RPJMD Kota Pontianak menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan RPJMD Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2018-2023, Penyusunan RPJMD Kota Pontianak menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak dengan arah serta prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Pontianak. Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan misimewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, mewujudkan masyarakat sejahtera, mewujudkan masyarakat yang tertib dan mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan RPJMD Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 dan memperhatikan rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunandan penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Pontianak Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Pontianak. RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan sehingga pembangunan Kota Pontianak dapat berjalan dengan maksimal.

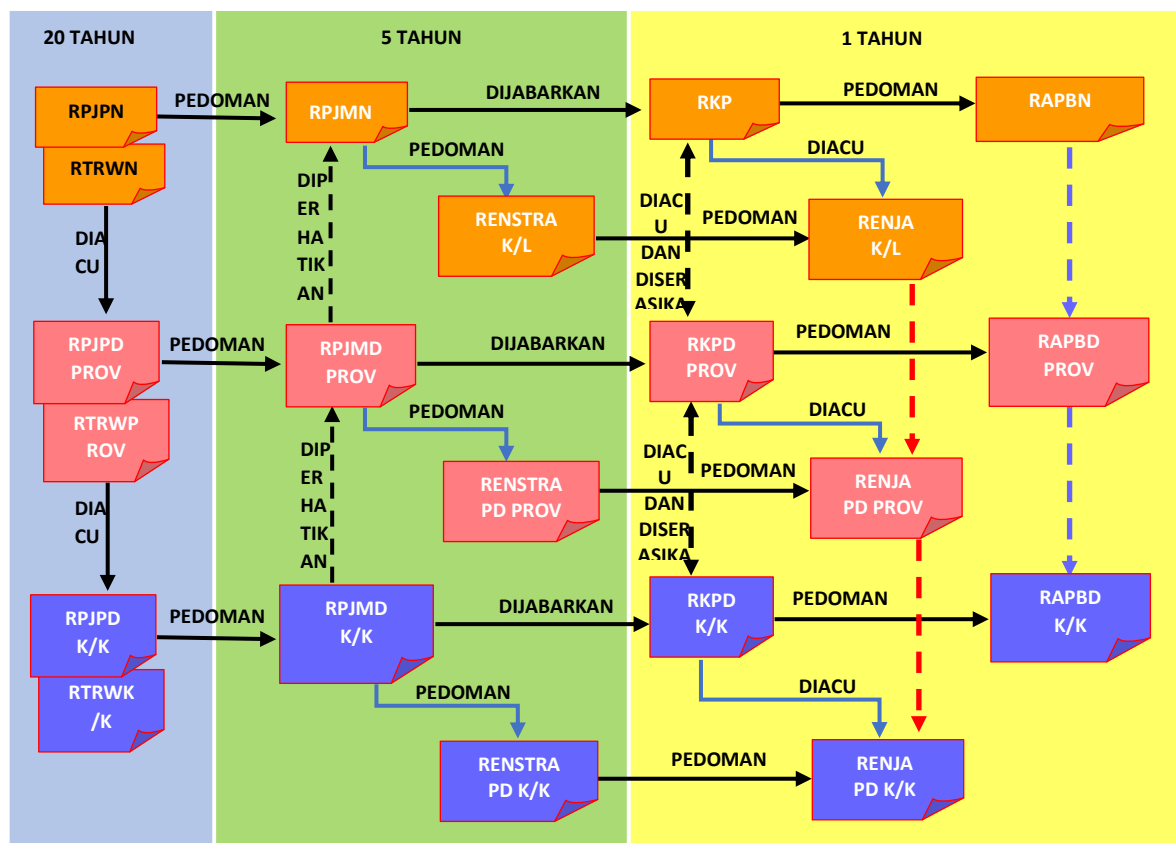
6. Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Pontianak

Penyusunan RPJMD Kota Pontianak berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 117). RTRW Provinsi Kalimantan Barat merupakan acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Pontianak dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kota Pontianak, program dan kegiatan pembangunan kota.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Di Berbagai Level Pemerintahan



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. MAKSUD

RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas serta indikasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun.

1.4.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari disusunnya RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

1. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan untuk periode tahun 2020-2024, disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman kepada RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu kepada agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahun 2020-2024 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak;
3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian Daerah serta pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode Tahun Anggaran 2020-2024;
4. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
5. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode tahun 2020-2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi penulisan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi sembilan bab, dengan ringkasan isi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen lainnya serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan Daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan pengelolaannya, kemudian menyajikan kerangka pendanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati serta nilai pengertian yang terkandung di dalamnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini berisikan penutup RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

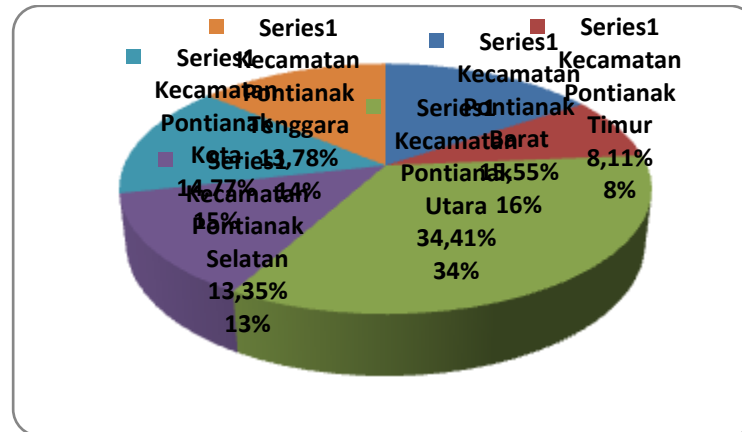
Merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki luas 108,16 m². Sebagaimana Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, 29 kelurahan, 582 Rukun Warga (RW) dan 2.592 Rukun Tetangga (RT). Ke-enam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Pontianak adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan luas sebesar 37,22 km² atau 34,41 persen dari luas wilayah Kota Pontianak, diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat dengan luas 16,82 km², Kecamatan Pontianak Kota dengan luas 15,98 km², kecamatan Pontianak Tenggara dengan luas 14,91 km², Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas 14,45 km², dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pontianak Timur dengan luas sebesar 8,78 km² atau 8,11 persen dari luas wilayah Kota Pontianak. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar II.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Pontianak

Grafik II.1
Persentase Luas Wilayah Kota Pontianak, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Tabel II.1
Luas Wilayah Administratif Kota Pontianak

No	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP KOTA PONTIANAK
1.	Pontianak Barat	1. Pallima	5,80	5,36
		2. Sungaijawi Dalam	2,34	2,16
		3. Sungaijawi Luar	3,01	2,78
		4. Sungai Beliang	5,67	5,24
		Sub Total :	16,82	15,55
2.	Pontianak Timur	1. Parit Mayor	1,06	0,98
		2. Banjar Serasan	1,14	1,05
		3. Saigon	2,80	2,58
		4. Tanjung Hulu	1,09	1,00
		5. Tanjung Hilir	0,30	0,27
		6. Dalam Bugis	1,98	1,83
		7. Tambelan Sampit	0,41	0,37
		Sub Total :	8,78	8,11
3.	Pontianak Utara	1. Siantan Hulu	9,20	8,50
		2. Siantan Tengah	13,70	12,66
		3. Siantan Hilir	7,87	7,27
		4. Batu Layang	6,45	5,96
		Sub Total :	37,22	34,41
4.	Pontianak Selatan	1. Benua Melayu Darat	2,72	2,51
		2. Benua Melayu Laut	0,56	0,51
		3. Parit Tokaya	5,40	4,99
		4. Akcaya	3,24	2,99
		5. Kota Baru	2,53	2,33
		Sub Total :	14,45	13,35
5.	Pontianak Kota	1. Sungai Bangkong	6,20	5,73
		2. Darat Sekip	1,31	1,21
		3. Tengah	0,95	0,87
		4. Mariana	0,50	0,46
		5. Sungai Jawi	7,02	6,49
		Sub Total :	15,98	14,77
6.	Pontianak Tenggara	1. Bangka Belitung Darat	2,90	2,68
		2. Bangka Belitung Laut	2,33	2,15
		3. Bansir Darat	6,73	6,22
		4. Bansir Laut	2,95	2,72
		Sub Total :	14,91	13,78

No	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	% TERHADAP KOTA PONTIANAK
Total Kota Pontianak			108,16	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Tabel II.2

Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Pontianak Selatan	5	92	411
Pontianak Tenggara	4	47	188
Pontianak Timur	7	88	398
Pontianak Barat	4	103	548
Pontianak Kota	5	120	511
Pontianak Utara	4	132	536
Jumlah :	29	582	2.592

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian Utara : Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah

Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

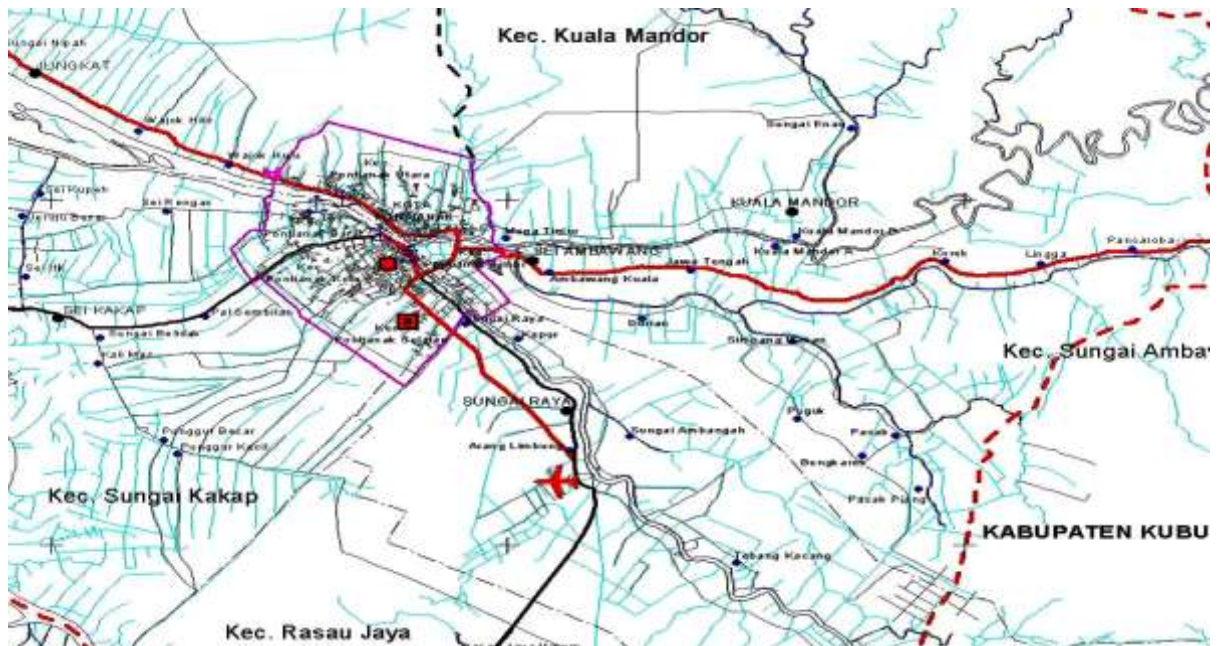
Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem pelayaran Indonesia bagian Barat , maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran sistem angkutan laut di wilayah Indonesia dan Internasional. Pelabuhan antar pulau Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan Pontianak-Ketapang, Pontianak-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pontianak secara astronomis terletak diantara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah

satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula.



Gambar II.2
Peta Geografis Kota Pontianak

2.1.3 Topografi

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan kontur topografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara Sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan kelandaian kurang dari 2 persen.

Ketinggian air dari permukaan tanah pada saat banjir di wilayah Kota Pontianak rata-rata 50 cm. Pada pengamatan pasang surut melalui alat ukur (pada koordinat 0° 00' 55" LU dan 109° 02' 20" BT) diperoleh titik pasang tertinggi sebesar 2,42 meter, titik pasang terendah sebesar 0,07 meter dan muka laut rata-rata maksimal 0,89 meter).

2.1.4 Geologi

Kota Pontianak dilihat dari kondisi geologi nya termasuk dalam kategori wilayah peneplant dan sedimen gambut alluvial yang secara

fisik merupakan jenis tanah liat, dimana jenis tanah nya terdiri dari jenis tanah Organosol, Gley, Humus dan Aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Jenis tanah liat ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai kapuas, dimana dengan kondisi tersebut tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah.

Komposisi tanah di sepanjang sungai merupakan bentuk dari proses pengendapan yang menghasilkan daerah tropaquent dan tropofluevent dan dalam kondisi tersaturasi permanen fluvaquent. Tropofluevent dan fluvaquent berasal dari endapan akresi baru dari berbagai komposisi dan bentuk, termasuk materi organik. Sabuk tropaquent melebar ke arah selatan mencapai pusat Kota Pontianak dan Sungai Kapuas di dekatnya. Di sisi lain, pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian.

2.1.5 Hidrologi

Kota Pontianak terdiri dari tiga daratan yang dipisahkan oleh sistem jaringan drainase regional yang terbentuk oleh 3 sungai besar yakni Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar masing-masing kurang lebih 400 meter. Bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Utara, bagian timur meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Timur dan bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Kedalaman sungai-sungai tersebut berkisar antara 12 sampai dengan 16 meter, sedangkan cabangnya mempunyai karakteristik berbeda dan menjadi jalur transportasi orang dan barang, dimana dalam wilayah Kota Pontianak sungai dan parit keseluruhannya berjumlah 61 sungai/parit yang sebagian besar masih dipergunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Adapun dalam sistem drainase regional bagian selatan terdapat saluran primer yang cukup banyak, maka dibagian selatan dibagi menjadi 4 subsistem jaringan drainase yaitu subsistem Sungai Beliung, subsistem Sungai Jawi, subsistem Sungai Tokaya dan subsistem Sungai Raya.

Subsistem Sungai Beliung adalah subsistem paling barat yang berbatasan dengan subsistem Sungai Jawi disebelah timurnya. Batas antara subsistem ini dengan subsistem Sungai Jawi adalah Jl.

Hasanuddin, Jl. HRA Rahman dan Jl. Husein Hamzah. Subsistem Sungai Jawi ini berbatasan dengan subsistem Parit Tokaya disebelah timurnya yang mana batasnya adalah Jl. HA Salim, Jl. Gst Sulung Lelanang, Jl. Sultan Abdurahman, Jl. Sutan Syahril dan Jl. Prof. M. Yamin. Batas antara subsistem Parit Tokaya dengan subsistem Sungai Raya adalah pertengahan lahan Universitas Tanjungpura dan terusnya.

Tabel II.3
Sungai/Parit Menurut Kecamatan di Kota Pontianak

NO	KECAMATAN	SUNGAI/PARIT	NO	KECAMATAN	SUNGAI/PARIT
1	Pontianak Selatan	Parit Bansir Parit Besar Parit Tokaya Sungai Kapuas Kecil	4	Pontianak Barat	Sungai Nipah Kuning Parit Sungai Jawi Parit Sungai Kapuas Sungai Kapuas Besar Parit Labala Sungai Sero Parit Tengah Sungai Beliang Sungai Selamat
2	Pontianak Tenggara	Parit Bangka Parit Haji Husin Sungai Raya	5	Pontianak Kota	Parit Besar Parit Sungai Jawi Sungai Bangkong Parit Sungai Kakap Sungai Kapuas Besar
3	Pontianak Timur	Parit Bating Parit Daeng Lasibek Parit Haji Yusuf Karim Parit Japon Parit Kongsu Parit Langgar Parit Mayor Parit Pangeran Pati Parit Semerangkai Parit Tambelan Parit Wan Bakar Kapur Parit H. Yusuf Parit Jalil Parit Norman Sungai Kapuas Kecil Sungai Landak Sungai Kapitan Sungai Jenggut Sungai Kapuas Besar	6	Pontianak Utara	Parit Jawa Parit Makmur Parit Malaya Parit Nanas Parit Pangeran Parit Sungai Kunyit Parit Sungai Putat Parit Sungai Sahang Parit Sungai Selamat Parit Wan Salim Sungai Kapuas Besar Sungai Landak Sungai Kuning Parit Pak Kacong Sungai Durhaka Parit Pekong Parit Lie Parit Belanda Parit Cekwa Sungai Pandan Parit Pangeran II

Sumber: TAPEM Kota Pontianak, Kota Pontianak Dalam Angka. 2017

2.1.6 Klimatologi

Temperatur udara di Kota Pontianak menurut hasil pencatatan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak tahun 2017 berkisar antara 22,40 °C hingga 36,4 °C, sedangkan rata-rata tekanan udaranya sebesar 1.010,3 milibar. Di sisi lain, Rata-rata kecepatan angin di Kota Pontianak berkisar antara 1,8 knot hingga 2,9 knot dengan kecepatan angin terbesar terjadi pada Bulan November yaitu sebesar 44 knot. Disisi lain, curah hujan yang terjadi di Kota Pontianak selama tahun 2017

terbanyak terjadi pada Bulan November yaitu sebanyak 26 hari dengan curah hujan sebesar 234,3 mm. Berikut adalah gambaran suhu udara, kelembaban, tekanan udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin di Kota Pontianak Tahun 2017:

Tabel II.4
Suhu Udara, Kelembaban dan Tekanan Udara di Kota Pontianak Tahun 2017

BULAN	SUHU UDARA (°C)			RATA-RATA KELEMBABAN (%)	RATA-RATA TEKanan UDARA (mb)
	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA		
Januari	22,6	35,2	27,8	81	1.009,9
Februari	22,8	35,2	27,1	81	1.010,8
Maret	23,0	35,4	27,6	82	1.010,7
April	23,6	35,4	28,0	81	1.011,0
Mei	23,4	36,2	28,1	83	1.010,0
Juni	23,1	36,4	28,4	79	1.010,6
Juli	23,2	36,1	27,8	80	1.010,7
Agustus	22,4	35,8	27,7	82	1.010,5
September	23,3	36,2	27,9	81	1.010,7
Oktober	23,9	35,7	27,8	83	1.010,4
November	22,7	34,4	27,4	85	1.008,7
Desember	23,2	34,2	27,4	84	1.009,7
Rata-Rata	23,1	35,5	27,8	81,8	1.010,3

Sumber: Stasiun Meteorologi maritim Pontianak. Kota Pontianak Dalam Angka. 2017

Tabel II.5
Kecepatan Angin dan Arah Angin di Kota Pontianak Tahun 2017

BULAN	RATA-RATA KECEPATAN ANGIN (knot)	KECEPATAN ANGIN TERBESAR (knot)	ARAH ANGIN TERBANYAK
Januari	2,5	11	Barat
Februari	2,9	21	Timur
Maret	2,4	15	Timur
April	2,4	10	Timur
Mei	2,4	10	Timur
Juni	2,2	26	Timur
Juli	2,3	19	Timur
Agustus	2,1	20	Timur
September	2,0	30	Timur
Oktober	1,8	31	Timur
November	1,9	44	Timur
Desember	2,4	36	Barat
Rata-Rata	2,3	22,8	Timur

Sumber: Stasiun Meteorologi maritim Pontianak. Kota Pontianak Dalam Angka. 2017

2.1.7 Penggunaan Lahan

Adapun penggunaan lahan di Kota Pontianak terpola pada ruang wilayah yang diwujudkan melalui rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

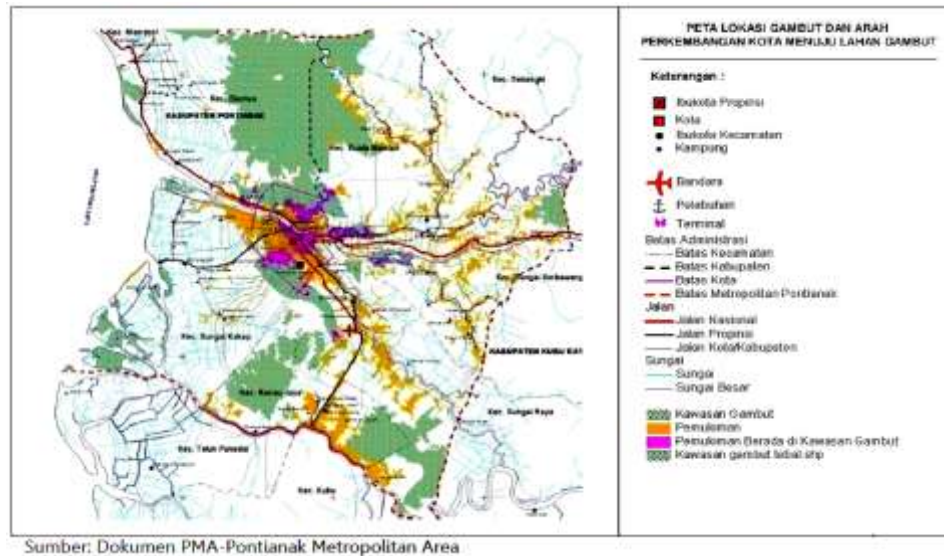
Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH) Kota, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2012-2033, pengembangan kawasan lindung di Kota Pontianak yang direncanakan adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, meliputi kawasan bergambut dengan kedalaman gambut lebih dari 4 (empat) meter seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar. Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung gambut di Kota Pontianak kurang lebih sebesar 1.607 hektar atau sekitar 14,9 persen dari luas keseluruhan Kota Pontianak yang meliputi kawasan lindung gambut di Kelurahan Batu Layang dan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Adapun peraturan zonasi untuk rencana pengelolaan penggunaan lahan pada kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan rehabilitasi lahan pada kawasan yang telah rusak;
- b. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- c. Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
- d. Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.



Gambar II.3
Peta Lokasi Gambut
Kota Pontianak dan
Sekitarnya

2. Kawasan Perlindungan Setempat, yakni kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut.

Sebagaimana kriteria tersebut di atas, kawasan yang termasuk kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Malaya dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Raya dan lain-lain. Mengingat sudah banyaknya permukiman penduduk yang berada pada kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dengan pembangunan terbatas misalnya pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai serta pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air. Sedangkan untuk lahan kosong yang berada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat misalnya penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau serta penataan, pengamanan dan penertiban pemanfaatan lahan pada sempadan sungai sesuai peruntukannya.

3. Ruang Terbuka Hijau (RTH), yakni area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH Alami (habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional) serta RTH Non Alami atau Binaan (taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan).

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, RTH Kota terbagi menjadi dua yaitu RTH Privat dan RTH Publik. RTH Privat meliputi perkarangan rumah, halaman perantoran, pelayanan umum, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan. Sedangkan RTH Publik meliputi taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, jalur hijau pada median jalan dan tepi jalan, pemakaman umum, serta agrowisata/kawasan Sentra Agro Bisnis. Adapun jenis dan luas RTH Privat di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pontianak
Tahun 2018

Jenis RTH	Jenis RTH	Luas		Persentase (%)
		Wilayah Kota Pontianak (Km ²)	RTH (Km ²)	
1	Taman Kota	107,82	4,9	4,5
2	Jalur Hijau	107,82	1,6	1,5
3	Lapangan Olah Raga	107,82	0,65	0,6
4	Pemukaman Umum	107,82	0,45	0,4
5	Hutan Kota	107,82	2,56	2,4
6	Agrowisata/KSA	107,82	10	9,3
Jumlah		107,82	20,16	18,7

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

4. Dan Kawasan Perlindungan Cagar Budaya, yakni kawasan yang melindungi kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan lestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan maksimal. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benca Cagar Budaya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, maka Kawasan/Benda Cagar Budaya di Kota Pontianak ditetapkan sebagai berikut:

1. Keraton Kadriah Pontianak di Kelurahan Dalam Bugis;
 2. Masjid Jami' Sultan Sy. Abdurrachman di Kelurahan Dalam Bugis;
 3. Makam Kesultanan Pontianak di Kelurahan Batulayang;
 4. Tugu Khatulistiwa di kelurahan Batulayang;
 5. Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak di Kelurahan Tengah;
 6. Vihara Bodhisatva di Kelurahan Darat Sekip;
 7. Kantor Pos di Kelurahan Tengah;
 8. Lapangan Keboen Sajoeck di Kelurahan Darat Sekip;
 9. Sumur Bor di Kelurahan Sungai Bangkong;
 10. Pelabuhan Seng Hie di Kelurahan Benua Melayu Laut;
 11. Kantor Bappeda Kota Pontiaak di Kelurahan Tengah.
5. Kawasan Rawan Bencana meliputi kawasan Rawan Genangan, Kawasan Rawan Kebakaran Permukiman, Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung, Secara geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan secara topografinya sebagian besar wilayah Kota Pontianak merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0-2 persen, sehingga tidak menggambarkan kawasan rawan longsor, akan tetapi terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi tergenang air yakni:
- a. Kelurahan Parit Tokaya dan sekitarnya, meliputi kawasan jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprpto dan Ahmad Yani
 - b. Kelurahan Sungai Bangkong dan sekitarnya, meliputi jalan Alianyang dan jalan Gusti Hamzah
 - c. Kelurahan Siantan Hulu, wilayah Parit Bentasan sekitar Sungai Malaya

Kawasan rawan kebakaran permukiman sebagaimana dimaksud terdapat di bagian wilayah kota yang mempunyai tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan yang tinggi terutama kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota semisal pusat perbelanjaan/pasar tradisional serta kebakaran hutan yang sering terjadi pada musim kemarau yang cenderung mengakibatkan polusi asap tebal.

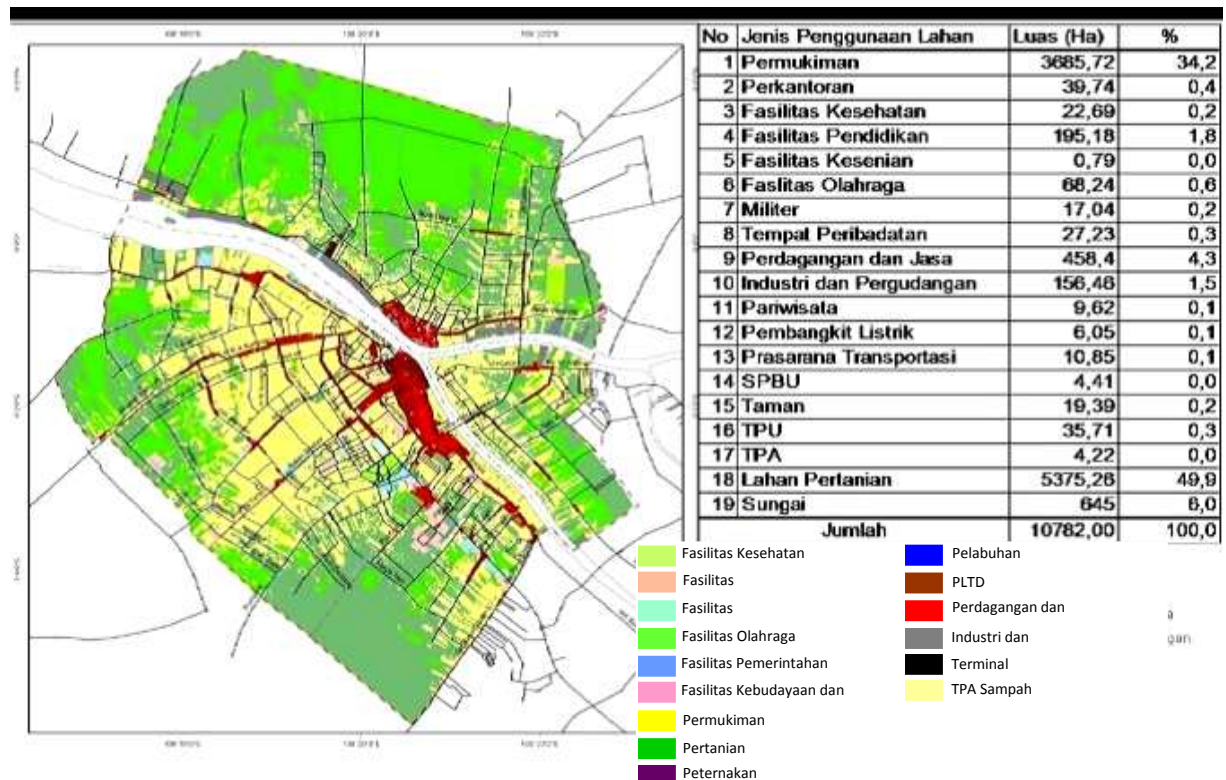
Kawasan yang berpotensi rawan kebakaran hutan dan lahan Sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Kecamatan Pontianak Utara ,meliputi Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir dan Kelurahan Siantan Tengah
- b. Kecamatan Pontianak Selatan, meliputi Kelurahan Akcaya, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Parit Tokaya
- c. Kecamatan Pontianak Tenggara, meliputi Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Kelurahan Bansir Darat

Sedangkan lokasi rawan bencana Puting Beliung meliputi seluruh wilayah Kota Pontianak.

Kawasan Budidaya

Sebagai salah satu implementasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota, Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di Kota Pontianak adalah diarahkan pada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dimana kawasan budidaya tersebut adalah terdiri dari kawasan perumahan, pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan pergudangan, pariwisata dan rekreasi serta militer. Secara garis besar, kondisi penggunaan lahan Kota Pontianak dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar II.4
Peta Penggunaan Lahan di Kota Pontianak

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukan lahan pertanian dengan luas 49,9% dari total luas wilayah Kota Pontianak, kemudian diikuti dengan peruntukan perumahan dan permukiman yang luasnya mencapai 34,2%, dan sisanya kurang lebih 15,9% terbagi untuk peruntukan fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa, kesehatan, pendidikan, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, serta sarana dan prasarana perkotaan.

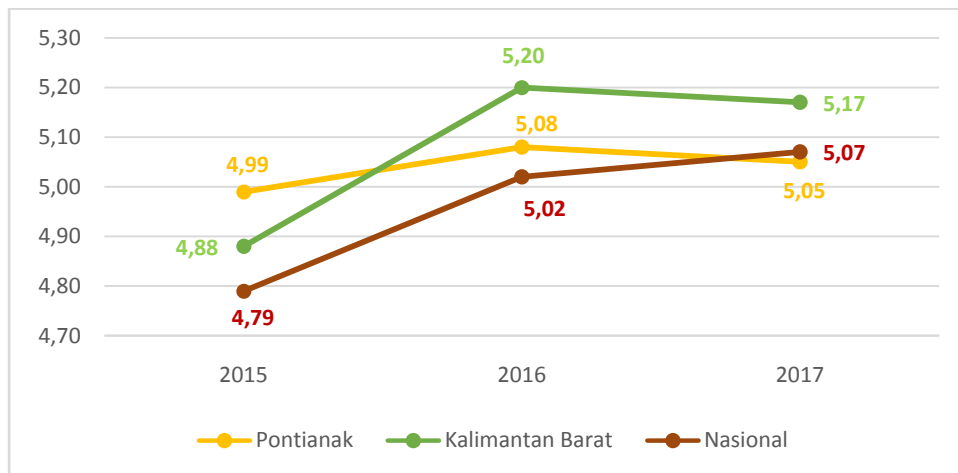
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik II.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Nasional
2015-2017



Selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pertumbuhan dengan trend yang cenderung bervariasi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak tahun 2017 tercatat sebesar 5,05 persen cenderung melambat 0,03 point dari pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,08 persen sedangkan tahun 2015 Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,99 persen. Adapun Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2017 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tumbuh sebesar 5,17 persen dan Nasional yang tumbuh sebesar 5,07 persen.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2017 adalah informasi dan komunikasi sebesar 11,41 persen, sektor ini tumbuh 1,05 persen dari tahun 2016. Kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi yang memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 6,68 persen atau tumbuh 4,33 dari tahun 2016. Dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebagian besar lapangan usaha melambat pertumbuhannya, dimana lapangan usaha pengadaan listrik dan gas melambat cukup signifikan yaitu sebesar 10,47 persen. Jasa Keuangan dan Asuransi melambat 2,90 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak Tahun 2017 juga tidak terlepas dari adanya dorongan investasi dan kinerja di sektor perdagangan. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan gedung pemerintahan misalnya pembangunan jalan Husein Hamzah, Jalan

Paralel Sei Raya, pembangunan saluran drainase di berbagai lokasi, pembangunan gedung kantor Camat dan Lain-lain serta investasi swasta berupa pembangunan dan penambahan berbagai bangunan hotel dan restoran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah total dari nilai barang dan jasa, atau nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah (regional). PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga yang berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Sejak tahun 2014 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 sebagai pengganti tahun dasar 2000 agar penghitungan PDRB lebih *up to dated* dimana salah satu revisi yang dilakukan adalah perubahan klasifikasi Lapangan Usaha.

Selama kurun waktu tahun 2015-2017 besaran PDRB ADHB Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 27,92 triliun rupiah (2015); 30,47 triliun rupiah (2016) dan 33,03 triliun rupiah (2017). Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan, angka PDRB Kota Pontianak 2015-2017 juga mengalami kenaikan berturut-turut dengan besaran yang relatif stabil, dari 20,75 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 21,80 triliun rupiah pada tahun 2016, kemudian naik lagi menjadi 22,90 triliun rupiah pada tahun 2017. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Berikut disajikan besaran PDRB ADHB dan ADHK Kota Pontianak tahun 2015-2017:

Tabel II.7

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Kota Pontianak Tahun 2015-2017

TAHUN	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)
2015	27.920.136,59	20.747.494,75
2016 *	30.472.529,31	21.801.263,39
2017 **	33.029.624,15	22.903.162,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Untuk mengetahui struktur ekonomi Kota Pontianak dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2015-2017) struktur perekonomian Kota Pontianak didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan; serta Asuransi, Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pontianak tahun 2017 meningkat 8,39 persen dari tahun sebelumnya dengan kontribusi terbesar pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 18,64 persen. Besarnya kontribusi lapangan usaha tersebut menunjukkan bahwa Kota Pontianak merupakan daerah perdagangan dan distribusi barang. Urutan kedua yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha adalah konstruksi yang memberikan kontribusi sebanyak 17,21 persen dan disusul oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebanyak 16,74 persen.

Tabel II.8
Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam juta rupiah) Tahun 2015-2017

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2015	2016 *	2017 **
(1)		(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	390.112,72	417.457,05	440.319,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.547.140,04	5.023.578,58	5.528.519,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26.840,65	34.382,39	41.592,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	89.952,81	97.497,13	105.556,76
F	Konstruksi	4.786.418,54	5.038.879,80	5.683.549,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.260.213,93	5.671.884,73	6.156.244,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2.451.909,73	2.702.911,45	2.896.281,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	939.726,88	1.041.181,46	1.129.927,03
J	Informasi dan Komunikasi	1.072.928,66	1.190.067,29	1.384.891,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.398.032,42	2.686.426,03	2.979.490,09
L	Real Estate	730.577,37	776.814,42	846.562,35
M,N	Jasa Perusahaan	178.673,44	202.304,38	219.143,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.158.348,20	2.489.269,58	2.769.765,23
P	Jasa Pendidikan	1.902.064,61	2.049.172,38	2.157.662,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	469.754,38	506.040,91	540.360,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	517.442,21	544.661,73	591.078,37
Produk Domestik Regional Bruto		27.920.136,59	30.472.529,31	33.029.624,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Indikator Ekonomi Kota Pontianak. 2018

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Atas dasar harga konstan, PDRB menurut lapangan usaha meningkat 5,05 persen dengan kontribusi terbesar pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor disusul oleh industri pengolahan dan konstruksi. Jika dilihat dari tahun sebelumnya, semua lapangan usaha melaju dalam kontribusinya untuk PDRB atas dasar harga konstan. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian tidak memberikan kontribusi dalam PDRB karena Kota Pontianak tidak bergerak dalam lapangan usaha tersebut.

Tabel II.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga
Konstan (Tahun Dasar 2010) Menurut Lapangan Usaha (dalam juta
rupiah) Tahun 2015-2017

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2015	2016 *	2017 **
(1)		(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	330.239,10	342.254,27	354.607,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3.536.632,14	3.663.494,17	3.809.001,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.656,36	28.358,03	29.646,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	81.399,38	87.805,51	91.941,15
F	Konstruksi	3.299.849,43	3.377.386,22	3.603.124,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.079.128,21	4.286.338,39	4.476.485,58
H	Transportasi dan Pergudangan	2.001.082,15	2.121.145,93	2.197.774,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	705.069,40	752.514,34	796.908,83
J	Informasi dan Komunikasi	984.906,35	1.086.908,71	1.210.925,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.727.240,39	1.877.034,19	1.985.306,73
L	Real Estate	579.667,30	608.360,83	633.486,14
M,N	Jasa Perusahaan	142.591,02	153.356,80	161.181,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.024.581,30	1.103.770,51	1.158.280,18
P	Jasa Pendidikan	1.450.197,55	1.496.985,00	1.544.319,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	356.343,19	372.639,85	385.647,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	423.911,48	442.910,64	464.524,68
Produk Domestik Regional Bruto		20.747.494,75	21.801.263,39	22.903.162,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Indikator Ekonomi Kota Pontianak. 2018

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Kontribusi Sektoral:

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Kontribusi sektoral memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Semakin besar persentase distribusi suatu sektor dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak
Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2015-2017

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2015	2016 *	2017 **
(1)		(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,55	3,64	3,61
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C	Industri Pengolahan	2,45	3,59	3,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,84	15,01	4,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	7,87	4,71
F	Konstruksi	8,78	2,35	6,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,08	4,44
H	Transportasi dan Pergudangan	3,85	6,00	3,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,13	6,73	5,90
J	Informasi dan Komunikasi	11,07	10,36	11,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	8,67	5,77
L	Real Estate	3,48	4,95	4,13
M,N	Jasa Perusahaan	6,93	7,68	4,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	7,73	4,94
P	Jasa Pendidikan	3,36	3,23	3,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,13	4,57	3,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	4,48	4,88
Produk Domestik Regional Bruto		4,99	5,08	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Indikator Ekonomi Kota Pontianak. 2018

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Distribusi persentase PDRB Kota Pontianak atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa selama periode 2015 hingga 2017 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi dan Perawatan Kendaraan menjadi salah satu penopang ekonomi kota dengan andil paling besar dalam perekonomian, meskipun selama lima tahun secara perlahan peranannya semakin menurun, akan tetapi kontribusinya tetap tertinggi yang membentuk perekonomian Kota Pontianak. Secara umum dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kota Pontianak didominasi oleh sektor ekonomi kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran didukung oleh maju pesatnya lapangan usaha konstruksi yang dibutuhkan sebagai kota perdagangan dan jasa, dan lapangan usaha industri pengolahan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan barang jadi maupun setengah jadi serta industri makanan maupun non makanan.

Tabel II.11
Distribusi Pesentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak
Atas Dasar Harga Berlaku (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2015-2017

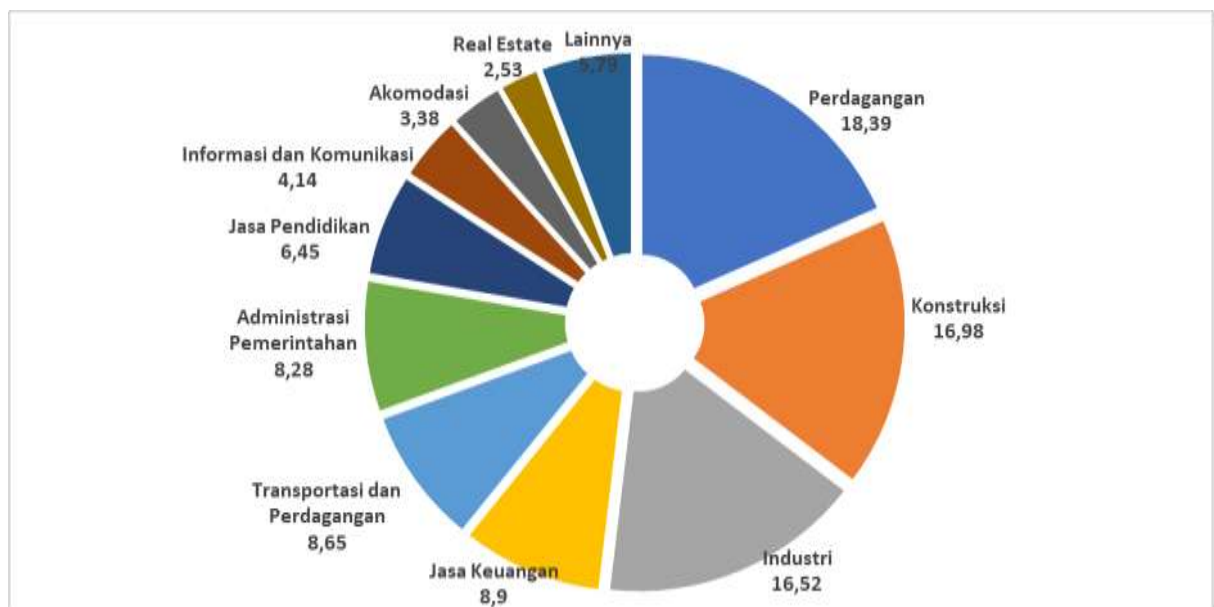
LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2015	2016 *	2017 **
(1)		(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,40	1,37	1,32
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-
C	Industri Pengolahan	16,29	16,49	16,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,32	0,32
F	Konstruksi	17,14	16,54	16,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,84	18,61	18,39
H	Transportasi dan Pergudangan	8,78	8,87	8,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,37	3,42	3,38
J	Informasi dan Komunikasi	3,84	3,91	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,59	8,82	8,90
L	Real Estate	2,62	2,55	2,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,64	0,66	0,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,73	8,17	8,28
P	Jasa Pendidikan	6,81	6,72	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,68	1,66	1,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,85	1,79	1,77
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Indikator Ekonomi Kota Pontianak. 2018

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Grafik II.3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak Tahun 2017



2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dan menyebabkan kecenderungan turunnnya nilai mata uang di suatu wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Perkembangan inflasi Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terus mengalami penurunan, yakni dari 6,17 persen pada tahun 2015 turun menjadi 3,88 persen pada tahun 2016, dan 3,86 persen pada tahun 2017. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, pada tahun 2018 inflasi Kota Pontianak mengalami peningkatan menjadi 3,99 persen. Kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan Jasa Keuangan yang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami deflasi sebesar -1,62 dan -0,18, pada tahun 2018 justru menjadi penyumbang inflasi terbesar. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah angkutan udara, pemeliharaan/servis, mobil, tarif taksi, dan perbaikan ringan kendaraan.

Sementara itu kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami inflasi yang relatif rendah, di tahun 2017 menjadi penyumbang inflasi terbesar.

Sejak tahun 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Tabel II.12
Laju Inflasi Gabungan (Nasional) di Kota Pontianak
Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2017

KATEGORI	2015	2016	2017	2018
1. Umum	6,17	3,88	3,86	3,99
2. Bahan Makanan	9,98	5,31	0,77	3,82
3. Makanan Jadi	8,42	6,12	3,59	2,59
4. Perumahan	8,35	3,37	6,64	3,51
5. Sandang	3,75	4,95	4,48	2,84
6. Kesehatan	8,09	3,24	5,20	4,31
7. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,15	4,98	8,14	5,49
8. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,62	-0,18	2,68	6,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

2.2.1.3 PDRD Per Kapita

PDRB per Kapita atau juga sering disebut Pendapatan per Kapita merupakan gambaran pendapatanyang diterima oleh masing-masing penduduk dalam suatu daerah sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan perkapita ini sering digunakan oleh para ahli perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wilayah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

Tabel II.13

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kota Pontianak Tahun 2015-2017

URAIAN	2015	2016	2017
PDRB (Juta Rupiah)	20.747.494,76	21.801.443,39	22.903.162,60
PDRB per Kapita (Rupiah)	34.145.622	35.316.011	36.526.947
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	607.618	618.388	627.021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, PDRB per Kapita Kota Pontianak ADHK Tahun 2010 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya dari 34.145.622 rupiah di tahun 2015 meningkat menjadi 36.526.947 rupiah di tahun 2017. Peningkatan PDRB per kapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.2.1.4 Indeks Gini:

Peningkatan PDRB Perkapita serta pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengukur peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat salah satunya melalui Indeks Gini (Gini Ratio). Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan

yang semakin tinggi. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Gini Ratio Kota Pontianak selama tahun 2015-2018 menunjukkan nilai yang berfluktuasi dari kisaran 0,31 hingga 0,37 yang bila dilihat dari pengelompokan ketimpangannya masih tergolong dalam kategori sedang. Namun, bila dilihat dari perkembangannya, gini ratio di tahun 2018 tercatat sebagai gini ratio tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan semakin lebarnya kesenjangan di Kota Pontianak. Pada Tahun 2015 Gini Ratio Kota Pontianak tercatat 0,31, namun kemudian meningkat menjadi 0,33 di tahun 2016. Indeks tersebut terus meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,34 dan 0,37.

Tabel II.14
Gini Ratio Kota Pontianak Tahun 2015-2018

TAHUN	INDEKS GINI
2015	0,31
2016	0,33
2017	0,34
2018 **	0,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

2.2.1.5 Indeks Ketimpangan Wilayah (Indeks Ketimpangan Williamson)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu,

aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar kecamatan yang ada di Kota Pontianak dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.

Tabel II.15
PDRB Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016

KECAMATAN	2015	2016
Pontianak Selatan	5.712.416,56	6.005.385,49
Pontianak Tenggara	1.622.800,60	1.704.968,32
Pontianak Timur	1.325.410,24	1.393.951,05
Pontianak Barat	3.519.493,18	3.697.326,03
Pontianak Kota	5.120.454,18	5.382.334,5
Pontianak Utara	3.446.920,01	3.622.223,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis dimana dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Pontianak. Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks = nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Tabel II.16
PDRB Per Kapita Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016

KECAMATAN	2015	2016
Pontianak Selatan	63.758.918,71	64.607.383,29
Pontianak Tenggara	33.048.909,43	34.073.470,55
Pontianak Timur	14.690.380,98	15.179.691,30
Pontianak Barat	26.129.546,82	27.026.249,29
Pontianak Kota	42.475.066,16	44.074.869,83
Pontianak Utara	27.961.905,42	29.060.316,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Selama kurun waktu 2000 – 2006, PDRB per Kapita setiap kecamatan di Kota Pontianak nilainya bervariasi yaitu ada yang diatas angka PDRB per Kapita Kota Pontianak dan ada juga yang dibawah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesenjangan ekonomi antar kecamatan, yang dalam hal ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan per kapitanya diduga disebabkan oleh perbedaan penyerapan investasi serta kesenjangan infrastruktur yang ada.

Tabel II.17
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016

KECAMATAN	2015	2016
Pontianak Selatan	89.594	92.952
Pontianak Tenggara	49.103	50.038
Pontianak Timur	90.223	91.830
Pontianak Barat	134.694	136.805
Pontianak Kota	120.552	122.118
Pontianak Utara	123.272	124.645

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Dengan demikian dapat diduga lebih tingginya angka pendapatan regional per kapita di Kecamatan Pontianak Kota lebih disebabkan oleh lebih tingginya investasi yang diserap di Kecamatan Pontianak Kota serta relatif lebih bagusnya infrastruktur yang ada dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk melihat lebih jauh tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kota Pontianak maka dapat dilihat dari hasil penghitungan Indeks Williamson berikut.

Tabel II.18
Indeks Williamson Kota Pontianak Tahun 2015-2016

TAHUN	INDEKS WILLIAMSON
2015	0,43
2016	0,42

Sumber: Hasil Perhitungan. 2018

Dari Hasil penghitungan, terlihat bahwa kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kota Pontianak tidak terlampau besar, ditunjukkan dengan angka indeks yang berkisar dari 0,42 sampai dengan 0,43.

2.2.1.6 Persentase Penduduk di Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan

2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan menjadi berbeda di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh NKRI.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Garis Kemiskinan Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan, dari Rp 403.905,00 di tahun 2015 menjadi Rp 483.618,00 di tahun 2018. Hal ini berarti terdapat peningkatan harga makanan maupun makanan yang tergolong sebagai kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Pada tahun 2018, dibutuhkan biaya sebesar Rp 483.618 untuk setiap orang memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan setiap bulannya. Sehingga, apabila terdapat penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 483.618 setiap bulannya pada tahun 2018 akan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Tabel II.19

Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

KEMISKINAN	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan (Rp.)	403.905	427.783	439.648	483.618
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,56	34,13	33,18	31,76
Angka Kemiskinan (persen)	5,22	5,55	5,31	5,00
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (persen)	94,78	94,45	94,69	95,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 34.130 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 31.560. Kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2016 menjadi 33.180 jiwa, dan kembali menurun sebesar 1.419 jiwa menjadi 31.761 jiwa di tahun 2018.

Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan di Kota Pontianak juga mengalami fluktuasi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2016, angka kemiskinan di Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 5,22 persen menjadi 5,55 persen di tahun 2016. Angka

kemiskinan tersebut kemudian secara perlahan-lahan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 5,31 persen dan 5 persen.

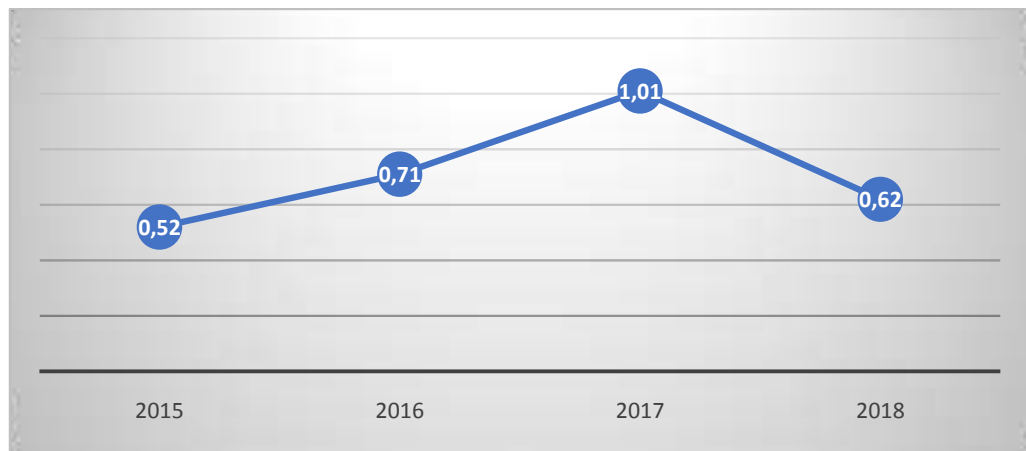
Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan dapat dilihat dari angka kemiskinannya, yakni dengan mengurangi angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya menunjukkan Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan yakni dari 94,78 persen di tahun 2015 menjadi 94,45 di tahun 2016. Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan meningkat menjadi 94,69 persen dan 95 persen.

2.2.1.7 Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) atau biasa juga disebut dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai *Poverty Gap* berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Rasio Kesenjangan Kemiskinan ini berguna untuk menghitung besarnya jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2014, *Poverty Gap Index* Kota Pontianak berada pada angka 0,52 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,71 dan 1,01, namun kemudian kembali menurun di tahun 2018 menjadi 0,62. Ini mengindikasikan adanya perbaikan pada tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pontianak dikarenakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan. Gambar di bawah memperlihatkan terjadinya fluktuasi pada Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Grafik II.4
Rasio Kesenjangan Kemiskinan (*Poverty Gap*) Kota Pontianak tahun
2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

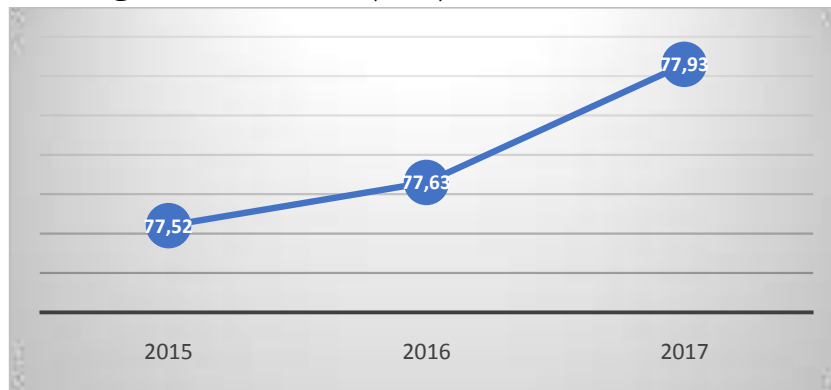
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek, meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta aspek hidup layak melalui pengukuran kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Grafik II.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tahun 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, IPM Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar 0,11, dari tahun sebelumnya menjadi 77,63. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2017 menjadi 77,93%. Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di atas IPM Nasional yang hanya mencapai 70,81 pada tahun 2017.

Pendidikan

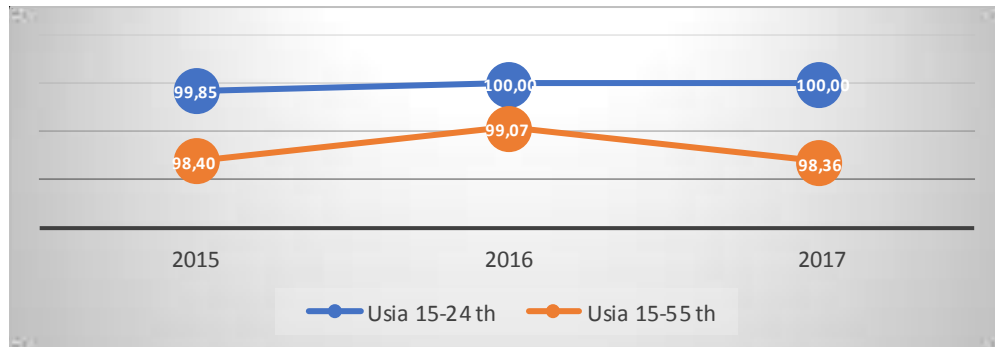
2.2.1.2 Angka Melek Huruf

Pemerintah memberlakukan program wajib belajar yang mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun untuk mengikuti pendidikan formal SD sampai SLTP. Program Pemerintah tersebut membuat angka melek huruf menjadi semakin tinggi. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca dan ditulisnya.

Sebenarnya angka melek huruf ini sudah tidak lagi sensitif untuk menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan di bidang pendidikan karena sebagian besar di Indonesia termasuk Kota Pontianak angka melek huruf tahun 2017 untuk usia 15-24 tahun sudah mencapai 100 persen, sedangkan angka melek huruf untuk usia 15-55 tahun mencapai 98,36 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada lagi

penduduk usia produktif yang buta huruf, dan hanya tersisa sedikit saja yang belum melek huruf untuk penduduk usia tua dan jumlahnya tersebut sedikit berkurang dibandingkan tahun 2016.

Grafik II.6
Angka Melek Huruf Di Kota Pontianak Periode 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

2.2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Kemudian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 tercatat 9,79 tahun, yang artinya secara rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Pontianak (usia 25 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal sebanyak/hingga 9,79 tahun, atau jika dirata-ratakan pada jenjang pendidikan setara dengan SLTA dikelas sembilan dan sepuluh.

Grafik II.7
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

2.2.1.4 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan

tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun ke atas, dimana angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pontianak tahun 2017 adalah 14,72 tahun, yang artinya secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk ke jenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,72 tahun atau setara Diploma III.

Grafik II.8
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Di Kota Pontianak Tahun 2015-2017



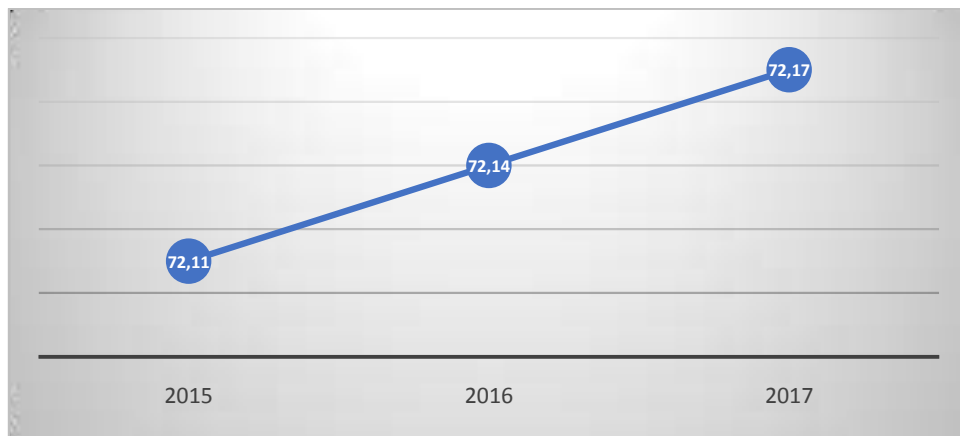
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Kesehatan

2.2.1.5 Angka Usia Harapan Hidup

Angka (Usia) Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Semakin tinggi kematian maka semakin rendah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup di suatu wilayah, maka semakin baik pembangunan ekonominya.

Grafik II.9
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pontianak Tahun 2015-2017



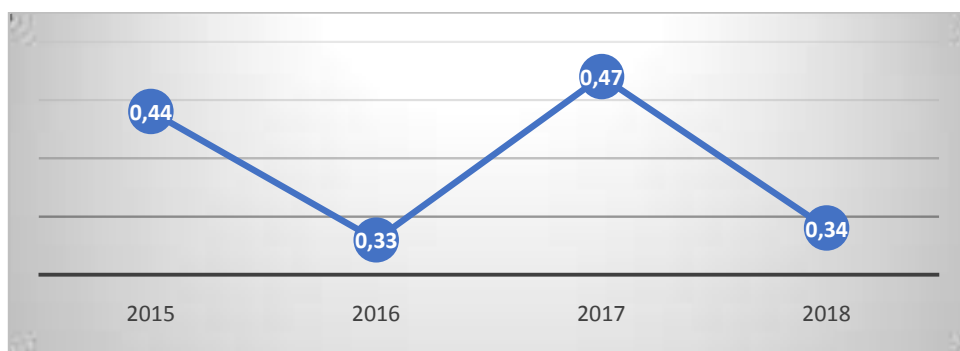
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Selama periode tahun 2015 hingga tahun 2017, angka usia harapan hidup Kota Pontianak menunjukkan tren peningkatan dari 72,11 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,14 tahun pada tahun 2016, dan kemudian meningkat lagi menjadi 72,17 tahun pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Pontianak.

2.2.1.6 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Grafik II.10
Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pontianak Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 2018

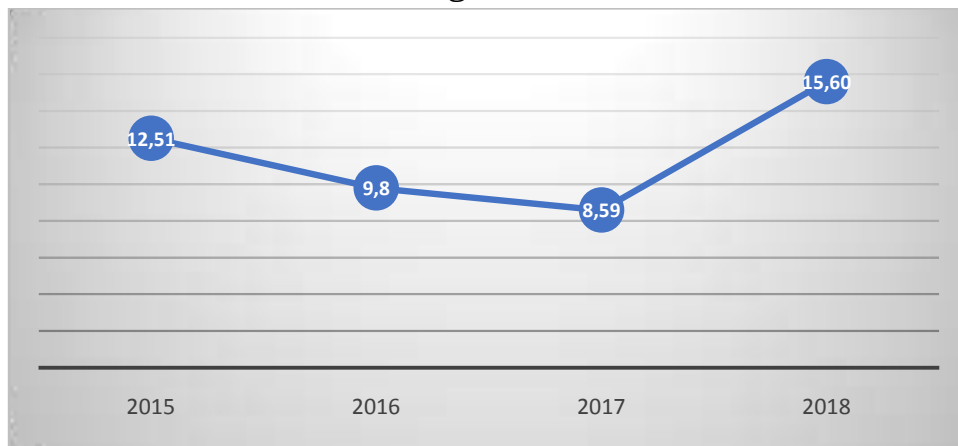
Persentase balita gizi buruk di Kota Pontianak selama empat tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuatif. Pada tahun 2017, persentase balita gizi buruk sedikit mengalami kenaikan dari 0,33 persen di tahun

2016 meningkat menjadi 0,47 persen, namun kemudian dapat diturunkan menjadi 0,34 persen di tahun 2018.

2.2.1.7 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat.

Grafik II.11
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Pontianak Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2018

Prevalensi balita gizi kurang di Kota Pontianak sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2018 memperlihatkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 prevalensi balita gizi kurang berada pada angka 12,51 persen. Angka ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, namun selanjutnya kembali mengalami peningkatan dengan angka yang cukup signifikan menjadi 15,60 persen.

Ketenagakerjaan

2.2.1.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik II.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak tahun 2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Pada tahun 2016 kegiatan Sakernas tidak dilakukan sehingga data ketenagakerjaan tidak tersedia untuk tahun 2016. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pontianak mengalami peningkatan dari 61,89 persen menjadi 63,66 persen, namun di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 61,19 persen. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk Kota Pontianak usia 15 tahun ke atas, sebanyak 61 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2018.

2.2.1.9 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor, diantaranya karena terbatasnya lapangan kerja sementara jumlah penduduk tinggi, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, dan berbagai macam faktor lain.

Grafik II.13
Tingkat Pengangguran di Kota Pontianak tahun 2015-2018



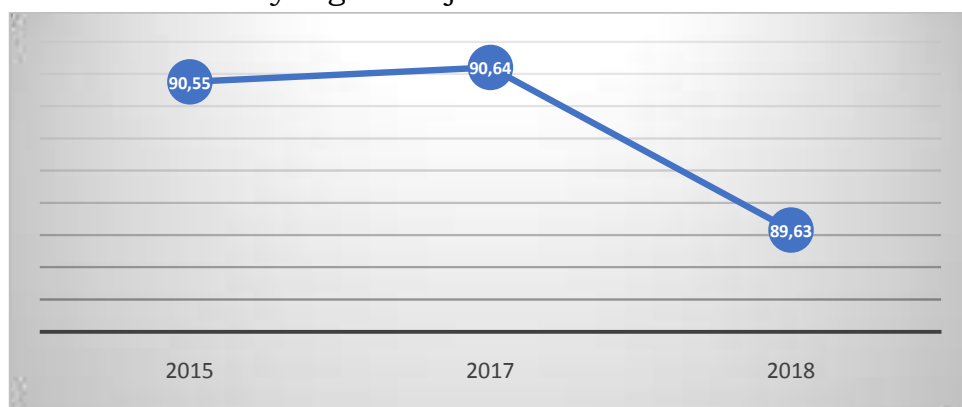
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Tingkat pengangguran di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran Kota Pontianak menunjukkan angka 9,44 persen, angka ini terus meningkat hingga mencapai 10,37 persen pada tahun 2018. Tingkat pengangguran sedikit mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 9,36 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 9,44 persen.

2.2.1.10 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Grafik II.14
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Pontianak tahun 2015-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2015 rasio penduduk yang bekerja berada pada angka 90,55 persen. Rasio ini sedikit mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 90,64, namun kemudian menurun hingga mencapai 89,63 persen pada tahun 2018. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 89,63 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membangun watak dan keribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai media untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.20

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Pontianak, Tahun 2015-2018

No	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			
			2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kebudayaan					
1.1	Jumlah Kelompok Seni Budaya	Kelompok	167	169	136	137
1.2	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Buah	0	1	4	6
1.3	Dokumentasi Budaya	Buah	1	2	2	3
1.4	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan	Kegiatan	9	11	11	13
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	20	12	12	12
2	Kepemudaan dan Olahraga					
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	160	165	170	175
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	32	35	37	37
2.3	Jumlah Atlet	Orang	650	660	665	710

2.4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	32	32	36	36
2.5	Lapangan Olahraga	Unit	114	118	118	118

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahdilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang dijelaskan dalam Pasal 9 terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Kewenangan dalam melakukan urusan pemerintahan konkuren, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren sendiri terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 Urusan ini terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang , sosial, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan ini berjumlah 18 (delapan belas) urusan serta urusan pilihan yang meliputi 8 (delapan) urusan.

Secara umum aspek pelayanan umum menyangkut dua hal yaitu layanan urusan wajib yang terdiri dari 23 urusan, serta urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 5 urusan pilihan. Berikut digambarkan kondisi pelayanan umum yang telah dilaksanakan Pemeirntah Kota Pontianak dalam periode 2015-2018.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

A. Urusan Pendidikan

Sesuai dengan misi Kota Pontianak Tahun 2015-2019 urusan pendidikan termaktub pada misi 1 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak dengan menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketrampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak dapat ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan, peningkatan profesionalisme dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang telah dicapai, penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pontianak, dapat dilihat dengan capaian kinerja selama pelaksanaan urusan pendidikan di kota Pontianak dalam periode 2015-2018. Secara umum capaian kinerja yang telah diraih adalah memuaskan, bahkan beberapa indikator melebihi ekspektasi.

Tabel II.21
Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kota Pontianak Tahun 2015 - 2018

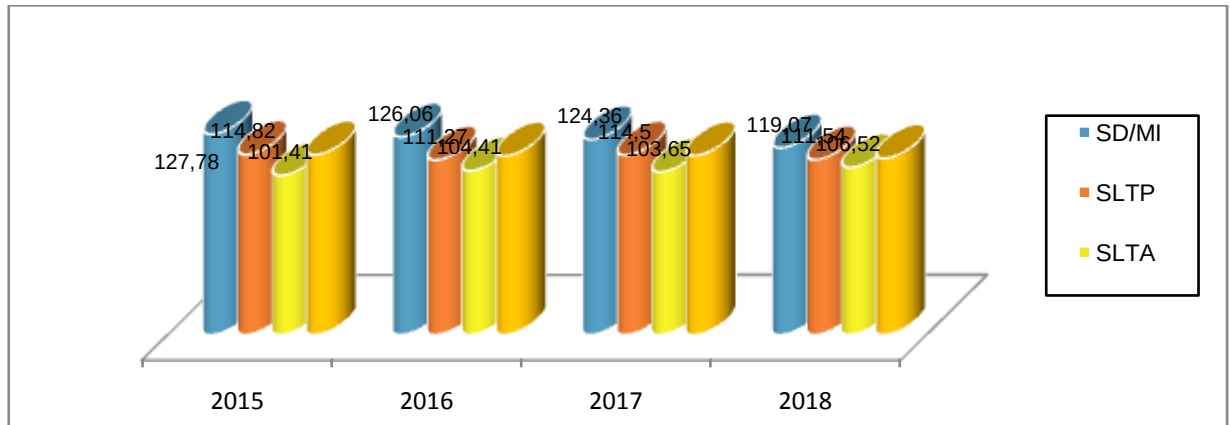
No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	127,78	126,06	124,36	119,07
2	SLTP/MTs	114,82	111,27	114,50	111,54
3	SMA/SMK/MA	101,14	104,41	103,65	106,52
Rata-rata APK		117,08	116,35	116,14	105,90

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Dari tabel diatas APK di tingkat SD/MI tahun 2015 merupakan yang tertinggi yaitu 127,78 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 127,06% yang artinya dalam jumlah siswa SD/MI yang ada di Kota Pontianak terdapat siswa yang usianya di luar usia SD/MI sehingga APK melebihi 100%. APK tingkat SLTP/MTs tahun 2018 sebesar 119,50% meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 111,27%. Sedangkan APK tingkat SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 101% jika dibandingkan dengan tahun 2017 terjadinya peningkatan sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jenjang pendidikan lanjutan tingkat atas (SLTA) mengalami peningkatan.

Perkembangan APK di Kota Pontianak dapat ditampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik II.15
Perkembangan APK di Kota Pontianak Tahun 2015 - 2018



Sedangkan rata-rata angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2014 sebesar 102,53% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 105,27%. Apabila dilihat perjenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar dengan capaian APM tahun 2014 sebesar 106,49% jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat sebesar 109,55%. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar setiap tahunnya fluktuatif. APM pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun 2014 sebesar 103,38%. Terjadi peningkatan tahun 2017 sebesar 106,84%. Sedangkan pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) jika dilihat tahun 2014 sebesar 94,04% terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 96,61%. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA. Keseluruhan APM dari tahun 2014 - 2017 per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut.

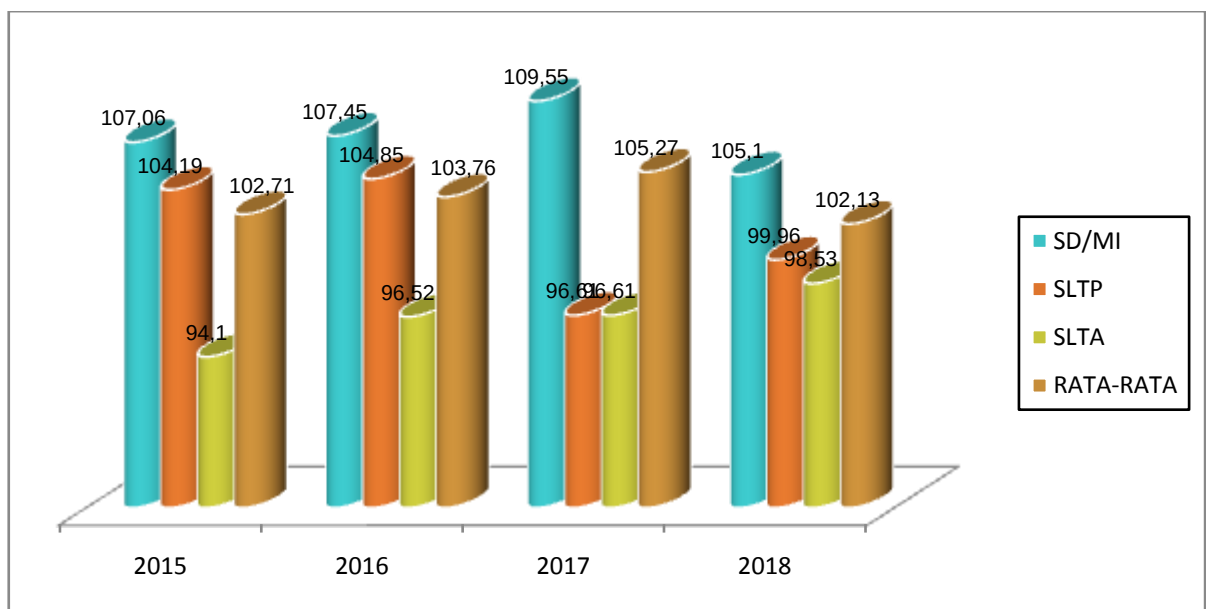
Tabel II.22
Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	107,06	107,45	109,55	108.16
2	SLTP/MTs	104,19	104,85	106,84	91.06
3	SMA/SMK/MA	94,1	96,52	96,61	91.63
Rata-rata APM		102,71	103,76	105,27	102,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Secara keseluruhan, APM SD/MI merupakan yang tertinggi yaitu 109,55% pada tahun 2017 dibandingkan tingkat/jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, APM SD/MI di atas 100% yang artinya semua penduduk usia SD/MI telah bersekolah di tingkat pendidikan SD/MI. APM tingkat SD/MI meningkat sebesar 2,10% dari 107,45% pada tahun 2016 menjadi 109,55% pada tahun 2017. APM tingkat SLTP/MTs meningkat sebesar 1,99% atau 104,85% dari tahun 2016 menjadi 106,84 pada tahun 2017. Sedangkan APM SMA/SMK/MA meningkat sebesar 0,09% dimana tahun 2016 sebesar 96,52% menjadi 96,61% pada tahun 2017. Perkembangan APM selama tahun 2015 - 2018 dapat di tampilkan pada grafik dibawah ini.

Grafik II.16
Perkembangan APM di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018



Tabel menggambarkan jumlah kelulusan SD/MI sebanyak 11.868 siswa pada tahun 2015 menurun bila dibandingkan tahun 2018 sebanyak 11.601 siswa. Sedangkan tingkat kelulusan SMP mengalami peningkatan dari 10.411 siswa pada tahun 2015 menjadi 11.462 siswa pada tahun 2018. Sedangkan tingkat kelulusan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan kelulusan dari tahun 2015 sebanyak 10.422 siswa dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat sebesar 10.580 siswa. Jika dilihat secara keseluruhan total jumlah kelulusan tahun 2015 sebanyak 32.701 siswa dibandingkan tahun 2018 sebanyak 33.643 siswa.

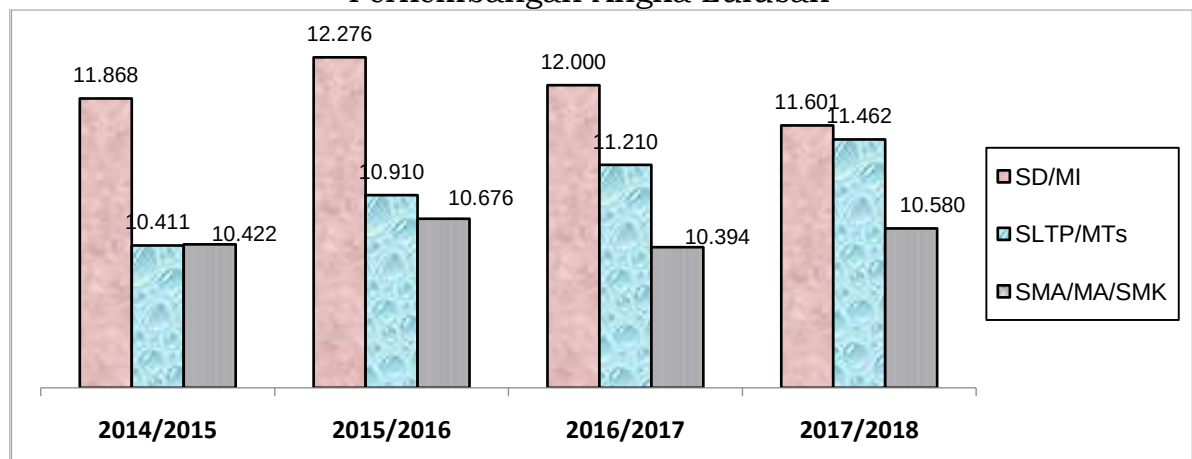
Tabel II.23
Angka Lulus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Jenjang Pendidikan	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1	SD/MI	11.868	12.276	12.000	11.601
2	SLTP/MTs	10.411	10.910	11.210	11.462
3	SMA/MA/SMK	10.422	10.676	10.394	10.580
Total Jumlah Kelulusan		32.701	33.862	33.604	33,643

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Untuk melihat perkembangan angka lulus sekolah di Kota Pontianak dapat dilihat melalui grafi dibawah ini.

Grafik II.17
Perkembangan Angka Lulusan



Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar/penduduk usia sekolah (usia 5-18 tahun). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.24
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kota Pontianak Tahun 2016 & 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Penduduk Usia Sekolah		Rasio	
		2016	2018	2016	2018	2016	2018
1	Taman Kanak-Kanak (TK) – Usia 5-6 ahun	132	123	21,413	23,668	162.22	192.4
2	Sekolah Dasar (SD) – Usia 7-12 ahun	192	197	60,660	61,767	315.94	313.5
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Usia 13-15 tahun	74	113	31,823	32,086	430.04	283.9
4	Sekolah Menengah Tk. Atas (SMA/SMK) – Usia 16-18 tahun	93	99	35,675	35,271	383.6	356.3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, rata-rata angka putus sekolah selama periode tahun 2015 - 2018 dengan rincian rata-rata putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,06% pada tahun 2015 meningkat dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 0,09%. Demikian pula rata-rata putus sekolah tingkat SLTP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,44% pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 0,18% dan untuk rata-rata putus sekolah tingkat SMA/MA/SMK sebesar 0,07% pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi sebesar 0,66%. Secara keseluruhan angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,31% menjadi 0,27% pada tahun 2018. Selama periode tahun 2015– 2018 Apabila dibandingkan rata-rata angka putus sekolah tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap meneruskan pendidikan. Angka putus sekolah per jenjang pendidikan selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel II.25
Angka Putus Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Angka Putus Sekolah	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	0,06	0,062	0,00	0,09
2	SLTP/MTs	0,18	0,17	0,00	0,44
3	SMA/MA/SMK	0,07	0,07	0,04	0,66
Jumlah		0,31	0,30	0,04	0,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Angka mengulang tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD/MI dengan angka mengulang mencapai sebesar 1,99% pada tahun 2015 menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,42%. Apabila dibandingkan total rata-rata angka mengulang tahun 2015 sebesar 3,42 % menurun pada tahun 2018 sebesar 1,01%.

Tabel II.26
Prosentase Angka Mengulang di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	1,99	0,04	0,03	1,42
2	SLTP/MTsn	0,4	0,01	0,08	0,59
3	SMA/MA/SMK	1,03	0,04	0,09	0,57
Jumlah total		3,42	0,09	0,20	1,01

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Ditinjau dari kualitas lulusan atau rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), pada tahun 2017 rata-rata nilai UAN di wilayah Kota Pontianak mencapai nilai 5,97turun 0.36poin dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,33. UAN per jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

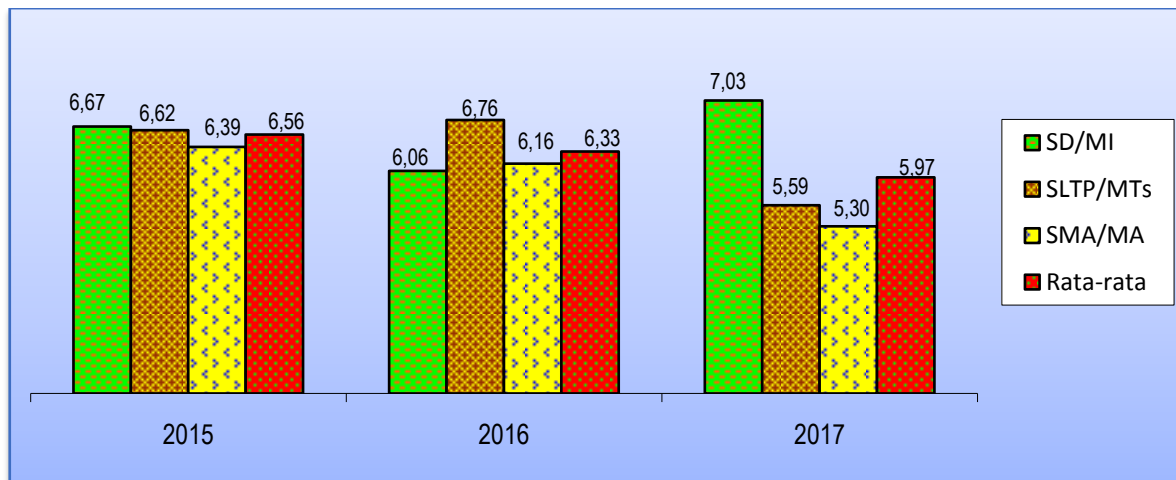
TabelII.27
Nilai Rata-rata UAS dan UAN di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	6,67	6,06	7,03	6.43
2	SLTP/MTs	6,62	6,76	5,59	5.35
3	SMA/SMK/MA	6,39	6,16	5,30	-
Rata-rata Nilai UAN Keseluruhan		6,56	6,33	5,97	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Rata-rata nilai UAN tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD/MI, sedangkan terendah berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

Grafik II.18
Perkembangan rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN)
Di Kota Pontianak Tahun 2015 -2018 **(EDIT GRAFIK)**



Rata-rata Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2015 sebesar 368,67 murid per sekolah menurun pada tahun 2018 sebesar 354 murid per sekolah. Apabila dilihat secara keseluruhan masih terjadi fluktuasi penurunan rata-rata rasio murid terhadap sekolah.

TabelII.28
Rasio Murid Terhadap Sekolah Di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	389	391	376	373
2	SLTP/MTs	321	326	319	314
3	SMA/SMK/MA	396	364	370	380
Rata-Rata		368,67	360,33	354,79	354

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Rata-rata rasio murid terhadap ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan adalah sebesar 35,63 murid per kelas pada tahun 2015. Dengan demikian capaian kinerjanya telah terpenuhi, dengan kata lain pemenuhan ruang kelas untuk pelaksanaan pendidikan di Kota Pontianak telah cukup memadai.

Tabel II.29
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak
Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	38	38	31	30
2	SLTP/MTs	34	37	34	33
3	SMA/SMK/MA	35	37	33	32
Rata-Rata		35,63	37,16	37,00	32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Tabel III.30
Rasio Murid Terhadap Guru Di Kota Pontianak Tahun 2015 - 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018*
1	SD/MI	21	21	21	22
2	SLTP/MTs	16	15	16	18
3	SMA/SMK/MA	14	15	15	17
Rata-Rata		17	18	18	19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Tabel di atas menunjukkan rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan tahun 2015 rata-rata sebesar 17,00 murid per guru. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 19murid per guru. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 2015-2018 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap guru pada sebanyak 21 murid per guru. Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP/MTs sebanyak 16 murid per guru dan rasio tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun 2017.Sedangkan rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 15 murid.

Tabel III.31
Rasio Guru Terhadap Sekolah Di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018*
1	SD/MI	19	19	18	17
2	SLTP/MTs	21	22	19	17
3	SMA/SMK/MA	26	26	25	22
Rata-Rata		22	22	20	19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Melihat perkembangan rasio guru terhadap sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun 2015 sebesar 22 guru per sekolah di bandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 29 guru per sekolah. Jika dilihat secara jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI tahun 2015 sebanyak 19 guru per

sekolah namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 menurun menjadi 17 guru per sekolah. Rasio guru terhadap sekolah untuk tingkat SLTP/MTs dengan sebanyak 21 guru per sekolah pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebanyak 17 guru per sekolah. Sedangkan untuk rasio guru terhadap sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 26 guru per sekolah pada tahun 2015 menurun menjadi sebanyak 19 guru per sekolah. Dari perkembangan selama tahun 2015-2018 menggambarkan kebutuhan guru di Kota Pontianak yang terus berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan, terutama untuk guru pada bidang studi dan guru sekolah kejuruan. Kekurangan guru disebabkan juga oleh adanya moratorium pemerintah pusat terhadap penerimaan guru baru dan adanya guru-guru yang pensiun.

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid, dimana rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Adapun kondisi rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.32

Rasio Guru Terhadap Murid di Kota Pontianak Tahun 2016 & 2018

No.	Sekolah	Jumlah Murid		Jumlah Guru		Rasio	
		2016	2018	2016	2018	2016	2018
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	9.152	7.456	941	649	9,73	11.5
2	Sekolah Dasar (SD)	74.109	73.543	3.571	3.401	20,75	21.6
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	35.646	35.788	2.26	1.95	15,77	18.4
4	Sekolah Menengah Tk. Atas (SMA)	21.339	19.41	1.527	1.002	13,97	19.4
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	12.337	13.668	915	860	13,48	15.9

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Kota Pontianak Dalam Angka 2017 (diolah)

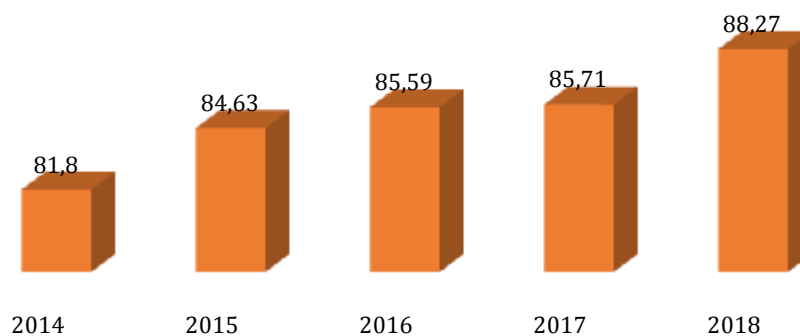
Urusan pendidikan juga melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pada tahun 2018, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berada di angka 88,27 point masuk dalam kategori Baik.

GRAFIK II.19
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Tabel II.33
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Urutan Pendidikan Kota Pontianak

NO	Tahun	Nilai IKM
	2015	84,63
2	2016	85,59
3	2017	85,71
4	2018	88,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel II.34
Jumlah Dana Bos Daerah
Urusan Pendidikan Kota Pontianak

NO	Tahun	SD/ MI (Setingkat)	SMP / Mts (Setingkat)	Jumlah
1	2015	5.517.900.000	4.189.440.000	9.707.340.000
2	2016	5.580.000.000	4.392.000.000	9.972.000.000
3	2017	5.384.520.000	4.369.200.000	9.753.720.000
4	2018	6.445.800.000	4.524.534.000	10.970.334.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak juga membuat beberapa inovasi. Inovasi yang dibuat bertujuan agar kegiatan yang sudah diprogramkan dapat lebih baik lagi pelaksanaannya. Tujuan inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas : sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat dan pembangunan) dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memiliki delapan inovasi. Detail kedelapan inovasi tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.35
Daftar Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak

NO	NAMA INOVASI	BIDANG YANG MENANGANI
1	Schoolmap	Bidang PTKP
2	SIPPTENDIK (Sistem Informasi Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik)	Bidang PTKP
3	System Komputerisasi Bank Soal Online	Bidang PTKP
4	"Pinta" (Pusat Informasi dan Terapi Autis)	UPTD Autis Centre
5	Pelayanan Paket Kursus Bahasa untuk Keahlian Tertentu	UPTD Pusat Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Bahasa

6	Pelayanan Paket Eksperimen	UPTD Pusat Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Bahasa
7	" YOLA " (Ayo Belajar)	- SPKB Sanggar Kegiatan Belajar
8	Edu Entertaint	Bidang PTKP

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara keseluruhan, jumlah guru di Kota Pontianak pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Jumlah seluruh guru dari tingkat TK-SD-SMP sederajat baik PNS maupun non PNS adalah sebanyak 6.753 guru pada tahun 2017 berkurang 1.049 orang atau sebesar 15,53% menjadi 5.704 orang guru pada tahun 2018.

Jika dilihat dari rasio PNS dan NON-PNS, jumlah guru di Kota Pontianak pada tingkat TK/PAUD lebih banyak guru NON-PNS yaitu sebesar 92,02% dan guru PNS sebanyak 7,98%. Ini disebabkan karena jumlah sekolah swasta ditingkat PAUD/TK di Kota Pontianak lebih banyak dibandingkan dengan sekolah PAUD/TK Negeri.

Untuk tingkat SD, perbandingan guru PNS dan NON PNS adalah sebesar 49,65% untuk guru PNS dan 50,35% untuk guru Non PNS. Untuk tingkat SMP guru PNS sebanyak 45,16% dan guru Non PNS sebanyak 54,84%. Dari jumlah tersebut, guru PNS dari tahun ke tahun semakin menurun disebabkan karena banyaknya guruyang pensiun dan tidak adanya penerimaan guru PNS pada beberapa tahun belakangan ini.

Untuk tenaga kependidikan, tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016. Jika pada tahun 2017 jumlah tenaga kependidikan seluruhnya dari tingkat PAUD, SD, dan SMP dederajat adalah 1.288 orang, maka menurun sebesar 13,28% atau sebanyak 171 orang pada tahun 2018 menjadi 1.117 orang.

Tabel II.36
Jumlah Tenaga Pendidik (Guru)
Urusan Pendidikan Kota Pontianak

NO	Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	2014	110	723	2.116	1.490	981	1.212
2	2015	132	823	2.025	1.633	1.016	1.324
3	2016	130	817	2.021	1.610	993	1.315
4	2017	125	811	1.901	1.720	928	1.268
5	2018	82	945	1.491	1.470	775	941

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel II.37
Jumlah Tenaga Kependidikan (Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Dll)
Urusan Pendidikan Kota Pontianak

NO	Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	2015	3	113	79	571	137	302
2	2016	4	141	78	557	137	278
3	2017	7	156	76	616	138	295
4	2018	7	148	157	426	135	244

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio murid terhadap guru adalah Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru yang bersangkutan. Kegunaan menghitung rasio ini adalah menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio murid terhadap guru di Kota Pontianak tahun 2018 pada umumnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel II.38
Rasio Murid Terhadap Guru Kota Pontianak

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/ MI	21	21	21	22
2	SLTP / Mts	15	16	16	18
3	SMU / SMK/ MA	15	16	15	17
	RATA RATA	17	18	18	19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio guru terhadap sekolah adalah jumlah guru yang ada pada jenjang pendidikan tertentu di satu sekolah. Jika dilihat pada tabel di bawah, terlihat bahwa seluruh guru disetiap jenjang pendidikan dari tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA mengalami penurunan.

Penurunan rasio guru terhadap sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI adalah sebanyak 6% atau ada penurunan 1 guru disetiap sekolah dasar di Kota Pontianak. Kemudian pada tingkat pendidikan SLTP/MTs sebesar 11% atau ada penurunan 2 orang guru disetiap sekolah menengah di Kota Pontianak. Terakhir adalah pada tingkat Sekolah Atas yang mengalami penurunan sebanyak 12% atau terdapat penurunan 3 guru disetiap jenjang SMA sederajat di Kota Pontianak.

Tabel II.39
Rasio Guru Terhadap Sekolah Kota Pontianak

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/ MI	23,3	19	19	19	18	17
2	SLTP / Mts	15,12	21	21	22	19	17
3	SMU / SMK/ MA	19,08	25	26	26	25	22
	RATA RATA	19,17	22	22	22	20	19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2018 jumlah siswa di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi sebanyak 22,30% atau sebanyak 2.051 di tingkat PAUD/TK. Sedangkan untuk tingkat SD /MI mengalami peningkatan sebanyak 3,28% atau 2.331 siswa baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Untuk tingkat SLTP mengalami peningkatan sebanyak 19,14% atau sebanyak 5.698 siswa.

Tabel II.40
Jumlah Siswa Urusan Pendidikan Kota Pontianak

Tahun	TK / PAUD		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
2015	212	8.331	52.687	22.307	19.306	16.232	119.075
2016	406	8.308	57.347	23.717	21.292	17.740	128.810
2017	404	8.792	49.314	21.804	17.287	12.489	110.090
2018	445	10.802	49.961	23.488	20.848	14.626	120.170

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Kasar berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang

pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Sejak tahun ajaran 2016/2017 sekolah pada jenjang pendidikan SLTA sederajat pindah menjadi binaan pemerintah Propinsi. Maka dari itu, kewenangan sekolah ditingkat Pemerintah Kota Pontianak hanya pada tingkat TK, SD, SLTP sederajat saja.

Jumlah sekolah di Kota Pontianak untuk tingkat TK, SD, SLTP sederajat pada tahun 2018 adalah sebanyak 609 sekolah. Jumlah ini meningkat sebanyak 38,41% atau sebanyak 169 gedung sekolah baru di Kota Pontianak pada tahun 2018.

Untuk tingkat TK/PAUD/RA dan SMP/MTs jumlah sekolah swasta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sekolah negeri. Untuk tingkat TK/PAUD, hanya ada 5 sekolah negeri yang ada di Kota Pontianak, selebihnya atau 310 sekolah TK/PAUD adalah sekolah swasta. Begitupun untuk SMP/MTs hanya ada 30 sekolah negeri yang ada di Kota Pontianak atau sebesar 27,52% dan sekolah swasta sebesar 72,48% atau sebanyak 79 gedung sekolah.

Tabel II.41
Jumlah Sekolah/Gedung Sekolah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Tahun	TK / PAUD / RA		SD / MI (Setingkat)		SMP / Mts (Setingkat)		Jumlah
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
2015	5	124	116	73	28	76	422
2016	5	118	114	79	29	78	423
2017	5	127	115	82	30	81	440
2018	5	310	114	71	30	79	609

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya sekolah. Rasio murid terhadap sekolah ini dapat digunakan untuk melihat jumlah yang diperlukan untuk sekolah dapat menampung seluruh murid di Kota Pontianak.

B. Urusan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan kota Pontianak adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kota Pontianak berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan indikator, antara lain indikator Indonesia Sehat dan Indikator Kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Indikator Indonesia Sehat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Indikator Derajat Kesehatan (*outcome*) sebagai hasil akhir, yang terdiri dari Mortalitas (misal: Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup), Morbiditas, dan Status Gizi.
2. Indikator Hasil Antara (*output*), yang terdiri atas indikator-indikator untuk Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup, Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
3. Indikator Proses (*process*) dan Masukan (*input*), yang terdiri atas indikator-indikator untuk Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Kontribusi Sektor terkait.

Indikator hasil akhir yang paling akhir dari pembangunan kesehatan adalah Indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikator morbiditas (kesakitan) dan indikator status Gizi.

Indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM / Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak Tahun 2017 adalah sebesar 77,93 terdiri dari pendidikan angka melek huruf 15-24 Tahun sebesar 99,95 dan angka melek huruf 15-55 Tahun sebesar 99,07 sedangkan angka partisipasi sekolah 7-12 Tahun sebesar 99,25 dan angka partisipasi sekolah 13-15 Tahun sebesar 94,59 ; kesehatan Rasio harapan hidup 72 Tahun; Sekitar 84,70% penduduk Kota Pontianak memiliki pengeluaran Per Kapita per bulan >500.000 rupiah. Hal ini menunjukkan masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal. Semakin dekat IPM suatu wilayah dengan angka 100 maka semakin dekat yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran IPM tersebut. (*Pontianak Dalam Angka Kota Pontianak 2017*)

Oleh karena itu, untuk mendapatkan perbaikan pada peningkatan indikator akhir yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) maka hal yang penting untuk selalu memperhatikan indikator *input* dan *process* yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil akhir yang akan dicapai.

Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*)

Angka HarapanHidup (AHH) adalah indikator umum bagi taraf hidup, maka semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat di suatu wilayah juga semakin tinggi. Angka Harapan Hidup Kota Pontianak berdasarkan data BPS Kota Pontianak Tahun 2017 adalah 72,17 tahun.

Angka Kematian (*Mortality*)

Salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dari angka kematian (Mortality). Angka kematian yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat antara lain angka kematian ibu (jumlah kasus kematian ibu), angka kematian neonatus (jumlah kasus kematian neonatus), angka kematian bayi, angka kematian kasar dan jumlah kasus kematian balita. Data kematian yang dipaparkan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.42
Mortalitas/Angka Kematian di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

Mortalitas	2015	2016	2017	2018
Kasus Kematian Ibu	7	3	7	6
Kasus Kematian Bayi	27	32	36	30
Angka Kematian Bayi per 1000 pddk KH	2.24	2.54	3.01	2.48
Kasus Kematian Balita	29	35	37	31

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Tahun 2017

Bila dilihat dari tabel kasus kematian ibu selama kurun waktu empat tahun (2015 – 2018) mengalami penurunan. Usia kematian terbesar pada ibu tahun 2017 yaitu pada usia 20-34 tahun sebanyak 5 orang sedangkan pada usia ≥ 35 thn sebanyak 2 orang. Kasus kematian ibu karena Pre Eklampsia (38%), kasus infeksi (21%), Kelainan Bawaan (17%) dan lain-lain (24%).

Angka Kesakitan (*Morbidity*) dan Status Gizi

Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit

suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Angka kesakitan menurut terminologi epidemiologi adalah jumlah keseluruhan orang menderita penyakit yang menimpa sekelompok penduduk pada periode waktu tertentu. Pada tabel berikut disajikan angka kesakitan penyakit di Kota Pontianak pada tahun 2012 - 2016.

Tabel II.43
Angka Kesakitan Beberapa Penyakit Kota Pontianak
Tahun 2015 – 2018

No	Jenis Penyakit	2015	2016	2017	2018
1	DBD				
	Angka Kesakitan per 100,000 pddk (Inciden Rate/IR)	11,36	11,8	34,07	30,58
	Angka kematian (Case Fatality Rate/CFR)	0	1,37	1,4	1,62
2	TB Paru				
	Angka Kesakitan per 100,000 pddk	133,27	133,06	147,68	
	Angka Kematian	0,66	1,3	1,44	3,14
3	ISPA				
	Angka Kesakitan Pneumonia per 1000 balita	17,57	21,04	12,12	10,92
4	Diare				
	Angka Kesakitan per 1000 pddk	22,24	21,21	18,4	12,19
	Angka Kematian	0	0	0	0
5	Malaria				
	Api per 1000 pddk	0	0,005	0,005	0,002
6	Tetanus Neonatorum (TN)				
	Jumlah Kasus (orang)	3	2	3	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Pada tahun 2017 jumlah kunjungan ke Puskesmas Kota Pontianak adalah 719.538 kunjungan (SP2TP tahun 2017). Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebesar 11.562 kunjungan. Grafik IV.1 di bawah ini menyajikan informasi jumlah kunjungan puskesmas di Kota Pontianak untuk periode tahun 2013-2017 beserta tren kenaikan atau penurunannya.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis

B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Target Pemerintah Republik Indonesia adalah 100% masyarakat Indonesia melaksanakan imunisasi dasar lengkap. Kota Pontianak sendiri setiap tahunnya selalu berusaha untuk mencapai target tersebut. Mulai dari mendata data dasar anak yang dalam usia imunisasi hingga mendatangi target ke rumah lewat kegiatan kunjungan rumah.

Pada tahun 2018 cakupan UCI di Kota Pontianak masih sama seperti tahun 2017 yaitu 68,97% atau sebanyak 20 kelurahan.

Tabel II.44
Cakupan UCI Di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Jumlah Kelurahan UCI	% UCI
1	2015	21	72,41
2	2016	25	86,21
3	2017	20	68,97
4	2018	20	68,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Pada tahun 2018 jumlah kelahiran di Kota Pontianak meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Jumlah lahir hidup pada tahun 2018 adalah sebanyak 12.028 atau bertambah 108 kelahiran hidup dibandingkan lahir hidup di tahun 2017 yang berjumlah 11.974.

Meningkatnya jumlah lahir hidup juga diikuti dengan menurunnya jumlah lahir mati di Kota Pontianak. Pada tahun 2018 jumlah lahir mati sebanyak 38 kelahiran menurun sebanyak 40 kelahiran mati dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak 78 kelahiran mati.

Secara total, jika membandingkan jumlah kelahiran pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah tahun ini meningkat sebesar 68 kelahiran atau sebesar 0.56%.

Tabel II.45
Jumlah Kelahiran Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Lahir Hidup	Lahir Mati	Total
1	2015	12.047	43	12.090
2	2016	12.197	53	12.250
3	2017	11.974	78	12.052
4	2018	12.082	38	12.120

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tren Kematian Ibu di Kota Pontianak sangat fluktuatif. Jika dilihat dari jumlah kasus dari tahun 2014 hingga tahun 2018, hanya pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu sebesar 3 kasus, selebihnya ada pada angka 7 kasus dan 6 kasus pada tahun 2018. Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) sendiri, pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. AKI Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah sebesar 49,66 per 100.000 kelahiran hidup atau turun 8,8 poin jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang Angka Kematian Ibu (AKI)-nya sebesar 58,46 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel II.46
Tren Kematian Ibu Maternal
Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus	AKI
1	2015	7	58,11
2	2016	3	24,6
3	2017	7	58,46
4	2018	6	49,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Sedangkan bayi adalah anak berusia 0 hari sampai dengan 11 bulan 29 hari.

Angka Kematian bayi adalah jumlah kematian neonatal ditambah jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi di Kota Pontianak menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017. AKB pada tahun 2018 adalah sebesar 2,48 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus neonatal sebanyak 29 kasus dan bayi kurang dari satu tahun sebanyak 1 kasus.

Tabel II.47
Tren Kematian Bayi Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Neonatal	Bayi	Anak Balita	Balita	AKB	AKBA
1	2015	23	4	2	29	2,24	2,41
2	2016	27	5	3	35	2,62	2,87
3	2017	29	7	1	37	3,01	3,09
4	2018	29	1	1	31	2,48	2,57

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Kecamatan bebas rawan gizi adalah kecamatan dengan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita < 15% pada kurun waktu tertentu. Kota Pontianak mempunyai 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan. Dari 6 Kecamatan tersebut seluruhnya adalah Kecamatan Bebas Rawan Gizi. Hal ini sudah berlangsung selama 4 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Tabel II.48
Kecamatan Bebas Rawan Gizi Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	KEC
1	2015	100
2	2016	100
3	2017	100
4	2018	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Walaupun sudah dinyatakan bebas rawan gizi dengan perhitungan prevalensi $< 15\%$, akan tetapi Kota Pontianak masih memiliki kasus gizi buruk. Pada tahun 2018, jumlah kasus gizi buruk di Kota Pontianak menurun sebanyak 12 kasus atau sebesar 29,27%.

Gizi buruk adalah Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada $< -3SD$ tabel baku WHO-NCHS.

Tabel II.49
Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Jumlah Ditemukan
1	2014	29
2	2015	27
3	2016	29
4	2017	41
5	2018	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (**Posyandu**) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. **Posyandu** merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala kelurahan.

Di Kota Pontianak ada 2 (dua) jenis posyandu yaitu posyandu balita dan posyandu lansia. Posyandu balita sendiri ada yang merupakan posyandu permanen dan posyandu swadaya masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah posyandu balita di Kota Pontianak adalah sebanyak 290 dengan 57 unit posyandu

merupakan posyandu permanen yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Jumlah posyandu setiap tahunnya selalu bertambah untuk mengimbangi jumlah balita yang ada di Kota Pontianak.

Posyandu balita sendiri dibagi menjadi empat strata yaitu strata mandiri, strata Purnama, strata madya dan strata yang paling tinggi adalah strata pratama. Di Kota Pontianak jumlah posyandu yang paling banyak adalah berstrata purnama dengan jumlah 131 posyandu dilanjutkan dengan strata madya dengan jumlah 76 posyandu, kemudian strata mandiri sebanyak 57 posyandu dan yang paling sedikit adalah strata pratama 26 posyandu.

Tabel II.50
Jumlah Posyandu Kota Pontianak

Tahun	PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	JUMLAH
2015	43	128	86	16	273
2016	19	135	118	12	284
2017	17	102	77	88	284
2018	26	76	131	57	290

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, sehingga membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalah sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan.

PHBS pada tatanan rumah tangga dinilai berdasarkan 16 indikator yang meliputi 9 indikator perilaku dan 7 indikator lingkungan. Sembilan indikator perilaku ini adalah (1) Perilaku tidak merokok, (2) Persalinan oleh Nakes, (3) Immunisasi, (4) Penimbangan Balita, (5) Sarapan Pagi, (6) Kebersertaan Dana Sehat, (7) Kebersihan Mencuci Tangan, (8) Kebersihan Menggosok Gigi, (9) Olah Raga. Sedangkan Indikator Lingkungan pada PHBS adalah (1) sarana air bersih, (2) Jamban, (3) Tempat Sampah, (4) Sarana Pembuangan Air Limbah, (5) Ventilasi Rumah, (6) Kepadatan

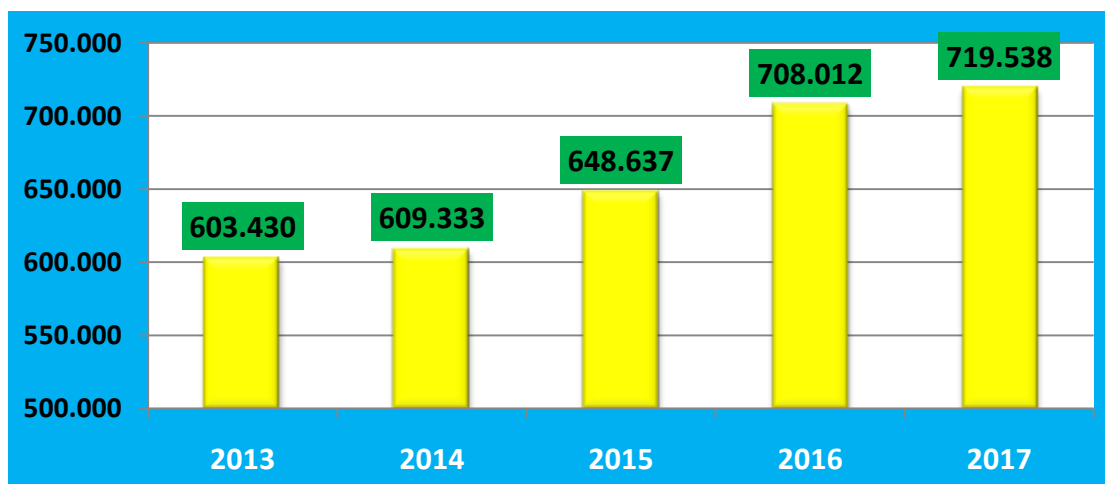
Rumah, (7) Lantai Rumah. Persentase rumah tangga ber-PHBS di Kota Pontianak adalah sebesar 69,42% dari target 65%.

Tabel II.51
Persentase Rumah Tangga Ber-Phbs Kota Pontianak

No	Tahun	Dipantau	Jumlah Ber-PHBS	% Ber-PHBS
1	2015	5.772	2.353	40,77
2	2016	6.519	3.027	46,43
3	2017	6.517	3.025	46,42
4	2018	4.019	2.790	69,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Grafik II.20
Kunjungan Puskesmas Kota Pontianak Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Meningkatnya jumlah kunjungan ke puskesmas mengimplikasikan semakin meningkatnya jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tergambar dari adanya puskesmas unggulan dan persepsi masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh puskesmas semakin membaik. Kunjungan pasien merupakan kunjungan preventif meliputi kunjungan imunisasi, KIA, KB dan Pelayanan lansia serta kunjungan pengobatan.

Berkaitan dengan kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas, satu upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yaitu dengan program jaminan mutu (Quality Assurance) dalam bentuk Puskesmas Unggulan dan Inovasi. Pada tahun 2017 Kota Pontianak memiliki 23 puskesmas yang tersebar di enam kecamatan dimana 23 puskesmas memiliki inovasi. Puskesmas Inovasi adalah puskesmas yang

melakukan proses pembaharuan/ pemanfaatan/ pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dengan sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi spesifik dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan.

Tabel II.52
Puskesmas-puskesmas Inovasi di Kota Pontianak

No	Unit Kerja			Judul Inovasi
1	UPTD	Puskesmas	Kecamatan Pontianak Kota	“Naga Asuh” (Amati, Suluh, Sehatkan, Ubah Keluarga Rawan Kesehatan)
2	UPK	Puskesmas	Alianyang	“See and Treat” (Pelayanan IVA Terpadu)
3	UPK	Puskesmas	Karya Mulya	“KaBulKan” (Katalog Bulanan Kegiatan)
4	UPK	Puskesmas	Pal Tiga	“SMS Jak” (Jangan Antri Kelamaan)
5	UPTD	Puskesmas	Kecamatan Pontianak Barat	“CATIN SIAP” (Sehat; Intelek; Aktif; Produktif)
6	UPK	Puskesmas	Perumnas II	“SIMBAT” (Sistem Informasi Rekam Medik Berbasis Total)
7	UPK	Puskesmas	Kom Yos Sudarso	“Puskesmas Ramah HIV” (Pengembangan Klinik IMS dan HIV/AIDS)
8	UPK	Puskesmas	Pal Lima	“DM Mandiri” (Masyarakat Mengelola Sendiri)
9	UPTD	Puskesmas	Kecamatan Pontianak Selatan	“Balita Sehat dengan Fisioterapi”
10	UPK	Puskesmas	Purnama	“Stop Pernikahan Dini”
11	UPTD	Puskesmas	Kecamatan Pontianak Tenggara	“Go to Barcode” (Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dengan barcode pada kartu kunjungan pasien)
12	UPK	Puskesmas	Parit Dua	H.Husin “Merokok Sampai Disini”
13	UPTD	Puskesmas	Kecamatan Pontianak Timur	“Tanggap Cepat Gizi”
14	UPK	Puskesmas	Banjar Serasan	“SMS Locket”
15	UPK	Puskesmas	Tambelan Sampit	“Orang Tua Cerdas Balita Sehat”
16	UPK	Puskesmas	Kampung Dalam	“DEGAP CIRAP” Kader Sigap UCI di Garap

17	UPK Puskesmas Tanjung Hulu	Balak-E “Berikan Layanan Komprehensif” (Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan melalui TQM)
18	UPK Puskesmas Parit Mayor	“Mat Toga” (Optimalisasi Penggunaan Lahan untuk Tanaman Obat Keluarga Manfaatkan Tanaman Obat Keluarga)
19	UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Utara	“SADARI IVA”
20	UPK Puskesmas Siantan Hulu	“Sehat Jiwaku Sehat Keluarga Ku”
21	UPK Puskesmas Siantan Tengah	“Surveilans Berbasis Masyarakat melalui SMS”
22	UPK Puskesmas Telaga Biru	"REHAT bersama TEBU" (Rumpi Sehat bersama Puskesmas Telaga Biru) KIE pada masalah Kesehatan Ibu dan Anak)
23	UPK Puskesmas Khatulistiwa	“Curhat Remaja” (Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKPR) melalui Sosial Media)
24	UPTD Pusat Pengobatan Mata dan Gigi	Sistem Informasi Kesehatan : “SIMATA“
25	UPTD Pusat Laboratorium Kesehatan	“Pelayanan Laboratorium Sore Hari”

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Pada tahun 2017 terdapat lima puskesmas unit perawatan di Kota Pontianak. Pengembangan ini merupakan upaya pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal karena Pemerintah Kota Pontianak baru memiliki Rumah Sakit. Adapun upaya peningkatan kualitas pelayanan puskesmas tahun 2015 telah dilaksanakan ujicoba ISO puskesmas yaitu di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Timur dan secara berkala kegiatan ISO akan diperluas ke puskesmas lain di Kota Pontianak.

Berikut ini puskesmas perawatan Kota Pontianak :

No	Puskesmas	Pengembangan Pelayanan
1.	UPK Puskesmas Alianyang Jl. Alianyang No.121 Kode Pos: 78116	Perawatan persalinan, pelayanan sore hari dan PKRE
2	UPK Puskesmas Kp. Dalam Jl. Tanjung Raya I Dalam Bugis	Pelayanan dan perawatan persalinan
3.	UPTD Puskesmas Kec.Pontianak Utara (Siantan Hilir) Jl. Khatulistiwa No.151 RT.01/RW.21	Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam, pelayanan rawat inap termasuk pelayanan dan perawatan persalinan
4.	UPTD Puskesmas Kec.Pontianak Selatan (Gang Sehat) Jl. Tani Makmur Rt 02/29 Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan	Pelayanan dan perawatan persalinan
5.	UPTD Puskesmas Kec.Pontianak Timur Jl. Tanjung Raya II	Perawatan gizi buruk dengan didirikannya Therapeutic Feeding Center (TFC)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Tabel II.53
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Kesehatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) & Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Target (%)	Capaian 2018		% Realisasi	% Capaian
			Pembilang	Penyebut		
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	98	12487	12772	97.77	99.76
2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	97	12070	12192	99.00	102.06
3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	97	11521	11611	99.22	102.29
4	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	88	50518	56761	89.00	101.14
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	85	16112	20915	77.04	90.63
6	Persentase Warga Negara Usia 15 - 59 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100	132807	503527	26.38	26.38
7	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	90	30743	51544	59.64	66.27
8	Persentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	21117	183728	11.49	11.49

No	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) & Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Target (%)	Capaian 2018		% Realisasi	% Capaian
			Pembilang	Penyebut		
9	Presentase Penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	5940	44003	13.50	13.50
10	Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	100	722	722	100.00	100.00
11	Presentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan Pelayanan TB sesuai Standar	100	1345	1345	100.00	100.00
12	Presentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar	90	9029	16420	54.99	61.10

Pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi menjadi prioritas karena dua kelompok tersebut rentan terhadap kesakitan dan kematian (*Laporan Tahunan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, 2017*) dan karena angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih cukup tinggi. Capaian kegiatan pelayanan kesehatan dasar disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.54
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)
% Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	98	96.99
% Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	95	78.70
% Pelayanan Kesehatan Anak sesuai Standar	85	87.29
% Cakupan Bumil Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	99	99.88
% Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap	95	97.95
% Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	97	98.55
% Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	95	100
% Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan	97	97.38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Dari tabel diatas didapat informasi bahwa terdapat 2 indikator yang tidak mencapai targetnya yaitu capaian Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar pada tahun 2017 adalah 96,66 % dengan target sebesar 98% dan Persentase Bayi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar pada tahun 2017 adalah 78.70 % dengan target sebesar 95 %.

Sedangkan untuk indikator Pelayanan Kesehatan Anak sesuai Standar, Cakupan Bumil Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap, Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan melebihi capaian target yang sudah ditetapkan pada tahun 2017.

Capaian kinerja ini dapat berdampak pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara langsung. AKI pada tahun 2017 adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus atau 58.46/100.000 kelahiran hidup, dan AKB pada tahun 2017 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus atau sebesar 3.01/1000 kelahiran hidup.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui beberapa kegiatan, diantaranya optimalisasi Peran Kader dalam P4K, Pertemuan dengan Bidan Praktek Mandiri (PPM) dan kemitraan bidan dan dukun.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam meningkatkan capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan diantaranya adalah Peningkatan kapasitas petugas dalam penerapan standar pelayanan persalinan, Nifas dan Perinatal serta Neonatal melalui bimtek di puskesmas. Dengan pelayanan kesehatan reproduksi pendekatan PKRE integrative terutama dalam mendeteksi dini Infeksi Menular Seksual (IMS) dan ISR pada ibu hamil, bersalin, akseptor KB dan remaja. Upaya lain adalah pembentukan Pelayanan Obstetrik Neonatal Dasar (PONED) sebagai tempat rujukan kasus komplikasi maternal dan neonatal (Laporan Struktural Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, 2017). Ada 4 puskesmas PONED yaitu UPK Puskesmas Alianyang, UPTD Puskesmas Pontianak Selatan (Gang Sehat), UPK Puskesmas Kampung Dalam dan UPTD Kecamatan Pontianak Utara (Siantan Hilir). Selain upaya tersebut telah dikembangkan Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan pemantapan RW Siaga (*Laporan Struktural Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, 2017*) untuk semakin

mendekatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi kepada masyarakat dan untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Cakupan kunjungan neonatus (0-28 hari) di atas target di tahun 2017. Dari tabel di atas diketahui bahwa cakupan kunjungan neonatus mencapai 97,95 % sedangkan target tahun 2017 adalah 95%. Cakupan kunjungan neonatus mencapai 96,76 % dari target sebesar 95% dimana ini menunjukkan masih diatas target tahun 2017.

Masih adanya bayi yang belum memperoleh pelayanan sesuai standar ini dapat berdampak terhadap peningkatan angka kesakitan, dan terjadinya penyeimbangan tumbuh dan berdampak terhadap peningkatan kasus kematian bayi.

Belum optimalnya kunjungan bayi tersebut disebabkan oleh:

1. Kurang optimalnya pencatatan dan pelaporan ditingkat Puskesmas
2. Intergrasi program belum berjalan, serta
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap standar pelayanan kesehatan bayi diantaranya pelayanan Deteksi Dini Tumbuh Kembang, sehingga saat bayi sudah selesai imunisasi mereka enggan untuk berkunjung ke Puskesmas untuk memperoleh pelayanan lainnya.

Pada tahun 2017 ini semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Namun target indikator kinerja ini harus ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Contohnya untuk meningkatkan cakupan kunjungan bayi, Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan pendekatan MTBM, MTBS dan SDIDTK di puskesmas, posyandu dan PAUD/TK (Pendidikan Anak Usia Dini) serta Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pemantauan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas. (*Laporan Struktural Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, 2017*).

Pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel II.55
Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah dan Usia Sekolah Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Realisasi 2017 (%)
% Anak Usia Pendidikan Menengah dan Atas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	80	92.46
% Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	80	100
% Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	86	87.29
% Cakupan Pelayanan Anak Balita sesuai Standar	85	90

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Secara umum capaian pada tahun 2017 mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 4 indikator kinerja yang mempunyai capaian lebih tinggi dari target yang telah ditentukan yaitu Anak Usia Pendidikan Menengah dan Atas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (92.46%) dimana target tahun 2017 sebesar 80%, Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar (100%) dimana tahun 2017 ini target yang ditentukan sebesar 80% dan Cakupan Anak Usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar sebesar 87.29% lebih tinggi dari target tahun 2017 sebesar 86% dan Capaian Cakupan Pelayanan Anak Balita sesuai Standar tahun 2017 yaitu (90%) dengan target sebesar 85%.

Tercapainya target Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar disebabkan antara lain (Laporan Struktural Seksi Promosi Kesehatan, 2017): Siswa SD dan setingkat, yang telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih (guru UKS/Dokter kecil), paling sedikit 2 x per tahun, di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen program usaha kesehatan anak sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

Capaian penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel

Tabel II.56
Cakupan Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Pembilang	Penyebut
% Balita Kurus yang mendapat Pelayanan	80	82.08	394	480
% Balita Sangat Kurus yang mendapat Pelayanan sesuai Standar	100	100	41	41
% Balita Bawah Garis Merah yang mendapat Pelayanan sesuai Standar	100	100	277	277
% Balita Kurus mendapat makanan tambahan	80	82.08	394	480
% Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 Tablet selama Masa Kehamilan	97	96,66	12516	12904
% Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Makanan Tambahan	65	60,53	457	755
% Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)	75	69,34	39414	56845
% Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	44	75,59	8236	11042
% Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	44	61,53	3417	5553

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang

Pelayanan kesehatan rujukan dilakukan untuk kasus yang bersifat gawat darurat dan fasilitas di puskesmas tidak memadai untuk mengatasi kasus. Pelayanan kesehatan rujukan dilakukan untuk ibu hamil resiko tinggi, neonatal resiko tinggi atau mempunyai komplikasi serta akses terhadap ketersediaan darah untuk menangani rujukan dan penunjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.57
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan
dan Penunjang Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Pembilan g	Penyebu t
% Cakupan Bumil Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	99	99.88	2582	2585
% Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	95	100	1781	1781

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Perbedaan situasi masyarakat, lingkungan fisik dan biologi serta gaya hidup di Kota Pontianak menuntut pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti adanya sarana yang dapat memberikan informasi cepat dan akurat, pelayanan gawat darurat medik, penanganan keluhan pelayanan dan lain-lain. Mempertimbangkan situasi kota yang berkembang dan dinamis, adanya masalah kesehatan di perkotaan serta potensi yang dimiliki daerah perkotaan, maka suatu system dan pengorganisasian yang serasi, terpadu dan terintegrasi sangatlah diperlukan. Sebagai antasipasi hal tersebut terbentuklah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 118 untuk mewujudkan masyarakat yang aman.

SPGDT adalah program kesehatan yang dikembangkan di Kota Pontianak untuk mengantisipasi kejadian gawat darurat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kondisi bencana. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk mencegah kematian dan kecacatan sehingga masyarakat Kota Pontianak dapat hidup secara produktif. Adapun tujuan dilaksanakannya SPGDT 118 adalah untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat yang berada dalam kondisi gawat darurat.

Strategi pelayanan SPGDT 118 adalah sebagai berikut (Dirjen Bina Yanmedik Depkes RI,2005) :

1. Pelayanan transportasi rujukan gawat darurat dilaksanakan suatu unit gawat darurat
2. Penanganan gawat darurat pada skala kota dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis dibawah koordinasi

unit gawat darurat Dinas Kesehatan Kota Pontianak berdasarkan SK Walikota Pontianak nomor 345 tahun 2007 tentang Pembentukan Posko Emergency 118 di Kota Pontianak. Pengananan gawat darurat dilengkapi system transportasi dan informasi gawat darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang bekerjasama secara sinergis dan efisien.

3. Dalam keadaan gawat darurat setiap tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun.
4. Unit Gawat Darurat Dinas Kesehatan Kota Pontianak bersama-sama dengan semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta menyediakan akses situasi darurat dan siaga bencana sesuai dengan kondisi skala bencana
5. Pada situasi seperti kecelakaan lalu lintas, kriminalitas, terorisme, bunuh diri, situasi kacau (chaos), polisi dan aparat keamanan lain melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), Unit Transportasi Gawat Darurat akan melakukan pemindahan korban ke rumah sakit terdekat
6. Rumah sakit dan puskesmas yang memiliki Unit Gawat Darurat (UGD) menerima korban tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai standar prosedur yang berlaku
7. Pembiayaan kasus – kasus sebagaimana disebutkan pada poin (6) dibebankan pada pemerintah dan swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Penanganan kasus penyakit yang memerlukan tindakan segera dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan lintas sektor terkait

Strategi di atas dapat terwujud dengan adanya komitmen Pemerintah Kota Pontianak yaitu :

- Penanggulangan di tempat kejadian.
- Penyediaan sarana kesehatan yang memadai dengan menggunakan ambulance 118 selama tahun 2014
- Penyediaan sumber daya manusia kesehatan dan sarana komunikasi.
- Rujukan ilmu, pasien dan tenaga ahli
- Upaya penanggulangan gawat darurat rujukan (UGD dan ICU)

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ideal tidak selamanya dapat tercapai karena timbulnya kendala dalam

pelaksanaan. Satu kendala yang dihadapi adalah panjangnya rantai komando sehingga aksi yang seharusnya dilaksanakan terhambat oleh sistem birokrasi. Masalah yang berhubungan dengan kendala di atas adalah kemampuan dalam mengolah data dan informasi oleh pengambil keputusan yang sering menjadi hambatan dalam mempercepat aksi. Solusi yang dapat dipertimbangkan dengan memasyarakatkan aksi tanggap darurat pada masyarakat Kota Pontianak.

2. Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular

Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.58
Cakupan Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular
Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Pembilan g	Penyeb ut
% Terkendalnya Angka Kesakitan Penyakit Menular (DBD)	< 49	0.03	214	627021
% Terkendalnya Angka kesakitan Penyakit Menular (Kusta)	< 1	0.002	18	627021
% Terkendalnya Angka Kesakitan Penyakit Menular (AFP)	≥ 2	5.60	9	160743
% Angka Kesembuhan Penderita TB	85	93.72	403	430
% Terkendalnya Angka Kesakitan Penyakit Menular (Diare)	< 214	1.77	11070	627021
% Menurunnya kesakitan Penderita HIV	< 0,02	0.014	89	627021
% Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100	100	214	214
% Orang dengan TB mendapatkan Pelayanan TB sesuai Standar	100	100	955	955
% Penyelidikan Epidemiologi (PE) yang dilakukan kurang dari 24 jam	100	100	542	542
% Orang Beresiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar	85	100	11711	11711

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Secara umum capaian kewenangan wajib penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular adalah baik dimana dari 10 indikator kinerja, semuanya tercapai sesuai target di tahun 2017.

3. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar

Berdasarkan teori diagram HL Blum, lingkungan memiliki peran yang terbesar untuk meningkatkan derajat kesehatan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Maka semakin sehat kondisi lingkungan semakin tinggi pula derajat kesehatan. Kesehatan lingkungan mencakup kumpulan kondisi luar yang memiliki akibat pada kehidupan makhluk hidup. Cakupan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Tahun 2017 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.59
Cakupan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)	Pembilang	Penyebut
% Sarana Air Minum yang memenuhi Standar	100	100	60	60
% Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan	76	75.96	278	366
% Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (Laik Sehat)	30	29.98	247	824
Kelurahan yang melaksanakan Pemicuan Pilar STBM	19	15		
Jumlah Sarana Air Minum yang dilakukan Pengambilan Sampel dan Inspeksi Sanitasi	60	60		
Jumlah Tempat Fasilitas Umum yang di bina	138	138		
Jumlah Tempat pengolahan makanan yang di bina	480	480		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Apabila dilihat dari tabel capaian penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar dari 7 (tujuh) indikator hanya satu indikator yang tidak mencapai target yaitu kelurahan yang melaksanakan pemicuan pilar STBM. Beberapa hal yang menjadi kendala belum tercapainya target di atas antara lain adalah Tenaga Sanitarian Puskesmas pelaksana kegiatan belum

mencukupi jumlahnya dibandingkan dengan jumlah institusi maupun wilayah RT yang harus dibina (Kekurangan SDM). (*Laporan Tahunan Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang P3PL, 2017*).

Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Pontianak khususnya masih berkisar pada beberapa hal berikut :

1) Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Air bersih adalah kebutuhan mutlak untuk kehidupan manusia, oleh karena itu harus tersedia pada setiap saat. Sumber air bersih dan air minum di Kota Pontianak sangat tergantung pada air hujan terutama pada musim kemarau dimana kadar garam air Sungai Kapuas melebihi ambang batas yang mengakibatkan air PDAM payau dan kualitasnya menurun. Untuk mengantisipasinya masyarakat Kota Pontianak memiliki tempat penampungan air hujan (PAH).

Apabila PAH tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk *Aedes Aegypti*. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai penanggungjawab program penyehatan lingkungan di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam rangka pengawasan penyehatan kualitas air bersih (*Laporan Tahunan Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang P3PL, 2017*) antara lain :

- Inspeksi sanitasi sarana air bersih
Melakukan inspeksi terhadap 2 sumber sarana air bersih (PAH dan PDAM).
- Pengujian Kualitas Air PDAM
Pemeriksaan sampel air dilakukan terhadap air PDAM dan air Depot Air Minum.
- Pengujian Kualitas Air Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
- Pelatihan Pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)

2) Sarana Sanitasi Dasar

Sesuai dengan MDG's Sarana Sanitasi Dasar yang akan ditingkatkan pemanfaatannya adalah jamban. Pemeriksaan yang dilakukan oleh 23 puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pontianak terhadap rumah tangga di Kota Pontianak menunjukkan bahwa 621.308 (99,09%) jumlah penduduk menggunakan jamban leher angsa yang memenuhi syarat dari 627.021 yang diperiksa. (tabel 61 lampiran profil).

Dengan demikian walaupun kondisi sarana sanitasi dasar di Kota Pontianak hampir mencapai nilai ideal, masih di mungkin berkontribusi pada angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan misalnya diare. Selain itu masyarakat yang tinggal di tepian sungai Kapuas masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan kotoran (pengelolaan sampah yang tidak tepat) sehingga mengganggu kualitas kesehatan lingkungan, karena sampah adalah sumber potensial dalam berkembangbiakan vector penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengantisipasi masalah diatas adalah dengan mengimplementasikan STBM. STBM mulai di implementasikan di Kota Pontianak tahun 2011 dengan bantuan mitra WVI. Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain terbentuknya 2 bank sampah dan adanya 21 orang warga yang mampu membangun jamban tanpa subsidi di walaupun kondisi perekonomian terkategori kurang mampu.

3) Penyehatan Perumahan/Pemukiman

Ditinjau dari kesehatan lingkungan, rumah yang dibangun hendaknya memenuhi syarat kesehatan antara lain :

- Memenuhi kebutuhan fisik dasar penghuni
- Memenuhi kebutuhan kejiwaan penghuni
- Melindungi penghuni dari penyakit menular
- Melindungi penghuni dari bahaya atau kecelakaan

Dalam Bab III profil ini juga telah disebutkan syarat – syarat rumah yang sehat menurut Ditjen PPM & PL Depkes RI yaitu rumah memiliki jendela, ventilasi dan pencahayaan, memiliki sarana sanitasi misalnya air bersih serta sarana pembuangan sampah dan kotoran serta penghuni berperilaku sehat seperti membuka jendela dan membuang tinja di jamban.

Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Seksi Penyehatan Lingkungan telah melakukan pendataan rumah sehat yang dibina sebanyak 13.036 rumah tangga yang diperiksa di Kota Pontianak. Kegiatan ini menghasilkan informasi bahwa sebanyak 6.773 rumah dibina memenuhi syarat (51,96%) di Kota Pontianak berkategori memenuhi syarat rumah sehat.

4) Pengawasan Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan

Pengawasan terhadap tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan penting bagi konsumen atau masyarakat

karena pengawasan ini dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari penularan penyakit dan keracunan akibat makanan.

Menurut Kepmenkes RI no.1457 Tahun 2003 mengenai Definisi Operasional Kewenangan Wajib Standar Pelayanan Minimal, yang termasuk dalam Tempat Umum antara lain hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, tempat wisata, kolam renang, restoran dan tempat ibadah & tempat hiburan. Adapun yang dimaksud sebagai Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah hotel, restoran dan pasar (Tabel 63 & 64 lampiran profil). Pada tahun 2017 terdapat 436 Tempat Umum dan 824 Pengelolaan Makanan (TPM) di Kota Pontianak. Sedangkan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 335 (76,83%) TTU dan 247 (29,98%) TPM. Dari 824 TPM yang diperiksa sebanyak 577 tidak memenuhi syarat higiene sanitasi (70,02%). Hotel berbintang di Kota Pontianak berjumlah 24 buah dan non berbintang berjumlah 24 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan hotel berbintang sebanyak 22 buah (91,7%) dan hotel non berbintang yang memenuhi syarat sebanyak 4 buah (16,7%).

Melihat pencapaian kegiatan (pemeriksaan terhadap TUPM di Kota Pontianak) di atas, Seksi TTU/TPM, Bidang PLPK Dinas Kesehatan Kota Pontianak perlu lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi dan menyehatkan TUPM-TUPM diwilayah tersebut. Disamping kegiatan di atas, pada tahun 2017 Seksi TTU dan TPM mengadakan :

- ✓ Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi dalam rangka pemberian advice dan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi TTU
- ✓ Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi Pengelola TTU
- ✓ Penilaian Pasar Sehat pada Pasar Tradisional
- ✓ Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Sekolah
- ✓ Uji Petik Pengambilan, pemeriksaan sampel air Kolam Renang
- ✓ Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka SPP-IRT
- ✓ Uji Petik Pengambilan, pemeriksaan sampel makanan dan usap alat makan di rumah makan, restoran dan jasaboga.
- ✓ Uji Petik Bahan Berbahaya pada Pangan Jajanan Anak Sekolah dengan Rapid Test Kit.
- ✓ Uji Petik Pengambilan, pemeriksaaan sampel makanan di pasar tradisional

- ✓ Pembinaan dan pengawasan Hygiene Sanitasi dalam rangka pemberian Advice dan Sertifikat Laik sehat TPM
- ✓ Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan di Rumah Makan dan Restoran
- ✓ Antisipasi Keracunan Makanan Minuman
- ✓ Pelatihan Penjamah Makanan bagi Pedagang Keliling
- ✓ Bimbingan teknis Program Penyehatan TPM Petugas DKK ke Puskesmas

5) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

Perilaku sehat adalah salah satu pilar Indonesia Sehat 2015. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2015 yang diharapkan adalah yang bersifat proaktif yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit serta berpartisipasi aktif dalam kesehatan masyarakat. Salah satu indikator perilaku sehat masyarakat adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS adalah upaya memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat agar membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan melalui pendekatan advokasi, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Indikator dalam tatanan PHBS (tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat umum dan tatanan tempat kerja) diarahkan kepada lima aspek program prioritas yaitu KIA, Gizi, Kesling, Gaya Hidup dan Peran serta dalam upaya kesehatan. Dari hasil pendataan rumah tangga ber-PHBS di Kota Pontianak tahun 2017 mencapai 46.42%. Hal ini masih dibawah target yang ditentukan sebesar 50%. Capaian Tahun 2017 ini lebih turun sedikit dibanding Tahun 2016 yang hanya mencapai 46.43%. Jumlah Rumah Tangga yang disurvei berjumlah 6.517 dengan rumah tangga ber-PHBS berjumlah 3.025. Apabila dilihat dari angka ini maka terdapat 3.492 rumah tangga yang belum melaksanakan sepenuhnya 10 (sepuluh) indikator PHBS.

Rumah Tangga ber-PHBS yaitu rumah tangga yang melakukan perilaku dan lingkungan sehat dimana harus memenuhi 10 (sepuluh) indikator. Jika 1 (satu) indikator saja tidak terpenuhi maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga tidak ber-PHBS.

Adapun indikator PHBS adalah sebagai berikut:

- (1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- (2) Memberi bayi ASI Eksklusif
- (3) Menimbang Balita setiap bulan
- (4) Menggunakan Air Bersih
- (5) Mencuci tangan pakai sabun
- (6) Gunakan Jamban Sehat
- (7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu
- (8) Makan buah dan sayur setiap hari
- (9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- (10) Tidak merokok di dalam rumah.

Tabel IV.8 berikut menyajikan informasi capaian penyelenggaraan promosi kesehatan tahun 2017.

Tabel II.60
Cakupan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)
% Sekolah yang Melaksanakan Promosi Kesehatan	80	100
% Posyandu Purnama dan mandiri	65	58.10

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Capaian Indikator % Cakupan Sekolah yang Melaksanakan Promosi Kesehatan sudah mencapai target pada tahun 2017 yaitu 100% dari target tahun 2017 sebesar 80%.

Pada tahun 2017 proporsi posyandu purnama dan mandiri mencapai 58,10% dengan target nasional 2017 sebesar 65% sehingga dapat dikatakan bahwa capaian tahun 2017 belum mencapai target. Terdapat 284 posyandu di Kota Pontianak dan yang kategori posyandu purnama dan mandiri sebanyak 165 buah. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 38.93% terdapat peningkatan proporsi posyandu purnama dan mandiri. Pada tahun 2016 terdapat 284 posyandu dan kategori posyandu purnama dan mandiri sebanyak 130 buah. Informasi lebih lengkap mengenai jumlah dan persentase posyandu menurut strata dan kecamatan di Kota Pontianak tersaji pada Tabel 71 lampiran profil ini.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga target 2017 tidak tercapai adalah Dukungan dana, sarana dan prasarana untuk program bina kesehatan bersumberdaya masyarakat masih

kurang memadai, Kurang inovatif penanggung jawab posyandu dalam melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan di posyandu. (*Laporan Tahunan Seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, Binkesmas 2017*)

Belum tercapainya target Strata Posyandu Purnama dan Mandiri pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- ✓ Masih rendahnya cakupan D/S (dibawah 80%) di beberapa Posyandu
- ✓ Jumlah kader posyandu aktif dibawah 5 orang

Belum tercapainya target capaian Strata Posyandu Purnama dan Mandiri pada tahun 2017, yang disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti diuraikan sebelumnya, diperlukan strategi untuk pemecahan masalah yang ditemukan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah posyandu dari strata pratama dan madya ke strata purnama dan mandiri, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- ✓ Pelaksanaan Bulan Tema Kesehatan di Posyadu
- ✓ Pelatihan Peningkatan Kinerja Kader Posyandu
- ✓ Pembinaan posyandu
- ✓ Monitoring dan evaluasi kegiatan posyandu
- ✓ Rapat Kelompok kerja operasional dan kelompok kerja posyandu

6) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Penyediaan obat khususnya untuk pelayanan kesehatan dasar merupakan prioritas dalam pengadaan obat. Obat yang diadakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasien baik dalam hal jumlah maupun jenis obat. Pengelolaan dan pendistribusian obat di Kota Pontianak dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Farmasi (Puslofar). Aktivitas penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh Puslofar untuk menjaga mutu dan menjamin kelangsungan pelayanan kefarmasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi capaian kewenangan wajib penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan tahun 2017.

Tabel II.61
Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)
% Puskesmas dengan Ketersediaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	90	100
% Fasilitas Kesehatan di bidang Kefarmasian sesuai Standar	90	100
Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang di adakan	100	100
Jumlah Item Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	100	100
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar	100	100
Jumlah Puskesmas yang Menggunakan Obat secara Rasional	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Pada tahun 2017 dari 6 indikator kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sudah di atas target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 100%.

7) Penyelenggaraan Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dapat diukur dari dua indikator kinerja yaitu Cakupan Masyarakat Miskin dan Kelompok Tertentu yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan. Pada tahun 2017 Cakupan Masyarakat Miskin dan Kelompok Tertentu yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan mencapai 93,55% dengan target tahun 2017 sebesar 100%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.62
Cakupan Penyelenggaraan Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target 2017 (%)	Capaian 2017 (%)
Cakupan Masyarakat Miskin dan Kelompok Tertentu yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	100	93.55

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017

Capaian dari indikator Cakupan Masyarakat Miskin dan Kelompok Tertentu yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan ini adalah sebesar 93.55% dari target 100% pada tahun 2017. Capaian pada tahun 2017 ini diperoleh melalui data dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari 628.076 jumlah penduduk Kota Pontianak, yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 467.144 peserta. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak berjumlah 15.313 jiwa, dan telah terlindung kesehatannya dengan memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian indikator ini diperoleh melalui dua kegiatan yaitu pertama, Jaminan Pelayanan Dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu; kedua, sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkesko dan Jamkesmas di Tingkat Pelayanan Dasar Puskesmas. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Pontianak sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini diperoleh melalui kunjungan masyarakat miskin ke UPTD/UPK Puskesmas di Kota Pontianak pada Tahun 2017 yang berjumlah 15.313 jiwa.

Jumlah tersebut berasal dari data kunjungan pasien menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional PBI, capaian ini menggambarkan bahwa masyarakat miskin di Kota Pontianak telah mengakses pelayanan kesehatan dasar khususnya Puskesmas, namun diharapkan bahwa kedepan jumlah kunjungan untuk pelayanan *preventif* terus meningkat dimana saat ini kunjungan *preventif* hanya berkisar 35-40% dari total kunjungan.

Tabel II.63
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Di Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

No	Jenis Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokter Umum	35	27	25	25	25
2	Dokter Gigi	20	19	19	19	19
3	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
4	Magister (Kesehatan & Non Kesehatan)	17	14	14	14	14
5	SKM	60	58	58	58	58
6	Apoteker	11	11	11	11	11
7	D4 Gizi / S1 Gizi	9	9	9	9	9
8	Sarjana non kesehatan	13	12	12	12	12
9	AKZI	37	37	37	37	37
10	D4 Kesling	12	12	12	12	12
11	AKFAR	19	20	20	20	20
10	AKG	30	30	30	30	30
11	AKL	13	13	13	13	13
12	AKPER	53	53	53	53	53
13	SPPH	17	16	16	16	16
14	SMAK	32	31	31	31	31
15	SPAG	2	2	2	2	2
16	SPRG	40	40	40	40	40
17	SMF/SAA	21	21	21	21	21
18	D3 Analis	13	15	15	15	15
18	Perawat/SPK	52	50	50	50	50
19	Bidan/D3 Bidan/D4 Bidan	113	112	112	112	112
20	Sekolah non Kesehatan	33	46	46	46	46
21	Paramedis Pembantu (lain-lain)	66	60	60	60	60
22	S1 / D4 Fisioterapi	2	2	2	2	2
23	D3 ARO/Refraksionis	2	2	2	2	2
24	D3 Atem	2	2	2	2	2
25	D3 Fisioterapi	1	1	1	1	1
26	D3 ATRO/Radiografer	1	1	1	1	1
J U M L A H		727	716	713	713	713

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

Selama 3 tahun terakhir (2015-2017), jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sedikit

menurun. Pada tahun 2017 pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sedikit menurun menjadi 713 orang dibandingkan tahun 2016, dikarena adanya pegawai yang pindah dari Kota Pontianak atau pindah antar instansi dan pensiun. Kota Pontianak memiliki berbagai macam fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan swasta yang tentunya memiliki tenaga yang juga melakukan upaya pelayanan kesehatan. Informasi rinci mengenai distribusi tenaga kesehatan di Kota Pontianak berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel 72 sampai 80 lampiran profil ini. Selanjutnya, tabel V.2 di bawah ini menyajikan informasi rasio tenaga kesehatan di Kota Pontianak per 100.000 penduduk pada tahun 2017. Sebagai informasi, jumlah penduduk yang digunakan adalah 628.076 jiwa (*BPS Kota Pontianak, 2017*).

Tabel II.64
Rasio Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta
dan Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Pontianak
Tahun 2017

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah	Rasio Nakes 2017
1	Dokter Umum	187	29.30
2	Dokter Gigi	55	8.76
3	Dokter Spesialis	188	29.93
4	Dokter Keluarga	-	-
5	Tenaga Farmasi (termasuk Apoteker)	251	39.96
6	Tenaga Gizi	113	17.19
7	Perawat	1720	273.85
8	Bidan	426	67.83
9	Tenaga Kesmas	111	17.67
10	Tenaga Sanitasi/Kesling	80	12.74

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2017
Rumah Sakit Umum Daerah (Pemerintahan) & Swasta

C. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka perlu upaya pengelolaan yang sungguh-sungguh.

Perkembangan kualitas udara buruk di Kota Pontianak selama tahun 2010-2014 menunjukkan penurunan hal ini dapat dilihat dari prosentase kualitas udara memburuk pada tahun 2010 sebesar 9,32% menurun pada tahun 2011 menjadi 1,92% atau 7 hari dalam setahun dan tahun 2012 menurun kembali menjadi 1,37% atau 5 hari dalam satu tahun, ini menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara memburuk dari tahun ke tahun menurun sehingga cuaca buruk di Kota Pontianak juga menurun. Sedangkan untuk prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara sedang sebesar 11,51% pada tahun 2010 dan menurun pada tahun 2011 menjadi 4,93% atau 18 hari dalam satu tahun dan prosentase kualitas baik dimana rata-rata cuaca untuk hari baik sebesar 93,15% atau 340 hari dalam satu tahun serta tahun 2012 cuaca sedang sebesar 6,30% atau 23 hari dalam satu tahun dan cuaca kualitas udara baik sebesar 92,33% atau 337 hari dalam satu tahun. Sedangkan tahun 2013 cuaca sedang meningkat sebesar 7,38% atau 23 hari dalam satu tahun dan cuaca kualitas udara baik menurun menjadi sebesar 89,34% atau 337 hari dalam satu tahun. Untuk tahun 2014 cuaca sedang sebesar 7,38% atau 23 hari dalam satu tahun dan cuaca kualitas udara baik menjadi sebesar 89,34% atau 337 hari dalam satu tahun.

Tabel II.65

Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	URAIAN	TAHUN (KASUS)			
		2015	2016	2017	2018
1	Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran	19	26	33	18
2	Penyelesaian Kasus Pencemaran				

Tabel II.66
Jumlah Rata-rata Parameter Pencemar Udara Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	INDIKATOR	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	PM 10	-	19,1	21,03	18,82
2	SO2	-	-	36,04	10,82
3	CO	-	-	17191,75	1591,17
4	O3	-	-	1,61	22,2
5	NO2	TD	-	8,90	117,24
6	HC	-	-	52,86	49,43
7	PM25	-	-	16,55	13,84

Tabel II.67
Perkembangan Pengelolaan kebersihan Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	URAIAN	TAHUN (M3/TAHUN)			
		2015	2016	2017	2018
1	Produksi Sampah	612.047	623.981	657.887	
2	Volume Sampah Yang Terangkut ke TPA	523.41	526.716	564.655	
	Persentase (%)	85,52	84,41	85,83	

Tabel II.68
Jumlah Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	JENIS	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS)	121	113	111	
2	Jumlah Transferdepo	2	2	1	
	Jumlah	123	115	112	

Tabel II.69
Jumlah Sarana dan Prasarana Armada Angkutan Sampah
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	JENIS	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Armada Angkutan Sampah (dumptruck)	16	10	13	
2	Armada Angkutan Sampah (armroll)	22	23	23	
3	Kendaraan Pick Up	7	11	10	
4	Buldozer	1	1	-	
5	Kontainer	79	100	111	
6	Excavator	1	1	1	
7	Motor Gerobak	34	49	11	
8	Kendaraan Fuso	2	2	2	
	Total	162	197	171	

Tabel II.70
Ruang Lingkup Pelayanan kebersihan di Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	JENIS	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Luas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	30,6	30,6	30,6	
2	Luas Wilayah Kota Pontianak	107,82	107,82	107,82	
3	Jumlah Penduduk Kota Pontianak	609.76	621.65	655.432	
4	Jumlah Penduduk yang Terlayani Kebersihan	521.467	531.635	562.545	

Tabel II.71
Perkembangan Kualitas Udara di Kota Pontianak Tahun 2010-2014

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara memburuk	%	9,32	1,92	1,37	3,27	3,27
2	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara Sedang	%	11,51	4,93	6,30	7,38	7,38
3	Prosentase bulan yang memiliki rata-rata kualitas udara Baik	%	79,18	93,15	92,33	89,34	89,34

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Tabel II.72
Perkembangan Kasus dan Penyelesaian Pencemaran di Kota Pontianak
Tahun 2010-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Jumlah Kasus Pencemaran	kasus	17	38	25	17	13	19	15	
2	Jumlah Penyelesaian Kasus Pencemaran	kasus	17	38	25	17	13	19	15	
3	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	kasus	17	38	25	17	13	19	15	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Sedangkan jumlah kasus pencemaran yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup tahun 2010 sampai dengan 2016 mengalami penurunan, dimana tahun 2010 jumlah kasus pencemaran sebanyak 17 kasus dari kasus tersebut dapat diselesaikan semuanya, sedangkan tahun 2016 jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran sebanyak 15 kasus dan dapat diselesaikan semua.

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambient ini dilakukan dalam upaya memperoleh data kualitas udara ambient Kota Pontianak bulanan dengan 5 parameter yaitu PM 10, Ozon, NO₂, CO, SO₂. Selain itu juga dilakukan kalibrasi peralatan *Fix Station* dan pengadaan suku cadang AQMS dan pengambilan uji petik emisi kendaraan bermotor serta mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemantauan Udara Ambient Tingkat Nasional di Medan dengan prosentase kualitas udara. Dengan tersedianya data kualitas udara tersebut dapat memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat terhadap perubahan kualitas udara ambient terutama pada musim kemarau, serta sebagai bahan/data untuk pengendalian pencemaran udara ambient Kota Pontianak.

Pada saat ini Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki Gedung Laboratorium Lingkungan untuk uji emisi dilapangan, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) laboratorium lingkungan seluas 10 m³ dan pengadaan mobil laboratorium lingkungan serta sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, sehingga memudahkan dalam melakukan pengkajian/analisis beban pencemaran/ tingkat kerusakan kualitas lingkungan hidup berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara ambient tersebut. Berikut dapat dilihat rata-rata parameter pencemar udara dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

Tabel II.73
Jumlah Rata-Rata Parameter Pencemar Udara di Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2016

No	Indikator	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PM 10	49,50	30,52	33,02	34,48	30,79	30,79	-	19,1
2	SO ₂	15,08	14,55	12,62	14,26	13,78	13,78	-	-
3	CO	5,74	4,11	4,98	4,98	4,44	4,44	-	-
4	O ₃	16,79	14,72	16,68	15,63	15,72	15,72	-	-
5	NO ₂	TD	TD	TD	TD	TD	TD	-	-

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Urusan lingkungan hidup juga menyangkut masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak. Untuk melihat keberhasilan dalam pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan dapat dilihat perkembangan kinerja pengolahan sampah selama tahun 2009-2016 secara umum menunjukkan peningkatan baik sarana dan prasarana serta penanganan masalah persampahan di Kota Pontianak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dapat diangkut pertahun pada tahun 2012 sebanyak 438.252m³/tahun dari jumlah sampah sebanyak 526.377 m³/tahun atau jumlah sampah yang dapat diangkut sebesar 83,26%, jika dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah volume sampah sebanyak 407.934 m³/tahun dengan jumlah sampah yang diangkut sebesar 73,85%. untuk lebih jelas melihat perkembangan pengelolaan sampah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.74
Perkembangan Pengelolaan Kebersihan Di Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2016

No	Jenis	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah produksi sampah (m ³ /tahun)	552.367	567.834	502.146	526.377	586.243	589.424	612.047	623.981
2.	Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA (m ³ /tahun)	407.934	410.606	397.897	438.252	438.750	472.836	523.410	533.628
Persentase (%)		73,85	72,32	79,24	83,26	74,84	80,22	85,52	85,52

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Dalam pengelolaan persampahan di perlukan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPS). Untuk melihat perkembangan sarana dan prasarana TPS selama tahun 2009-2016 dapat dilihat dari jumlah TPS dan Transferdepo pada tahun 2012 sebanyak 111 buah jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 147. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dari pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kebersihan Pertamanan yang berkomitmen untuk menutup TPS liar yang ada dan meminimalisir jumlah TPS. Untuk lebih jelasnya mengenai keberadaan jumlah TPS dan Transferdepo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.75
Prasarana dan Sarana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
di Kota Pontianak Tahun 2009- 2016

No	Jenis	Satuan	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	buah	-	147	111	111	129	129	121	107
2.	Jumlah Transferdepo	buah	2	2	2	2	2	2	2	3
Jumlah			2	149	113	113	131	131	123	110

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Tabel II.76
Prasarana dan Sarana Armada Angkutan Sampah di Kota Pontianak
Tahun 2009- 2016

No	Jenis	Satuan	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah armada angkutan sampah (dumptruck)	buah Operasiona l/buah	17	23	23	23	23	19	16	10
2.	Jumlah armada angkutan sampah (armroll)	buah Operasiona l/buah	10	11	13	23	23	17	22	23
3.	Jumlah kendaraan pick up	buah	3	3	3	6	7	7	11	10
4.	Jumlah Buldozer	buah	-	1	1	1	1	1	1	-
5.	Jumlah Excavator	buah	1	1	1	2	2	2	2	1
6.	Jumlah	buah		30	32	68	79	79	79	100

No	Jenis	Satuan	Tahun					201 2	201 3	201 4	201 5	201 6
			2009	2010	2011	2012	2013					
7.	Kontainer Jumlah Motor Gerobak	buah	1	2	7	12	15	29	34	49		
Jumlah			32	71	80	135	135	154	165	193		

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Untuk melayani dalam pengangkutan sampah selama tahun 2009 - 2016 dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang telah tersedia pada tahun 2016 dengan keseluruhan sebanyak 193 unit jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang berjumlah 32. Peningkatan armada ini terjadi pada jenis Armroll, kontainer, pick Up dan motor gerobak, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Jumlah penduduk yang telayani kebersihan dari tahun 2009 sebanyak 406.418 jiwa atau sebesar 74,73 % dan tahun 2012 meningkat dengan jumlah sebanyak 480.276 jiwa atau sebesar 83,28%. Kondisi ini menunjukkan kinerja pengelolaan sampah semakin hari semakin membaik. Diharapkan kedepan dapat mencapai tingkat pelayanan 100%, artinya tidak ada lagi sampah yang tertinggal dan pelayanan mencakup sleuruh wilayah dan penduduk Kota Pontianak.

Tabel II.77
Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan di Kota Pontianak Tahun 2009- 2016

No	Jenis	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) (Ha)	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	30,6	30,6	30,6
2.	Luas wilayah Kota Pontianak (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82	107,82
3.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak (Jiwa)	543.842	554.764	565.856	576.694	587.074	598.097	609.760	621.650
4.	Jumlah Penduduk yang terlayani kebersihan (Jiwa)	406.418	429.072	456.922	444.658	439.366	479.793	521.467	531.635

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak

Sarana TPA yang dimiliki Kota Pontianak Ruang saat ini seluas 26,6 Hektar dengan model pengolah berupa *open dumping* serta sebagian kecil dengan cara *control landfill*. Kedepan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa model pengelolaan sampah di TPA diharuskan menggunakan metode *sanitary landfill*. Halini tentu saja membutuhkan dukungan sarana dan pendanaan yang lebih banyak lagi mengingat metode pengolahan sampah ini memerlukan penanganan khusus secara intensif. Selain itu saat ini Pemerintah Kota Pontianak sedang merintis kerjasama

pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan Kota Borås Swedia yang telah lama terkenal dengan efektifitas mereka dalam mengolah sampah menjad sumber energi biogas dan listrik. Diharapkan dengan kerjasama ini kedepan akan membawa penanganan sampah kota Pontianak menjadi lebih baik.

D. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum di Kota Pontianak adalah menyangkut pembangunan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan yang mana disesuaikan dengan pembagian fungsi dan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Di bidang sumber daya air dilakukan pengelolaan sungai dan saluran drainase kota dalam rangka pengendalian genangan dan banjir. Sedangkan di bidang bina marga dilakukang pengelolaan jalan dan jembatan yang masuk dalam kategori jalan kota (SK Walikota Pontianak).

Dalam kurun waktu 2009-2013 kinerja pengelolaan drainase cukup baik. Hal ini ditunjangkoordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai I WS Kapuas selaku perpanjangan Kementerian PU dalam mengelola sistem drainase kota secara keseluruhan. Saat ini di Kota Pontianak tercatat 5 saluran primer yang pengelolaannya menjadi kewenangan Balai Sungai dan Pemerintah Provinsi dengan total panjang mencapai 131.870 meter dengan sebagian besar tanpa konstruksi penguatan.

Fokus pembangunan sumber daya air ke depan adalah memastikan genangan dan banjir tidak terjadi, khususnya dalam mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrem dan perubahan fisik lahan kota. Selain itu focus lainnya yang harus dilakukan adalah memastikan kuantitas dan kualitas sediaan air baku bagi proses pengolahan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kota Pontianak. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah intrusi air laut pada waktu musim kemarau menyebabkan kadar garam pada air baku sangat tinggi sehingga mengganggu proses pengolahan air bersih. Disisi lain akibat belum terbangunnya instalasi pengumpul air limbah domestik, air sungai tercemar yang akhirnya menyebabkan semakin menurunnya kualitas air baku, belum lagi akumulasi pencemaran akibat PETI dan aktifitas di sepanjang pinggiran sungai Kapuas berdampak pada Kota Pontianak. Untuk mengatasi hal ini, semua pihak dari berbagai level pemerintahan perlu duduk bersama merumuskan langkah penanganannya.

Tabel II.78
Kondisi Jalan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Indikator	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	168.288	139.433	211.282	211.282
2	Panjang Jalan Rusak Sedang	28.393	51.214	56.631	62.540
3	Panjang Jalan Rusak Ringan	26.637	31.565	6.401	6.590
4	Panjang Jalan Rusak Berat	51.005	52.111	5.666	5.666
5	Tidak Diketahui			0.189	-
	Panjang Total Jalan K1	274.323	274.323	280.169	286.078

Tabel II.79
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	Panjang Jalan	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jenis Permukaan (Km)				
	- Aspal	161.663	161.276	164.857	162.657
	- Kerikil / Telford	4.323	4.486	4.486	5.936
	- Tanah	29.925	29.925	29.925	34.392
	- Beton	78.412	78.636	78.636	83.094
2	Kondisi Jalan (Km)				
	- Baik	168.288	139.433	211.283	211.282
	- Sedang	28.393	51.214	56.630	62.540
	- Rusak	26.637	31.565	6.590	6.590
	- Rusak Berat	51.005	52.111	5.666	5.666
3	Panjang Jalan Yang Dipelihara (Km)	274.323	274.323	280.169	286.078

Tabel II.80
Panjang Saluran Drainase Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	Nama Saluran	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	PRIMER				
	- Panjang Saluran	131,870.00	131,870.00	131.870,00	131,870.00
	- Konstruksi Tanah	88,787.35	86,472.03	84.914,03	84,465.03
	- Konstruksi Pasangan	2,461.75	2,701.00	2.806,00	2,806.00
	- Konstruksi Beton	-	-	-	-
	- Konstruksi Turap Beton	8,451.65	10,526.97	11.979,97	12,428.97
	- Konstruksi Turap Kayu	32,170.00	32,170.00	32.170,00	32,170.00
2	SEKUNDER				
	- Panjang Saluran	127,220.00	127,220.00	127.220,00	127,220.00
	- Konstruksi Tanah	65,477.45	64,062.45	63.624,45	62,254.45
	- Konstruksi Pasangan	42,112.75	43,173.75	43.345,75	43,575.75
	- Konstruksi Beton	14,889.80	15,243.80	15.476,80	15,476.80
	- Konstruksi Turap Beton	780.00	780.00	813,00	1,953.00
	- Konstruksi Turap Kayu	3,960.00	3,960.00	3.960,00	3,960.00
3	TERSIER				
	- Panjang Saluran	345,715.00	345,715.00	345.715,00	345,715.00
	- Konstruksi Tanah	213,975.62	205,382.62	193.694,62	176,105.62
	- Konstruksi Pasangan	46,520.75	49,279.75	54.639,75	62,629.75
	- Konstruksi Beton	84,162.83	89,885.83	95.085,83	102,981.83
	- Konstruksi Turap Beton	1,055.80	11,660.80	2.294,80	3,997.80
	- Konstruksi Turap Kayu	-	-	-	-

Tabel II.81
Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	JENIS RTH	2015	2016	2017	2018
1	TAMAN KOTA				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- Ruang Terbuka Hijau (Km2)	4,8	4,8	4,8	4,9
	- Persentase (%)	4,5	4,5	4,5	4,5
2	JALUR HIJAU				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- RTH (Km2)	1,6	1,6	1,6	1,6
	- Persentase (%)	1,5	1,5	1,5	1,5
3	LAPANGAN OLAHRAGA				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- RTH (Km2)	0,65	0,65	0,65	0,65
	- Persentase (%)	0,6	0,6	0,6	0,6
4	PEMAKAMAN UMUM				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- RTH (Km2)	0,35	0,35	0,45	0,45
	- Persentase (%)	0,3	0,3	0,4	0,4
5	HUTAN KOTA				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- RTH (Km2)	2,46	2,46	2,56	2,56
	- Persentase (%)	2,3	2,3	2,4	2,4
6	AGROWISATA / KSA				
	- Wilayah Kota (Km2)	107,82	107,82	107,82	107,82
	- RTH (Km2)	10	10	10	10
	- Persentase (%)	9,3	9,3	9,3	9,3

Tabel II.82
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2009-2015

No	Indikator	Satuan	Tahun						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Jalan (Jenis Permukaan)								
	Km		203.84	222.05	224.00	236.95	239.61	197.80	161.66
	- Aspal		2	3	5	4	8	2	3
	- Kerikil/ Telford	Km	5.680	6.388	6.388	-	-	-	4.323
	- Tanah	Km	23.525	19.464	19.464	15.764	15.764	15.764	29.925
	- Beton	Km	19.679	9.787	9.787	6.926	7.708	49.524	78.412
2	Panjang jalan (Kondisi)								
	Km		77.544	185.45	195.21	199.25	217.16	-	168.28
	- Baik			7	7	5	9		8
	- Sedang	Km	92.111	4.187	4.407	4.208	3.137	-	28.393
	- Rusak	Km	61.184	7.670	7.560	7.276	8.580	-	26.637
	- Rusak Berat	Km	21.887	60.379	52.460	48.905	36.904	-	51.005
3	Panjang jalan yang dipelihara	Km	252.72	257.69	259.64	259.64	263.09	263.09	274.32
			6	2	4	4	0	0	3
4	Peningkatan kualitas jalan	%	0,27	1,96	0,76	-	-	-	-
5	Peningkatan rasio jalan yang permukaanya aspal	%	2,60	8,93	0,88	-	-	-	-
6	Tingkat pemenuhan kebutuhan lebar jalan	%	100	100	100	-	-	-	-
7	Jembatan								
	Buah		-	132	132	132	154	-	-
	- Baik								
	- Sedang	Buah	-	-	-	-	-	-	-
	- Rusak	Buah	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah alat berat yang dimiliki	Unit	27	37	37	154	175	-	-
9	Jumlah alat berat yang dalam kondisi baik	Unit	19	26	27	147	175	-	-
10	Persentase jalan yang dilengkapi trotoar	%	20	20	20	20	20	-	-
11	Tingkat penataan persimpangan jalan	%	15	20	20	20	20	-	-
12	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	-	-
13	Terpenuhinya kebutuhan penerangan di jalan umum pada malam hari	%	70	70	70	70	70	-	-
14	Prosentase peningkatan jalan dengan kondisi baik	%	19,679	9,787	9,787	37,48	NA	-	-
15	Tingkat kepadatan per ruas jalan utama	LHR	4,187	4,187	4,407	-	-	-	-
16	Tingkat pemenuhan kebutuhan lebar jalan	%	7,670	7,670	7,560	-	-	-	-
17	Tingkat pemenuhan kebutuhan jembatan	%	60,588	60,379	52,460	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak

Pengelolaan jalan-jalan kota dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah dilakukan dengan baik hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki kondisi baik terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tersebut, konsentrasi diarahkan untuk meningkatkan volume jalan-jalan strategis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Juga dilakukan peningkatan jalan-jalan kota dengan cara betonisasi.

Hal ini dilakukan untuk mengimbangi semakin tingginya muka air genangan yang berdampak pada kerusakan aspal jalan. Dengan membeton jalan, umur jalan semakin lama dan biaya pemeliharaan semakin rendah. Tantangan kedepan adalah menciptakan akses antar wilayah yang lebih baik dengan membangun jalan-jalan baru untuk mengurangi beban jalan-jalan di tengah kota. Pembangunan jalan baru juga diarahkan pada kawasan utara Pontianak untuk merangsang pertumbuhan sehingga terjadi pemertaan pertumbuhan wilayah.

E. Urusan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan ruang Kota Pontianak untuk 20 tahun kedepan mengacu kepada RTRW Kota Pontianak 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Berdasarkan amanat Perda tersebut, perlu tindak lanjut penyusunan rencana yang lebih rinci sebagai dasar pengendalian ruang seperti RDTR dan peraturan zonasi, Rencana Detil Kawasan Strategis, serta rencana-rencana rinci sektoral lainnya.

Pemanfaatan ruang di Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian peruntukkan melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis. Disamping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini, saat ini kewenangan pengeluaran IMB telah

ditetapkan menjadi domain BP2T, akan tetapi kajian teknis serta pertimbangannya tetap mengikutsertakan instansi-instansi terkait.

Kendala utama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat kurangnya aparatur pengawasan dan kurangnya rencana detil teknis operasional dari rencana tata ruang yang ada. Disisi lain basis data bangunan belum mencakup keseluruhan bangunan yang berdiri/ada sehingga pengendalian bangunan-bangunan tidak berijin lebih banyak dilakukan dengan cara pasif/menunggu pengajuan dari masyarakat dan menunggu pemutihan. Izin yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 928 izin meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.597, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011 menjadi 2.053 serta tahun 2012 meningkat kembali menjadi 3.277.

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri no 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, didalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat kota.

Kawasan strategis lainnya yang dikembangkan adalah kawasan strategis sosial budaya Keraton Kadriah dan Makam Batulayang. Mengingat kawasan strategis ini lebih banyak berada di kawasan utara dan timur Kota Pontianak, kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhankawasan dalam rangka mereduksi ketimpangan perkembangan wilayah.

F. Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah vital, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan berawal dari perencanaan yang baik. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pendekatan teknokratik, demokratik, partisipatif,

politis dan *bottom-top down* dilakukan secara simultan. sehingga keterlibatan stakeholder, legislatif dan masyarakat merupakan keharusan.

Perencanaan pembangunan Kota Pontianak diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca, MDGs, *sustainable development* serta muatan yang bersifat spesifik.

Terobosan yang dilakukan BAPPEDA kota Pontianak selaku institusi yang memegang kewenangan pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah memadukan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP). Kehadiran SIPP ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perencanaan. Dengan SIPP masyarakat luas dapat mengetahui secara langsung/online usulan-usulan kegiatan pembangunannya apakah dipenuhi ataukah sebaliknya, semua dilakukan secara transparan. Sehingga tidak ada lagi sikap skeptis dan anggapan bahwa Musrenbang merupakan ajang seremonial belaka yang tidak menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan adalah bagaimana produk perencanaan yang dihasilkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, bagaimana dokumen yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan operasional teknis dalam keputusan-keputusan pembangunan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses perencanaan yang dilakukan dapat memuaskan berbagai pihak serta dilaksanakan sesuai aturan dan selesai pada waktu sesuai ketentuan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dan KUA PPAS serta perubahannya pada lima tahun terakhir selalu dilaksanakan tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan penetapan APBD yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang menjadi tantangan dalam proses perencanaan tahunan ini adalah menetapkan prioritas program dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan strategis dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Disatu sisi harus dipastikan bahwa pembangunan di setiap sektor dan urusan pembangunan dapat terus berjalan, disisi lain keterbatasan dana yang dimiliki mengharuskan prioritasasi beberapa urusan yang secara strategis memang urgen untuk didahulukan.

Selain penyelenggaraan perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi lain yang juga dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pontianak adalah pengendalian pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan (monev RKPD) secara rutin telah dilaksanakan, akan tetapi menghadapi berbagai kendala. Diantaranya adalah keterlambatan data realisasi kegiatan SKPD sebagai bahan monev di lapangan. Hal ini seringkali terjadi sehingga menyebabkan laporan pengendalian juga terlambat dibuat, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dalam RKPD seringkali terlambat ditindaklanjuti. Untuk mengantisipasi ini BAPPEDA Kota Pontianak sedang mengembangkan sebuah sistem informasi online untuk melakukan monev atau yang lebih dikenal dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG). Diharapkan dengan memanfaatkan sistem ini tidak lagi terjadi hal-hal yang disebutkan di atas.

Sebagai reaksi dinamika perkembangan kota yang sedemikian cepat, selain melaksanakan proses perencanaan yang ideal juga dilakukan berbagai kajian, studi dan evaluasi dalam berbagai bidang/urusan pembangunan. Hal ini selain untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi juga dalam rangka memberikan dasar/*guideline* bagi pengambil keputusan untuk menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan Kota Pontianak. Diharapkan setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Pontianak telah dikaji secara mendalam baik efek positif ataupun dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan, ataupun kontra produktif.

G. Urusan Cipta Karya dan Perumahan

Penyediaan perumahan di Kota Pontianak dilakukan melalui Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, Pengembangan Perumahan Swadaya, Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pembangunan rumah formal oleh pihak pengembang. Dengan keterbatasan wilayah kota Pontianak, untuk mengatasi kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat, perlu didorong pengembangan hunian layak huni secara vertikal.

Tabel II.83
Rekapitulasi Progress Bantuan Stimulan
Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	KECAMATAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	23	23	172	21
2	Pontianak Kota	0	1	2	46
3	Pontianak Selatan	0	3	6	55
4	Pontianak Tenggara	0	2	3	15
5	Pontianak Timur	23	38	378	214
6	Pontianak Utara	3	21	139	97

Tabel II.84
Lokasi Kegiatan Jalan Lingkungan Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	KECAMATAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	50	56	172	
2	Pontianak Kota	39	47	2	
3	Pontianak Selatan	25	27	6	
4	Pontianak Tenggara	23	28	3	
5	Pontianak Timur	31	47	378	
6	Pontianak Utara	35	35	139	
	Kota Pontianak	203	240	700	

Tabel II.85
Lokasi Kegiatan Drainase Lingkungan Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	KECAMATAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	15	21	25	
2	Pontianak Kota	11	15	19	
3	Pontianak Selatan	10	18	18	
4	Pontianak Tenggara	9	14	10	
5	Pontianak Timur	13	10	13	
6	Pontianak Utara	4	17	25	
	Kota Pontianak	62	95	110	

Tabel II.86
Rekapitulasi Kegiatan Jalan Lingkungan Kota Pontianak
Tahun 2015 - 2018

NO	Kecamatan				
		2015	2016	2017	2018
		23.465.552.000	25.850.065.000	51.896.351.000	
		Lokasi	lokasi	lokasi	
1	Pontianak Kota	39	47	2	
2	Pontianak Barat	50	56	172	
3	Pontianak Selatan	25	27	6	
4	Pontianak Tenggara	23	28	3	
5	Pontianak Timur	31	47	378	
6	Pontianak Utara	35	35	139	
Jumlah		203	240	700	

Tabel II.87
Rekapitulasi Kegiatan Drainase Lingkungan Kota Pontianak
Tahun 2015 - 2018

NO	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
		7.258.726.000	10.728.810.000	12.738.450.000	
		lokasi	Lokasi	Lokasi	Lokasi
1	Pontianak Kota	11	15	19	
2	Pontianak Barat	15	21	25	
3	Pontianak Selatan	10	18	18	
4	Pontianak Tenggara	9	14	10	
5	Pontianak Timur	13	10	13	
6	Pontianak Utara	4	17	25	
Jumlah		62	99	106	

Tabel II.88
Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi
Kota Pontianak Tahun 2014 - 2015

Kecamatan/ Kelurahan	2014		2015	
	Jumlah (Unit)		Jumlah (Unit)	
	Rumah tak layak huni	Sanitasi	Rumah tak layak huni	Sanitasi
Pontianak Kota	-	70	-	-
Mariana	-	-	-	-
Tengah	-	-	-	-
Sungai Jawi	-	70	-	-
Darat Sekip	-	-	-	-
Sungai Bangkong	-	-	-	-
Pontianak Barat	161	70	23	-
Sungai Beliang	147	-	8	-
Paal lima	-	-	-	-
Sungai Jawi Dalam	-	70	-	-
Sungai Jawi Luar	14	-	15	-
Pontianak Selatan	111	10	0	-
Parit Tokaya	18	-	-	-
Benua Melayu Darat	17	-	-	-
Benua Melayu Laut	40	-	-	-
Akcaya	-	-	-	-
Kota Baru	36	10	-	-
Pontianak Tenggara	0	50	-	-
Bansir Darat	-	-	-	-
Bansir Laut	-	50	-	-
Bangka Belitung Darat	-	-	-	-
Bangka Belitung Laut	-	-	-	-
Pontianak Timur	265	164	23	-
Tanjung Hilir	2	-	4	-
Tanjung Hulu	-	60	-	-
Dalam Bugis	1	1	6	-
Banjar Serasan	-	61	3	-
Parit Mayor	32	-	-	-
Saigon	-	38	-	-

Kecamatan/ Kelurahan	2014		2015	
	Jumlah (Unit)		Jumlah (Unit)	
	Rumah tak layak huni	Sanitasi	Rumah tak layak huni	Sanitasi
Tambelan Sampit	230	4	10	-
Pontianak Utara	263	166	591	-
Batulayang	1	27	-	-
Siantan Hilir	3	2	274	-
Siantan Tengah	252	72	3	-
Siantan Hulu	7	65	314	-
Kota Pontianak	800	530	637	200

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Disisi lain upaya Pemerintah kota Pontianak mengatasi permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan serta perbaikan sarana-sarana pendukung perumahan. Pendekatan ini sejak tahun 2009 telah berhasil mengurangi kawasan kumuh sampai 64,76% dari awalnya seluas 247,77 ha hingga menjadi 87,29 ha saja di tahun 2012. Upaya lainnya dilakukan dengan cara memberikan bantuan perbaikan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni baik dengan menggunakan dana APBD kota Pontianak, juga melalui pemerintah pusat dan dana pihak ketiga. Dalam kurun waktu 2009-2012 sebanyak 3.958 unit rumah telah mendapatkan bantuan.

Tabel II.89
Rekapitulasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pontianak Menurut Sumber Pendanaan Tahun 2013 - 2015

No	Kelurahan	TA. 2013					TA. 2014					TA. 2015				
		PNPM		'enampin g PAKET M		JUM LAH	PNPM		PERKIM		JUM LAH	PNPM		PERK IM		CSR PT.
		APBN (Unit)	APB D (Unit)	APB N (Unit)	APB N (Unit)		APB D (Unit)	APBN (Unit)	(APBD)	BPPS (Unit)	BSPS APBN-F (Unit)	PAK ET APB N (Unit)	APBD (Unit)	APBN (Unit)	DIAMOND INDOSAT RIA	
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)		(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)	(Unit)
A	PONTIANAK TIMUR	-	-	-	-	-	5	260	-	-	-	0	23	-	-	-
1	Tanjung Hilir	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-
2	Banjar Serasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3	Parit Mayor	-	2	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Saigon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dalam Bugis	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-
6	Tanjung Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tambelan Sampit	-	-	-	-	-	2	228	-	-	-	-	10	-	-	-
	Jumlah	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PONTIANAK KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Jawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Darat Sekip	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mariana	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Bangkong	40	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tengah	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	100	4	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-

No	Kelurahan	TA. 2013					TA. 2014					TA. 2015				
		PNPM		'enampin g PAKET	PERKI M	JUM LAH	PNPM		PERKIM		JUM LAH	PNPM		PERK IM	CSR PT.	JUMLA H
		APBN (Unit)	D (Unit)	(APBD)	N (Unit)		D (Unit)	APBN (Unit)	(APBD)	BPPS (Unit)	BSPS APBN-F (Unit)	PAK ET APB N	APBD (Unit)	APBN (Unit)	DIAMOND INDOSAT RIA	
C	PONTIANAK SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kota Baru	20	1	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Benua Melayu Darat	20	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Akcaya		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Parit Tokaya	20		-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Benua Melayu Laut		1	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	60	4	-	-	-	0	111	-	-	-	0	0	-	-	-
D	PONTIANAK BARAT			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Paal Lima	65	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sungai Jawi Luar		1	-	-	-	14		-	-	-	15	-	-	-	-
3	Sungai Jawi Dalam	153	1	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Belitung		2	-	-	-	10	137	-	-	-	8	-	-	-	-
	Jumlah	218	5	-	-	-	24	137	-	-	-	0	23	-	-	-
E	PONTIANAK UTARA			-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Batulayang		1	-	-	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Siantan Hulu	50	1	-	-	-	7		-	-	-	336	-	-	-	-
3	Siantan Tengah		2	-	-	-		252	-	-	-		3	-	-	-
4	Siantan Hilir		1	-	-	-	3		-	-	-	292	-	-	-	-
	Jumlah	50	5	-	-	-	11	252	-	-	-	628	3	-	-	-
F	PONTIANAK TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bansir Laut	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bansir Darat	24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bangka Belitung Laut	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Belitung Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	72	4	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
	TOTAL	500	26	-	-	-	40	760	-	-	-	588	49	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Untuk mengatasi kekumuhan kawasan juga dilakukan dengan peningkatan/perbaikan jalan-jalan gang/jalan lingkungan melalui kegiatan perbaikan melalui pihak ketiga dan dengan bantuan material jalan lingkungan berupa semen dan batu. Hal positif yang didapat dari pelaksanaan program ini adalah memacu partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Di tahun 2012, tercatat sebanyak 6.436 zak semen dibagikan kepada masyarakat dengan total jalan gang yang diperbaiki sebanyak 232 gang.

Tabel II.90
Bantuan Material Jalan Lingkungan di Kota Pontianak Tahun 2009-2015

No	Tahun	Jumlah Semen (Zak)	Jumlah Batu (m3)	Anggaran Pembiayaan
1	2009	19.145	19	1.447.235.000
2	2010	23.360	0	1.794.366.000
3	2011	49.722	0	4.000.000.000
4	2012	36.231	0	2.932.740.000
5	2013	57.384	480	6.500.000.000
6	2014	33.861	106	3.272.000.000
7	2015	5.980	0	5.000.000.000
Jumlah		183.178		16,705,240,000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Tabel II.91
Kondisi Jalan Lingkungan (Gang) di Kota Pontianak Tahun 2015

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Jalan			
			Baik	%	Rusak	%
PONTIANAK TIMUR						
1	Tanjung Hilir	50	46	92	1	2
2	Banjar Serasan	93	76	81.7	4	4.3
3	Parit Mayor	42	27	64.3	4	9.52
4	Saigon	168	139	82.7	0	0
5	Dalam Bugis	84	71	84.52	2	2.4
6	Tanjung Hulu	127	76	60	27	21.26
7	Tambelan Sampit	29	25	86.2	3	10.34
Jumlah						
PONTIANAK KOTA						
1	Sungai Jawi	424	31647	74.5	47	11
2	Darat Sekip	66	47	71.2	3	4.5
3	Mariana	45	40	88.9	0	0
4	Sungai Bangkong	318	286	89.84	8	2.5
5	Tengah	55	31	56.3	9	16.3
Jumlah						
PONTIANAK SELATAN						
1	Kota Baru	156	107	68.6	8	5.13
2	Benua Melayu Darat	112	106	94.6	0	0
3	Akcaya	149	129	86.6	2	1.34
4	Parit Tokaya	111	73	65.7	5	4.5
5	Benua Melayu Laut	44	34	77.3	1	2.2
Jumlah						

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Jalan			
			Baik	%	Rusak	%
PONTIANAK BARAT						
1	Paal Lima	117	16	13.7	14	12
2	Sungai Jawi Luar	165	76	46	0	0
3	Sungai Jawi Dalam	221	169	76.5	16	7.2
4	Sungai Beliuang	262	103	39.3	18	6.87
Jumlah						
PONTIANAK UTARA						
1	Batulayang	131	74	56.5	4	3
2	Siantan Hulu	166	72	43.4	57	34.3
3	Siantan Tengah	188	105	55.8	1	0.53
4	Siantan Hilir	185	111	60	0	0
Jumlah						
PONTIANAK TENGGARA						
1	Bansir Laut	52	45	86.5	3	5.77
2	Bansir Darat	52	34	65.9	3	5.77
3	Bangka Belitung Laut	127	101	79.5	5	3.9
4	Bangka Belitung Darat	103	79	76.7	0	0
Jumlah						
TOTAL 2015		3842	2614	68.04	198	5.15
TOTAL 2014		3.191	2.277	71,36	914	28,64

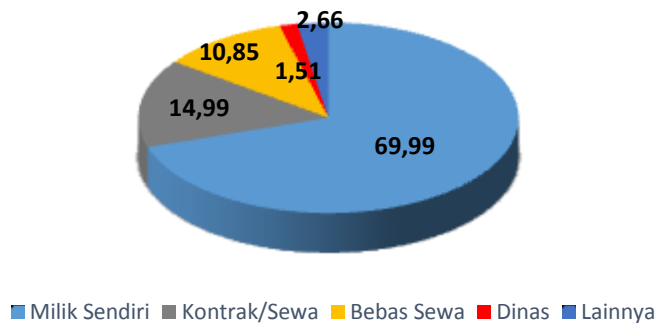
Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Tabel II.71
Perkembangan Bantuan Material Jalan lingkungan di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2015

No	Kecamatan	Realisasi Bantuan													
		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
		1.447.235.000,-		1.794.366.000,-		4.000.000.000,-		2.923.740.000,-		6.500.000.000,-		Rp.3.272.000.000,-		Rp.500.000.000,-	
		Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak	Gang	Zak
1	Pontianak Barat			53	5.025	100	13.230	61	10.730	114	15.815	68	10.111	17	2.190
2	Pontianak Kota	37	3.390	38	4.350	82	11.957	44	8.210	79	10.910	32	6.250	11	720
3	Pontianak Selatan	32	3.130	48	5.040	58	8.375	27	6.080	46	5.715	25	3.485	5	350
4	Pontianak Tenggara	18	1.850	20	2.265	21	3.350	10	1.750	31	3.230	19	2.780	5	400
5	Pontianak Timur	27	2.350	28	2.450	44	5.625	21	3.125	55	7.550	34	3.995	7	625
6	Pontianak Utara	42	3.100	48	4.240	76	8.205	49	6.336	116	14.364	66	7.240	20	1.695
Jumlah		208	18.620	244	23.370	381	49.722	212	36.231	441	67.384	244	33.861	65	5.980

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

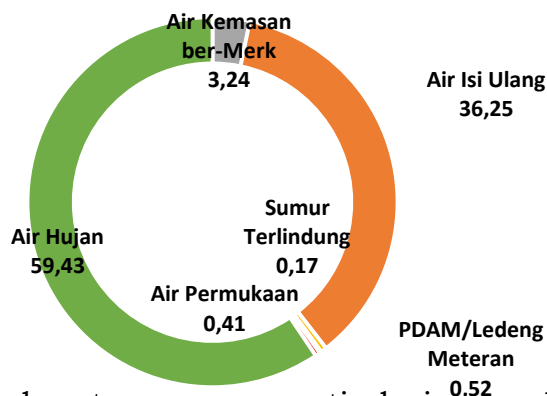
Tahun 2016, ada 69,99 persen rumah tinggal di Kota Pontianak yang merupakan milik sendiri. Sedangkan sisanya 14,99 persen adalah rumah kontrak/sewa, 10,85 persen adalah bebas sewa, 1,51 persen adalah rumah dinas dan lainnya sebesar 2,66 persen.



Grafik II.21
Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kota Pontianak Tahun 2016

Sumber: Statistik Daerah Kota Pontianak 2017. BPS Kota Pontianak, 2017

Sumber air minum utama yang banyak digunakan masyarakat Kota Pontianak adalah Air Hujan dan air isi ulang. Lebih dari 50 persen sumber air minum air hujan yang banyak digunakan masyarakat Kota Pontianak.



Grafik II.22
Persentase Penggunaan Sumber Air Minum di Kota Pontianak Tahun 2016

Tugas berat yang menanti dari penyelenggaraan urusan ini adalah bagaimana memperbaiki sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman yang kondisinya semakin menurun. Perbaikan sektor sanitasi ini meliputi penyediaan air bersih, penyediaan sarana pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi penyediaan air bersih di Kota Pontianak saat ini baru mencapai 74,10%, masih cukup jauh dari target MDGs sebanyak 80% yang harus dipenuhi di tahun 2015. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih ini adalah penyediaan air baku, tingkat kebocoran yang masih tinggi serta keterbatasan biaya investasi untuk pembaharuan jaringan lama dan pemasangan jaringan baru. Kendala lainnya adalah masalah keterbatasan dan kualitas air baku terutama pada musim kemarau

yang mengganggu distribusi dan kontinuitas penyediaan air kepada penduduk.

Perilaku hidup bersih dan sehat dicapai melalui edukasi dan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat. Memberikan pemahaman bahwa lingkungan hidup dan perilaku yang sehat akan sangat berpengaruh kepada kualitas hidup. Memang tidak mudah untuk mengubah perilaku masyarakat dengan cepat akan tetapi apabila dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat memperbaiki perilaku yang tidak baik dari sisi sanitasi.

H. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan diperlukan data dan informasi baik yang sudah berjalan maupun sedang berjalan untuk perencanaan kepemudaan dan keolahragaan ke depan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Kota Pontianak sampai

Tabel II.93
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Pontianak

No.	Kecamatan/Kelurahan	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I	Kecamatan Pontianak Barat	118	118	108	108	108	108
1	Kel. Sei Jawi Dalam	46	46	23	23	23	23
2	Kel. Sei Beliang	33	33	23	23	23	23
3	Kel. Sei Jawi Luar	21	21	41	41	41	41
4	Kel. Pal V	18	18	21	21	21	21
II	Kecamatan Pontianak Kota	69	69	105	105	105	105
1	Kel. Sei Jawi	12	12	23	23	23	23
2	Kel. Mariana	9	9	22	22	22	22
3	Kel. Sei Bangkong	31	31	20	20	20	20
4	Kel. Darat Sekip	4	4	20	20	20	20
5	Kel. Tengah	13	13	20	20	20	20
III	Kecamatan Pontianak Selatan	178	159	159	159	159	159
1	Kel. Parit Tokaya	69	50	50	50	50	50
2	Kel. Bangka Belitung	48	27	27	27	27	27
3	Kel. Benua Melayu Darat	9	30	30	30	30	30
4	Kel. Benua Melayu Laut	0	0	0	0	0	0
5	Kel. Akcaya	25	25	25	25	25	25
6	Kel. Kota Baru	27	27	27	27	27	27
IV	Kecamatan Pontianak Timur	59	59	52	52	52	52
1	Kel. Parit Mayor	8	8	11	11	11	11
2	Kel. Banjar Serasan	5	5	10	10	10	10
3	Kel. Dalam Bugis	8	8	5	5	5	5
4	Kel. Tanjung Hulu	16	16	10	10	10	10
5	Kel. Tanjung Hilir	10	10	5	5	5	5
6	Kel. Saigon	4	4	6	6	6	6
7	Kel. Tambelan Sampit	8	8	5	5	5	5
V	Kecamatan Pontianak Tenggara	83	83	83	83	83	83
1	Kel. Bansir Laut	22	22	22	22	22	22
2	Kel. Bansir Darat	20	20	20	20	20	20
3	Kel. Bangka Belitung Laut	20	20	20	20	20	20
4	Kel. Bangka Belitung Darat	21	21	21	21	21	21
VI	Kecamatan Pontianak Utara	69	69	78	78	78	78
1	Kel. Batu Layang	10	10	20	20	20	20
2	Kel. Siantan Hulu	22	22	14	14	14	14
3	Kel. Siantan Hilir	8	8	24	24	24	24
4	Kel. Siantan Tengah	29	29	20	20	20	20
	Total	576	557	585	585	585	585

tahun 2013 mempunyai 44 organisasi pemuda yang tersebar di 6 kecamatan. Beragam OKP tersebut bergerak sesuai dengan visi, misi dan tujuan didirikannya, ada yang bergerak dibidang politik, ekonomi, pengembangan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Kemunculan OKP tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan justru sebaliknya.

Melalui program peningkatan peran serta kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak mengadakan kerjasama dengan Negara lain seperti Jepang, Korea, Malaysia, Australia dan

Negara lainnya melalui Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN). Pada Tahun 2011 peserta PPAN berjumlah 4 orang terdiri dari 3 orang siswa/siswi SLTA dan 1 orang mahasiswa, tahun 2012 jumlah peserta dari SLTA bertambah menjadi 4 orang dan mahasiswa 1 orang. Tahun 2013 menurun menjadi 3 orang dan semuanya berasal dari siswa/siswi SLTA.

Tahun 2009 sampai tahun 2011 Kota Pontianak belum berhasil mengirim pemuda terbaik untuk kegiatan Kapal Pemuda Nusantara karena gugur (tidak lulus seleksi) pada tingkat provinsi. Baru pada tahun 2012 Kota Pontianak berhasil mengirim peserta untuk kegiatan Kapal Pemuda Nusantara dengan jumlah peserta 4 orang dan diikuti selama 1 bulan. Tahun 2013 untuk kegiatan yang sama Kota Pontianak hanya berhasil sebagai cadangan.

Kegiatan PPAN diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan kedisiplinan di kalangan generasi muda, dan dapat melatih pemuda Indonesia dalam bekerjasama
2. Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan serta mampu bekerjasama dan bersinergi dengan pemuda Negara lain.
3. Belajar, menjalin persahabatan, menambah wawasan dan mengenal lebih banyak budaya Negara lain.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2009, kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan bidang Pemuda dan Olahraga sudah cukup baik. Tercatat bahwa berturut turut dalam rentang waktu tersebut, Kota Pontianak menjadi juara umum dalam perhelatan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROP) serta Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kalbar (POPDA) dengan perolehan jumlah medali yang cukup signifikan meningkat. Disisi lain dalam pembinaan pemuda, even kepemudaan yang dilakukan sudah cukup banyak dan mengikutsertakan hampir merata dari berbagai golongan pemuda, sehingga memberikan hasil yang cukup baik dan memberikan manfaat bagi terciptanya sumber daya pemuda yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan Kota Pontianak.

Tabel II.94
Kinerja Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Pontianak
Tahun 2009-2015

No.	Indikator Kinerja	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemuda berprestasi	-	6	21	18	15	18	18
2	Atlet berprestasi	23	18	16	23	24	25	25
3	Jumlah even kepemudaan	-	-	12	12	12	12	12
4	Jumlah cabor yang dibina	12	13	18	17	23	23	23

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak

I. Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, Kota Pontianak masih memerlukan dukungan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk menjalankan urusan ini, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu bertindak sebagai fasilitator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Pontianak.

Untuk meningkatkan pelayanan yang prima diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kemajuan di Bidang Pelayanan, salah satu upaya tersebut berupa pelayanan satu atap, berupa 8 Jenis Pelayanan Perizinan yakni ijin Siup, Situ/Ho, TDP, IMB, Siau Izin Ops Perhubungan, Siujk Reklame dan Jasa Medik. Selain itu Pemerintah Kota Pontianak juga memberikan keringanan dalam mengurus perijinan, antara lain :

- 1 Tindak lanjut UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kota Pontianak mulai 1 Juni 2011 telah membebaskan semua perizinan dari pembayaran retribusi kecuali 4 jenis izin (IMB, HO, Trayek, Perikanan)
- 2 Tindak lanjut UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Pemerintah Kota Pontianak mulai 1 Juni 2011 telah membebaskan semua perizinan dari pembayaran retribusi kecuali 4 jenis izin (IMB, HO, Trayek, Perikanan)

Untuk melihat perkembangan perizinan di Kota Pontianak telah terdapat jumlah permohonan izin masuk dari tahun 2010-2012 dengan peningkatan rata-rata sebesar 2,01% dan izin yang diterbitkan rata-rata peningkatan sebesar 5,42%, dimana tahun 2010 dengan jumlah izin yang masuk sebesar 11.210 izin namun yang diterbitkan sebanyak 10.670 izin, terjadi peningkatan pada tahun 2011 menjadi 12.700 izin masuk dengan izin yang diterbitkan sebesar 12.015 izin sedangkan tahun 2012 sebanyak 12.015 izin masuk sedangkan yang diterbitkan sebanyak 12.718 izin, dengan jumlah permohonan izin yang paling tinggi yakni permohonan SITU/HO kenaikan yang besar didalam pengurusan izin SITU/HO mengindikasikan usaha mikro, kecil dan menengah tumbuh cukup signifikan.

Tabel II.95
Perkembangan Surat Izin yang Diterbitkan dengan Permohonan
Izin Tahun 2009 – 2015

URAIAN	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT
SIUP	1.500	1.440	2.016	1.931	2.672	2.628	2.672	2.628	1742	1719	1750	1724
SITU	4.000	3.942	4.004	3.666	2.156	2.030	2.156	2.030				
HO					1.725	1.591	1.725	1.591	4243	4016	4542	4354
TDP	1.500	1.168	1.897	1.971	2.182	2.167	2.182	2.167	1785	1771	1975	1923
IMB	1.300	1.382	1.597	1.983	.301	3.277	3.301	3.277	4142	3121	3673	3477
SIAU	100	62							50	54	21	17
Operasional												
Perhubungan	100	59	97	52	52	66	73	74				
SIUJK	163	156	635	606	232	209	232	209	560	560	317	308
Reklame	200	206	150	120	4	9					27	14
Jasa Medik	33	33	35	35								
Izin Rumah Sakit					4	5	4	5	4	7		
Izin Apotek					24	24	24	24	36	33	39	34
Izin Penyelenggara Optikal					2	1	2	1	4	7	7	8
Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah	94	76	94	93								
Perikanan	4	4	8	8	2	6	4	3				
Situ	202	145	200	224	269	301	182	168				
TDI/IUI	120	84	70	63	113	91	113/19	91/20	98	92	100	91
Izin Pembuangan Limbah Cair					8	12	8	12				
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	1.894	1.913	1.897	1.833	269	301	269	301	227	223	197	169
Izin mendirikan bangunan reklame/tower							4	9			27	14
Izin klinik							4	5	3	4	11	10
Izin							2	2	11	10	36	31

URAIAN	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT	IZIN MASUK	IZIN TERBIT
pedagang eceran obat Tanda daftar usaha pariwisata a							261	301				
JUMLAH	11.210	10.670	12.700	12.585	12.015	12.718	13.237	12.918	12.905	11.617	12.695	12.160

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

Pelayanan perijinan yang telah diterbitkan sebagai standar prosedur pelayanan yang lebih baik tidak lepas dari standar waktu yang telah ditentukan sehingga penerbitan surat ijin dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun ketentuan standar waktu pelayanan sebagai berikut :

Tabel II.96
Standar Waktu Pelayanan Perizinan

No.	Jenis Ijin	Lama Waktu Pelayanan (hari)
1	SIUP	1
2	SITU/HO(*)	12
3	TDP	1
4	IMB	14
5	SIUJK	1
6	Perikanan	6
7	SIUAU	5
8	Trayek	8
9	TDG	7
10	TDI/IUI	4
11	Klinik	7
12	Rumah Sakit	10
13	Pedagang Eceran Obat	7
14	Optikal	7
15	Apotek	8
16	TDUP	7
17	Penanaman Modal	1

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

Perkembangan ekonomi di Kota Pontianak tahun 2010-2013 dapat dilihat dari jumlah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kurun empat tahun terakhir perkembangan penanaman modal di Kota Pontianak cukup menggembirakan. perbaikan infrastruktur dan perbaikan pelayanan perijinan memberikan dampak meningkatnya investasi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut

Tabel II.97
Perkembangan Investasi PMDN dan PMA Kota Pontianak Tahun
2009 – 2015 (dalam juta rupiah)

No.	URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Realisasi	2009*	Realisasi	2010*	Realisasi	2011*	Realisasi	2012	realisasi	2013	realisasi	2014
1	Jumlah Investasi PMDN	194.284,60	196.336,60	194.302,99	194.284,60	563.924,34	194.302,99	560.915,34	563.924,34	1.551.231,31	700.999,87	563.924,34	1.081.690.195.079
2	Jumlah investasi PMA	25.112,72	25.091,34	25.112,72	25.112,72	71.951,69	25.112,72	175.921,07	71.951,69	59.502,38	369.556,51	89.758,86	28.288.341.582
TOTAL INVESTASI		219.397,32	221.427,94	219.415,71	219.397,32	635.879,03	219.415,71	647.077,55	635.876,03	1.610.733,69	1.070.536,38	653.683,2	1.109.978.536.661

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

Tabel II.98
Rekapitulasi Rencana, Realisasi Proyek PMDN/PMA Tahun 2009-2015

No	Tahun	PMDN						PMA					
		Rencana			Realisasi			Rencana			Realisasi		
		Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Tenaga Kerja WNI	Asing	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Jumlah Proyek	Investasi (Rp.juta)	Tenaga Kerja WNI	Asing
1	2009	22	1.175.518,71	16	196.336,60	1.221	-	47	373.451,09	11	25.091,34	2.194	39
2	2010	22	1.164.885,27	16	194.284,60	1.215	-	49	375.355,26	11	25.112,72	2.220	39
3	2011	20	639.885,27	14	194.302,99	1.521	-	45	360.355,26	10	25.112,72	2.416	38
4	2012	20	639.649,87	15	568.924,34	921	-	46	375.306,51	12	71.951,69	2.967	35
5	2013	19	708.410,87	13	560.915,34	985	-	43	369.525,26	13	175.921,07	3.263	25
6	2014	12	233.189,95	40	1.666.445,77			17	319.892,61	4	109.320,20		2
7	2015	32	1.281.420,95	17	2.913.035,77	3				2	142.543		

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

Tabel II.99
Kinerja Pelayanan Masyarakat Tahun 2010 – 2015

No	Keterangan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di BP2T	%	75,17	83,11	73,25	74,01	98	
2	Prosentase surat izin yang diterbitkan dengan permohonan izin	%	99,81	99,81	97,50	92,70	98	
3	Prosentase izin yang diterbitkan dengan objek yang harus berizin	%	86,79	97,55	97,50	92,70	98	
4	Tingkat kesesuaian waktu pelayanan dan perizinan dengan ketentuan	%	80,10	85,00	90,00	90,00	97	
5	Prosentase pendapatan retribusi dari target yang ditentukan	%	95,39	97,80	98,07	81,64	98	
6	Peningkatan Nilai Penanaman Modal 500 Juta Keatas	%						97
7	Rata-rata waktu Penyelesaian Proses Pelayanan Perizinan	%						97

Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pontianak

Ket : *) sampai dengan bulan Juni 2015

Sedangkan untuk data kinerja pelayanan perijinan terhadap masyarakat terjadi peningkatan dari tahun 2010-2011, dimana indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 75,17% meningkat menjadi 83,11% dan tahun 2012 sebesar 73,25%, prosentase surat izin yang diterbitkan dengan permohonan izin tahun 2010-2011 dengan nilai yang tetap yakni 99,81% dan tahun 2012 sebesar 97,50%, dan prosentase izin yang diterbitkan dengan objek yang harus berizin sebesar 86,79% meningkat menjadi 97,55% dan tahun 2012 sebesar 97,50% serta prosentase pendapatan retribusi dari target yang ditentukan sebesar 95,39% meningkat menjadi 97,80% tahun 2011 dan meningkat tahun 2012 sebesar 98,07%.

J. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan perekonomian Kota Pontianak tidak terlepas dari peranan koperasi yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian, mengingat lebih mudah pengelolaannya dan usahanya dari anggota untuk anggota sehingga lebih mudah untuk berhubungan. Dengan kenyataan tersebut maka komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk mengembangkan koperasi akan ditingkatkan pada masa mendatang. Berikut kinerja urusan koperasi dan UKM.

Tabel II.100
Data Umum Dan Indikator Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan
Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar						
1	Jumlah pasar tradisional (binaan)	Lokasi	7	8	10	24	17
2	Jumlah pasar modern						
	Jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba	unit	25	25	61	61	63
	Hypermarket	unit	1	1	1	1	1
	Mall / Plaza	unit	4	4	4	4	4
	Gerai/outlet alfamart & Indomaret	unit	21	46	82	158	166
3	Penurunan jenis barang yang tidak layak edar	Jenis	10	11	12	12	12
4	Nilai Eksport Total	juta Rp	893.493	406.478	897.846	897.846	1.510.203.237
5	Nilai Import Total	juta Rp	404457	1.138.225	915.841	915.841	463.068.912
	Bidang Perindustrian						
1	Jumlah Industri RT, Kecil, Menengah	unit	1228	1328	1365	1390	1421
2	Jumlah Industri	unit	1237	1337	1375	1401	1432
3	Prosentase Industri Tangga, Kecil, Menengah yang dibina	%	49,84	18,37	11,43	20,43	15,83
4	Klasifikasi usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	%	99,27	99,33	99,27	99,21	99,23
5	Pertumbuhan industri	%	16,48	8,08	2,84	1,89	2,21
	Bidang Koperasi dan UKM						
1	Peningkatan jumlah koperasi	Koperasi	799	809	814	816	818
2	Pertambahan usaha koperasi	%	0,25	1,25	0,62	0,25	0,25
3	Jumlah Koperasi aktif	unit	479	489	494	496	498
4	Jumlah UMKM	unit	6175	6196	7812	7812	30198
5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	unit	5497	5998	6977	6977	27454
6	Prosentase koperasi yang aktif	%	59,95	60,44	94,27	95,94	95,95
7	Prosentase Peningkatan jumlah anggota koperasi terhadap jumlah penduduk	%	6,85	6,66	9,38	9,38	

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
8	Peningkatan modal koperasi	%	11,13	-9,98	-	-	0
9	Meningkatnya jumlah badan usaha koperasi yang timbul dari lembaga pra koperasi	Koperasi	5	1	0	2	2
10	Meningkatnya jumlah pengelola koperasi	Orang	2819	2849	2803	3465	
11	Jumlah Koperasi yang diusulkan pembubaran oleh Pemerintah	Unit			311	299	296
12	Jumlah Usaha mikro	unit			5106	5553	5779

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Tabel II.101
Jumlah UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	JENIS	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah UMKM	Unit	6,175	6,196	7,812	8011	8584
1	- Pontianak Barat	Unit	683	689	1096	1129	1255
2	- Pontianak Selatan	Unit	1373	1378	1581	1614	2838
3	- Pontianak Utara	Unit	283	293	562	605	1713
4	- Pontianak Timur	Unit	767	767	1068	1102	907
5	- Pontianak Kota	Unit	2481	2481	2717	2752	1203
6	- Pontianak Tenggara	Unit	588	588	788	809	668

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomirakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, mempunyai prinsip modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK).

Di Kota Pontianak ada 25 (dua puluh lima) jenis koperasi. Dari kedua puluh lima jenis koperasi itu, jenis koperasi yang paling banyak adalah koperasi konsumsi atau koperasi serba usaha (KSU) yaitu sebanyak 453 koperasi. Kedua puluh lima jenis koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA) – 3 koperasi.
2. Koperasi Konsumsi /Koperasi Serba Usaha (KSU) – 453 koperasi.
3. Koperasi Pegawai Telkom (Koppegtel) – 1 koperasi
4. Koperasi Jasa – 16 koperasi
5. Koperasi Simpan Pinjam/Kredit – 19 koperasi
6. Koperasi Unit Desa (KUD) – 2 koperasi
7. Koperasi Pasar (KOPPAS) – 8 koperasi
8. Koperasi Pedagang Kaki Lima – 3 koperasi
9. Koperasi Karyawan (KOPKAR) – 66 koperasi
10. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) – 91 koperasi
11. Koperasi Wanita (KOPWAN) – 10 koperasi
12. Primkopad – 14 koperasi
13. Primkopol /airud – 4 koperasi
14. Primkopal – 1 koperasi
15. Koppontren – 19 koperasi
16. Koperasi Pensiunan / wredatama – 6 koperasi
17. Koperasi Angkutan Darat/Laut/Sungai – 7 koperasi
18. Koperasi Peternakan – 2 koperasi
19. Koperasi Mahasiswa – 5 koperasi
20. Kopti (Koperasi Tahu Tempe) – 2 koperasi
21. Koperasi Kehutanan – 1 koperasi
22. Koperasi Perikanan – 1 koperasi
23. Koperasi Tani (Koptan) – 1 koperasi
24. Kopermas – 8 koperasi
25. Koperasi lainnya – 75 koperasi

Total jumlah koperasi yang ada di Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah berjumlah 818 koperasi. Jika dilihat berdasarkan lokasi koperasinya, Kecamatan Pontianak Kota memiliki paling banyak koperasi dengan jumlah 270 atau sebesar 33,01%, dilanjutkan dengan Kecamatan Pontianak Selatan dengan jumlah 226 atau sebesar 27,63%, selanjutnya Kecamatan Pontianak Barat

dengan jumlah 139 atau sebesar 16,99%, kemudian Kecamatan Pontianak Utara 80 koperasi atau sebanyak 9,78%, Pontianak Timur 58 koperasi atau 7,09% dan terakhir Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah koperasi 45 atau sebesar 5,50%.

Dari 818 koperasi tersebut, koperasi yang aktif berjumlah 498 atau hanya 60,88%, koperasi aktif terbanyak terletak di Kecamatan Pontianak Kota yaitu sebanyak 270 sedangkan jumlah koperasi tidak aktif berjumlah 320 atau hanya 39,12% dari jumlah koperasi yang ada, koperasi tidak aktif terbanyak terletak di Kecamatan Pontianak Kota yaitu sebanyak 107.

Tabel II.102
Jumlah Koperasi Kota Pontianak Tahun 2014-2018

NO	KECAMATAN	JENIS	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah koperasi	Unit	799	809	814	816	818
1	Pontianak Barat	Unit	134	141	141	139	139
2	Pontianak Selatan	Unit	228	180	182	226	226
3	Pontianak Utara	Unit	75	76	77	79	80
4	Pontianak Timur	Unit	53	57	58	57	58
5	Pontianak Kota	Unit	271	270	271	270	270
6	Pontianak Tenggara	Unit	38	85	85	45	45

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Tabel II.103
Jumlah Koperasi Aktif Kota Pontianak Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS	Jumlah
	Jumlah koperasi	Unit	498
1	Pontianak Barat	Unit	82
2	Pontianak Selatan	Unit	133
3	Pontianak Utara	Unit	48
4	Pontianak Timur	Unit	32
5	Pontianak Kota	Unit	163
6	Pontianak Tenggara	Unit	40

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Tabel II.104
Jumlah Koperasi Tidak Aktif Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS	Jumlah
	Jumlah koperasi	Unit	320
1	Pontianak Barat	Unit	57
2	Pontianak Selatan	Unit	93
3	Pontianak Utara	Unit	32
4	Pontianak Timur	Unit	26
5	Pontianak Kota	Unit	107
6	Pontianak Tenggara	Unit	5

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pengembangan usaha kecil dan menengah dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan latihan keterampilan yang sifatnya teknis serta pendidikan mengenai manajemen usaha, efektifitas proses produksi sampai dengan pengemasan produk. Hambatan yang dihadapi UKM adalah akses modal yang terbatas serta pemasaran produk. Untuk itu perlu dilakukan inovasi dan penguatan peran pemerintah daerah untuk mencari peluang akses pasar tidak hanya di dalam negeri akan tetapi juga meliputi pangsa pasar ekspor, tentunya dengan disertai peningkatan kualitas produk yang mumpuni.

K. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kota Pontianak pada 7 (tujuh) tahun terakhir 2009-2015 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan KK (Kartu

Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KIPEM (Kartu Penduduk Musiman) sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendapatan penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui kepemilikan KTP, KK dan KIPEM.

Tabel II.105
Jumlah Penerbitan KTP, KK dan KIPEM di Kota Pontianak
Tahun 2010-2016

No	Uraian	2010	2011	2012	2013 *	2014	2015	2016
1	KTP/e-KTP	73.405	62.448	55.619	335.340	-	387.887	-
2	KK	58.996	53.178	50.221	20.060	-	177.400	-
3	KIPEM	1.651	1.757	1.198	759	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Ket : * data KTP/e-KTP sampai bulan September, KK sampai bulan Juli, KIPEM sampai bulan Agustus 2013

Pada tahun 2011 dimulainya pelaksanaan program e-KTP, mulai dari sosialisasi sampai dengan pelayanan penerapan e-KTP. Terdapat peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2010 hingga 2016, jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 601.715 jiwa meningkat menjadi 626.819 pada tahun 2011, tahun 2012 kembali bertambah menjadi 660.261 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 645.622 jiwa yang terdiri dari laki-laki 326.750 jiwa atau 50,61% dan perempuan 318.872 jiwa atau 49,39%. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2009 jumlah penduduk Kota Pontianak sebanyak 628.312 jiwa dengan laki-laki 319.666 jiwa atau 50,88% dan perempuan 308.646 jiwa atau 49,12%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebesar 145.255 jiwa atau 22,49% dengan luas wilayah 37.22 km² dan jumlah penduduk paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu sebesar 47.086 jiwa atau 7,29% dengan luas wilayah 14.83 km². (data setelah konsolidasi oleh Kemendagri).

Perkembangan penerbitan KTP dari tahun 2010-2013 mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,91%, namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 335.340 KTP. Penerbitan KK juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 8,41%, dan penerbitan KIPEM terjadi penurunan menurun pada tahun 2012 dibanding tahun 2010 dan 2011 sebesar 13%.

Komulasi perekaman e-KTP secara Mobile di SMA dan di Kelurahan sebanyak 4.256 WK. Total perekaman adalah 354.343 atau 94,50%

dari jumlah alokasi e-KTP yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebanyak 374.935 WK. Penerimaan e-KTP yang sudah jadi dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 337.717 keping atau 95,31% WK, sedangkan penyerahan kepada penduduk mulai dilaksanakan hari Senin, 25 Juni 2012 dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tempat, peralatan dan petugas operator yang tersedia. Jumlah e-KTP yang telah didistribusikan sampai tahun 2013 sebanyak 335.706 keping atau 95,92%. Selanjutnya untuk masyarakat yang telah melaksanakan e-KTP telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 316.645 orang atau sebanyak 84,45% dari target wajib e-KTP berjumlah 455.109 orang.

Tabel II.106
Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2015-2018

PENDUDUK			
TAHUN	JUMLAH	LAKI-LAKI	perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	607,438	302,711	304,727
2016	618,388	308,596	309,792
2017	627.021	312.178	314.843
2018			

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dan dalam kurun waktu 10 tahun, pada tahun 2000, meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 7,7 persen. Dalam 1 dekade kemudian yaitu pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pontianak menjadi 554.764 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,42 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 1.2. Dalam tabel terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak meningkat dari 586.243 jiwa pada tahun 2013 menjadi 627.021 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 6,5 persen. Penduduk laki-laki meningkat dari 293.744 jiwa pada tahun 2013 menjadi 312.178 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 5,9 persen. Sementara itu, penduduk perempuan meningkat dari 292.499 jiwa

pada tahun 2013 menjadi 314.843 jiwa pada tahun 2017, meningkat sebesar 7,1 persen. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak disamping disebabkan oleh kelahiran, tentu juga dibabkan oleh migrasi yang dalam hal ini urbanisasi.

Dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah, maka Kecamatan Pontianak Barat merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 138.715 jiwa atau sekitar 22,12 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Kemudian jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu sebanyak 126.385 jiwa atau

sekitar 20,16 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 50.737 jiwa atau sekitar 8,09 persen dari total penduduk Kota Pontianak.

Tabel II.107
Jumlah, Persentase dan Sex Rasio Penduduk Kota Pontianak
Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk (orang)				Rasio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pontianak Selatan	46.792	47.457	94.249	15,03	98,60
Pontianak	24.736	26.001	50.737	8,09	95,13
Pontianak Timur	46.703	46.409	93.112	14,85	100,63
Pontianak Barat	69.348	69.367	138.715	22,12	99,97
Pontianak Kota	61.390	62.433	123.823	19,75	98,33
Pontianak Utara	63.935	62.450	126.385	20,16	102,38
Kota Pontianak	312.904	314.117	627.021	100	99,61

Sumber: BPS Kota Pontianak

Sex ratio penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2017 adalah 99,61 persen atau jika dibulatkan menjadi 100. Arti dari angka tersebut adalah terdapat 100 perempuan dari 100 laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pontianak relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sex ratio penduduk tiap kecamatan juga menunjukkan hal yang tidak berbeda, dapat dikatakan

bahwa jumlah penduduk laki-laki relatif berimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Walaupun demikian, jika dilihat lebih rinci, maka Kecamatan Pontianak Tenggara adalah kecamatan yang perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan terkecil yaitu 95,13 persen. Sementara itu, kecamatan yang sex rasionya paling besar adalah Kecamatan Pontianak Utara, yaitu 102,38 persen.

Kepadatan penduduk Kota Pontianak tahun 2017 adalah 5.816 jiwa per Km², jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kepadatan penduduk sekitar 5.736 jiwa per Km², seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan luas wilayah yang tetap maka terjadi

peningkatan kepadatan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pontianak relatif tidak merata. Dilihat dari kepadatan menurut kecamatan, Kecamatan Pontianak Timur merupakan kecamatan paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya dan Kecamatan Pontianak Utara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah. Dengan luas wilayah 8,78 km², Kecamatan Pontianak Timur dihuni oleh 93.112 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.459 jiwa tiap km²-nya. Sedangkan Kecamatan Pontianak Utara, dengan luas wilayah 37,22 km², dihuni oleh 126.385 jiwa, sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.349 jiwa tiap km²-nya.

Sementara itu kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan lain dapat dilihat pada tabel 1.4, yaitu, Kecamatan Pontianak Barat (8.306 jiwa/km²), Kecamatan Pontianak Kota (7.642 jiwa/km²), Kecamatan Pontianak Selatan (6.139 jiwa/km²).

Tabel II.108
Kepadatan Penduduk Kota Pontianak
Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan
	Km2	%	Jumlah	%	Penduduk (orang/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pontianak Selatan	15,14	14,04	94.249	15,03	6.139
Pontianak Tenggara	14,22	13,19	50.737	8,09	3.519
Pontianak Timur	8,78	8,14	93.112	14,85	10.459
Pontianak Barat	16,47	15,28	138.715	22,12	8.306
Pontianak Kota	15,98	14,82	123.823	19,75	7.642
Pontianak Utara	37,22	34,52	126.385	20,16	3.349
Kota Pontianak	107,81	100	627.021	100	5.816

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Tabel II.109
Pelaksanaan Elektronik KTP (e-KTP) di Kota Pontianak

Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Target E-KTP	Realisasi E-KTP	% E-KTP
Pontianak Barat	99.768	82.192	79.548	96,78
Pontianak Selatan	71.477	58.885	53.513	90,88
Pontianak Kota	88.380	72.811	70.068	96,23
Pontianak Timur	61.009	50.261	50.390	100,26
Pontianak Utara	101.844	83.903	69.824	83,51
Pontianak Tenggara	32.631	26.883	26.453	98,40
Jumlah	455.109	374.935	349.796	93,30

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Tabel II.110
Perkembangan Penerbitan Akta Catatan Sipil di Kota Pontianak Tahun 2010-2016

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
1	Akta Kelahiran	39.737	34.172	11.653	18.861	15.219	14.379	8.123
2	Akta Kematian	1.065	1.219	1.156	1.246	1.722	2.553	1.703
3	Akta Perkawinan	1.358	1.285	1.302	1.337	1.542	1.352	569
4	Akta Perceraian	35	49	63	45	52	62	30
	Jumlah	42.195	36.725	14.174	21.489	18.535	18.346	10.425

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, *) sampai dengan Bulan Juni 2016

Tahun 2011 pelayanan akta kelahiran menurun sebesar 14% dibandingkan tahun 2010, tahun 2012 penurunannya lebih signifikan yaitu sebesar 65,90%. Pada tahun 2012 ada penambahan syarat dalam pembuatan akta kelahiran berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini bisa menjadi penyebab menurunnya antusias masyarakat dalam membuat akta kelahiran. Pada tahun 2013 penambahan syarat tersebut tidak diberlakukan kembali, hal ini berdampak pada kenaikan jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun 2013 sebesar 61,86%. Pelayanan akta kelahiran langsung jadi juga dilakukan di Kelurahan-Kelurahan dengan maksud untuk mempermudah masyarakat yang ingin memiliki akta kelahiran. Mekanisme “jemput bola” juga dilakukan melalui kerjasama pelayanan akta kelahiran dengan 9 rumah sakit dan rumah sakit bersalin, 26 Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan 1 puskesmas. Penerbitan Akta Kematian pada tahun 2011 meningkat sebesar 14,46% dari tahun 2010, tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 5,17% dari tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 7,79%. Perkembangan penerbitan akta catatan sipil yang lainnya seperti pengesahan anak, pengakuan anak, akta hilang, adopsi dan lain-lain, dari Tahun 2010–2013 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen akta catatan sipil untuk membuktikan status hukum seseorang atau warga masyarakat semakin tinggi.

L. Urusan Ketenagakerjaan

Salah satu Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), prosentase kesempatan kerja, prosentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan dibidang tenaga kerja

selama periode tahun 2009 - 2013 telah melaksanakan program kerja yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Perlindungan Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perlindungan dan Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan.

Melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja pada tahun 2011 diberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja kecantikan/rambut yang ditujukan kepada anak putus sekolah dan pencari kerja usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan, sehingga setelah dibina dan dilatih dapat mencari pekerjaan ataupun membuka usaha sendiri berupa keterampilan merias wajah dan rambut.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memfasilitasi Dewan Pengupahan Kota Pontianak untuk membahas upah minimum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan besaran nilai upah. Pada tahun 2009 standar UMK hanya sebesar Rp.785.000,- dan meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp.845.000,- meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.895.000,- dan meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp.995.000,- dan meningkat lagi untuk tahun 2013 menjadi Rp.1.165.000,-. Untuk menekan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyebarkan brosur serta pamflet kepada pekerja maupun pengusaha serta mekanisme pengaduan kepada Dinsosnaker jika terjadi pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh pekerja maupun oleh pengusaha.

Tabel II.111
Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Pontianak

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	2,63	3,92	3,10
Tidak/Belum Tamat SD	9,07	7,69	8,56
SD	17,43	9,04	14,37
SMP/TSANAWIYAH	15,36	14,83	15,17
SMP KEJURUAN	0,81	0,00	0,52
Paket B	0,00	0,38	0,14
SMA/ALIIYAH	27,56	22,31	25,65
SMK	9,32	12,56	10,50
Paket C	0,73	0,00	0,46
Program Diploma I/II	0,98	2,43	1,51
Program Diploma III	2,40	7,59	4,29
Program D.IV/S1	12,16	18,10	14,33
Program S.2/S3	1,54	1,16	1,40
J u m l a h	100,00	100,00	100,00

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Apabila ditinjau dari latar belakang pendidikan dari tenaga kerja yang bekerja, terlihat bahwa proporsi terbesar adalah tamatan SMA/ sederajat ke bawah (78,47%), hanya sebagian kecil saja (21,53%) yang merupakan tamatan DI sampai S2/S3. Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian bersama, karena untuk dapat bersaing dalam kompetisi pasar tenaga kerja kedepan dalam kerangka pasar bebas, tenaga kerja kita harus berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas tentu saja yang memiliki tingkat pendidikan yang ideal didukung keterampilan teknis handal.

Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2015 sebanyak 607.438 jiwa, dimana 61,89 persen nya adalah Angkatan Kerja. Yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 adalah 278.764 jiwa atau sebesar 61,89 persen dari penduduk usia kerja, dengan kata lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pontianak pada tahun 2015 adalah sebesar 61,89 persen. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 172.160 jiwa (61,75 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 106.604 jiwa (38,24 persen), hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Pontianak relatif didominasi oleh pekerja laki-laki.

Tabel II.112
Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Menurut Jenis Kegiatan
Utama di Kota Pontianak Tahun 2015

Jenis Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	172.160	106.604	278.764
2.4.1.1 Bekerja	152.652	99.787	252.439
2.4.1.2 Pengangguran	19508	6.817	26.325
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan Lainnya)	50.541	121.087	171.628
Jumlah	22.701	227.691	450.92
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,31	46,82	61,89
Tingkat Pengangguran	11,33	6,39	9,44

Sumber: Sakernas 2015. Kota Pontianak Dalam Angka. 2017

Tabel II.113
Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja menurut
Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pontianak
Tahun 2015

Jenis lapangan Usaha Utama	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	8.045	1.736	463,42
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0,00
Industri	18.719	10.018	186,85
Listrik, Gas dan Air Minum	1.950	625	312,00
Konstruksi	18.345	831	2.207,58
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	44.707	45.298	98,70
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	16.385	2.658	616,44
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	10.180	5.237	194,39
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	34.321	33.384	102,81
Jumlah	152.652	99.787	152,98

Sumber: Statistik Daerah Kota Pontianak 2017. BPS Kota Pontianak. 2017

M. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian. Ketahanan pangan dapat terjadi apabila ditunjang oleh pengembangan pertanian yang baik. Peningkatan hasil pertanian di Kota Pontianak tidak terlepas dengan kerja keras petani dalam mengelola sawah maupun tanaman sayuran dan buah-buahan yang dimilikinya, dalam mengembangkan hasil tani para petani membentuk kelompok tani seKota Pontianak dengan jumlah 97 kelompok tani pada tahun 2010 dan bertambah menjadi 26 kelompok tani pada tahun 2011 sehingga jumlah kelompok tani menjadi 123 kelompok tani, dimana kelompok tani terbanyak pada kecamatan pontianak utara yakni sebanyak 42 kelompok tani dan bertambah pada tahun 2012 menjadi 64 kelompok tani hal ini disebabkan lahan pertanian terluas berada di Kecamatan Pontianak Utara.

Dengan dibentuknya kelompok tani dan bertambahnya kelompok tani SeKota Pontianak, maka bertambah pula petani yang ada, dimana jumlah petani pada tahun 2010 sebanyak 1.566 orang dan bertambah

pada tahun 2011 menjadi 1.825 orang terjadi peningkatan rata-rata 14,19%, dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan juni bertambah kembali menjadi 1.992 orang, semakin bertambah jumlah petani di Kota Pontianak diharapkan dapat menambah hasil pertanian yang berguna untuk kebutuhan masyarakat Kota Pontianak khususnya.

Tabel II.114
Jumlah Kelompok Tani di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2016

No.	Kecamatan	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pontianak Barat	kelompok	9	11	20	20	25	31	31
2	Pontianak Kota	kelompok	8	10	16	18	22	24	24
3	Pontianak Selatan	kelompok	10	15	22	22	26	23	28
4	Pontianak Tenggara	kelompok	8	20	30	30	31	34	36
5	Pontianak Timur	kelompok	23	25	42	43	54	56	64
6	Pontianak Utara	kelompok	39	42	64	67	68	76	82

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak

Tabel II.115
Jumlah Petani di Kota Pontianak Tahun 2010 - 2016

No.	Kecamatan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pontianak Barat	213	250	374	384	434	569	620
2	Pontianak Kota	132	145	201	240	282	304	304
3	Pontianak Selatan	186	235	317	322	397	334	439
4	Pontianak Tenggara	123	300	316	318	328	370	390
5	Pontianak Timur	113	191	516	526	646	657	777
6	Pontianak Utara	799	871	994	1.061	1.043	1.028	1.336

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak

Tabel II.116
Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Usahanya di Kota Pontianak
Tahun 2010 - 2016

No.	Kecamatan	Jenis Usaha	satuan	Tahun						
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pontianak Barat	Pertanian	orang	93	103	121	121	131	260	311
		Peternakan	orang	46	56	115	115	115	121	121
		Perikanan	orang	74	91	138	138	188	188	188
2	Pontianak Kota	Pertanian	orang	83	96	135	164	164	173	173
		Peternakan	orang	11	11	14	14	24	24	24
		Perikanan	orang	38	38	52	62	94	107	107
3	Pontianak Selatan	Pertanian	orang	128	128	199	199	229	221	306
		Peternakan	orang	35	25	13	13	13	13	13
		Perikanan	orang	23	82	105	110	155	100	120
4	Pontianak Tenggara	Pertanian	orang	52	120	136	138	138	151	151
		Peternakan	orang	53	30	30	30	30	30	30
		Perikanan	orang	18	150	150	150	160	189	209
5	Pontianak Timur	Pertanian	orang	55	65	173	178	208	185	185
		Peternakan	orang	26	26	10	15	15	15	15
		Perikanan	orang	100	100	333	333	423	457	577
6	Pontianak Utara	Pertanian	orang	648	698	716	766	700	795	883
		Peternakan	orang	119	119	185	194	194	237	257
		Perikanan	orang	32	54	93	101	149	176	196

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pontianak

Sedangkan jumlah petani terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah sebanyak 799 orang pada tahun 2010 dan bertambah pada tahun 2011 menjadi 786 orang. Adapun rincian petani berdasarkan jenis usahanya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdiri dari pertanian, peternakan dan perikanan dengan didominasi jumlah pertanian tahun 2010 berjumlah 1.059 orang petani, tahun 2011 berjumlah 1.210 orang petani dan meningkat kembali menjadi 1.480 orang petani menjadi 2012. Adapun peningkatan rata jumlah pertanian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 10,24%, peternakan meningkat rata-rata sebesar 6,21% kemudian perikanan meningkat rata-rata 28,51%.

Perkembangan jumlah stok beras di Kota Pontianak terjadi peningkatan di tahun 2011 sebanyak 75,454 ton dan meningkat sebanyak 2.239 ton menjadi 77.693 ton. Mengingat beras merupakan kebutuhan pangan paling pokok bagi masyarakat Kota Pontianak, kecukupan ketersediaannya harus selalu dipastikan. Untuk pasokan pangan, terutama beras ini, Pontianak sangat tergantung dengan hasil produksi dari wilayah hinterlandnya serta kriman pasokan dari luar pulau khususnya Jawa. Untuk melihat perkembangan harga bahan kebutuhan pokok utama di Kota Pontianak tahun 2011 sampai dengan bulan juni 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.117
Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama
di Kota Pontianak Tahun 2011-2016

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Beras	Rp/kg	8.700	10.181	10.500	10.889	11.692	11.143
2	Gula	Rp/kg	10.000	11.906	13.390	11.567	11.545	12.169
3	Minyak goreng	Rp/kg	11.000	10.046	11.593	11.647	11.843	11.556
4	Daging sapi	Rp/kg	72.375	89.906	110.000	114.851	115.889	110.106
	Daging ayam	Rp/kg	24.625	24.687	24.375	24.923	25.962	28.126
5	Telur	Rp/btr	1.031	1.116	1.237	1.317	1.340	1.445
6	Jagung	Rp/kg	5.037	6.333	6.218	6.253	6.198	6.345

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pontianak

Perkembangan jumlah stok beras di Kota Pontianak terjadi peningkatan di tahun 2011 sebanyak 75,454 ton dan meningkat sebanyak 2.239 ton menjadi 77.693 ton. Mengingat beras merupakan kebutuhan pangan paling pokok bagi masyarakat Kota Pontianak, kecukupan ketersediaannya harus selalu dipastikan. Untuk pasokan pangan, terutama beras ini, Pontianak sangat tergantung dengan hasil produksi dari wilayah hinterlandnya serta kriman pasokan dari luar pulau khususnya Jawa.

N. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dengan fokus pada peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan area bermain yang aman dan nyaman serta penguatan lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan berupa penanganan kasus anak dan perempuan sebanyak 7 kasus terdiri trafikking, KDRT, terlantar, pencabulan, pencurian, penipuan dan perkosaan, dimana pada tahun 2011 banyaknya kasus berjumlah 52 kasus dan tahun 2012 dan 2013 sebanyak 35 kasus dan 24 kasus. Sedangkan untuk kasus anak pada tahun 2011 sebanyak 37 kasus, menurun pada tahun 2012 menjadi 26 kasus dan pada tahun 2013 menurun kembali menjadi 19 kasus, serta untuk penanganan kasus perempuan pada tahun 2011 sebanyak 15 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 9 kasus serta tahun 2013 menjadi 5 kasus. Upaya yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan kasus tersebut memberikan penyuluhan dan pelayanan terhadap mereka yang mendapatkan kasus sehingga dapat ditempatkan di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak sampai permasalahannya selesai.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender. Pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan INPRES No.9 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pengarusutamaan gender di Kota Pontianak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Tabel II.118
Perbandingan IPM dan IPG Kota Pontianak dengan Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		Indeks Pembangunan Gender			Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Sumbangan Pendapatan	
	2011	2012	2011	2012	2013*	(Tahun)		(%)		(Tahun)		(%)	
						L	P	L	P	L	P	L	P
Kalimantan Barat	69,66	70,31	64,78	65,62	66,33	64.85	68.77	94.66	87.9	7.58	6.63	65.98	34.95
Kota Singkawang	69,21	69,77	59,54	60,05	60,82	65.41	69.36	93.9	86.86	7.89	7.38	73.33	26.67
Kota Pontianak	73.43	74.21	67.46	68.39	69,05	65.48	69.43	98.55	94.25	10.22	9.47	67.01	32.99

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum masih terjadi kesenjangan gender di Kota Pontianak karena nilai IPG lebih kecil dari nilai IPM. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kota lain di Kalbar serta Provinsi Kalbar, angka IPG kota Pontianak jauh lebih tinggi, artinya kesenjangan gender relatif lebih baik kondisinya di kedua wilayah tersebut.

Disisi lain Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Berdasarkan data di bawah, terlihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Pontianak tahun 2012 membaik kondisinya bila dibandingkan tahun 2011. Kondisi di Kota Pontianak ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi di Kalimantan Barat pada umumnya serta di kota Singkawang.

Tabel II.119
Perkembangan IPG Kota Pontianak dan
Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender			Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Pendapatan Kerja
	2011	2012	2013 *)	(%)	(%)	(%)
Kalimantan Barat	56,39	59,34	60,69	7.27	45.37	34.02
Kota Singkawang	53,34	54,19	54,55	8.00	47.14	26.67
Kota Pontianak	64,4	64,95	69,28	13.33	52.89	32.99

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

O. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Tabel II.120
Jumlah Peserta KB Baru dan KB Aktif di Kota Pontianak
Tahun 2009-2016

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Peserta KB Baru	14.432	13.807	16.401	20.595	23.123	16,583	12,549	6.345
2	Peserta KB Aktif	57.510	58.395	59.066	60.861	62.879	64,021	65,709	66.445

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan KB Kota Pontianak

Sasarannya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan indikator peningkatan peserta KB baru, peserta KB pria, pengetahuan masyarakat tentang KB serta penurunan kasus yang terjadi pada peserta KB. Perkembangan pelaksanaan Keluarga Berencana di Kota Pontianak, jumlah peserta KB baru dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11%, pencapaian jumlah peserta KB baru komulatif sampai tahun 2013 sebesar 23.123 akseptor atau 160,34% dari PPM sebesar 14.421 sedangkan pencapaian pada

bulan Desember 2013 sebesar 1.586 akseptor atau 10,99% dari PPM sebesar 14.421 yang terdiri dari MKJP sebesar 344 akseptor atau 14,71% dari PPM sebesar 2.339 dan non MKJP sebesar 1.242 akseptor atau 10,28% dari PPM sebesar 12.082. Sedangkan untuk peserta KB aktif dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2%, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merencanakan jumlah keluarga semakin meningkat. Pencapaian jumlah peserta KB aktif sampai tahun 2013 sebesar 62.879 akseptor atau 69,26% dari PUS lapangan sebesar 90.785, yang terdiri dari MKJP sebesar 17.984 akseptor atau 28,60% dari peserta KB aktif dan non MKJP sebesar 44.895 akseptor atau 71,40% dari peserta KB aktif.

Tabel II.121
Perkembangan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Pontianak
Tahun 2009-2016

No.	Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pontianak Utara	17,100	17,786	17,473	17,934	18,676	19,101	19,450	19.578
2	Pontianak Selatan	14,510	14,617	14,514	14,711	14,971	15,078	15,173	15.201
3	Pontianak Timur	12,718	13,150	13,505	14,077	14,675	14,839	15,555	15.617
4	Pontianak Barat	17,458	17,790	18,000	18,487	19,163	19,810	20,767	21.225
5	Pontianak Kota	15,494	15,672	15,829	15,975	16,237	16,392	16,513	16.785
6	Pontianak Tenggara	6,475	6,430	6,619	6,813	7,063	7,146	7,195	7.235
Kota Pontianak		83,755	85,445	85,940	87,997	90,785	92,366	94,653	95.637

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan KB Kota Pontianak

Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan untuk “Peserta KB aktif dengan prosentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang terbanyak di Kalimantan Barat tahun 2013 dari Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan program KB akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kegagalan KB akan berakibat pada ledakan jumlah penduduk dan menimbulkan masalah sosial karena keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan pangan, dan sebagainya. Sehingga, jumlah pengangguran akan meningkat, jumlah kemiskinan bertambah, dan seterusnya.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2%. Jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (MKJP) (pil, suntik, kondom) meningkat dari 39.607 peserta pada tahun

2009 menjadi 44.895 peserta pada tahun 2013 dan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (non MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant dari 17.903 peserta pada tahun 2009 menjadi 17.984 pada tahun 2013. Perkembangan penggunaan alat kontrasepsi di Kota Pontianak secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2 %. Jika dilihat dari jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah jenis IUD, Suntikan dan Pil, hal ini disebabkan adanya kemudahan masyarakat dalam menggunakannya.

Tabel II.122
Perkembangan Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kota Pontianak
Tahun 2009-2015

No.	Jenis Kontrasepsi	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	IUD	14,844	14,890	14,800	14,800	14,487	121.401	14,371	14.484
2	MOP	356	385	383	516	525	535	615	611
3	MOW	1,628	1,635	1,636	1,701	1,761	1.816	1,903	1.948
4	Kondom	685	835	980	1,321	1,413	1.666	1,729	1.791
5	Suntikan	19,450	19,770	20,150	20,882	21,958	22.363	23,206	23.670
6	Pil	19,472	19,680	19,896	20,387	21,524	21.994	22,644	22.718
7	Implant	1,075	1,200	1,221	1,254	1,211	1.246	1,241	1.223
Jumlah		57,510	58,395	59,066	60,861	62,879	64,021	65,709	66.445

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan KB Kota Pontianak

Masalah yang kita hadapi saat ini masih ada keluarga yang berada dalam kondisi prasejahtera, adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mereka sehingga mencapai keluarga sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan keluarga dari berbagai aspek kehidupan termasuk segi kesehatannya.

Tabel II.123
Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kota Pontianak
Tahun 2009-2014

No.	Tingkatan Tahapan KS	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Pra KS	1,316	925	445	186
2	KS I	19,883	17,543	17,707	18.452
3	KS II	56,415	59,197	60,849	64.726
4	KS III	41,529	44,462	46,201	48.018
5	KS III Plus	22,680	24,609	26,342	26.624

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan KB Kota Pontianak

Tabel II.124
Perkembangan Kelompok Kegiatan (POKTAN) di Kota Pontianak
Tahun 2009-2015

No.	Nama Kelompok	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	BKB	16	16	16	33	34	38	47	50
2	BKR	8	8	8	10	10	12	14	16
3	BKL	7	7	7	33	33	31	31	33
4	UPPKS	198	198	198	198	188	177	179	179
Jumlah		229	229	229	274	265	258	271	278

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan KB Kota Pontianak

Untuk BKB di 6 kecamatan masih memiliki kegiatan, BKR hanya 3 kecamatan yang memiliki kegiatan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara, BKL dari 6 kecamatan hanya 4 yang memiliki kegiatan yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Utara.

Pada tahun 2013 jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan UPPKS adalah 1.543 keluarga, jumlah KS I yang menjadi anggota kelompok kegiatan UPPKS adalah 621 keluarga, jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS adalah 1.189 keluarga, jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS ber KB adalah 850 keluarga, jumlah keluarga prasejahtera/KS I yang menjadi anggota UPPKS yang berstatus PUS adalah 513 keluarga, jumlah KS I yang menjadi anggota kelompok UPPKS berusaha adalah 415 keluarga.

Institusi Masyarakat adalah lembaga maupun perorangan yang secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu melaksanakan program KB melalui berbagai penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat dalam upaya mencapai keluarga kecil yang berkualitas. Perkembangan kelompok institusi dan kelompok keluarga sejahtera ini agak mengalami stagnasi bahkan ada yang tidak aktif. Mengingat selama ini kelompok-kelompok institusi masyarakat telah terbukti cukup berperan dalam membantu memasyarakatkan program KB di Kota Pontianak, hal ini perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang dengan pembentukan kelompok yang baru maupun mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang tidak aktif.

P. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pembangunan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian. Salah satu urusan perhubungan berkaitan dengan sektor transportasi yang memiliki peranan cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa. Pada saat ini aktivitas masyarakat sedang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan peningkatan intensitas mobilitas perjalanan orang dari dan ke tujuan kegiatan. Jumlah kendaraan yang teregistrasi SeKota Pontianak rata pertumbuhannya pertahun sebanyak 4,16%, dimana tahun tahun 2010 sebanyak 265.953 kendaraan meningkat pada tahun 2013 menjadi 307.131 kendaraan.

Tabel II.125
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	URAIAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Kendaraan Roda Dua	281.435	245.841	635.840	
2	Kendaraan Roda Empat	56.409	50.842	119.941	

Tabel II.126
Jumlah Traffick Light, Terminal dan Halte Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	URAIAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Traffic Light	20	20	20	20
2	Terminal	9	4	4	4
3	Halte	12	19	19	18

Tabel II.127
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

No	URAIAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Lampu Lalu Lintas	20	20	20	20
2	Traffic Light Tenaga Listrik	18	19	20	20
3	Traffic Light Tenaga Surya	2	1	0	0
4	Rambu Lalu Lintas	1.352	1.614	1.708	1.772

Tabel II.128
Lokasi Parkir di Kota Pontianak Berdasarkan Kecamatan
di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	KECAMATAN	TAHUN (UNIT)			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat				
2	Pontianak Kota				
3	Pontianak Selatan				
4	Pontianak Tenggara				
5	Pontianak Timur				
6	Pontianak Utara				

Tabel II.129
Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi di Kota Pontianak Tahun 2009-2016

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sedan, Jeep dan sejenisnya	24.032	26.296	28.245	31.174	33.018	33.181	36.503	20.227
2	Bus dan sejenisnya	286	330	320	353	340	286	303	175
3	Mobil Barang, Pick-Up, Truck, DSJ	12.128	13.271	15.194	16.621	17.719	16.567	17.247	8.943
4	Kendaraan Khusus (Alat Berat)	38	218	165	236	204	334	442	294
5	Sepeda Motor Roda 2 dan Roda 3	204.215	225.838	250.972	253.910	255.850	234.610	245.114	120.621
Total		240.699	265.953	294.896	302.294	307.131	284.978	299.609	150.260

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak, 2016 sampai dengan Bulan Juni 2016

Tabel II.130
Jumlah Traffic Light, Terminal dan Halte di Kota Pontianak Tahun 2010 – 2015

No.	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah traffic light	buah	19	19	20	20	21	21
2	Jumlah terminal	buah	10	10	9	9	9	9
3	Jumlah halte	buah	15	15	16	13	13	12
4	Rambu lalu Lintas	buah	721	920	1169	1465	1695	1352

Sumber: Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kota Pontianak
Ket : *) sampai dengan bulan Juni 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah traffic light yang ada di Kota Pontianak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 16 buah. Jumlah terminal yang dimiliki Kota Pontianak

Tahun 2010 sebanyak 10 buah sedangkan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 9 buah. Jumlah Halte yang dimiliki pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 sebanyak 23 buah sedangkan untuk Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebanyak 16 halte. Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 jumlah Traffict Light/lampu lalu lintas/apill sebanyak 16 buah. Jumlah Traffick light Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang menggunakan tenaga listrik sebanyak 17 buah dan Tahun 2012 serta 2013 sebanyak 16 buah.

Q. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah secara efektif dan efisien.

Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN, WAN dan internet/*global area network*) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet/intranet, sehingga tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sampai dengan akhir tahun 2013, semua kantor baik instansi-instansi teknis sampai dengan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah tersambung dengan internet.

Beberapa instansi seperti telah mengembangkan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. BPKAD mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terhubung ke SKPD lainnya dan mengembangkan Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada) serta Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). BAPPEDA telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) dalam proses Musrenbang dan sedang mengembangkan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan (SIMEKBANG) secara online untuk memepermudah pelaksanaan pengendalian pembangunan.

Layanan-layanan publik juga sudah mulai diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti yang telah dilakukan LPSE, Penerimaan Siswa Secara Online oleh Dinas Pendidikan, layanan informasi perijinan oleh BP2T, layanan portal www.pontianakkota.go.id

yang dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta Sistem Informasi Produk Hukum Daerah oleh Bagian Hukum Setda Kota Pontianak. Selanjutnya dengan konsep e-gov, kedepan tersebut, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berinteraktif melalui jaringan elektronik akan lebih terberdayakan. Masyarakat dapat ikut terliat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Berikut capaian indicator urusan komunikasi dan informatika selama tahun 2017-2018.

Tabel II.131
Target dan Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2019

No.	Indikator	Kondisi Awal 2016 dan 2017	2015	2016	2017		2018	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	293	0	0	86.50%	86.50%	93%	93%
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	28	0	0	86.26%	86.26%	92.82%	92.82%
3	Persentase pelayanan online yang bisa diakses masyarakat	250	0	0	80.00%	80.00%	90%	90%
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang data sektoral sudah terintegrasi dengan website	750	0	0	80.00%	80.00%	85%	85%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

R. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kota Pontianak selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Dalam upaya membentuk masyarakat madani Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembinaan kesatuan bangsa, serta melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik.

Kondisi umum Kota Pontianak di tahun 2009 sampai dengan juli 2013 cukup kondusif. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi Satkorpulsida (Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi Daerah) sampai dengan bulan juli 2013 kasus penipuan hingga saat ini masih merupakan kasus yang paling menonjol, disusul oleh kasus pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang.

Peredaran narkoba dan minuman keras yang semakin meluas juga perlu mendapatkan perhatian mengingat dampak negatif dari konsumsi barang tersebut secara nyata berhubungan dengan keamanan dan ketertiban sosial. Di sisi lain adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Tabel II.132
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rapat koordinasi KOMINDA	Pertemuan	6	6	6	9
2	Jumlah rumah ibadah	Unit	-	-	394	1.077
3	Jumlah pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kecamatan	Kecamatan	6	6	4	126
4	Jumlah LSM (terbina dan terintegrasi)	LSM	5	5	6	15
5	Jumlah Ormas (terbina dan terintegrasi)	Ormas	80	82	79	141

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
6	Jumlah LSM	LSM	6	6	6	15
7	Jumlah LSM yang memiliki legalitas (aktif)	LSM	6	6	6	15
8	Jumlah Organisasi Masyarakat	Ormas	432	432	432	432
9	Jumlah partai Politik di Kota Pontianak	Partai Politik	13	14	12	11
10	Jumlah partai Politik yang menyampaikan laporan penggunaan bantuan yang tertib dan tepat waktu	Partai Politik	11	11	12	11
11	Jumlah tenaga linmas	Orang	1.428	1.428	1.428	2602
12	Jumlah tenaga linmas yang diberdayakan	Orang	70	70	70	1276
13	Jumlah Poskamling	Unit	426	426	426	130
14	Jumlah Poskamling yang diberdayakan	Unit	401	401	314	130

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Sosial Politik Kota Pontianak

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Untuk pelaksanaan kegiatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Terpadu dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian, serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung pada pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaian;
- Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
- Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi

agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;

- d. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

S. Urusan Pemerintahan Umum

Otonomi dan Pelayanan Masyarakat

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan dan kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan umum kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Kecamatan dan Kelurahan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat dari jumlah pelayanan yang diberikan, waktu penyelesaian pelayanan, transparansi pelayanan, keadilan dalam memberikan pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

Tabel II.133
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan di Kecamatan
Tahun 2014 – 2015

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Kec. Pontianak Barat	17,936	18,525	18,710	14,172	3,647
Kec. Pontianak Selatan	84,966	57,591	53,241	16,537	1,028
Kec. Pontianak Kota	26,467	86,402	85,723	83,591	1,365
Kec. Pontianak Utara	37,402	30,200	24,271	22,636	1,223
Kec. Pontianak Timur	13,658	13,222	15,997	8,729	2,835
Kec. Pontianak Tenggara	9,435	12,455	18,081	4,261	573

Sumber : Laporan Kecamatan

Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan dan Kelurahan pada umumnya terdiri dari pengurusan Surat Keterangan, Kematian, Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Nikah, Keterangan Waris, Surat Kelahiran, Keterangan KTP Sementara, Surat Keterangan Masuk Sekolah, jual beli, hibah dan hak bersama. Selain itu juga meliputi pengurusan Rekomendasi, SITU, Legalisir Kredit, Legalisir KPR, Izin Sementara, Keterangan Domisili dan Izin Bangunan, Surat Keterangan Penduduk Sementara, Keterangan Pindah Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten/ Provinsi, Salah nama,

Keterangan Kedatangan, Keterangan Kependudukan dan pengurusan akta tanah, Legalisir KTP/KK/Akte/Keterangan Kematian/Keterangan Tidak Mampu, Pembuatan KK, KIPEM dan Pembuatan KTP.

Kepegawaian

Secara umum kondisi kepegawaian di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak cukup baik. Apabila dilihat dari tingkat efisiensinya terus meningkat. Hal ini terlihat dari rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk yang hanya 1,1. Jumlah pegawai di Kota Pontianak terus berkurang sejalan dengan program moratorium penerimaan pegawai ditambah dengan pegawai yang pensiun.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sekolah Dasar mengalami penurunan sebesar 6,47% dimana tahun 2009 sebanyak 129 orang menurun pada tahun 2013 menjadi 74 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 136 orang pada tahun 2009 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 106 orang dengan rata-rata penurunan sebesar 5,40% dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas juga mengalami penurunan sebesar 0,06% dimana tahun 2009 sebanyak 2.422 orang menurun menjadi 1.964 orang pada tahun 2013, namun untuk Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan S1/D4 dan S2 mengalami peningkatan rata-rata 1,96% dan 0,14%.

Tabel II.134
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 – 2018

No.	Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	SD	Orang	70	65	48	38
2	SLTP	Orang	112	103	82	74
3	SLTA	Orang	1.830	1.781	1.457	1.274
4	D1 - D3	Orang	2.107	2.087	1.789	1.575
5	S1 / D4	Orang	2.499	2.487	1.817	1.877
6	S2	Orang	195	202	205	234
JUMLAH			7.299	7.014		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

Dari 5.072 jumlah PNS yang ada di Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2018, jenjang pendidikan yang paling banyak dimiliki adalah tingkat D4/S1 dengan jumlah pegawai 1.877 PNS (37%) disusul oleh jenjang pendidikan D1-D3 dengan jumlah pegawai 1.575 PNS (31%).

Diurutan ketiga jenjang pendidikan PNS yang paling banyak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah SLTA dengan

jumlah pegawai 1.274 PNS (25%). Untuk PNS dengan jenjang SD, SLTP dan S2 jumlah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak berturut-turut adalah 38 PNS (0,75%), 74 PNS (1,46%), dan 234 (4,6%). Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan sejak tahun 2015-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel II.135
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Tahun 2015 – 2018

No	Golongan	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	Golongan I	Orang	45	35	27	28
2	Golongan II	Orang	1.039	908	808	704
3	Golongan III	Orang	3.074	2.667	2.675	2.655
4	Golongan IV	Orang	2.655	2.093	1.888	1.685
JUMLAH			6.813	5.703	6.813	5.703

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak memiliki PNS paling banyak di Golongan III dengan jumlah pegawai sebesar 2.655 PNS (52,35 %), dilanjutkan pada Golongan IV dengan jumlah pegawai sebesar 1.685 PNS (33,22%), Golongan II sebanyak 704 PNS (13,88%) dan Golongan I dengan jumlah PNS yang paling sedikit yaitu berjumlah 28 PNS (0,55%).

Tabel II.136
Jumlah Formasi Jabatan Tahun 2009 – 2016

No.	Eselon	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Eselon II	Orang	30	31	25	26
2	Eselon III	Orang	120	123	121	112
3	Eselon IV	Orang	524	542	444	426
4	Eselon V	Orang	674	696	590	564
JUMLAH						

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

Formasi jabatan pada Pemerintah Kota Pontianak menurun setiap tahunnya kecuali pada tingkat eselon II yang bertambah satu orang pada tahun 2018. Ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang pensiun dan kurangnya penerimana CPNS di tingkat pemerintah Kabupaten /Kota.

Pada tahun 2017 jumlah formasi pegawai adalah 26 untuk Eselon II, 112 untuk tingkat eselon III, 426 untuk tingkat eselon IV.

Tabel II.137
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2016

No	Jenis Kelamin	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Laki - laki	Orang	2,444	1,955	1.863	1.742
2	Perempuan	Orang	4,369	3,748	3.535	3.330
JUMLAH			7.217	7.359	6,813	5,703

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak

Kesejahteraan Sosial

Tabel II.138
Perkembangan Jumlah Jemaah Haji Kota Pontianak
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jemaah Haji	449	449	652	619

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Kota Pontianak adalah Ibu Kota Propinsi di Kalimantan Barat dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Kota Pontianak memiliki kuota Jemaah haji terbanyak dari daerah kab/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 jumlah kuota jemaah haji di Kota Pontianak mengalami penurunan sebanyak 5,06 % atau turun sebesar 33 kuota. Dimana pada tahun 2017 kuota jemaah haji kota Pontianak berjumlah 652 dan pada tahun 2018 turun menjadi 619 kuota.

Tabel II.139
Jumlah Tempat Ibadah Kota Pontianak
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	RUMAH IBADAH	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Surau	459	459	459	459
2	Mesjid	305	305	305	305
3	Gereja	65	65	65	65
4	Vihara	9	9	9	9
5	Kelenteng	10	10	10	10

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Jumlah penduduk di Kota Pontianak adalah sebanyak 658.457 jiwa (data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan dari jumlah itu 75,32% atau sebanyak 495.961 adalah penduduk beragama Islam. Dengan presentase sebanyak itu, jumlah tempat ibadah di Kota Pontianak yang paling banyak adalah surau dan masjid. Jumlah surau di Kota Pontianak adalah sebanyak 459 dan masjid sebanyak 306.

Jumlah gereja di Kota Pontianak adalah sebanyak 65 dan kelenteng serta vihara berturut adalah berjumlah 10 buah dan 9 buah.

Kota Pontianak tidak memiliki Pura, dikarenakan pusat peribadatan umat Hindu di Pontianak dan sekitarnya berpusat di Pura yang berada di Kabupaten Kubu Raya di mana Pura tersebut langsung berbatasan dengan Kota Pontianak.

Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan *good and clean government* di Pemerintah Kota Pontianak, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Hal ini penting agar pengawasan yang dilakukan berkualitas dan dapat memberikan masukan perbaikan serta mencegah terjadi penyelewangan.

Tabel II.140
Jumlah Pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	33	33	33	33
2	Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan	6	11	9	6
3	Pemeriksaan Alih Tugas Kepala Dinas/ Unit Kerja/ Instansi	10	3	1	5
4	Pemeriksaan SAKD pada SLTP, SMU dan SMK	16	16	6	12

Tabel II.141
Hasil Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai LAKIP			
		2015	2016	2017	2018
1	Dinas Kesehatan	73,69	83,46	85,03	86,03
2	Rumah Sakit Umum Daerah	66,17	72,6		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71,01	76,19	76,67	77,29
4	Dinas Sosial dan tenaga Kerja	69,8	70,3	71,13	72,60
5	Inspektorat Kota Pontianak	69,62	71,95	72,68	74,01
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	69,35	78,54	79,88	76,48
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69,24	70,01	70,27	
8	Dinas Pendapat Daerah	69,07	70,21	72,44	74,68
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	67,89	71,26		
10	Kecamatan Pontianak Tenggara	69,05	71,51	73,35	73,65
11	Dinas Perhubungan	68,28	70,78	71,32	73,42
	Dinas Komunikasi dan Informatika			70,02	74,00
12	Sekretariat Daerah	68,01	70,92	74,96	76,87
13	Dinas Pekerjaan Umum	66,8	70,48	70,85	
14	Kecamatan Pontianak Barat	66,64	70,41	70,75	72,44
15	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)	66,57	73,65	77,08	77,45
16	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	66,51	72,24	73,96	75,72
17	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	64,9	72,24		
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB	66,45	70,04	70,90	72,5
19	Badan Kepegawaian Daerah	65,84	73,5	76,74	77,27
20	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	65,6	71,52	75,63	75,76
21	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan	65,54	72,67	74,21	74,81
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	65,17	70,08	72,70	71,11
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	61,04	72,07		
24	Kecamatan Pontianak Selatan	65,12	71,38	73,09	72,55

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai LAKIP			
		2015	2016	2017	2018
25	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	64,61	72,76	72,09	72,90
26	Sekretariat DPRD	64,05	71,78	73,23	73,43
27	Kecamatan Pontianak Timur	62,87	71,13	72,61	72,68
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,3	64,13	79,88	
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	62,21	71,09	70,68	
30	Kecamatan Pontianak Utara	61,91	70,1	72,39	73,81
31	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	61,37	70,17	72,23	71,13
32	Kecamatan Pontianak Kota	61,26	70,25	73,41	72,68
33	Badan Lingkungan Hidup	60,06	75,38	75,47	71,23
34	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	66,94	70,58		

Tabel II.142
Hasil Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Permerintah (SPIP)
Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai SPIP			
		2015	2016	2017	2018
1	Dinas Kesehatan	2.944	3.017	3.214	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.322	3.011		
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.457	3.152	3.166	
4	Dinas Sosial dan tenaga Kerja	2.309	2.465	3.152	
5	Inspektorat Kota Pontianak	2.944	2.777	3.377	3.390
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.445	2.816	3.161	
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.457	2.097	3.053	3.148
8	Dinas Pendapat Daerah	2.480	2.582	3.030	3.167
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.309	2.627		
10	Kecamatan Pontianak Tenggara	2.348	2.578	2.601	
11	Dinas Perhubungan	2.480	2.266	3.007	3.007
	Dinas Komunikasi dan Informatika			2.639	
12	Sekretariat Daerah	2.944	2.128	3.064	3.264
13	Dinas Pekerjaan Umum	2.233	2.089	3.148	
14	Kecamatan Pontianak Barat	2.168	2.124	2.884	

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai SPIP			
		2015	2016	2017	2018
15	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)	2.466	3.034	3.149	
16	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2.151	2.869	3.125	
17	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	2.157	2.297		
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB	2.178	2.261	3.048	3.160
19	Badan Kepegawaian Daerah	2,543	3.334	3.445	
20	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	2.178	2.439	3.176	
21	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan	2.142	2.492	2.608	
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.242	2.247	2.556	
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.118	2.408		
24	Kecamatan Pontianak Selatan	2.234	2.446	2.421	
25	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	2.350	2.564	2.734	
26	Sekretariat DPRD	2.408	2.739	2.869	
27	Kecamatan Pontianak Timur	2.122	2.431	2.869	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.168	2.401	2.891	
29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	2.013	2.348	2.346	
30	Kecamatan Pontianak Utara	2.294	2.206	3.013	3.167
31	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.376	2.461	2.949	
32	Kecamatan Pontianak Kota	2.411	3.057	2.969	
33	Badan Lingkungan Hidup	2.128	2.389	3.039	
34	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	2.411	2.109		

Tabel II.143
Perkembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Tahun	Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2015	22	18	40
2	2016	26	18	44
3	2017	26	14	40
4	2018	24	16	40

Tabel II.144
Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Tahun	Nilai IKM
1	2015	76,83
2	2016	76,83
3	2017	78,22
4	2018	80,75

Tabel II.145
Realisasi Kinerja Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat

NO .	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemeriksaan kasus masuk dari pengaduan masyarakat	4	8	9	7	6
2	Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala OPD	10	4	1	5	0
3	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kota Pontianak

Dari pemeriksaan tata kelola keuangan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pontianak, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP tahun 2015-2018 terdapat total 129 temuan dan jumlah rekomendasi sebanyak 129, 68 tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dan proses tindak lanjut 0, belum ditindak lanjuti 35, dan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah 0. Sedangkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009-2018 terdapat jumlah temuan sebanyak 183 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 190, 162 tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dan proses tindak lanjut sebanyak 27,

belum ditindak lanjuti 1, dan 2 temuan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah, dengan persentase 79,82%

Tabel II.146
Data Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TAHUN PEMERIKSAAN	JLH TEMUAN	JLH REKOME NDASI	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT				%REKOMENDAS I YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI
					SESUAI DENGAN REKOME NDASI	BELUM SESUAI DAN PROSES TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUTI	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
1	INSPEKTORA T PROVINSI	2009 – 2018	183	190	162	27	1	0	85,26%
2	INSPEKTORA T KOTA	2015 – 2018	129	129	68	0	35	0	77,60%

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak tahun 2004 – 2018 terdapat 387 jumlah temuan dan 788 jumlah rekomendasi, 629 tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi, 153 belum sesuai dan proses tindak lanjut, 4 temuan belum ditindak lanjuti, dan 1 temuan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah, dengan persentase sebesar 79,82%.

Tabel II.147
Data Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Tahun 2004 - 2018

TEMUAN PEMERIKSAAN	TAHUN PEMERIKSAAN	JLH TEMUAN	JLH REKOMENDASI	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT				%REKOMENDASI YANG SELESAI TINDAK LANJUT
				SESUAI DENGAN REKOMENDASI	BELUM SESUAI DAN PROSES TINDAK LANJUT	BELUM DITINDAK LANJUTI	TIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI DENGAN ALASAN YANG SAH	
BPK-RI	2004 – 2018	387	788	629	153	4	2	79,82%

Tabel II.148
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Tahun 2015 – Semester II 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah temuan hasil pemeriksaan	18	26	7	7
Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan	46	61	23	13
Jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai saran (TS)	32	42	16	3
Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai saran (TS)	69,57%	68,85%	69,57%	23,07%
Jumlah temuan yang ditindaklanjuti belum sesuai saran dan proses tindak lanjut (TB)	13	19	7	10
Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti	1	0	0	0
Prosentase temuan yang belum ditindaklanjuti	7,69%	100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kota Pontianak

Dari tabel-tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi perbaikan dalam tata kelola keuangan, penyelenggaraan pemerintahan (kebijakan) serta pelaksanaan pembangunan, yang mana ditunjukkan dari jumlah temuan yang menunjukkan tren yang semakin menurun.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*. Ketiga sistem tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan upgrading sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan aset daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset serta kebijakan sertifikasi aset pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil dari perbaikan yang terus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut di tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Pontianak mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pelaporan keuangan daerah, tahun sebelumnya mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dilakukan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya menyangkut pajak-pajak daerah. Upaya ini telah berhasil meningkatkan PAD Kota Pontianak sampai 4 kali lipat terhitung mulai tahun 2009, dimana PAD mencapai 65,85 Milyar saja tumbuh menjadi 265,5 Milyar di tahun 2013. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan upaya ini harus terus dilakukan dengan menggali potensi-potensi wajib pajak yang belum optimal penarikannya. Akan tetapi disisi lain perlu dilakukan perbaikan menyangkut pengelolaan aset-aset daerah yang dirasa masih jauh dari optimal. Hal ini juga merupakan catatan khusus yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kota Pontianak dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI.

Tabel II.149

Realisasi Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan APBD
kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	KOMPONEN APBD	SATUAN	REALISASI			
			2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	1,435.25	1,418.52	1,545.62	1,663.62
2	Belanja Daerah	Rp. Milyar	1,414.78	1,428.92	1,512.48	1,605.72
3	Pembiayaan Daerah	Rp. Milyar	14.75	37.72	10.95	13.28

Tabel II.150

Realisasi Pendapatan dalam APBD Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI			
			2015	2016	2017	2018
A	Pendapatan Asli Daerah	Rp. Juta	334,708.37	389,368.66	476,050.41	440,293.81
1	Pajak Daerah	Rp. Juta	240,452.11	258,150.00	303,128.00	308900.83
2	Retribusi Daerah	Rp. Juta	32,822.00	42,016.15	35,657.08	36039.84
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. Juta	9,880.19	35,532.50	14,662.44	18322.96
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. Juta	51,554.07	53,670.01	122,602.89	77030.18

B	Dana Perimbangan	Rp. Juta	731,736.30	890,541.18	905,713.70	942,558.77
1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. Juta	37,814.96	44,061.12	39,616.95	49,414.04
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp. Juta	-	2,549.36	2,334.24	4,372.67
3	Dana Alokasi Umum	Rp. Juta	686,035.83	711,955.76	699,448.99	699,448.99
4	Dana Alokasi Khusus	Rp. Juta	7,885.51	131,974.94	164,313.52	189,323.07
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. Juta	368,809.30	138,606.55	163,858.19	280,287.54
1	Pendapatan Hibah	Rp. Juta	2,201.00	6,432.00	6,510.00	64,792.32
2	Pendapatan dana Darurat	Rp. Juta	-	-	-	-
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp. Juta	177,212.01	125,742.23	149,848.19	198,745.22
4	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp. Juta	-	-	-	-
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. Juta	182,109.09	5,000.00	7,500.00	16,750.00
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	Rp. Juta	7,287.20	1,432.32	-	-

Tabel II.151
Realisasi Belanja dalam APBD Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

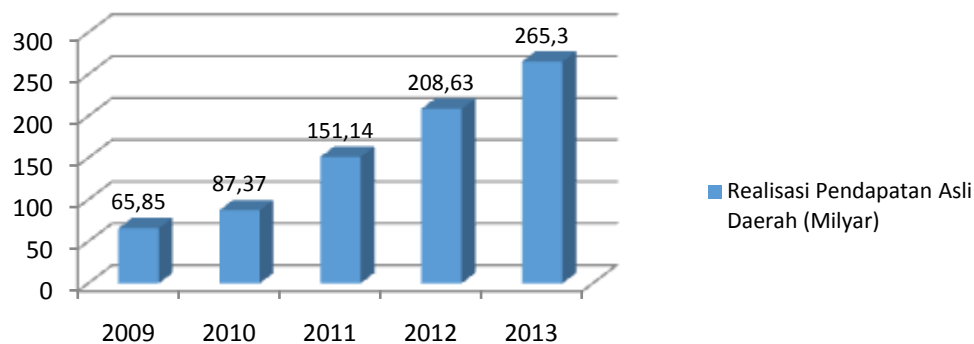
NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI			
			2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	Rp. Juta	630,868.58	640,261.66	588,843.47	630,436.25
1	Belanja Pegawai	Rp. Juta	615,882.92	622,931.84	554,642.20	555,753.49
2	Belanja Bunga	Rp. Juta	20.43	-	-	-
3	Belanja Subsidi		-	-	-	-
4	Belanja Hibah	Rp. Juta	9,063.23	12,536.30	23,518.54	65,873.87
5	Belanja Bantuan Sosial	Rp. Juta	1,902.26	3,256.17	4,088.48	7,106.33

6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov / Kab / Kota dan Pemerintah Desa		-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. Juta	1,317.14	1,317.14	6,317.14	1,702.56
8	Belanja Tidak Terduga	Rp. Juta	2,682.60	220.21	277.11	-
B	Belanja Langsung	Rp. Juta	783,911.50	788,655.99	923,632.59	975,283.15
1	Belanja Pegawai	Rp. Juta	58,215.67	59,668.72	72,705.45	80,086.49
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. Juta	289,052.34	325,131.72	405,595.44	404,392.61
3	Belanja Modal	Rp. Juta	436,643.49	403,855.55	445,331.70	490,804.05

Tabel II.152
Realisasi Pembiayaan dalam APBD Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI			
			2015	2016	2017	2018
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. Juta	31,311.21	46,356.05	20,470.18	32,284.32
1	Pengguna SILPA	Rp. Juta	31,206.21	46,320.96	20,445.61	22,191.43
2	Pencairan Dana Cadangan	Rp. Juta	-	-	-	10,064.32
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. Juta	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. Juta	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. Juta	105.00	35.09	24.57	28.57
6	Penerimaan Piutang Daerah	Rp. Juta	-	-	-	-
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. Juta	16,560.62	8,633.00	21,425.00	19,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. Juta	-	-	10,000.00	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp. Juta	16,258.64	8,633.00	19,100.00	19,000.00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	Rp. Juta	301.98	-	-	-

	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. Juta	-	-	2,325.00	-
4	Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	Rp. Juta	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)	Rp. Juta	35,224.47	27,321.79	22,191.40	70,705.02



Grafik II.23
Pertumbuhan Realisasi PAD di Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Hukum

Dari sisi pelayanan penunjang supremasi hukum, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas perUndang-Undangan, pelayanan informasi hukum, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum. Dari data pencapaian kinerja pelayanan hukum mulai tahun 2009 sampai tahun 2012 terlihat bahwa jumlah produk hukum yang ditetapkan kecenderungannya semakin meningkat, sedangkan terhadap jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditelaah serta jumlah fasilitasi penanganan dan advokasi permasalahan hukum cenderung fluktuatif tiap tahun dikarenakan tergantung pada jumlah produk hukum kabupaten/kota yang ditetapkan serta jumlah permasalahan hukum yang ditangani.

Tabel II.153
Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Pemerintah Kota Pontianak

Tahun	SK Walikota	Peraturan Daerah	Peraturan Walikota
2009	979	11	47
2010	873	8	41
2011	873	14	54
2012	693	14	66
2013 s/d Mei			1

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Tabel II.154
Jumlah Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan TUN

No	Tahun	Jumlah Penyelesaian perkara perdata, pidana dan TUN
1.	2009	-
2.	2010	2 perkara
3.	2011	12 perkara
4.	2012	13 perkara
5.	2013 s/d Mei	3 perkara

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Kerjasama

Dalam rangka mempercepat pembangunan dan perkembangan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan kerjasama antar daerah sesama Pemerintah Kota maupun dengan Pemerintah Kabupaten baik secara Regional maupun Nasional. Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2009-2013 adalah:

1. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Nasional;
2. Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Nasional;
3. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan

Manfaat yang dirasakan dalam kerangka kerja sama tersebut adalah bertukar pengalaman *best practices* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan antar anggota sehingga dapat melakukan perbaikan dengan mengimplementasikan hal-hal positif yang telah berhasil dilakukan anggota lainnya. Asosiasi tersebut juga berguna sebagai forum diskusi dan penyampaian pendapat maupun sikap bersama kepada pemerintah pusat terhadap hal-hal tertentu yang perlu mendapat perhatian.

Selain melakukan kerja sama dengan daerah lain, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan kesepakatan dan kerjasama antara dengan Pihak ketiga. Di tahun 2013, terjadi 20 kesepakatan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang urusan seperti kerja sama pengelolaan aset daerah, kerjasama investasi dan lain-lain. Pemerintah Kota Pontianak mendorong kerjasama yang lebih luas dengan pihak ketiga tentunya yang memberikan manfaat serta keuntungan bagi masyarakat Kota Pontianak.

Organisasi dan Perangkat Daerah

Sejalan dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, agenda besar yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Kota Pontianak merupakan satu dari 30 kota lain yang termasuk dalam pilot project penerapan birokrasi reformasi di daerah di tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, diamanatkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merespon tuntutan reformasi birokrasi dimaksud, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak yang didalamnya berisi tahapan dan rencana aksi yang harus dilakukan untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak. Selain itu juga dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Perbaikan-perbaikan terhadap area perubahan tersebut secara bertahap telah dilakukan sampai tataran SKPD, walaupun diakui masih diperlukan usaha lebih keras lagi untuk menjadikannya optimal.

Hal yang menjadi kendala dalam implementasi refromasi birokrasi ini adalah kesiapan sumber daya aparatur yang masih belum memahami secara akurat apa yang dimaksud serta tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan refromasi birokrasi ini. Selain itu kelengkapan perangkat pelaksanaannya juga yang masih belum tersedia.

Masih dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi, sampai tahun 20013 terdapat 2 SKPD yang telah mendapatkan dan menerapkan ISO 9001:2008 mengenai Manajemen Mutu. Sertifikasi ISO ini sebagai indikator kinerja pemerintahan umum merupakan bentuk penghargaan atas penilaian mutu pelayanan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, secara bertahap setiap SKPD di Pemerintah Kota Pontianak diharapkan mendapatkan sertifikat ISO ini sebagai jaminan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel II.155
Jumlah Dinas, Lembaga dan UPTD Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dinas Otonom	13	13	15	15
2	Jumlah Lembaga Teknis Otonom	8	8	6	6
3	Jumlah Kecamatan	6	6	6	6
4	Jumlah Kelurahan	29	29	29	29
5	Jumlah UPTD	27	27	15	15
6	Sekretariat Daerah	1	1	1	1
7	Sekretariat DPRD	1	1	1	1
8	Inspektorat	1	1	1	1

Tabel II.156
Jumlah Formasi Jabatan Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Formasi Jabatan Eselon IIA (orang)	1	1	1	1
2	Formasi Jabatan Eselon IIB (orang)	30	30	28	28
3	Formasi Jabatan Eselon IIIA (orang)	48	48	42	42
4	Formasi Jabatan Eselon IIIB (Orang)	74	74	79	79
5	Formasi Jabatan Eselon IVA (orang)	363	363	330	330
6	Formasi Jabatan Eselon IVB (orang)	178	178	119	119
7	Formasi Jabatan Eselon V (orang)	34	34	-	-

T. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Pusat Perhatian dalam Proses Pembangunan saat ini sebagaimana yang di atur dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Pembangunan yang dilaksanakan menggunakan Paradigma Pemberdayaan, artinya pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada umumnya.

Upaya pemberdayaa masyarakt Kota Pontianak dilakukan dengan melalui kegiatan pembinaan bulan bakti gotong royong mayarakat yang dilaksanakan selama bulan mei setiap tahunnya, yang terdiri dari 4 bidang yaitu;

- Bidang Kemasyarakatan yang dilakukan berupa rapat koordinasi, Perbaikan 100 gang dan perbaikan MCK.
- Bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan berupa rapat koordinasi, pengelolaan lingkungan, Amdal, UKL dan UPL serta pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau.

- Bidang Sosial Budaya yang dilakukan berupa rapat koordinasi, penyuluhan tentang narkoba dan kenakalan remaja.
- Bidang Ekonomi yang dilakukan berupa rapat koordinasi, kemitraan masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penghasilan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilaksanakan berbagai macam kursus/diklat keahlian seperti kursus reparasi hp, kursus rias pengantin, tata rias rambut/salon dengan bekerjasama dengan praktisi/tenaga ahli di bidangnya. Diharapkan dengan bekal keahlian dan keterampilan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk merintis usaha dan membuka lapangan kerja baru sehingga lebih berdaya.

U. Urusan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tabel II.157
Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Sosial
Tahun Anggaran 2015 – 2018

No	Program	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
A	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya					
1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial / pelatihan salon)	orang	-	-	10	10
2	Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Keluarga Miskin	orang	30	32	32	
3	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /pelatihan otomotif	orang	10	10	12	12
B	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
1	Fasilitasi Lembaga Lanjut Usia (LLI)	orang	120	120	120	
2	Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)	bulan				7
3	Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar	orang	59	49	50	
4	Operasional Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	bulan	12	12	12	7
5	Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar		-	-	10	
6	Pembinaan dan Stimulan bagi Pekerja Sex Komersial		-	-	10	
7	Mayat Terlantar Dan Otopsi		13	10	10	8
8	Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak	bulan	-	12	12	7
C	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma					
1	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma		-	-	10	10
2	Pembinaan Eks Napza		-	-	10	
3	Pembinaan Anak Disabilitas		50	50	50	
D	Bantuan Sosial Korban Bencana					
1	Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Sosial		105	94	69	11
2	Verifikasi dan validasi Bencana Kebakaran dan Puting Beliung		-	50	50	
3	Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial		200	200	200	130
4	Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial		32	30	29	29
5	Pemulangan Gepeng/Orang Terlantar		59	49	50	28
E	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					

1	Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM dan Organisasi Sosial)		50	50	56	7 bulan
2	Hari Pahlawan Nasional	kegiatan	2	2	2	1
3	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)		2.913	2.905	5493	9.834
4	Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	bulan	12	12	12	7
5	Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)	bulan	12	12	12	7
6	Pendampingan Pembinaan E-warung	kelompok	-	-	22	22
7	Penguatan Komunitas Berisiko (ODHA)		-	-	10	8

Sumber : Dinsos Kota Pontianak

*Juli 2018

Tabel II.158

Perkembangan Orang Cacat di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Kecamatan	Jenis Cacat	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	Cacat Fisik			211	
		Cacat Fisik Mental			8	
		Cacat Lainnya			14	
		Cacat Mental			25	
		Cacat Netra			11	
		Cacat Rungu			25	
		Total			294	
2	Pontianak Kota	Cacat Fisik			159	
		Cacat Fisik Mental			29	
		Cacat Lainnya			54	
		Cacat Mental			40	
		Cacat Netra			9	
		Cacat Rungu			47	
		Total			338	
3	Pontianak Selatan	Cacat Fisik			112	
		Cacat Fisik Mental			3	
		Cacat Lainnya			14	
		Cacat Mental			19	
		Cacat Netra			13	
		Cacat Rungu			21	
		Total			182	

4	Pontianak Tenggara	Cacat Fisik			37	
		Cacat Fisik Mental			7	
		Cacat Lainnya			10	
		Cacat Mental			10	
		Cacat Netra			5	
		Cacat Rungu			11	
		Total			80	
5	Pontianak Timur	Cacat Fisik			190	
		Cacat Fisik Mental			5	
		Cacat Lainnya			25	
		Cacat Mental			11	
		Cacat Netra			32	
		Cacat Rungu			18	
		Total			281	
6	Pontianak Utara	Cacat Fisik			369	
		Cacat Fisik Mental			14	
		Cacat Lainnya			7	
		Cacat Mental			22	
		Cacat Netra			11	
		Cacat Rungu			31	
		Total			454	

Tabel II.159
Perkembangan orang Gila di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	98
2	2016	91
3	2017	30
4	2018	

Tabel II.160
Perkembangan Penghuni Pusat Layanan Terpadu
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Bulan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Januari	34	46	45	32
2	Februari	29	31	39	35
3	Maret	22	44	32	46
4	April	13	91	38	46
5	Mei	11	47	42	29
6	Juni	13	18	32	40
7	Juli	16	41	30	38
8	Agustus	8	74	33	28
9	September	15	29	24	28
10	Oktober	19	31	18	15
11	November	55	33	38	9
12	Desember	17	57	29	15

Tabel II.161
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	PMKS Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	157	242
2	PMKS Korban Bencana Sosial / Pengungsi	105	94	69	65
3	PMKS Anak Panti Asuhan	1499	1490	1495	1372
4	PMKS Orang Terlantar	59	49	50	54
5	PMKS Mayat Terlantar	13	10	14	8
6	PMKS Pengemis / Gelandangan	10	66	50	35

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lain. Pelaksanaan program ini melalui :

- 1.1. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin (Wanita Rawan Sosial/ pelatihan salon) Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kondisi rawan sosial, dengan kegiatan ini diharapkan mereka yang dalam kondisi rawan sosial dapat terbantu sehingga tidak menjadi miskin. dimana kegiatan ini telah melaksanakan pelatihan keterampilan bagi

wanita rawan sosial ekonomi mulai tahun 2017 sebanyak 10 orang. Jumlah peserta yang sudah dilatih sampai dengan tahun 2018 adalah 20 orang.

- 1.2. Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Keluarga Miskin kegiatan ini berupa pemberian motivasi terhadap keluarga miskin yang menjadi tulang punggung keluarga yang memiliki usaha. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan stimulan terhadap keluarga miskin sehingga usahanya lebih maju dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah 124 yang telah terbantu.
- 1.3. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Pelatihan Satpam). Pelatihan ini berupa pelatihan kesamaptaan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang masih produktif. Hasil dari pelatihan ini adalah para peserta dapat bekerja di perusahaan atau instansi dengan berbekal sertifikat hasil pekerjaannya. Jumlah satpam yang telah dilatih sampai tahun 2017 adalah sebanyak 42 orang. Di tahun 2018 kegiatan ini diganti menjadi pelatihan otomotif. Jumlah pesertanya sebanyak 12 orang.

2. **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Pelaksanaan program ini melalui :

- 2.1. Fasilitas Lembaga Lanjut Usia (LLI), Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pemberian bantuan gizi dan makanan kepada lansia dan pemberian motivasi kepada lansia sebanyak 480 orang yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak.
- 2.2. Operasional Pelayanan PMKS Dalam Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) kegiatan ini berupa operasional kegiatan terhadap Unit Pelayanan rehabilitasi sosial berupa pemenuhan kebutuhan makan minum orang terlantar, gepeng, lansia terlantar. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang pelayanannya setiap hari.
- 2.3. Pelayanan Bagi Penderita Psykotik Terlantar Kegiatan ini merupakan upaya dalam menciptakan ketertiban lingkungan masyarakat dengan pemulangan atau merehabilitasi orang gila yang terjaring penertiban sebanyak 348 orang. Melalui kegiatan ini diberikan fasilitas untuk perawatan bagi orang gila/psikotik terlantar yang dilakukan dengan membantu fasilitas perawatan orang gila di rumah sakit jiwa Pontianak maupun di Singkawang.

- 2.4. Operasional Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) melalui fasilitasi sebanyak 25 orang. Anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak-anak baik korban maupun pelaku yang berhadapan dengan hukum dan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak terjadi trauma dikemudian hari. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sesuai dengan surat permohonan bantuan diversi yang diberikan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan, maupun masyarakat.
- 2.5. Pembinaan Gepeng/Orang Terlantar Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembinaan gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam razia sebanyak 400 orang. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama maupun secara sendiri oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu dibawa ke UPRS di Pal Lima untuk dibina sedangkan gepeng luar daerah dikembalikan ke daerah masing-masing.
- 2.6. Pembinaan dan Stimulan bagi Pekerja Sex Komersial Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pembinaan bagi waria sebanyak 10 orang. Pembinaan ini ditujukan agar waria/PSK mendapatkan motivasi dan bimbingan agar keluar dari pekerjaan mereka. Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017.
- 2.7. Mayat Terlantar Dan Otopsi Kegiatan ini menghasilkan tertangani/terfasilitasinya mayat terlantar dan otopsi sebanyak 48 mayat. Pelayanan pemakaman kepada mayat terlantar dan pelayanan otopsi dilaksanakan jika ditemukan mayat terlantar yang tidak diketahui keluarganya.
- 2.8. Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pontianak. Kegiatan ini berupa tim patroli yang bertugas diluar jam dinas dalam rangka melakukan patroli menyisir jalanan dan simpang lampu merah serta tempat yang sering terdapat PMKS, adapun PMKS yang sering ditemukan adalah, Psikotik terlantar, orang terlantar, anak kecil penjual koran, pengemis dan beberapa PMSK lainnya.

3. **Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma**

Pelaksanaan program ini melalui :

- 3.1. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Kegiatan ini menghasilkan terlaksana pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan stimulan sebanyak 20 orang. Pelatihan ini merupakan upaya dalam menumbuhkan kembangkan kepercayaan diri bagi penyandang cacat dan trauma sehingga mereka dapat hidup secara mandiri, pelatihan dan bimbingan motivasi ini berupa kegiatan pelatihan service handphone dan hasilnya mereka dapat secara berkelanjutan menambah penghasilan. Kegiatan ini dimulai pada tahun 2017.
- 3.2. Pembinaan Eks Napza Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pembinaan terhadap eks napza dan stimulan sebanyak 30 orang. Kegiatan ini dapat memberikan kemampuan dalam kemandirian bekas penyandang masalah sosial. Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2017.
- 3.3. Pembinaan Anak Disabilitas Kegiatan ini merupakan upaya dalam memberikan pembinaan bagi masyarakat yang mengalami cacat, kejiwaan serta mengalami trauma dengan melakukan pembinaan kepada 200 orang. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap anak dan orang tua penyandang cacat dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi positif sehingga pada penyandang cacat dapat beraktifitas normal dikalangan masyarakat.

4. **Bantuan Sosial dan Korban Bencana**

Pelaksanaan program ini melalui :

- 4.1. Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Sosial Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya operasional bencana alam dan sosial melalui pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan sosial sebanyak 323 kali yang dilaksanakan di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Operasional tanggap darurat bencana ini sebenarnya untuk mendukung kinerja instansi yang telah ada dan hal inipun difasilitasi oleh Kementerian Sosial berupa pemberian 1 buah mobil rescue dan 1 buah speedboat untuk evakuasi korban bencana alam dan sosial.
- 4.2. Verifikasi dan validasi Bencana Kebakaran dan Puting Beliung. Kegiatan ini dalam rangka membantu program pusat dalam mengidentifikasi rumah yang terdampak bencana alam atau sosial(kebakaran) untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat. Jumlah rumah yang telah

diferifikasi untuk mendapatkan bantuan pusat adalah 100 rumah. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2016.

- 4.3. Bantuan Kepada Panti Asuhan/Panti Sosial Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pembinaan kepada anak panti asuhan sebanyak 800 orang, berupa pemberian bantuan makanan kepada anak yang berada di panti asuhan yang ada di Kota Pontianak sehingga kebutuhanmakan dan gizi mereka dapat tercukupi.
- 4.4. Bantuan Sarana Prasarana Panti Asuhan/Panti Sosial bantuan yang diberikan kepada panti asuhan yang ada Di Kota Pontianak dengan bantuan sarana prasarana berupa kasur, bantal, kipas angin, lemari, mukena, mesin air, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan masing masing panti dan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Adapun jumlah panti asuhan yang ada setiap tahunnya berubah rubah. Jumlah panti asuhan tahun 2018 ini sebanyak 29 panti asuhan.
- 4.5. Pemulangan Gepeng/Orang Terlantar Kegiatan ini menghasilkan terlaksannya pemulangan orang yang terlantar ke daerah asalnya sebanyak 208 orang. Mereka adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan maupun kejahatan yang kehilangan harta bendanya sehingga membutuhkan bantuan untuk pulang ke daerah asalnya, untuk itulah Dinas Sosial memfasilitasi kepulangan orang terlantar tersebut.

5. **Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Pelaksanaan program ini melalui :

- 5.1. Pembinaan TKSK, Karang Taruna, PSM dan Organisasi Sosial) penyandang masalah kesejahteraan sosial (MKS) Kegiatan ini menghasilkan terlaksananya pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diikuti sebanyak 50 orang. Pembinaan ini ditujukan kepada karang taruna dan organisasi sosial agar dapat lebih memahami mengenai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5.2. Berkabung dan peringatan Hari Pahlawan Nasional peringatan hari berkabung Daerah dan hari pahlawan nasional. Kegiatan ini berupa peringatan hari berkabung daerah yang dilakukan setiap tanggal 29 Juni berupa ziarah ke makam juang Mandor sebanyak 90 Orang. Kegiatan ini mengikuti arahan dan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Selain kegiatan hari berkabung, juga kegiatan peringatan hari pahlawan. Kegiatan ini berupa upacara peringatan hari

pahlawan dan anjongsana kepada ahli waris keluarga pahlawan. Tahun ini ahli waris yang dikunjungi sebanyak 3 orang.

- 5.3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kegiatan ini berupa operasional yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyuksesan program pemerintah pusat berupa pendampingan PKH selama satu tahun.
- 5.4. Operasional Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kegiatan ini berupa pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga yang dilakukan di wilayah Kota Pontianak oleh pendamping LK3 dan psikolog menggunakan fasilitas mobil LK3. Masyarakat yang melakukan konsultasi kepada tim sebanyak 45 orang.
- 5.5. Operasional Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) PLAT merupakan tempat penampungan sementara bagi anak berhadapan dengan hukum maupun anak bermasalah lainnya. Sebagian besar dana digunakan untuk biaya makan minum selama mereka berada didalam PLAT. Selain sebagai tempat penampungan sementara, PLAT juga memberikan pembinaan baik dari bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan psikologi. Selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan keterampilan berupa pembuatan batako.
- 5.6. Pendampingan Pembinaan E-warung Kegiatan ini berupa operasional yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penyuksesan program pemerintah pusat berupa pendampingan E- waroeng selama satu tahun.
- 5.7. Penguatan Komunitas Berisiko (ODHA) Kegiatan ini berupa kunjungan ke ODHA yang berada di wilayah Kota Pontianak. Kegiatannya berupa penyuluhan dan motivasi kepada ODHA bersama dengan lembaga Komisi penanggulangan Aids serta puskesmas setempat. Jumlah masyarakat yang telah diberikan penyuluhan sebanyak 42 orang. Sedangkan yang disuluh intensif sebanyak 18 orang.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak, terdiri dari :

1. Persentase pemberdayaan fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Persentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
3. Persentase peningkatan pembinaan anak terlantar/jalanan;
4. Persentase peningkatan para penyandang cacat dan trauma;

5. Persentase meningkatnya pelayanan bagi lansia;
6. Persentase peningkatan pembinaan panti asuhan/panti jompo;
7. Persentase peningkatan pembinaan anak cacat dan stimulan;
8. Persentase meningkatnya pembinaan bagi orang gila terlantar;
9. Persentase meningkatnya pembinaan Gelandang dan Pengemis (Gepeng);
10. Persentase peningkatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Masyarakat.

Berikut data PMKS di Kota Pontianak dalam kurun 2010-2013.

Tabel II.162
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pontianak
Tahun 2010 – 2015

No	Jenis PMKS	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Orang Terlantar	Jiwa	72	55	44	44		
2.	KK miskin	KK	2.501	2.501	2.501	15.271		
3.	Anak Panti Asuhan	orang	1.147	1.308	1.514	1.515		
4.	Anak Jalanan	orang	82	82	0	0		
5.	Anak terlantar diluar panti	orang	35	30	30	30		
6.	Penyandang cacat remaja	orang	104	104	104			
7.	Anak cacat ringan	orang	30	25	30			
8.	wanita rawan sosial	orang	180	175	500			
9.	Gepeng lokal	orang	89	40	30	25		
10.	orang gila/ psikotik terlantar	orang	24	32	177	57		
11.	korban bencana sosial / pengungsi	Jiwa	304	96	115	30		
12.	mayat terlantar	Mayat	23	13	7	10		
13.	pengemis / gelandangan	Orang	149	90	105	25		

Sumber : Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota Pontianak, 2015



Kota Pontianak memiliki beberapa sarana sosial seperti panti asuhan sebanyak 32 buah yang dikelola oleh pihak non pemerintah dan Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Pontianak. PLAT tidak hanya

Gambar II-5

Gedung Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak

difungsikan sebagai tempat penanganan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi juga untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan manusia, serta juga difungsikan sebagai tempat penguatan kapasitas anak. Berdirinya Kota Pontianak sebagai Kota Layak Anak, juga bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara terintegrasi dan mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan sosial anak dari keterlantaran, eksploitasi, diskriminasi dan tindak kekerasan fisik, psikis maupun tindak kekerasan seksual.

V. Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kota Pontianak tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu, namun juga untuk memanfaatkan kekayaan khasanah seni dan budaya dalam bidang ekonomi khususnya pendukung pariwisata daerah. Kekayaan budaya merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dapat menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Dalam rangka pengembangan nilai budaya, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berdirinya berbagai macam sanggar seni budaya di masyarakat. Saat ini telah terbentuk sanggar seni dan budaya sejumlah 165. Akan tetapi akibat keterbatasan sumberdaya dan sumber dana yang ada, hanya 35 sanggar seni budaya saja yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Pontianak.

Selain melakukan pembinaan sanggar seni dan budaya, Pemerintah Kota Pontianak melakukan pendataan dan pemantauan terhadap benda-benda yang memiliki nilai sejarah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010, yang termasuk dalam klasifikasi Benda Cagar Budaya yang terdapat di Kota Pontianak adalah:

1. Istana Kadriah Keraton Kesultanan Pontianak Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Ali Bin hamid Assegaf pernah dipugar Depdikbud Prov tahun 1923 M Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1992-1996
2. Masjid Sultan Abdurahman Alk Rumah Ibadah Kesultanan Pontianak Muharam Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Usman

- Mohdar Al-Idrus pernah dipugar Depdikbud Prov 1237 H Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1994-1998
3. Komplek Makam Batulayang Kesultanan Makam Kesult Pontianak tahun 1808 M Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Sy. Mohdar alkadrie pernah dipugar Depdikbud Prov Pontianak Kec. Pontianak Timur Kalbar tahun 1984-1988
 4. Tugu Khatulistiwa tugu Kolonial Belanda tahun 1928 Kel. Batulayang Kota Pontianak Hamdi Kec. Pontianak Utara
 5. Masjid Baitan Nur Rumah Ibadah Kesult Pontianak th. 1216 H Kel. Dalam Bugis Kota Pontianak Abdul Gawi Obet 1802 M Kec. Pontianak Timur
 6. SDN 46 (sekarang SDN 14) Sekolah Kolonial Belanda tahun 1928 Jl. Tamar Kel. Tengah Kota Pontianak Kec. Pontianak Kota
 7. Bekas Gedung PBI Bangunan Kemerdekaan/NICA thn. 1945 Jl. Zainuddin Kel Tengah Kota Pontianak Sekarang Gedung Pramuka Kec. Pontianak Kota Kwarcab Pontianak
 8. Kelenteng/Vihara Bodhisatva Karaniyah Metta Rumah Ibadah tahun 1689 M Komplek Pasar Kapuas Indah Kota Pontianak Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota
 9. Kantor Pos Bangunan Kolonial Belanda tahun 1937 Jl. Rahadi Usman Kota Pontianak
 10. Lapangan Keboen Sajoek (PSP) Situs Kemerdekaan th. 1945-1950 Jl. AR. Hakim Kota Pontianak digunakan oleh pejuang untuk Kel. Tengah Kec. rapat akbar menentang DIKB Pontianak Kota
 11. Sumur Bor Situs/Mesin Kolonial Belanda tahun 1930 Kantor Camat Kota Pontianak, Pontianak Kota Jl. Pangeran Natakusuma
 12. Pelabuhan Teng Seng Hie Situs Abad 18-19 M Jl. Sultan Muhammad Kota Pontianak Pelabuhan Rakyat I Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan
 13. Bekas Komplek Kantor Residen Bangunan abad 20 M Jl. Zainuddin Kel. Tengah Kota Pontianak Sekarang BAPPEDA Kota Ptk. Borneo Barat Kec. Pontianak kota.

W. Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan kearsipan, Pemerintah Kota Pontianak membentuk unit kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Pontianak yang bertugas mengelolaa arsip-arsip penting daerah serta mengelola perpustakaan daerah. Pelaksanaan pembangunan dibidang perpustakaan tidak terlepas dari peningkatan minat baca masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan ketersediaan jumlah buku yang ada di perpustakaan daerah dan taman

bacaan yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah Kota Pontianak. Selanjutnya untuk melihat perkembangan perpustakaan daerah selama tahun 2010-2015, dengan kegiatan pengadaan jumlah buku tahun 2010 sebanyak 1.812 buku jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah pengadaan buku meningkat menjadi 2.646 buku dan tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 2.004 buku, dari pengadaan buku ini dapat memberikan jumlah ketersediaan buku di perpustakaan dari tahun 2010 sebanyak 17.297 buku jika dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah buku meningkat menjadi 19.943 buku dan meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi 21.247 buku dengan rata-rata peningkatan menjadi 36,70%.

Tabel II.163
Pengadaan dan Ketersediaan Buku di Perpustakaan
Tahun 2010 – 2015

No	Keterangan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan	1.812	2.646	2.004	2.196	2.280	2.728
2	Jumlah buku yang tersedia dipergustakaan	17.297	19.243	21.247	23.443	23.900	28.628
Jumlah Buku		19,109	21,889	23,251	25,639	26,180	31,356

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Kota Pontianak

Bertambahnya minat baca masyarakat dan aparaturnya pemerintahan Kota Pontianak ditunjang dengan ketersediaannya buku-buku perpustakaan maupun penambahan buku baru. Pada tabel dibawah dapat kita lihat tingginya minat baca masyarakat Kota Pontianak, hal ini terbukti dengan jumlah buku yang dipinjam rata-rata meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar 17,89% pada tahun 2010 sebanyak 5.324 buku dengan peminjaman perhari sebanyak 23 buku dan tahun 2011 sebanyak 3.306 buku dengan peminjaman buku perhari sebanyak 30 buku serta tahun 2012 sebanyak 4.170 buku dengan peminjaman perhari sebanyak 35 buku. Untuk jumlah judul buku yang baru setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 35,26% dimana tahun 2010 sebanyak 8.672 buku, tahun 2011 sebanyak 9.204 buku dan tahun 2012 sebanyak 9.872 buku. Untuk jumlah pengunjung perpustakaan juga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 30,49%, dimana tahun 2010 sebanyak 4.590 orang dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 24 orang, tahun 2011 sebanyak 4.229 dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 21 orang dan tahun 2012 sebanyak 6.353 pengunjung perpustakaan dengan rata-rata pengunjung perhari sebanyak 29 orang.

Tabel II.164
Jumlah Peminjaman, Judul Buku Baru dan Pengunjung
Perpustakaan Tahun 2010 - 2015

No.	Uraian	Satuan	Tahun (buku)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Judul buku yang dipinjam	Judul	4.982	5.864	6.573	7.992	8.394	8.003
2	Peminjaman buku perhari	Buah	23	30	35	38	39	23
3	Jumlah judul buku yang baru	Judul	6.112	6.994	7.702	9.120	9.522	11.886
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan	eksemplar	13.278	15.924	18.050	21.620	23.900	28.628
5	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	4.590	4.229	6.353	6.607	8.452	19.946
6	Rata - rata pengunjung prhari	Orang	24	21	29	32	35	56

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi Kota Pontianak

Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pertanian

Pembangunan bidang pertanian perikanan dan kehutanan telah diupayakan secara maksimal melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana di bidang pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas produk-produk pertanian baik itu tanaman pangan, sayuran, buah-buahan serta tanaman hias maupun penanganan pasca panen dan peningkatan pemasaran hasil pertanian.

Walaupun berstatus sebagai wilayah perkotaan dan memiliki fungsi sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, sektor pertanian tetap berkembang dan menjadi mata pencaharian sebagian kecil penduduknya. Produksi pertanian yang dihasilkan meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, sayuran dan buah-buahan. Untuk mendukung perkembangan pertanian dilakukan perluasan areal tanaman pertanian Jagung seluas 25 hektar dan perluasan areal Padi seluas 350 hektar dan perluasan areal sayuran seluas 7 hektar.

Luas Lahan pertanian Kota Pontianak senayak 3.797 Ha yang terbagi atas 221 Ha lahan pertanian sawah dan 3.576 lahan pertanian bukan sawah. Lahan pertanian paling luas terdapat di Kecamatan Pontianak Utara yaitu 2.136 Ha, yang merupakan penghasil Nanas dan Aloevera. Tahun 2016 sebanyak 9.554 kuintal Nanas yang diproduksi

di Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah rumpun sebanyak 168.420 rumpun. Sedangkan produksi Aloevera sebanyak 9.820.160 Kg yang dipanen pada lahan seluas 800.000 km². Disisi lain, Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara juga menghasilkan Nanas yakni sebanyak 1.028 kuintal di Pontianak Selatan dan 224 kuintal di Pontianak Tenggara.

Tabel II.165
Jumlah Beras Cadangan Pangan Untuk Bantuan Kepada Masyarakat
Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

No	Pengadaan Tahun	Jumlah (Kg)	Keterangan
1	2014	4,800.00	Sisa Stok tahun 2014-2016 (per 23 Maret 2017) sebanyak: 97.624,24 (stok di gudang Bulog Divre Kalbar)
2	2015	6,500.00	
3	2016	49,575.00	
4	2017	50.000	Sisa stok per 31 desember 2017 97.584,24 kg (dititipkan digudang bulog)
5	2018	45.000	Sisa stok per 31 Desember 2018 71.348 kg (dititipkan di gudang bulog)

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Umumnya tanaman pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu semusim.

Tanaman pangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Serealia: adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat;
2. Biji-bijian: adalah segala tanaman penghasil biji-bijian yang didalamnya terkandung karbohidrat dan protein;
3. Tanaman umbi-umbian: adalah tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya karena di dalam umbi terdapat kandungan karbohidrat untuk sumber nutrisi bagi tubuh;
4. Tanaman jenis lainnya: seperti sagu dan sukun.

Tanaman pangan yang diproduksi di Kota Pontianak adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan keladi. Namun, pada tahun 2018 tanaman jenis jagung tidak berproduksi. Pada tahun 2018 jumlah produksi pangan adalah sebesar 57,02 Ton/Ha. Jumlah ini naik dari tahun 2017 yaitu berjumlah 33,42 Ton/Ha atau naik sebesar 70,62%. Jenis tanaman pangan yang paling besar hasilnya adalah tanaman ubi kayu dengan jumlah produksi sebanyak 24,93 Ton/Ha, disusul oleh ubi jalar sebanyak 14,50 Ton/Ha.

Tabel II.166
Produktivitas Tanaman Pangan Menurut Jenisnya
Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Padi	Ton/Ha	26,00	24,31	3,55	3,44	3,59
2	Jagung	Ton/Ha	14,00	16,33	2,64	0,00	0,00
3	Ubi Kayu	Ton/Ha	136,00	201,91	28,58	19,05	24,93
4	Ubi Jalar	Ton/Ha	77,00	78,00	8,19	10,93	14,50
5	Keladi	Ton/Ha	140,00	140,00	14,00	0,00	14,00
Jumlah			393,00	460,55	56,96	33,42	57,02

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: *crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Kota Pontianak memiliki lahan pertanian yang difokuskan di Kecamatan Pontianak Utara. Fokus utama pertanian di Kota

Pontianak adalah produksi sayur-sayuran dan umbi-umbian. Luas lahan pertanian di Kota Pontianak adalah sebesar 1.355,82 Ha, tentu ini didukung dengan petani yang memadai.

Tahun 2018 jumlah petani di Kota Pontianak adalah sebanyak 2.708 orang. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3.587 petani, atau turun sebesar 24,51%. Jumlah petani terbanyak berasal dari Kecamatan Pontianak Utara dengan total petani sebanyak 1.312 orang.

Tabel II.167
Jumlah Petani Kota Pontianak Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	Anggota	434	569	549	589	466
2	Pontianak Kota	Anggota	282	304	329	274	214
3	Pontianak Selatan	Anggota	397	334	426	365	270
4	Pontianak Tenggara	Anggota	328	370	376	370	213
5	Pontianak Timur	Anggota	646	657	755	652	233
6	Pontianak Utara	Anggota	1.043	1.208	1.320	1.337	1.312
Jumlah			3.130	3.442	3.755	3.587	2.708

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tabel II.168
Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Usaha
Kota Pontianak Tahun 2014 - 2018

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Satuan	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Pontianak Barat	Pertanian	Orang	131	260	255	379	432
		Peternakan	Orang	115	121	121	37	34
		Perikanan	Orang	188	188	173	173	157
2	Pontianak Kota	Pertanian	Orang	164	173	180	103	169
		Peternakan	Orang	24	24	24	46	45
		Perikanan	Orang	94	107	125	125	146
3	Pontianak Selatan	Pertanian	Orang	229	221	284	214	248
		Peternakan	Orang	13	13	13	22	22
		Perikanan	Orang	155	100	129	129	139
4	Pontianak	Pertanian	Orang	138	151	147	149	196

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Satuan	Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018*)
	Tenggara							
		Peternakan	Orang	13	13	13	22	17
		Perikanan	Orang	155	100	129	199	210
5	Pontianak Timur	Pertanian	Orang	138	151	147	218	239
		Peternakan	Orang	30	30	30	13	4
		Perikanan	Orang	160	189	199	412	468
6	Pontianak Utara	Pertanian	Orang	208	185	196	989	1226
		Peternakan	Orang	15	15	15	157	86
		Perikanan	Orang	423	457	544	194	271

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Pada tahun 2018 jumlah kelompok tani di Kota Pontianak adalah sebanyak 294 kelompok yang terdiri dari 165 kelompok pertanian dan 129 kelompok perikanan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017, yaitu bertambah 19 kelompok tani. Kecamatan yang paling banyak memiliki kelompok tani adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan jumlah kelompok tani sebanyak 100 kelompok terdiri dari pertanian sebanyak 76 kelompok dan kelompok perikanan sebanyak 24 kelompok. Selanjutnya Kecamatan Pontianak Timur dengan jumlah kelompok tani sebanyak 59 kelompok yang terdiri dari 15 kelompok pertanian dan 44 kelompok perikanan.

Pada urutan ketiga ditempati oleh Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah kelompok tani sebanyak 37 kelompok yang terdiri dari 16 kelompok pertanian dan 21 kelompok perikanan. Urutan keempat yaitu Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah kelompok tani sebanyak 35 kelompok yang terdiri dari 22 kelompok pertanian dan 13 kelompok perikanan. Urutan kelima yaitu Kecamatan Pontianak Selatan yang berjumlah 32 kelompok yang terdiri dari 19 kelompok pertanian dan 13 kelompok perikanan dan urutan terakhir yaitu Kecamatan Pontianak Kota yang berjumlah 31 kelompok terdiri dari 17 kelompok pertanian dan 14 kelompok perikanan.

Tabel II.169
Jumlah Kelompok Tani Kota Pontianak
Tahun 2014 – 2016

No	Kecamatan	Satuan	Tahun					
			2014		2015		2016	
			Pertanian	Perikanan	Pertanian	Perikanan	Pertanian	Perikanan
1	Pontianak Barat	Kelompok	16	15	18	13	19	14
2	Pontianak Kota	Kelompok	14	10	15	9	14	12
3	Pontianak Selatan	Kelompok	14	9	18	10	16	12
4	Pontianak Tenggara	Kelompok	16	19	16	20	15	20
5	Pontianak Timur	kelompok	13	43	12	52	14	40
6	Pontianak Utara	kelompok	61	14	67	15	68	17
Jumlah			134	110	146	119	146	115

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tabel II.170
Jumlah Kelompok Tani Kota Pontianak
Tahun 2017 – 2018

No	Kecamatan	Satuan	Tahun			
			2017		2018	
			Pertanian	Perikanan	Pertanian	Perikanan
			21	14	22	13
2	Pontianak Kota	Kelompok	15	14	17	14
3	Pontianak Selatan	Kelompok	19	12	19	13
4	Pontianak Tenggara	Kelompok	15	20	16	21
5	Pontianak Timur	kelompok	14	40	15	44
6	Pontianak Utara	kelompok	73	18	76	24
Jumlah			157	118	165	129

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Target pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk tahun 2015–2019 difokuskan pada

peningkatan produktivitas Tanaman Hortikultura khususnya komoditas sayur jenis sawi, bayam dan kangkung. Produksi pertanian yang paling menonjol di Kota Pontianak adalah produksi tanaman sayuran daun dan sayuran buah. Pada tahun 2018 jumlah produksi tanaman sayur daun dan sayur buah semusim adalah sebanyak 7.318,10 Ton. Jumlah ini meningkat jauh dari tahun 2017 yang hanya berjumlah 4.684,16 Ton untuk produksi tanaman sayur daun dan sayur buah semusim.

Tanaman sayur daun dan sayur buah semusim yang paling banyak diproduksi adalah sayur kangkung dengan jumlah produksi sebanyak 1.928,7 Ton disepanjang tahun 2018. Sedangkan sayuran yang paling sedikit produksinya pada tahun 2018 adalah bawang merah yaitu sebanyak 7,00 Ton.

Tabel II.171
Produksi Tanaman Sayuran Daun Dan Sayuran Buah
Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018

No.	Jenis Tanaman	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Bawang Merah	Ton	-	-	39	29	7.00
2	Bawang Daun	Ton	421	313	342	187	282.80
3	Petsai/Sawi	Ton	997	696	744	1264	834.70
4	Lobak	Ton	61	45	15	-	-
5	Kacang Panjang	Ton	581	240	164	146	204.90
6	Cabe Besar	Ton	39	8	0		10.00
7	Cabe Rawit	Ton	277	323	300	215	82.40
8	Jamur *)	Ton	7366	1380	1356	14.16	1646.20
9	Tomat	Ton	204	120	715	105	296.30
10	Terung	Ton	123	64	74	61	458.00
11	Buncis	Ton	146	29	-	-	-
12	Timun	Ton	867	309	131	107	516.10
13	Kangkung	Ton	1307	1189	1242	1688	1928.70
14	Bayam	Ton	572	407	520	848	1051.00
15	Melon	Ton	-	-	-	20	-
Jumlah			12961	5123	5642	4684.16	7318.10

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Untuk komoditi buah-buahan, peningkatan produktivitas diukur pada komoditi Pepaya, karena papaya diusulkan menjadi

salah satu komoditi unggulan Kota Pontianak. Pepaya Pontianak memiliki karakteristik, tampilan, tekstur dan rasa yang lebih unggul dibandingkan papaya jenis lainnya.

Jumlah hasil produksi komoditas buah-buahan pada tahun 2018 adalah sebanyak 26.124 Ton. Jumlah ini meningkat 95% atau sebanyak 12.704 Ton. Dari jumlah tersebut, produksi papaya sebanyak 10.135 Ton atau sebesar 38,88% dari seluruh hasil produksi komoditas buah-buahan di Kota Pontianak. Komoditi lainnya yang merupakan unggulan di Kota Pontianak adalah nenas, rambutan dan pisang. Nenas sangat cocok ditanam di daerah gambut seperti sebagian besar lahan di Kota Pontianak.

Jumlah produksi nenas pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.097 Ton, jumlah produksi rambutan sebanyak 3.862 Ton sedangkan jumlah produksi pisang sebanyak 3.588 Ton. Untuk melihat detail produksi komoditas buah-buahan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.172
Produksi Komunitas Buah-Buahan Dan Sayur
Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018

No.	Jenis Tanaman	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Alpukat	Ton	-	-	-	40	-
2	Belimbing	Ton	67	41	60	67	89
3	Daku/Langsat	Ton	400	363	241	177	593
4	Durian	Ton	232	340	213	154	735
5	Jambu Biji	Ton	166	129	127	104	206
6	Jambu Air	Ton	100	176	173	161	496
7	Jeruk Siam/ Keprok	Ton	82	72	74	355	436
8	Jeruk Besar	Ton	162	184	155	52	92
9	Mangga	Ton	173	235	161	450	850
10	Manggis	Ton	-			4	80
11	Nangka/ Cempedak	Ton	503	799	680	1298	1776
12	Nenas	Ton	2167	1383	1081	2495	2097
13	Pepaya	Ton	4988	4368	4735	5318	10135
14	Pisang	Ton	1353	1291	1203	1610	3588
15	Rambutan	Ton	680	745	543	714	3862
16	Salak	Ton	23	7	4	6	14
17	Sawo	Ton	93	115	110	147	436
18	Sirsak	Ton	36	35	23	72	225

19	Sukun	Ton	32	31	30	30	45
20	Melinjo	Ton	367	98	109	162	261
21	Petai	Ton	-	-	-	2	83
22	Jengkol	Ton	-	-	-	2	27
Jumlah			11624	10412	9722	13420	26124

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

B. Urusan Kehutanan

Kota Pontianak sebagai kota yang sedang berkembang dihadapkan pada masalah mulai menurunnya daya dukung lingkungan akibat akumulasi berbagai dampak aktifitas yang terjadi. Untuk menanggulangi hal tersebut, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah menetapkan dan mengelola hutan kota sebagai bagian dari pemenuhan RTH.

Melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota, pemerintah kota Pontianak menetapkan kawasan seluas 22,25 Ha di 6 Kecamatan sebagai kawasan hutan kota yakni:

- a. Lingkungan Untan seluas 5 Ha di Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara
- b. Komplek Stadion Atletik Ampera seluas 4 Ha di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota
- c. Fasilitas Jalan Umum Pemerintah Kota Pontianak Jalan Sulawesai seluas 0,25 ha di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan dan Areal depan gedung pemuda KNPI Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Akcaya seluas 0,25 ha
- d. Kecamatan Pontianak Utara dengan lokasi
 - Buffer Zone Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kelurahan Batu Layang seluas 3 ha
 - Areal Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak Kelurahan Siantan Hilir seluas 2 ha
 - Buffer Zone Raiser Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 2 Ha
 - Buffer Zone Sub Terminal Agribisnis Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 1 Ha
 - Buffer Zone UPTD RPH Babi Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Siantan Hilir seluas 3 Ha
 - Buffer Zoner Sirkuit Balap Motor Kelurahan Batulayang seluas 1 ha.

- e. Buffer Zone Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dengan lokasi seluas 0,5 ha
- f. Buffer Zone gedung Bulutangkis Kota Pontianak dan SMKN 9 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat seluas 0,25 ha

Kawasan hutan kota tersebut selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga diharapkan dapat berfungsi memberikan perlindungan wilayah sekitarnya.

C. Urusan Perikanan

Tujuan penyelenggaraan urusan perikanan adalah mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana dan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk meningkatkan luas kolam/keramba, produksi dan produktivitas produk-produk perikanan budidaya seperti ikan Nila, lele, Mas, dan lainnya maupun perikanan tangkap dengan kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kota sangat memperhatikan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Kota Pontianak mulai dari penyediaan bibit di Balai Benih Ikan (BBI), penyediaan pakan, pemberian penyuluhan sampai dengan pemasaran untuk perikanan budidaya serta memberikan layanan bagi perikanan tangkap dengan membangun tempat pendaratan ikan (TPI), cold storage dan memberikan bantuan mesin motor kapal dan peralatan lainnya bagi nelayan. Diharapkan beberapa upaya tersebut dapat memberikan peningkatan bagi pembangunan bidang perikanan. Kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Pada bidang perikanan upaya yang terus ditingkatkan antara lain adalah pengembangan budidaya air tawar, peningkatan produksi perikanan air tawar, pembinaan nelayan, serta pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah Kota Pontianak.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar masih berpotensi untuk dikembangkan mengingat Kota Pontianak dilalui dua aliran sungai yang cukup panjang dan dalam yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain itu pemanfaatan lahan pekarangan di lokasi pemukiman yang masih jarang sangat memungkinkan untuk dikembangkan usaha budidaya ikan air tawar menggunakan kolam terpal.

Jumlah produksi ikan budidaya di Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah sebanyak 207,12 Ton, jumlah ini menurun 61,90% atau

sebanyak 336,44 Ton dengan ikan lele sebagai produksi terbanyak yaitu sebanyak 88,58 Ton.

Tabel II.173
Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Mas	Ton	219	14,42	2,99	13,04	15,97
2	Nila	Ton	751	322,43	85,43	146,94	61,14
3	Lele	Ton	1.430	351,46	74,35	383,58	88,58
2	Lain-lain	Ton	-	-	-	0,00	41,43
Jumlah		Ton	2400	688,31	162,77	543,56	207,12

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Selain hasil ikan budidaya, Kota Pontianak juga berpotensi untuk ikan hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan ini terdiri dari ikan air tawar maupun ikan air asin. Jumlah hasil tangkapan pada tahun 2018 adalah sebanyak 378,18 Ton. Untuk detail jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan di Kota Pontianak kurun waktu 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.174
Produksi Ikan Hasil Tangkapan
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Alu-alu/Manggihan/Pucul	Ton	985,8	0	8505,7	3.250,50	6,47
2	Anjang-anjang	Ton	0	0	0	0,00	0,70
3	Baronang	Ton	0	0	0	0,00	0,26
4	Batu (Kuning-kuning)	Ton	0	0	0	0,00	9,82
5	Bawal Hitam	Ton	0	0	1325,2	430,00	0,00
6	Bawal Putih	Ton	0	0	0	0	0
7	Belanak	Ton	0	0	0	0,00	0,00
8	Bentong	Ton	0	110	10.775,30	8.205,20	0,00
9	Biji Nangka	Ton	0	0	0	0,00	1,74

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018 *)
10	Biji Nangka Karang	Ton	0	0	10.102,50	1.202,50	0,00
11	Birai	Ton	0	0	0	0	11,89
12	Bonak	Ton	0	0	0	0	1,36
13	Cucut Botol	Ton	0	0	0	0	0
14	Cucut Tikus/Cucut Monyet	Ton	0	0	0	0,00	0,00
15	Cumi-cumi	Ton	0	1182	284.820	190.530,20	0,00
16	Daun Bambu/Talang-talang	Ton	124	759	5225,2	1.105,50	0,00
17	Daun-daun	Ton	0	0	0	0,00	1,81
18	Ekor Kuning/Pisang-Pisang	Ton	36	1,01	5837,9	3.225,20	7,88
19	Gerot-gerot	Ton	0	0	0	0,00	0,00
20	Golok-golok	Ton	0	0	0	0,00	0,00
21	Gulamah/Tigawaja	Ton	0	0	19.320	6.205,30	0,00
22	Gentong	Ton	0	0	0	0	2,18
23	Geronggong	Ton	0	0	0	0,00	0,01
24	Hiu	Ton	0	0	0	0,00	2,82
25	Hiu Mejan	Ton	0	0	0	0,00	0,11
26	Ikan Lainnya	Ton	3219,8	0	0	0,00	0,00
27	Ikan Lidah	Ton	0	0	0	0,00	0,00
28	Kacang-kacang	Ton	0	0	0	0,00	2,92
29	Kakap Batu	Ton	0	0	0	0,00	1,38
30	Kakap Merah	Ton	0	0	0	0,00	1,50
31	Kakap Merah (Kecil)	Ton	0	0	0	0,00	0,04
32	Kakap Merah (Angsam)	Ton	0	0	0	0,00	7,76
33	Kakap Merah (Semerah)	Ton	0	0	0	0,00	17,57
34	Kakap Merah/Bambangan	Ton	1276,8	12.199	40.502,30	15.352,20	3,42
35	Kapas-kapas	Ton	0	0	0	0,00	0,00
36	Kelarau	Ton	0	0	0	0,00	12,35
37	Kembung	Ton	413	2144	28.435,20	16.22,5	1,95
38	Kepiting	Ton	80	0	15.325,20	8.105,30	0,00
39	Kerapu	Ton	0	0	0	0,00	0,63
40	Kerapu Batu	Ton	0	0	0	0	8,42

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018 *)
41	Kerapu Bola	Ton	0	0	0	0,00	7,90
42	Kerapu Gepeng	Ton	0	0	0	0,00	2,70
43	Kerapu Hitam	Ton	0	0	0	0,00	8,65
44	Kerapu Balong	Ton	43,8	0	12.125,10	6.750,20	0,00
45	Kerapu Bebek	Ton	1,6	998	10.325,20	3.225,00	0,00
46	Kerapu Karang	Ton	0	0	1.280,10	952,50	0,00
47	Kerapu Sunnu	Ton	623,9	0	8725,3	5.630,50	0,00
48	Kerisi	Ton	0	0	0	0,00	3,49
49	Ketambak	Ton	0	0	0	0,00	9,22
50	Ketambak Batu	Ton	0	0	0	0,00	0,01
51	Ketang	Ton	0	0	0	0,00	16,31
52	Kerong-kerong	Ton	0	0	0	0,00	0,00
53	Kuniran	Ton	0	0	0	0,00	0,00
54	Kurau	Ton	0	0	0	0,00	0,00
55	Kurisi	Ton	556	1117	18.302,50	8.795,20	0,00
56	Kuro/Senagin	Ton	0	0	0	0,00	0,00
57	Kuwe/Manyok	Ton	34	2226	19.475	10.207,50	8,50
58	Layang	Ton	486	1414	34.805,30	15.357,20	0
59	Layaran	Ton	101,5	383	8.530,20	9.201,00	0,00
60	Layur	Ton	104	445	22.325,30	10.750,20	0,00
61	Manyong	Ton	281,3	1875	22.225,50	23.015,00	18,16
62	Marlin	Ton	0	0	0	0,00	0,30
63	Mayok Sabun	Ton	0	0	0	0,00	0,14
64	Merah (Tumpu)	Ton	0	0	0	0,00	2,10
65	Napoleon	Ton	0	0	0	0,00	0,92
66	Otek	Ton	0	0	0	0,00	12,83
67	Pari	Ton	0	0	0	0,00	1,23
68	Pari Kembang/Pari Macan	Ton	338	0	5.102,20	2.105,20	0,00
69	Pase-pase	Ton	0	0	0	0,00	0,35
70	Pedang	Ton	0	0	0	0,00	0,00
71	Peperek	Ton	0	0	0	0,00	0,00
72	Rajungan	Ton	4,4	0	0	60.050,2	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018 *)
						0	
73	Sabun-sabun	Ton	0	0	0	0,00	16,28
74	Sebelah	Ton	0	0	0	0,00	0,00
75	Seiko	Ton	0	0	0	0,00	35,45
76	Selanget	Ton	0	0	0	0	0
77	Selar	Ton	62	1076	10.235,20	7.105,20	0,00
78	Selayar	Ton	0	0	0	0,00	0,93
79	Setuhuk Biru	Ton	0	0	1.201,20	565,50	0,00
80	Setuhuk Hitam	Ton	0	881	2.130,10	807,20	0,00
81	Setuhuk Loreng	Ton	0	0	1.112,50	120,50	0,00
82	Sotong	Ton	0	0	245.318,60	180.210,00	33,78
83	Sunuk	Ton	0	0	0	0,00	0,51
84	Sawanggi/Mata Besar	Ton	0	0	0	0,00	0,00
85	Talang	Ton	0	0	0	0,00	9,80
86	Tambak	Ton	0	0	0	0,00	0,02
87	Tamban	Ton	0	0	0	0,00	3,18
88	Tenggiri	Ton	4819	11,75	138.987,70	83.897,90	28,91
89	Tenggiri Papan	Ton	0	0	0	0,00	0,00
90	Teri	Ton	56	0	12.575,10	2.175,20	0,00
91	Tetengkek	Ton	0	0	0	0,00	4,90
92	Timun-timun	Ton	0	0	0	0	32
93	Toman Tose	Ton	0	0	0	0,00	9,21
94	Tongkol	Ton	0	0	0	0,00	0,01
95	Tongkol Abu-abu	Ton	0	0	10.140,30	5.265,20	0,00
96	Tongkol Hitam	Ton	0	0	0	0,00	1,84
97	Tongkol Komo	Ton	27	581	15.120,50	9.835,00	0,00
98	Rtongkol Krai	Ton	14	767	0	0,00	0,00
99	Tongkol Putih	Ton	0	0	0	0,00	3,56
100	Tuna Mata Besar	Ton	240,3	0	0	0	0
101	Udang Dogol	Ton	0	0	21.353,70	10.225,20	0,00
102	Udang Lainnya	Ton	0	0	0	0,00	0,00

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018 *)
103	Udang Putih/Jerbung	Ton	0	0	47.205,20	15.260,00	0,00
104	Udang Ratu/Raja	Ton	0	0	22.405,70	6.352,00	0,00
105	Udang Rosok	Ton	0	0	35.102,20	17.030,50	0,00
106	Udang Windu	Ton	0	0	23.205,10	8.705,30	0
Jumlah		Ton	14.314,60	39.559	1.179.490,10	757.427,00	378,18

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

*) Angka sementara sampai bulan desember 2018

Kapal perikanan didefinisikan sebagai kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Kapal-kapal ikan tersebut terdiri dari kapal atau perahu berukuran kecil berupa perahu sampan (perahu tanpa motor) yang digerakkan dengan tenaga dayung atau layar, perahu motor tempel yang terbuat dari kayu hingga pada kapal ikan berukuran besar yang terbuat dari kayu, *fibre glass* maupun besi baja dengan tenaga penggerak mesin diesel. Jenis dan bentuk kapal ikan ini berbeda sesuai dengan tujuan usaha, keadaan perairan, daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan lain-lain, sehingga menyebabkan ukuran kapal yang berbeda pula.

Kota Pontianak sendiri untuk perikanan memiliki armada / sarana prasarana kapal motor perikanan jenis < 5GT dengan jumlah kapal 23 buah. Jenis alat tangkap untuk kapal terdiri atas dua jenis yaitu tipe pancing dan bubu.

Tabel II.175
Data Armada/Sarana Prasarana Kapal Motor Perikanan < 5 GT
Kota Pontianak Tahun 2018

NO	NAMA KAPAL (KMN)	JENIS ALAT TANGKAP
1	BERKAH ILAHI	PANCING DAN BUBU
2	ZIRANTI	PANCING DAN BUBU
3	ELANG PUTIH	PANCING
4	BORNEO FISHING	PANCING DAN BUBU
5	RAHMAT JAYA	PANCING DAN BUBU
6	LANGIT BIRU	PANCING
7	HIDAYAH	PANCING DAN BUBU
8	CAHAYA INTAN	PANCING
9	ANUGERAH ILLAHI	PANCING
10	KURNIA ILLAHI	PANCING
11	PERMATA HATI AL-ZIQRIE	PANCING
12	ALHAMDULILLAH	PANCING DAN BUBU
13	KARYA ABADI 2	PANCING
14	KOTA PONTIANAK 3	PANCING
15	BERKAH PEGURAS	PANCING
16	BERKAH ILLAHI	PANCING DAN BUBU
17	SALSABILA	PANCING
18	RUNBINAR	PANCING
19	BAHTERA	PANCING
20	M. ALWI	PANCING
21	MAJU JAYA	PANCING
22	WALET IRIAN	PANCING
23	GAIRAH KEMBALI	PANCING

Sumber : Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

D. Urusan Pariwisata

Sebagai kota yang heterogen dan memiliki berbagai keunikan budaya, adat istiadat serta keunikan geografinya, pariwisata merupakan salah satu urusan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian kota selain sektor perdagangan dan jasa. Keterkaitan tiga sektor tersebut amatlah erat sehingga pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas pengaruhnya dari dua sektor lainnya tersebut. Hasil pendataan pada hotel dan penginapan di Kota Pontianak bahwa lamanya rata – rata kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Pontianak tidak mengalami peningkatan.

Tabel II.176
Perkembangan Kunjungan Wisata
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

TAHUN	JUMLAH WISATWAN		TOTAL
	NUSANTARA	MANCA NEGARA	
2014	932.070	24.955	957.025
2015	878.712	42.460	921.172
2016	939.149	30.468	969.617
2017	957.059	32.532	989.591
2018	1.077.356	47.681	1.125.037

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Tabel II.177
Jumlah Pengunjung Tugu Khatulistiwa
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

TAHUN	JUMLAH WISATAWAN		TOTAL
	NUSANTARA	MANCA NEGARA	
2014	81.919	7291	89.210
2015	77.609	8659	86.268
2016	86.088	7494	93.582
2017	105.617	9300	114.917
2018	111.297	10.057	121.354

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dari seluruh sektor pariwisata, Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan penerimaan pajak yang termasuk Pendapat Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp. 115.821.187.964,- , Jumlah ini didapat dari nilai realisasi penerimaan pajak daerah dari perhotelan, rumah makan/restoran, agen pariwisata dan yang terkait dengan pariwisata lainnya.

Tabel II.178
Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK (Rp)
1	2014	61.081.027.272
2	2015	78.324.224.293
3	2016	94.118.710.200
4	2017	101.323.216.430
5	2018	115.821.187.964

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

E. Urusan Industri dan Perdagangan

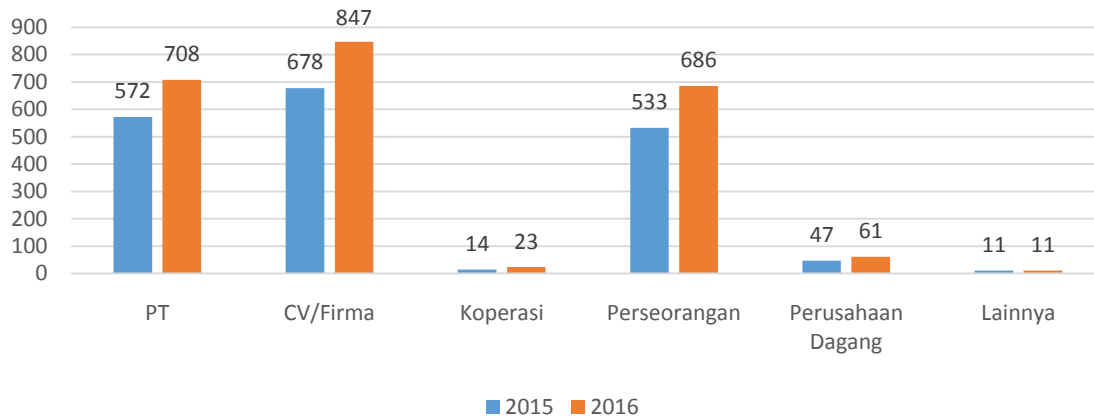
Perindustrian

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang industri, Kota Pontianak melakukan pembinaan terhadap industri menengah, besar dan industri rumah kecil dan rumah tangga. Mengingat keterbatasan lahan serta sumber daya yang dimiliki, industri kurang begitu berkembang di Kota Pontianak, yang mana terlihat dari kontribusinya dalam PDRB Kota Pontianak hanya 7,01%. Akan tetapi bukan berarti sektor ini dapat dipandang sebelah mata karena terbukti industri kecil dan menengah mampu bertahan selama krisis ekonomi melanda dan menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Dalam kurun waktu 2009-2013 telah banyak yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak untuk memajukan sektor ini. Gambaran perkembangan sektor industri dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.

Tahun 2017, perusahaan di Kota Pontianak meningkat sebesar 25,93 persen dengan perusahaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah perusahaan berbadan hukum koperasi yakni sebesar 64,29 perseb. Sementara itu, perusahaan yang mengalami peningkatan terkecil adalah perusahaan berbadan hukum PT dimana peningkatannya hanya 23,78 persen. Surat Ijin Usaha yang diterbitkan meningkat sebesar 42,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik II.24

Perkembangan Jumlah Perusahaan di Kota Pontianak Tahun 2015-2016

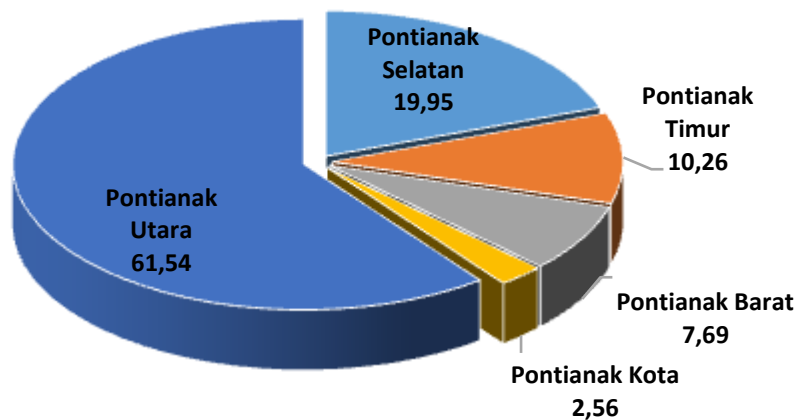


Sumber: Statistik Daerah Kota Pontianak 2017. BPS Kota Pontianak. 2017

Jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Pontianak pada kondisi tahun 2016 adalah sebanyak 39 perusahaan dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Utara yang bertambah 6 Industri. Industri Besar/Sedang paling banyak adalah industri makanan sebanyak 12 industri.

Grafik II.25

Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang di Kota Pontianak Tahun 2016



Sumber: Statistik Daerah Kota Pontianak 2017. BPS Kota Pontianak. 2017

Tabel II.179
Perkembangan Industri di Kota Pontianak Tahun 2009 - 2016

No.	Uraian	Satuan	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Industri Menengah (Asset 200 juta s/d 10 Milyar)									
1.	Unit Kerja	Unit	848	107	108	110	112	119	128	128
2.	Tenaga Kerja	Orang	4240	1934	1934	1961	1981	2201	2529	2529
3.	Nilai Produksi	Rp Juta	50,880	31.873	35.071	35.401	40.849	47.047	48.419	48.541
4.	Jumlah Industri menengah per Jenis Kerajinan		848	475	505	517	612	684	702	720
a.	Kulit	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Kayu	Unit	45	33	36	36	43	44	46	47
c.	Logam/Logam Mulia	Unit	18	32	33	33	37	41	44	46
d.	Anyaman/Gerabah/Keramik	Unit	11	3	3	3	3	3	3	3
e.	Dari Kain Tenun	Unit	2	1	1	1	1	1	1	1
f.	Industri Makanan/Minuman	Unit	367	143	152	153	204	219	225	229
g.	Tekstil	Unit	25	51	55	62	67	67	67	68
h.	Pakaian jadi	Unit	18	7	7	7	7	7	7	7
i.	Kertas	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
j.	Penerbitan, Percetakan, dan reproduksi media rekaman	Unit	45	104	109	115	124	146	149	152
k.	Kimia	Unit	1	11	12	12	16	21	22	22
m.	Karet	Unit	4	0	0	0	0	0	0	0
n.	Daur ulang	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0
B.	Industri Besar (Asset > 10 Milyar)									
1.	Unit Kerja	Unit	34	9	9	9	9	9	9	9
2.	Tenaga Kerja	Orang	1230	1403	1403	1403	1403	1403	1403	1403
3.	Nilai produksi	Rp Juta	782,009	12.527.818	12.527.818	12.527.818	12.527.818	12.527.818	12.527.818	12.527.818
C.	Rumah Kecil dan Rumah Tangga (Asset Rp. 0 s/d 200 Juta)									
1.	Jumlah Unit Kerja	Unit	816	648	737	789	941	1109	1200	1218
2.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1632	3691	2683	2813	3299	3830	4213	4218
3.	Nilai produksi	Rp Juta	2,040	161.873	165.071	165.401	227.349	233.547	458.799	917.72

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2015

Tabel II.180
Kinerja Indikator Bidang Perindustrian Kota Pontianak Tahun 2010 - 2016

No	Uraian	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi PDRB dari sektor perindustrian (%)	8.18	7.92	7.67	17,49	17,08	-	-
	- Pontianak Selatan (juta rupiah)	117,692.74	121,670.76	124,778.48	127.274,05	129.819,53	-	-
	- Pontianak Tenggara (juta rupiah)	29,007.13	30,542.56	31,694.90	32.274,80	32.975,37	-	-
	- Pontianak Timur (juta rupiah)	40,488.53	46,622.03	52,762.44	53.817,69	54.894,04	-	-
	- Pontianak Utara (juta rupiah)	608,601.54	637,215.51	687,687.01	701.440,75	715.469,37	-	-
	- Pontianak Barat (juta rupiah)	54,664.20	57,557.54	70,466.11	71.875,43	73.312,94	-	-
	- Pontianak Kota (juta rupiah)	119,756.06	125,077.69	135,118.01	137.820,37	140.576,78	-	-
2	Jumlah Industri RT, Kecil, Menengah (dalam unit)	1747	1842	1938	1989	2.063	2.094	2.094
3	Jumlah Industri (dalam unit)	1781	1876	1972	2023	2.072	2.103	2.103
4	Peningkatan kemampuan teknologi industri (dalam %)	10.05	20.18	27.3	-	-	-	-
5	Peningkatan nilai produksi Industri RT,Kecil, Menengah (dalam %)	1,013	2537	528	587	-	-	-
6	Prosentase Industri Tangga, Kecil, Menengah yang dibina (dalam %)	9.79	13.36	34.21	64.61	29,67	11,65	11,65
7	Tingkat aplikasi teknologi industri (dalam %)	8.11	8.92	11.2	-	-	-	-
8	Klasifikasi usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah (dalam %)	98.09	98.19	98.28	98.32	-	-	-
9	Prosentase Industri Rumah Tangga, Kecil, Menengah yang dibina program kemitraan (dalam %)	20.4	24.73	29.5	-	-	-	-
10	Pembangunan sentra usaha mikro, kecil dan menengah terpadu (dalam %)	-	0.02	0.02	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak

Perdagangan

Cakupan pelayanan yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak dalam bidang perdagangan adalah memberikan bimbingan teknis pelaksana, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran, pemantauan pengadaan dan penyaluran (distribusi) barang dan jasa, perlindungan konsumen serta urusan perizinan serta pengembangan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dagang di dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.181
Jumlah Pedagang
Kota Pontianak Tahun 2014-2018

No	Klasifikasi	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pedagang skala besar	128	77	64	102	58
2	Pedagang skala menengah	511	209	515	370	312
3	Pedagang skala kecil	1570	671	1300	1435	925
	Kota Pontianak	2209	957	1879	1907	1295

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Tabel II.182
Kinerja Indikator Bidang Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2010 - 2016

No	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan jasa (dalam persen)	21.30	21.56	21.65	22.92	18.42	-	-
2	Peningkatan jumlah pasar tradisional (binaan) (dalam unit)	7	7	7	7	7	8	8
3	Peningkatan jumlah pasar modern (dalam unit)	18	25	30	30	32	32	32
	jumlah pasar swalayan/ supermarket/ toserba (dalam unit)	25	25	25	25	25	25	25
	Hypermart (dalam unit)	1	1	1	1	1	1	1
	Pasar Grosir (dalam unit)							
	Mall/ Plaza (dalam unit)	4	4	4	4	4	4	4
	Gerai/ Outlet Alfamart & Indomaret (dalam unit)	-	-	-	-	21	46	77
	Pertokoan/ Warung/ Kios (dalam unit)	-	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan usaha perdagangan (dalam %)	6.24	6.86	7.89	-	-	-	-
5	Terkendalinya harga sembako (dalam %)	4.71	5.18	5.96	-	-	-	-
6	Penurunan jenis barang kadaluarsa yang beredar (dalam jenis)	4	4	8	10	10	11	-
7	Peningkatan total nilai ekspor kota pontianak melalui pelabuhan laut (dalam USD)	-	114.94	2.25	-	-	-	-
8	Peningkatan total nilai impor (dalam USD)	-	146.23	261.77	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak

Tabel II.183
Jumlah Pedagang di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2016

No.	Klasifikasi	Tahun							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pedagang Skala Besar	202	210	221	232	240	128	77	34
2	Pedagang Skala Menengah	173	182	191	201	210	511	209	303
3	Pedagang Skala Kecil	809	575	621	652	680	1.570	671	722
Kota Pontianak		1184	967	1033	1085	1130	2.209	957	1.059

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2013

Pasar

Cakupan pelayanan bidang meliputi pembinaan teknis, pembinaan dan penataan pasar, registrasi dan retribusi. Sebagai kota yang berkembang dari sector perdagngan, keberadaan pasar memiliki arti strategis dalam perekonomian kota. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mendorong berkembangnya sentra-sentra perdagangan di seluruh wilayah Kota Pontianak, khususnya di lokasi pusat-pusat pelayanan sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah Kota Pontianak. Hal ini memberikan peluang berkembangnya sector ini dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasar sebagai media bertransaksi antara penjual dan pembeli merupakan sarana yang vital dalam kegiatan perdagangan. Untuk itu perkembangannya mendapat perhatian penting. Pemerintah Kota Pontianak melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada untuk meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya bagi penjual dengan modal yang terbatas dengan pangsa pasar menengah ke bawah. Disisi lain pemerintah Kota Pontianak juga mendorong pihak swasta untuk berinvestasi membangun pasar-pasar modern untuk menyasar pangsa pasar menengah ke atas. Berikut data dan informasi perkembangan pasar di Kota Pontianak selama kurun waktu 2009-2013.

Tabel II.184
Perkembangan Pasar Modern di Kota Pontianak Tahun 2016

No	Nama Pasar	Alamat	Luas Tanah (M2)	Luas Bangunan (M2)	Status Tanah	Jumlah PKL Yang Ditempuh	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Tahun Dibangun	Kel	Kec
1	Hypermart Mega Mall	Jl. A. Yani Komp. A.Yani Mega Mall	-	-	-	-	-	2008	Parit Tokaya	Pontianak Selatan
2	Matahari Mall	Jl. Jend. Urip	9,820	22,000	HGB	75	551	1999	Tengah	Pontianak Kota
3	Carrefour	Jl. Jend Urip Komp Matahari Mall	9,820	1,900	Sewa	-	82	2011	Tengah	Pontianak Kota
4	Ramayanan Dept Store	Jl. Tanjungpura	10,000	7,000	-	-	-	-	B.M. Laut	Pontianak selatan
5	Swalayan Mitra Anda	Jl. Hasanudin	2,077	3,795	Hak Milik	Tidak ada	147	1992	S.J. Luar	Pontianak Barat
6	Swalayan Mitra Mart I	Jl. HRA. Rahman	1,903	2,979	Hak Milik	Tidak ada	127	2002	S.J. Dalam	Pontianak Barat
7	Swalayan Mitra Mart II	Jl. St. Abdurrahman	-	-	Hak Milik	Tidak ada	20	-	S. Bangkoning	Pontianak Kota
8.	Swalayan Mitra Mart III	Jl. Sei Raya Dalam	-	-	-	-	-	2003	B.B Darat	Tenggar a
9	Swalayan Garuda Mitra	Jl. HRA Rahman	2,576	1,872	Hak Milik	Tidak ada	215	1991	S.J. Dalam	Pontianak Barat
10	Swalayan Harum Manis	Jl. Agus salim	712	1,622	HGB	Tidak ada	58	1984	B.M. Darat	Pontianak selatan
11	Swalayan Kaisar	Jl. Pattimura	-	-	-	-	-	-	Darat sekip	Pontianak Kota
12	Swalayan Citra Jeruju	Jl. Kom Yos Sudarsi No.33	-	-	-	-	-	-	S.J. Luar	Pontianak Barat
13	Swalayan Sitra Siantan	Jl. Gst Mahmud No.8	1,350	1,105	Hak Milik	Tidak ada	82	2002	Siantan Hilir	Pontianak Utara
14	Swalayan Kaisar Siantan	Jl. Gst Mahmud	-	-	-	-	-	-	Siantan Hilir	Pontianak Utara
15	Swalayan Purnama	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Pontianak selatan
16	Swalayan Citra Niaga	Jl. Gajahmada Komp.Ps. Flamboyan	-	-	-	-	-	-	B.M.Darat	Pontianak selatan
17	Swalayan Citra Utama	Jl. Imam Bonjol	-	-	-	-	-	-	Bansir Laut	Pontianak selatan
18	Swalayan Ligo Mitra	Jl. Gajahmada	1400	3357	Hak Milik	Tidak ada	127	-	B.M.Darat	Pontianak selatan
19	Swalayan Xing Mart	Jl. Sei Raya Dalam	-	-	-	-	-	-	Bangka Bel. Darat	Tenggar a

No	Nama Pasar	Alamat	Luas Tana h (M2)	Luas Bangu nan (M2)	Status Tanah	Juml ah PKL Yang Dita mpun g	Jumla h Tenag a Kerja (Oran g)	Tahu n Diban gun	Kel	Kec
20	Swalayan Family Mart	Jl. Parit H Husin II	-	-	-	-	-	-	Bangka Bel. Darat S. Jawi	Kota Timur
21	Mini Market Sepakat Kota	Jl. Dr. Wahidin S	-	-	-	-	-	-	Tanjung Hulu	Utara
22	Mini Market Tanjung	Jl. Tekam Perumnas II	-	-	-	-	-	-	2000	Siantan Hulu Kota
23	Mini Market Citra Pangeran	Jl. Parit Pangeran	-	-	-	-	-	-	S. Bangko ng	Kota
24	Mini Market Safani	Jl. Danau Sentarum	-	-	-	-	-	-	2010	S. Jawi Kota
25	Mini Market Happy I	Jl. HRA Rahman	-	-	-	-	-	-	2010	S. Jawi Kota
26	Mini Market happy II	Jl. Gusti hamzah	-	-	-	-	-	-	-	Tengah Kota
27	Mini Market Asoka	Jl. KHW Hasyim	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
28	Mini Market Padi	Jl. Prof Dr. Hamka	-	-	-	-	-	-	Bangka Bel. Darat	Tenggar a
29	Mini Market Paris 2	Jl. P.H Husin II	-	-	-	-	-	-	Bangka Bel. Darat	Tenggar a
30	Mini Market Kita	Jl. P.H Husin II	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Kota
31	Mini Market Maju	Jl. P. H Husin II	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Barat
32	Swalayan Mitra Mart IV	Jl. Dr. Wahidin S	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
33	Mini Market Pal Mart	Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
34	Mini Market Primadona	Jl. Tabrani Ahmad	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
35	Mini Market Cempaka Mas	Jl. Danau Sentarum	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
36	Mini Market Aryo & Difo	Jl. P. Natakusuma	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
37	Mini Market Madani Mart	Jl. Wonobaru	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
38	Mini Market Chan-O	Jl. Purnama 2	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
39	Mini Market Abadi Jaya	Jl. M. Sohor No. 12-12	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
40	Mini Market Sari Harum	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
41	Mini Market Aheng	Jl. Purnama No. 1 A	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
42	Mini Market Talent Shop	Jl. Purnama 7	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
43	Mini Market Indo Maret	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan

No	Nama Pasar	Alamat	Luas Tana h (M2)	Luas Bangu nan (M2)	Status Tanah	Juml ah PKL Yang Dita mpun g	Jumla h Tenag a Kerja (Oran g)	Tahu n Diban gun	Kel	Kec
	Purnama									
44	Mini Market Mama Market	Jl. Purnama No.45	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
45	Mini Market Lucky	Jl. M. Sohor No.3	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
46	Mini Market Aisyah Toserba	Jl. Podomoro	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
47	Mini Market Mini Super	Jl. Tabrani Ahmad	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
48	Mini Market Raica	Jl. Ujung Pandang	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
49	Mini Market Aroyta	Jl. Ujung Pandang	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
50	Mini Market langganan Kita	Jl. Alianyang	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
51	Mini Market Aci	Jl. Gusti hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi	Kota
52	Mini Market Shopping	Jl. H.R.A Rahman & Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Barat
53	Mini Market Mal Mart	Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Barat
54	Mini Market Happy Mart I	Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Barat
55	Mini Market Rizieq	Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Barat
56	Mini Market Mega Mart	Jl. Husin Hamzah	-	-	-	-	-	-	S. Jawi Dalam	Barat
57	Mini Market Yuni Mart	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
58	Mini Market Prima Jaya	Jl. Purnama No.168 F	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
59	Mini Market Purnama Mart	Jl. Purnama	-	-	-	-	-	-	Parit Tokaya	Selatan
60	Mini Market Sim Jaya Abadi	Jl. Panglima A'im	-	-	-	-	-	-	Tanjung Hulu	Timur
61	Mini Market Mitra jaya	Jl. Ya'M Sabran	-	-	-	-	-	-	Tanjung Hulu	Timur

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2016

Tabel II.185
Perkembangan Pasar Tradisional yang Dibina di Kota Pontianak Tahun 2015

No.	Pasar	Kelurahan	Kecamatan	Binaan
1	Pasar Dahlia	Sei Jawi Dalam	Pontianak Barat	D-PPK-UKM
2	Pasar Pagi Ibu	Sei Jawi Dalam	Pontianak Barat	
3	Pasar Teratai	Sei Jawi Luar	Pontianak Barat	D-PPK-UKM
4	Pasar Pagi Milinium	Sei Jawi Luar	Pontianak Barat	
5	Pasar Landak	Sei Beliung	Pontianak Barat	
6	Pasar UKA	Sei Beliung	Pontianak Barat	
7	Pasar Sore	Sei Beliung	Pontianak Barat	
8	Pasar Nipah Kuning	Sei Beliung	Pontianak Barat	
9	Pasar Sepakat	Pal Lima	Pontianak Barat	
10	Pasar Mawar	Darat Sekip	Pontianak Kota	
11	Pasar Cempaka	Darat Sekip	Pontianak Kota	D-PPK-UKM
12	Pasar Kemuning	Sei Bangkong	Pontianak Kota	D-PPK-UKM
13	Pasar Pagi Mariana	Mariana	Pontianak Kota	
14	Pasar Pagi Wahidin	Sei Bangkong	Pontianak Kota	
15	Pasar Rakyat (Pancasila 5)	Sei Bangkong	Pontianak Kota	
16	Pasar Rakyat (H.Udin)	Sei Jawi	Pontianak Kota	
17	Pasar Flamboyen	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	D-PPK-UKM
18	Pasar Diponegoro	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
19	Pasar Kampung Bali	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
20	Pasar Antasari	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
21	Pasar Setiabudi	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
22	Pasar Hijas	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
23	Pasar Siam	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
24	Pasar Seroja	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	
25	Pasar Rakyat (Purnama)	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	
26	Pasar Ampera	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	
27	Pasar Kamboja	Benua Melayu Laut	Pontianak Selatan	
28	Pasar Tanjungpura	Benua Melayu Laut	Pontianak Selatan	
29	Pasar Rakyat (H Thaha)	Bangka Beliung Darat	Pontianak Tenggara	
30	Pasar Rakyat (H Abd Saleh)	Bangka Beliung Darat	Pontianak Tenggara	
31	Megamall A Yani	Bansir Darat	Pontianak Tenggara	
32	Pasar Kenanga	Dalam Bugis	Pontianak Timur	D-PPK-UKM
33	Pasar Anggrek	Dalam Bugis	Pontianak Timur	
34	Pasar Seruni	Saigon	Pontianak Timur	
35	Pasar Puring	Siantan Tengah	Pontianak Utara	D-PPK-UKM
36	Pasar Parit Nenas	Siantan Tengah	Pontianak Utara	
37	Pasar Jagung Bakar	Siantan Hulu	Pontianak Utara	
38	Pasar Batu Layang	Batu Layang	Pontianak Utara	
39	Pasar Gst Mahmud	Siantan Hilir	Pontianak Utara	
40	Pasar Pekong	Siantan Hilir	Pontianak Utara	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak 2015

Sarana pendukung aktivitas perekonomian Kota Pontianak adalah pasar tradisional dan pasar modern. Sampai dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 7 buah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak. Daya tampung pasar tradisional untuk pedagang dengan berbagai jenis dagangannya relatif sangat terbatas. Adapun pasar tradisional yang sudah diperbaiki atau direvitalisasi, antara lain adalah Pasar Dahlia, Pasar Cempaka, Pasar Puring, Pasar Kemuning, Pasar Teratai dan Pasar Flamboyen.

2.3.3. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bencana merupakan hal yang tak terduga dan acap kali terjadi. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindak tanggap terhadap kejadian bencana, maka Pemerintah Kota Pontianak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mewujudkan sistem pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas, profesional dan terpadu. Dalam operasionalnya di BPBD terdapat dua gugus tugas tanggap bencana yaitu Pasukan Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Dalam penanggulangan kebakaran di Kota Pontianak tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang bernaung dibawah yayasan pemadam kebakaran swasta dengan jumlah sebanyak 16 buah yayasan dengan personil secara keseluruhan sebanyak 1.006 (aktif dan non aktif) yang dapat dikerahkan apabila terjadi bencana kebakaran, serta sarana kendaraan sebanyak 16 unit fire truk, fire jip sebanyak 12 unit, trailer sebanyak 22 unit dan portable fire sistem sebanyak 25 unit. Seluruh kekuatan yang ada pada pemadaman kebakaran swasta dapat memberikan bantuan dalam penagulangan kebakaran yang sering terjadi di Kota Pontianak. Adapaun yayasan kebakaran swasta tersebut adalah sebagai berikut:

- Badan Pemadam Api Siantan
- Yayasan Pemadam Kebakaran Panca Bhakti
- Yayasan Pemadam Kebakaran Budi Pekerti
- Pemadam Kebakaran Mitra Bhakti
- Pemadam Kebakaran Merdeka
- Pemadam Kebakaran Mitra Jawi
- Yayasan Pemadam Kebakaran Khatulistiwa
- Perkumpulan Pemadam Kebakaran Bintang Timur
- Persatuan Pemadam Kebakaran Jeruju
- Unit Pemadam Kebakaran Gotong Royong
- Yayasan Bhakti Tiga Serumpun
- Pemadam Kebakaran Hikmah
- Pemadam Kebakaran Swadesi Borneo
- Pemadam Kebakaran Pesat
- Pemadam Kebakaran Pandu Siaga
- Pemadam Kebakaran Pemuda Pancasila

Tabel II.186
 Penanganan Bencana Yang Telah Dilakukan
 BPBD Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

NO	TAHUN	KEBAKARAN					BANJIR	ANGIN PUTING BELIUNG	KET
		PERMUKIMAN	RUKO	GUDANG	MOBIL	LAHAN			
1	2015	72	20	2	2	21		5	
2	2016	69	12	1	1	55	2	4	
3	2017	31	14	2	1	12		3	
4	2018	26	4	0	0	38	3	2	

Sumber : BPBD Kota Pontianak, 2018

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran lahan di Kota Pontianak pada tahun 2018 meningkat hingga terjadi 38 kejadian kebakaran dengan jumlah lahan yang terbakar adalah sebesar 22,78 Ha. Walaupun bisa dikatakan tidak terjadi bencana kebakaran lahan disepanjang tahun 2018, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada tahun 2018 tetap melaksanakan Action Plan guna pencegahan agar tidak terjadi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak, yaitu:

- Memaksimalkan potensi satuan kerja BPBD berkolaborasi dengan Damkar Swasta serta bekerjasama dengan TNI, Kepolisian, Manggala Agni, Satpol PP dan Relawan Masyarakat beserta dukungan perusahaan yang ada dalam wilayah Kota Pontianak;
- Melakukan konsolidasi berupa rapat rutin untuk mengevaluasi progres bencana kabut asap & pemadaman yang telah dilakukan dan rencana kerja berikutnya, bertempat di Posko Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kabut Asap BPBD Kota Pontianak;
- Menurunkan Tim Terpadu yang terdiri dari BPBD, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Terkait lainnya ke pemukiman masyarakat yang berhampiran dengan lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan lainnya sebagai wujud kepedulian;
- Menghimbau seluruh Damkar Swasta kota Pontianak dan sekitarnya untuk membantu Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan, serta kepada Perusahaan untuk membantu masker dan BPBD/Dinsosnaker memberikan bantuan Sembako/Kebutuhan Masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung;

- Bersama Pimpinan Daerah (FORKORPIMDA) secara rutin dan berkala melakukan Konsolidasi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla serta penegakan hukum pelaku Karhutla;
 - Menghimbau Masyarakat agar tidak melakukan Pembakaran Lahan dan hutan, melakukan sosialisasi di Kecamatan, Kelurahan dengan Spanduk, Baliho dll;
- Menghimbau Masyarakat agar tidak melakukan Pembakaran Lahan dan hutan.

Tabel II.187
Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan Tahun 2014 – 2018

TAHUN	LUAS	SATUAN
2015	3024	Ha
2016	174150	Ha
2017	6,01	Ha
2018	22,78	Ha

Sumber : BPBD Kota Pontianak, 2018

Tabel II.188
Data Kejadian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Di Kota Pontianak Tahun 2014 – 2018

BULAN	2015	2016	2017	2018
JANUARI	2	0	11	0
FEBRUARI	9	0	0	0
MARET	3	1	0	0
APRIL	0	1	0	0
MEI	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0
JULI	4	0	0	7
AGUSTUS	7	53	0	31
SEPTEMBER	5	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0
NOPEMBER	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0
TOTAL	30	55	11	38

Sumber : BPBD Kota Pontianak, 2018

Kejadian bencana yang kerap kali terjadi Kota Pontianak adalah bencana kebakaran, banjir, kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, dan angin puting beliung. Untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut dilakukan berbagai sosialisasi dan penanggulangan tanggap bencana baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok masyarakat serta anggota pemadam kebakaran swasta. Disisi lain tim reaksi cepat akan segera aktif apabila terjadi bencana dengan memberikan bantuan yang diperlukan bagi korban seperti bantuan kebutuhan dasar (sandang), bantuan makanan siap saji, serta bantuan konseling.

Dalam penanggulangan setiap kejadian bencana, BPBD berwenang mengkoordinasikan setiap aksi tindak penanganan dari berbagai komponen tanggap bencana yang ada. Disamping itu BPBD juga berwenang mengkoordinasikan setiap bantuan penanganan pasca bencana dari berbagai pihak/donor sehingga diharapkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

B. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai implementasinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005.

Fungsi utama dari Satpol PP adalah sebagai garda depan penegakkan aturan daerah khususnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan kaitan dengan penegakkan aturan daerah ini adalah berupa Penertiban/razia terhadap pelanggaran permainan layang-layang, penginapan, tempat hiburan, senjata tajam dan lain-lain. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan terpadu penertiban bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait yaitu penertiban PKL (gerobak, gubuk liar, kios, lapak dan lain-lain), pembinaan/razia gepeng dan PSK, razia/penertiban tempat kost, penertiban bangunan yang melanggar izin bangunan, penyuluhan/sosialisasi Perda tentang ketertiban umum serta pembinaan dan penataan PKL di Kota Pontianak.

Upaya penertiban bangunan/kios liar merupakan langkah terakhir yang ditempuh, setelah melakukan pendekatan dengan pemilik bangunan dan diberikan penjelasan dan penyuluhan. Setelah upaya tersebut tidak berhasil maka bagi pemilik bangunan/kios liar diberikan Surat Perintah Membongkar (SP). Surat Perintah 1 (SP-1) diberikan kesempatan kepada pemilik bangunan/kios liar selama 7 hari untuk membongkar sendiri bangunannya. Surat Peringatan 2 (SP-2) diberikan kepada pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunannya dalam tempo 5 (lima) hari, apabila dalam waktu 5 (lima) hari pemilik bangunan tidak membongkar bangunannya, maka diberikan surat peringatan ke 3 (SP-3). Surat Peringatan ke 3 (SP-3) memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri dalam tempo waktu selama 3 hari. Apabila dalam jangka waktu kesempatan selama 3 hari pemilik bangunan belum juga membongkar bangunannya sendiri, maka dilakukan pembongkaran oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu dan di back up oleh Kepolisian sektor, Koramil maupun unsur/instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Berikut informasi mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Tabel II.189
Tenaga Linmas Dan Poskamling Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Linmas	1428	1428	-	2602
2	Jumlah Tenaga Linmas yang diberdayakan	70	70	-	1276
3	Jumlah Poskamling	426	426	-	130
4	Jumlah Poskamling yang diberdayakan	401	401	-	130

Tabel II.190
Jumlah Laporan Persidangan Tipiring Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Warga yang tidak memiliki identitas / KTP	16	84	22	22
2	Warga pendatang dari luar daerah yang beraktivitas dan tinggal tidak menetap	24	13	0	0
3	Pelaku perbuatan asusila	105	440	394	394
4	Orang yang mencuci kendaraan bermotor di tepi sungai, parit dan saluran umum tanpa izin	13	0	0	0
5	Merokok di kawasan tanpa rokok		1	0	0
6	Warnet tanpa izin dan melewati jam operasional	6	105	63	63
7	Pemilik usaha tidak memiliki tempat sampah	19	0	0	0
8	Warga yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah	4	55	79	79
9	Pelaku usaha tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)	7	22	2	2
10	Orang bermain layang-layang tanpa izin	8	0	4	4
11	Pedagang / PKL yang berjualan di Fasilitas Umum	10	49	19	19

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.191
Jumlah Penertiban Kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	URAIAN/KECAMATAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	<i>Penertiban Gerobak</i>	81	125	88	65
	Pontianak Barat	9	26	10	9
	Pontianak Kota	26	64	16	21
	Pontianak Selatan	26	27	26	18
	Pontianak Tenggara	6	-	12	5
	Pontianak Timur	4	2	11	7
	Pontianak Utara	10	6	13	5
2	<i>Penertiban Kios / Pondok</i>	79	1	293	42
	Pontianak Barat	17	-	33	5
	Pontianak Kota	20	-	54	6
	Pontianak Selatan	9	-	52	6
	Pontianak Tenggara	14	-	46	7
	Pontianak Timur	9	-	87	8
	Pontianak Utara	10	1	21	10
3	<i>Penertiban Lapak</i>	149	118	236	249
	Pontianak Barat	53	9	63	38
	Pontianak Kota	37	42	49	57
	Pontianak Selatan	35	33	32	26
	Pontianak Tenggara	3	-	20	36
	Pontianak Timur	3	2	33	79
	Pontianak Utara	18	32	39	13
4	<i>Lain - Lain</i>	2625	1144	2201	1966
	Pontianak Barat	655	228	219	237
	Pontianak Kota	1515	460	570	453
	Pontianak Selatan	341	223	668	552
	Pontianak Tenggara	50	-	292	321
	Pontianak Timur	30	12	229	196
	Pontianak Utara	34	221	223	207
					2322

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.192
Razia Layang-Layang Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	KECAMATAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pontianak Barat	2	2	17	17
2	Pontianak Kota	20	30	4	4
3	Pontianak Selatan	1	1	21	21
4	Pontianak Tenggara	20	30	2	2
5	Pontianak Timur	2	2	13	13
6	Pontianak Utara	1	1	3	3

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.193
Kegiatan Bintibmas Yang Dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	KEGIATAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah operasi rutin (patroli) yang dilaksanakan	200	160	240	
2	Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan	150	138	103	
3	Jumlah pengawalan pejabat yang dilaksanakan	73	59	104	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.194
Jumlah Pengamanan Dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri	23	26	25	
2	Pengamanan Idul Adha	1	-	1	
3	Pengamanan Cap Go Me / Liong	2	2	2	
4	Pengamanan Natal dan Tahun Baru	2	-	2	
5	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat, Tamu VIP dan Lain-lain	80	52	104	
6	Pengamanan PILPRES	-	-	-	
7	Pengamanan PILLEG	-	-	-	
8	Pengamanan Hari Jadi Kota Pontianak	4 titik	-	5 titik	
9	Pengamanan HUT RI	1 titik	-	1 titik	
10	Pembinaan Poskamling dan Linmas	-	-	24	
11	Patroli Bersama Garnisum	48	56	100	
12	Pengamanan Aset Daerah / Alunpalun Kapuas	-	-	120	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.195
Jumlah Kejadian Kebakaran Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

NO	URAIAN	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Permukiman	72	62	44	29
2	Ruko	20	3	26	5
3	Gudang	2	1	2	2
4	Mobil / Motor	2	1	2	0
5	Lahan	21	49	12	20
	Jumlah	128	117	116	86

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.196
Kegiatan Bintibmas yang Dilaksanakan Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Kegiatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah operasi rutin (patrol) yang dilaksanakan	200	160	240	223
2.	Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan Instansi terkait) yang dilaksanakan	150	138	103	223
3.	Jumlah pengawalan pejabat yang dilaksanakan	73	59	104	163
	Jumlah	423	357	447	609

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tabel II.197
Jumlah Laporan Persidangan Tipiring Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelaku yang Diproses			
		2015	2016	2017	2018
1	Warga yang tidak memiliki indentitas/KTP	16	84	22	7
2	Warga pendatang dari luar daerah yg beraktivitas dan tinggal tidak menetap tidak punya kipem	24	13	0	0
3	Pelaku perbuatan asusila	105	440	394	556
4	Orang mencuci kendaraan bermotor di tepi sungai,parit & saluran umum tanpa izin	13	0	0	0
5	Merokok di kawasan tanpa rokok	-	1	0	1
6	Warnet tanpa izin dan melewati jam operasional	6	105	63	29
7	Pemilik usaha tidak memiliki tempat sampah	19	0	0	0
8	warga yang membuang sampah tidak sesuai dgn jadwal yang ditetapkan Pemerintah Daerah	4	55	79	33
9	Pelaku usaha tidak memiliki intalasi pengolahan air limbah (IPAL)	7	22	2	5
10	Orang bermain layang-layang tanpa izin	8	0	4	6
11	pedagang/PKL berjualan di Fasum/Fasos	10	49	19	18
12	Bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	1	0	4
13	Pedagang / PKL yang menumpuk atau mendirikan bangunan di atas fasilitas umum	-	-	-	13
14	Bertingkah laku asusila	-	9	19	8
	Jumlah	212	778	602	682

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Perkapita

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2017, pengeluaran terkecil sebagian besar penduduk di kota Pontianak sebulan berkisar antara Rp, 500.000 sampai Rp 999.000 per kapita untuk berbagai kebutuhannya, yakni sebanyak 0,1 persen. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan adalah 2 juta ke atas.

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita

Tabel II.198
Persentase Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Makanan/Pangan dan Non Makanan/Non Pangan Per Kapita Sebulan di Kota Pontianak Tahun 2015-2017

Jenis Konsumsi (1)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (4)
I Makanan	45,44	47,30	45,89
1. Padi-padian	4,76	4,32	3,91
2. Umbi-umbian	0,69	0,67	0,40
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4,38	4,14	4,57
4. Daging	3,22	3,57	2,21
5. Telur dan susu	3,40	3,40	3,04
6. Sayur-sayuran	2,36	2,47	3,0
7. Kacang-kacangan	0,89	0,81	0,72
8. Buah-buahan	2,0	2,02	2,21
9. Minyak dan lemak	0,90	0,79	0,84
10. Bahan Minuman	0,99	1,13	1,20
11. Bumbu-bumbuan	0,67	0,75	0,91
12. Lainnya	1,20	1,16	1,05
13. Makanan dan minuman jadi	12,91	12,76	17,35
14. Minuman beralkohol	0,0	1,27	*)
15. Tembakau dan sirih	7,08	8,04	4,49
II. Non Makanan	54,56	52,70	54,11
1. Perumahan	26,58	26,25	27,59
2. Aneka barang dan jasa	12,39	5,01	14,25
3. Pendidikan	*)	*)	**)
4. Kesehatan	*)	*)	**)
5. Pakaian dan alas kaki	3,24	4,0	3,44
6. Barang tahan lama	5,02	5,58	3,73
7. Pajak dan asuransi	2,13	2,63	2,86
8. Keperluan pesta	5,19	9,23	2,23

Sumber : Susenas (hasil olahan). Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2017

Tahun 2016, pengeluaran non makanan penduduk Kota Pontianak lebih besar dari pengeluaran untuk makanan. Melihat kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berpendapatan sedang dan tinggi sudah semakin banyak dibandingkan penduduk berpendapatan rendah sebab yang berpendapatan rendah akan cenderung terlebih dulu memenuhi kebutuhan makannnya.

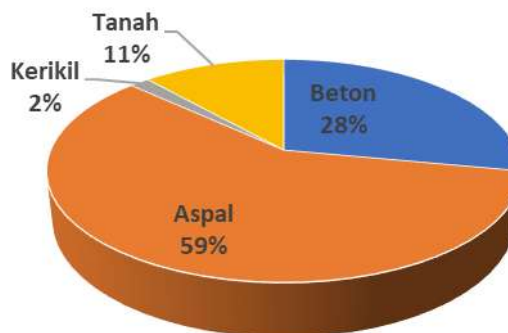
2.4.2 Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

Transportasi dan Infrastruktur Jalan:

Sektor transportasi di Kota Pontianak terdiri dari angkutan jalan raya, angkutan jalan laut, angkutan sungai dan jasa penumpang angkutan. Terdapat 6 (enam) terminal angkutan darat dengan terminal terluas terdapat pada terminal Batu Layang dengan luas 9.143m².

Panjang jalan di Kota Pontianak tahun 2017 tercatat sepanjang 280,17 km, yang sebagian besar permukaan jalan berupa aspal dan beton meskipun masih terdapat jalan dengan permukaan tanah sepanjang 32,43 km. Kondisi jalan di Kota Pontianak yang mengalami rusak ringan sepanjang 6,59 km dan 5,67 km yang mengalami rusak berat. Secara umum kerusakan jalan disebabkan karena kendaraan bermuatan berat dan struktur tanah yang sebagian besar merupakan tanah gambut

Grafik II.26
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2017 (km)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Pada tahun 2017, jumlah kendaraan yang berada di Kota Pontianak mencapai 202.095 unit, dimana 90% diantaranya merupakan kendaraan bekas dan 10% adalah kendaraan baru. Berdasarkan jenisnya, jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan roda 2 yang mencapai 90% dari total seluruh kendaraan yang ada di Kota Pontianak.

Tabel II.199
Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Pontianak
Tahun 2017

Rincian Jenis Kendaraan	Kendaraan baru	Kendaraan bekas
(1)	(2)	(3)
1 Kendaraan Bermotor Roda 2	20.341	181.754
2 Kendaraan Bermotor Roda 3	119	1.096
3 Mobil Penumpang (Sedan, SUV, MPV)	8	1.803
4 Bus dan sejenisnya	1	30
5 Microbus dan sejenisnya	7	94
6 Minibus dan sejenisnya	1.879	7.854
7 Mobil Pick up dan sejenisnya	357	3.949
8 Truk dan sejenisnya	27	3.856
9 Truk Tronton	1	58
10 Ambulans dan sejenisnya	13	5
11 Kendaraan Pemadam kebakaran		1
12 Jeep dan sejenisnya	133	1.476
Total	22.886	201.976

Sumber : UPT PPD Pontianak Wilayah I. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2018

Pariwisata:

Kedatangan dari luar negeri paling banyak pada bulan Januari dan kedatangan paling sedikit pada bulan Oktober, sedangkan keberangkatan luar negeri terbanyak pada bulan Juli dan Desember. Wisatawan Mancanegara yang datang melalui UPT Imigrasi Pontianak sebanyak 7.087 orang dengan wisatawan berkebangsaan Malaysia sebanyak 5.759 orang dan selebihnya adalah wisatawan dari kawasan Eropa, Amerika, Australia dan Afrika.

Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. TPK Hotel Berbintang dan Non Berbintang di Kota Pontianak masih terbilang kecil. Pada tahun 2016, rata-rata TPK Hotel Berbintang adalah sebesar 54,78 persen, keadaan ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana terdapat kenaikan rata-rata TPK sebanyak 2,1 poin. Sementara itu, TPK Hotel Non Berbintang di Kota Pontianak pada tahun 2016 sebesar 50,22 persen, atau naik sebanyak 1,73 poin dibandingkan dengan rata-rata TPK pada tahun 2015.

Tabel II.200
Tingkat Hunian Kamar Hotel (TPK) Menurut Bulan di Kota Pontianak
Tahun 2015-2017

Bulan	2015		2016		2017	
	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang
1	2	3	4	5	6	7
Januari	49,68	48,91	45,73	64,22	40,41	30,38
Februari	45,85	44,08	55,66	43,23	43,89	35,59
Maret	53,84	54,36	54,33	42,56	48,57	65,96
April	49,04	48,76	59,80	55,22	46,91	60,56
Mei	53,45	48,53	59,16	62,33	46,37	57,13
Juni	51,40	50,45	55,91	49,91	37,21	60,50
Juli	40,40	45,57	54,32	42,59	47,08	69,07
Agustus	56,86	51,68	61,32	48,72	55,87	61,32
September	49,87	44,43	44,29	45,17	53,46	67,86
Oktober	55,47	34,65	50,35	54,42	56,30	63,87
Nopember	63,34	53,89	56,92	42,89	51,40	62,60
Desember	61,99	55,80	59,61	49,79	56,15	67,91
Rata-Rata	52,68	48,49	54,78	50,22	48,62	55,66

Sumber : Laporan Perusahaan Akomodasi Hotel dan Non Hotel. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2018

Ketersediaan Listrik dan Air Bersih :

Tercatat sebanyak 627.417 pelanggan PLN sampai dengan Desember 2017 yang meliputi pelanggan rumah tangga, industri, perkantoran, bisnis, sosial dan pelanggan prabayar. Pelanggan yang paling banyak menggunakan listrik PLN adalah golongan rumah tangga dengan konsumsi listrik sebanyak 43,79 persen dari total listrik yang diproduksi PLN, sedangkan pelanggan listrik prabayar hanya mengkonsumsi listrik sebesar 8,27 persen.

Tabel II.201
Jumlah Pelanggan PLN Area Pontianak Menurut Jenisnya Tahun 2017

Bulan	Rumah Tangga	Industri	Perkantoran	Bisnis	Sosial	Prabayar	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	382.296	199	2.519	30.415	7.170	152.583	575.182
Februari	384.289	203	2.525	30.596	7.200	154.999	579.812
Maret	386.698	203	2.529	30.865	7.234	157.997	585.526
April	390.440	207	2.545	31.163	7.287	160.443	592.085
Mei	388.824	203	2.536	31.003	7.261	162.423	592.250
Juni	392.031	207	2.549	31.317	7.327	164.431	597.862
Juli	393.446	210	2.564	31.466	7.355	166.248	601.289
Agustus	394.935	212	2.579	31.714	7.390	168.401	605.231
September	396.548	215	2.579	31.873	7.427	170.482	609.124
Oktober	398.460	218	2.584	32.053	7.467	172.936	613.718
Nopember	401.652	217	2.594	32.290	7.512	176.819	621.084
Desember	404.238	221	2.614	32.523	7.577	180.244	627.417

Sumber : PT. PLN (Persero) Kalimantan Barat Area Pontianak. BPS Kota Pontianak. 2018

Tabel II.202
**Jumlah Pelanggan Air PDAM Menurut Jenis Konsumen
 di Kota Pontianak Tahun 2015-2017**

Jenis Konsumen	2015	2016	2017
1	2	3	4
Sosial	1.257	1.279	1.341
Non Niaga	88.005	92.345	99.329
- Rumah Tangga	87.636	91.913	98.883
- Instansi Pemerintah	369	432	446
Niaga	8.685	9.687	10.657
Industri	78	75	75
Khusus	7	5	3

Sumber : PDAM Kota Pontianak. BPS Kota Pontianak. 2018

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas:

Sampai dengan tahun 2015 jumlah laporan atas tindakan kriminalitas terus menurun, tercatat jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran di Kota Pontianak tahun 2015 adalah 3.116 laporan, ini lebih rendah 16,68 persen dari jumlah pelaporan atas tindak kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan di tahun 2016 yang berjumlah 3.740 laporan. Dari 3.116 laporan di tahun 2015, jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh Poltabes Kota Pontianak adalah 2.093 laporan. Berikut disajikan jumlah kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan dan diselesaikan menurut satuan kepolisian di Kota Pontianak:

Tabel II.203
Jumlah Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Satuan Kepolisian di Kota Pontianak Tahun 2015-2017

No.	SATUAN KEPOLISIAN	2015		2016		2017	
		Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Dilaporkan	Dilaporkan	Dilaporkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Polsekta Pontianak (Sat Reskrim)	1.074	910	1.258	793	947	650
2.	Polsekta Pontianak (Sat Narkoba)	92	91	109	113	87	72
3.	Polsekta Selatan	285	204	528	311	269	196
4.	Polsekta Timur	333	155	325	165	244	160
5.	Polsekta Utara	446	275	422	226	244	255
6.	Polsekta Barat	275	177	281	187	253	180
7.	Polsek Pontianak Kota	249	171	231	149	162	116
8.	KP3L	6	4	1	0	4	2
JUMLAH		2.760	1.987	3.740	1.944	2.210	1.631

Sumber : Polresta Kota Pontianak, BPS Kota Pontianak, 2018

Perbankan, Perijinan, Pajak dan Retribusi:

Fungsi Utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak

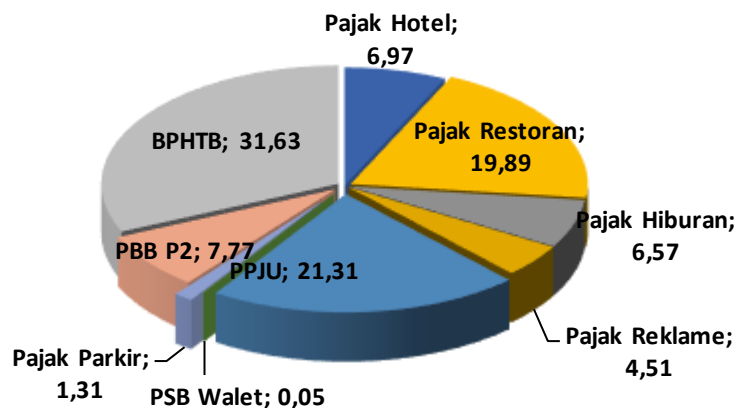
Pinjaman yang diberikan perbankan dalam bentuk rupiah dan valuta asing pada tahun 2016 sebanyak 40,54 persennya adalah pinjaman yang

diberikan sebagai modal kerja, 35 persen sebagai konsumsi, dan selebihnya digunakan untuk investasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Pontianak mendapat pinjaman sebanyak 4,5 Triliun Rupiah dimana pinjaman terbesar ada pada UMKM dengan lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 63,69 persen dari total pinjaman yang diberikan kepada UMKM.

Kontribusi jenis pajak terbesar terhadap pendapatan pajak daerah Kota Pontianak tahun 2017 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berkontribusi sebesar 31,63 persen dari total pendapatan pajak daerah tahun 2017. Jenis pajak terbesar kedua setelah PPJU adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang berkontribusi sebesar 21,31 persen dari total pendapatan pajak daerah tahun 2017. Sedangkan jenis pajak yang berkontribusi paling kecil di tahun 2017 adalah jenis pajak yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet yang hanya berkontribusi sebesar 0,05 persen dari total pendapatan pajak daerah Kota Pontianak tahun 2017. Berikut adalah gambaran proporsi kontribusi per jenis pajak terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak tahun 2017:

Grafik II.27

Proporsi Kontribusi Per Jenis Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak Tahun 2017



Sumber : Analisis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Angkatan Kerja:

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, terdiri dari:

1. Angkatan Kerja, terdiri dari (a) Bekerja; dan (b) Pengangguran.
2. Bukan Angkatan Kerja, terdiri dari: (a) Sekolah; (b) Mengurus Rumah Tangga; dan (c) Lainnya (pensiun, jompo, dll).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.204
Indikator Ketenagakerjaan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

Uraian	2015	2017	2018
Angkatan Kerja	278.764 jiwa	297.834 jiwa	291.925 jiwa
Bukan Angkatan Kerja (mengurus rumah tangga, sekolah, lainnya)	171.628 jiwa	170.026 jiwa	185.121 jiwa
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,86 %	63,66%	61,19%
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,44 %	9,36%	10,37%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.

Jumlah angkatan kerja di Kota Pontianak berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 adalah 278.764 jiwa dari penduduk usia kerja, dengan kata lain TPAK Kota Pontianak pada tahun 2015 adalah sebesar 61,89 persen. Dari jumlah angkatan kerja terhitung 252.439 jiwa yang bekerja dan 26.325 jiwa yang pengangguran. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 172.160 orang (61,76 persen), dan penduduk perempuan sebanyak 106.604 orang (38,24 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kota Pontianak relatif didominasi oleh pekerja laki-laki.

Selama empat tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Pontianak cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran Kota Pontianak adalah sebesar 9,44 persen atau sekitar 26.325 orang dari 278.764 angkatan kerja. Angka ini sedikit mengalami pengurangan sebesar 0,08% menjadi 9,36% pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 10,37%.

Tabel II.205
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kota Pontianak Tahun 2015-2018

Jenis Kegiatan Utama	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	278.764	297.834	278.764
- Bekerja	252.439	269.945	261.653
- Pengangguran	26.325	27.889	30.272
II. Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya)	171.628	170.026	185.121
Jumlah	450.392	467.860	477.046
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,45	63,66	61,19
Tingkat Pengangguran	8,05	9,36	10,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Upah Minimum:

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 827/Disnakertrans/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp.1.739.400,00. Angka ini naik 11,5 persen dari UMP tahun 2015 yang ditetapkan sebesar Rp.1.560.000,00. Menyusul penetapan UMP maka sesuai ketentuan Kepala Pemerintah Daerah/Kota mengajukan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kepada Gubernur untuk ditetapkan. UMK ini juga mencakup upah sektoral minimum Kabupaten/Kota (UMSK) bila ada. UMK dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMP.

Berikut adalah tabel UMK Kota Pontianak dari tahun ketahun:

Tabel II.206
Ketentuan Upah Minimum Yang Berlaku di Kota Pontianak
Tahun 2015-2018

Tahun	UMK
(1)	(2)
2015	Rp. 1.625.000,00
2016	Rp. 1.816.000,00
2017	Rp. 1.972.000,00
2018	Rp. 2.145.000,00

Sumber: disnakertrans.kabarprov.go.id/UMP-UMK/2018

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Guna melaksanakan setiap urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dibutuhkan alokasi dana sebagai bentuk keuangan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Adapun pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan daerah digambarkan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah guna membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Secara umum kinerja pemerintah dianggap baik jika pendapatan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya khususnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah, dan belanja langsung daerah memiliki komposisi lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dimana dalam penyusunan APBD ini asumsi dasar kondisi makro ekonomi nasional turut menjadi bahan penting yang berdampak pada perkembangan ekonomi Kabupaten/Kota diataranya adalah belum pulihnya kondisi ekonomi internasional yang berimbas pada belum pulihnya perekonomian nasional secara utuh dan diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2019 sampai dengan 2020 sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi ekonomi daerah. Kondisi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak periode tahun 2015-2019 secara umum dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Rata-Rata Pertumbuhan
		TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.435.253.969.108,05	1.418.516.388.060,49	1.545.622.287.316,32	1.663.204.429.559,76	1.762.307.259.362,69	5,34
1.1	Pendapatan Asli Daerah	334.708.368.451,95	389.368.654.493,49	476.050.410.313,57	440.358.120.030,76	476.837.103.362,69	9,84
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	240.452.113.349,00	258.149.996.119,00	303.127.995.782,00	308.900.825.494,25	352.062.109.000,00	8,9
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	32.821.997.143,00	42.016.145.122,00	35.657.077.655,00	36.039.842.255,00	44.804.425.300,00	9,57
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	9.880.186.143,55	35.532.504.080,37	14.662.443.316,10	18.322.956.064,98	21.500.000.000,00	17,34
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	51.554.071.816,40	53.670.009.172,12	122.602.893.560,47	77.094.496.216,53	85.470.569.062,69	5,37
1.2	Dana Perimbangan	731.736.303.254,00	890.541.184.485,00	905.713.690.781,00	942.558.769.606,00	978.581.171.000,00	7,54
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	37.814.962.254,00	46.610.485.200,00	41.951.188.877,00	53.786.710.306,00	54.559.719.000,00	9,6
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	686.035.831.000,00	711.955.758.000,00	699.448.985.000,00	699.448.985.000,00	726.769.846.000,00	1,45
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.885.510.000,00	131.974.941.285,00	164.313.516.904,00	189.323.074.300,00	197.251.606.000,00	14,64
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	368.809.297.402,10	138.606.549.082,00	163.858.186.221,75	280.287.539.923,75	306.888.985.000,00	9,09
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.201.000.000,00	6.432.000.000,00	6.510.000.000,00	64.792.320.000,00	71.209.200.000,00	9,9
1.3.2	Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	177.212.005.02,10	125.742.229.082,00	149.848.186.221,72	198.745.219.923,00	178.152.945.000,00	3,1
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182.109.092.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	16.750.000.000,00	57.526.840.000,00	416,78
1.3.4	Bantuan Keuangan (Subsidi) dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.287.200.000,00	1.432.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-100
2	BELANJA DAERAH	1.414.780.089.303,98	1.428.917.646.777,12	1.512.476.062.493,85	1.605.719.399.875,65	1.737.407.259.362,69	5,3
2.1	Belanja Tidak Langsung	630.868.585.746,59	640.261.656.132,00	588.843.468.032,00	630.436.249.347,50	665.182.721.149,90	1,51
2.1.1	Belanja Pegawai	615.882.922.053,25	622.931.840.225,00	554.642.202.781,00	555.753.490.182,00	629.899.158.649,90	0,93
2.1.2	Belanja Bunga	20.433.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100

NO	URAIAN	REALISASI				RENCANA	Rata-Rata Pertumbuhan
		TAHUN 2015 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	(%)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.1.4	Belanja Hibah	9.063.230.000,00	12.536.300.000,00	23.518.536.400,00	65.873.868.130,50	20.586.000.000,00	59,32
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.902.260.200,00	3.256.167.571,00	4.088.478.851,00	7.106.332.035,00	9.967.562.500,00	52,7
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	1.317.140.000,00	1.317.140.000,00	6.317.140.000,00	1.702.559.000,00	3.230.000.000,00	99,07
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	2.682.599.981,00	220.208.336,00	277.110.000,00	0,00	1.500.000.000,00	-13,53
2.2	Belanja Langsung	783.911.503.557,39	788.655.990.645,12	923.632.594.461,85	975.283.150.528,15	1.072.224.538.212,79	8,31
2.2.1	Belanja Pegawai	58.215.672.577,00	59.668.721.612,00	72.705.450.399,00	80.086.489.448,00	97.830.301.731,00	14,16
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.052.339.622,86	325.131.715.455,23	405.595.442.153,30	404.392.606.942,52	537.215.813.865,00	17,44
2.2.3	Belanja Modal	436.643.491.357,53	403.855.553.577,89	445.331.701.909,55	490.804.054.137,63	437.178.422.616,79	0,51
3	PEMBIAYAAN DAERAH	14.750.588.661,54	37.723.051.491,46	(2.091.847.561,54)	12.106.402.161,59	(24.900.000.000,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	31.311.207.178,91	46.356.051.491,46	29.333.152.438,46	32.220.004.152,13	5.100.000.000,00	-15,75
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Thn Sebelumnya	31.206.207.178,91	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.438.958,13	5.000.000.000,00	-22,51
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	105.000.000,00	35.086.500,00	24.565.285,00	28.565.194,00	100.000.000,00	-42,45
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.560.618.517,37	8.633.000.000,00	31.425.000.000,00	19.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.258.639.197,97	8.633.000.000,00	19.100.000.000,00	19.000.000.000,00	30.000.000.000,00	32,93
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	301.979.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.3	Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu	0,00	0,00	2.325.000.000,00	0,00	0,00	-
	Volume APBD	1.466.565.176.286,96	1.464.872.439.551,95	1.574.955.439.754,78	1.727.204.238.420,18	1.767.407.259.362,69	4,85

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

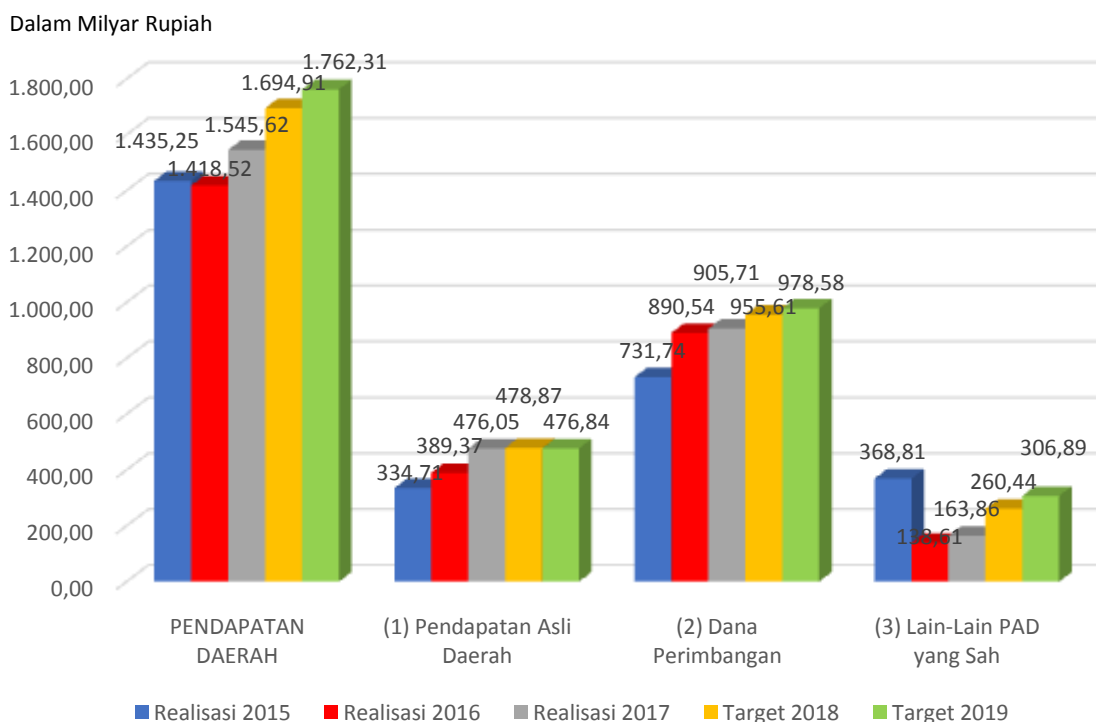
A. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Data menunjukkan bahwa pendapatan daerah Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2015-2019 mengalami rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 5,3 persen. Dimana penopang pendapatan daerah terbesar berasal dari Dana Perimbangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata bagian Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 7,54 persen. Adapun besarnya sumbangsih dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini dikarenakan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah Daerah Kota Pontianak dari tahun ke tahun.

Adapun gambaran perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GrafikIII.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

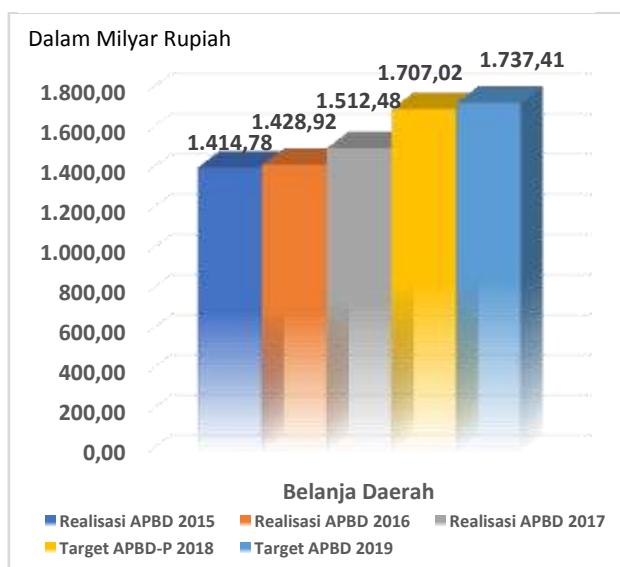
B. Belanja Daerah

Pengukuran kinerja APBD suatu daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan daerah dan dari besaran realisasi belanja daerah yang telah terserap selama tahun anggaran APBD bersangkutan. Semakin banyak belanja yang terserap maka semakin bagus pula kinerja suatu daerah. Penting bagi suatu daerah untuk merasionalisasikan belanja yang dikeluarkan agar belanja dapat efektif dan efisien, maka formulasi kebijakan umum belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas baik prioritas pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

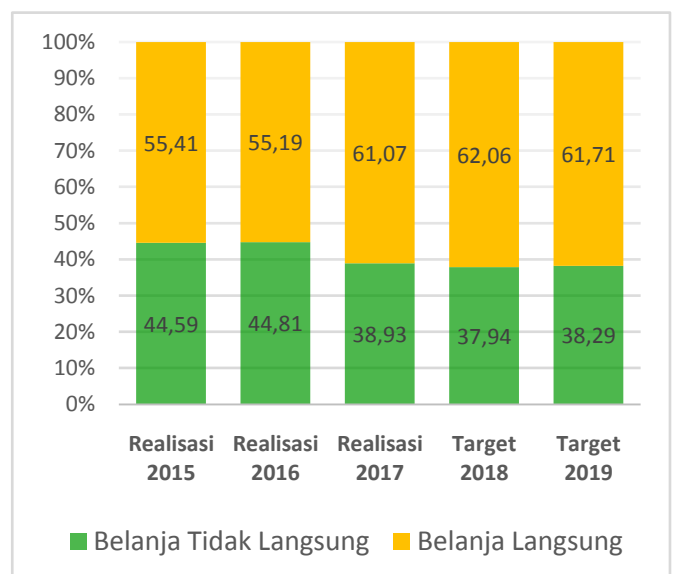
Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak selama tahun 2015-2019 cenderung menggambarkan peningkatan. Rata-rata pertumbuhan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 5,3 persen, dimana setiap tahunnya proporsi belanja langsung selalu lebih besar dari pada belanja tidak langsung sehingga hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belanja Pemerintah Kota Pontianak adalah mengedepankan program prioritas pembangunan dan *pro public* atau mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat secara langsung ketimbang belanja pegawai.

Adapun perkembangan belanja daerah Kota Pontianak dan komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung nya selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.2
Perkembangan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Grafik III.3
Persentase Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

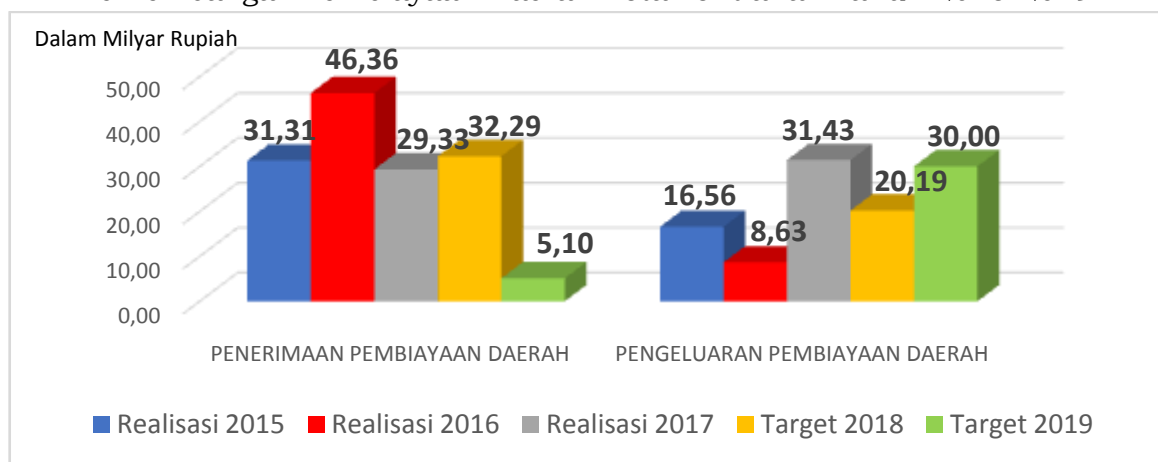
C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan komponen belanja dan pendapatan, sehingga rencana penggunaan anggaran untuk kegiatan dapat dipenuhi seluruhnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari dua pos pembiayaan yakni penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Adapun perkembangan pembiayaan daerah Kota Pontianak selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

GrafikIII.4

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

A. Aset

Aset lancar Pemerintah Kota Pontianak mengalami fluktuasi. Dalam periode 2013-2017 jumlah total aset lancar memperlihatkan tren kenaikan dan penurunan sejalan dengan penambahan dan pengurangan saldo Kas. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 aset lancar mengalami penurunan sebesar 2,51 persen atau menurun senilai Rp.3.348.312.680,85 yang disebabkan oleh penurunan saldo Kas dan Setara Kas.

Di sisi lain, investasi jangka panjang dalam bentuk investasi permanen pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam lima tahun terus mengalami keiangan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, namun pada tahun 2017 investasi mengalami penurunan. Adapun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 9,47 persen dan nilai investasi jangka panjang tahun 2017 adalah sebesar Rp.274.769.760.226,20.

Tabel III.2
Neraca Aset Pemerintah Kota Pontianak, Per 31 Desember 2013 – 31 Desember 2017 (Audited)

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	ASET						
1	ASET LANCAR						
1.1	Kas dan Setara Kas						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	35.648.146.540,07	29.302.369.900,91	27.601.180.629,48	9.168.627.087,09	13.215.362.707,20	
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.005.277.750,00	286.817.400,00	14.761.000,00	15.543.000,00	11.727.025,00	
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.514.284.697,00	417.714.604,00	1.146.748.069,13	111.620.930,00	320.163.304,98	
1.1.4	Kas di Bank	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	800,00	1.514.107.384,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Kas Lainnya di BLUD	0,00	0,00	3.902.172.175,00	5.075.284.184,00	4.500.923.677,57	
1.1.6	Kas Lainnya	0,00	0,00	12.013.203.726,79	14.971.831.356,97	4.406.525.277,84	
1.2	Piutang Pajak Daerah	61.108.291.923,00	66.673.143.284,00	71.122.834.215,00	81.801.563.895,00	82.816.051.307,00	
1.3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(45.779.504.709,80)	(49.314.319.481,60)	(53.996.869.675,20)	(50.123.651.441,60)	
1.4	Piutang Retribusi Daerah	3.980715.882,53	1.927.488.048,00	953.419.511,80	2.140.783.986,00	2.090.391.553,70	
1.5	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(94.366.650,00)	(125.692.308,70)	(1.323.51.101,69)	(127.593.431,30)	
1.6	Piutang lainnya	29.957.093.015,38	21.065.958.642,28	51.066.782.723,84	64.673.729.027,84	53.555.122.627,64	
1.7	Penyisihan Piutang Lainnya	(41.785.295.116,85)	(6.840.918.006,33)	(7.227.690.940,64)	(10.027.952.767,56)	(11.299.716.942,17)	
1.8	Belanja/Biaya dibayar di muka	385.487.342,47	648.007.169,50	226.871.795,17	967.614.650,01	646.718.319,71	
1.9	Persediaan	18.086.205.032,90	20.648.217.663,57	19.587.627.164,00	18.507.015.978,71	31.116.622.225,53	
	JUMLAH ASET LANCAR	110.900.208.266,50	89.769.034.730,13	130.967.898.279,27	133.281.198.221,56	129.932.885.540,71	4,04%
2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen						
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	191.342.780.457,46	227.481.513.179,79	309.055.879.098,19	317.581.454.789,19	274.769.760.226,20	
2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	875.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Permanen	191.342.780.457,46	227.481.513.179,79	309.930.879.098,19	317.581.454.789,19	274.769.760.226,20	
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	191.342.780.457,46	227.481.513.179,79	309.930.879.098,19	317.581.454.789,19	274.769.760.226,20	9,47%

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	ASET TETAP						
3.1	Tanah	463.236.134.788,72	468.026.134.674,72	658.163.909.990,72	585.348.661.990,72	666.104.436.950,72	
3.2	Peralatan dan Mesin	238.829.720.251,39	270.719.637.664,32	306.057.512.534,81	331.132.136.949,69	376.889.539.431,50	
3.3	Gedung dan Bangunan	847.555.365.002,57	841.112.388.573,18	1.058.527.578.265,70	1.115.302.641.021,70	1.230.533.028.160,93	
3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.650.654.520.822,99	1.834.583.592.789,47	1.990.301.921.335,85	2.222.571.373.676,90	2.446.067.738.816,35	
3.5	Aset Tetap Lainnya	58.638.582.981,68	26.488.331.181,96	33.509.813.677,59	34.358.759.464,65	36.584.568.103,70	
3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.146.812.901,00	57.317.347.015,00	66.418.708.625,00	10.696.070.296,00	47.792.519.128,50	
3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.904.516.519.812,45)	(2.066.542.417.440,13)	(2.349.565.526.938,59)	(2.496.346.002.164,60)	(2.745.159.787.502,74)	
	JUMLAH ASET TETAP	1.361.544.616.935,90	1.431.705.014.458,52	1.763.413.917.491,08	1.803.063.641.235,06	2.058.812.043.088,96	10,89%
4	DANA CADANGAN						
4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	100%
5	ASET LAINNYA						
5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	6.569.705.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Tuntutan Perbendaharaan	190.257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	Tuntutan Ganti Rugi	301.635.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	62.658.262.751,28	89.143.267.141,28	89.143.267.141,28	89.143.267.141,28	90.916.467.141,28	
5.5	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.394.451.097,50)	
5.6	Aset Tak Berwujud	5.803.576.817,00	7.026.051.911,00	8.314.287.663,49	11.576.349.363,49	13.864.190.264,44	
5.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	(6.123.221.357,81)	(7.665.505.583,27)	(10.006.127.261,37)	
5.8	Aset Lain-Lain	2.063.929.363,00	164.985.643.265,87	173.207.300.876,88	422.003.996.231,02	166.983.015.285,09	
5.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	(5.011.273.807,50)	(84.358.094.454,25)	(6.844.438.443,20)	
5.10	Penyisihan Piutang	(2.193.314.334,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH ASET LAINNYA	75.394.053.231,03	261.154.962.318,15	259.530.360.516,34	430.700.012.698,27	246.518.655.888,74	34,47%
	JUMLAH ASET	1.739.181.658.890,89	2.010.110.524.686,59	2.463.843.055.384,88	2.684.626.306.944,08	2.720.033.344.744,61	11,83%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 2018

Aset tetap Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama tahun 2013 sampai dengan 2017 memperlihatkan kecenderungan kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 10,89 persen dengan total nilai aset 2.058.812.043.088,96 pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan pada pos Aset Lainnya, penyumbang terbesar perkembangan nilai aset lainnya adalah pada kemitraan dengan pihak ketiga. Hal ini memberikan nilai positif sehingga perlu terus dikembangkan.

Secara kumulatif, jumlah aset Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,83 persen dan nilai total aset pada tahun 2017 adalah senilai Rp.2.720.033.344.744,61.

B. Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah keharusan mentransfer aset sebagai akibat dari transaksi ataupun perjanjian dengan pihak lain di masa lalu. Secara umum kewajiban dalam neraca Pemerintah Kota Pontianak memperlihatkan tren pertumbuhanselama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,91%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena memperlihatkan bahwa kewajiban-kewajiban yang membebani keuangan daerah semakin bertambah.

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka dan utang belanja serta utang jangka pendek lainnya. Porsi terbesaryang menjadi kewajiban jangka pendek selama lima tahun adalah pendapatan diterima dimuka dan utang belanja.

Kewajiban jangka panjang berupa utang jangka panjang lainnya tidak dimiliki Kota Pontianak selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pontianak memiliki kewajiban finansial terhadap Utang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp.20.000.000,00. Namun Pemerintah Kota Pontianak dimasa mendatang tetap berharap tidak ada lagi kewajiban jangka panjang sehingga pemerintah Kota Pontianak dapat focus untuk melaksanakan pembangunan dan tidak terbebani oleh kewajiban-kewajiban finansial lainnya.

Ekuitas dalam neraca pemerintah daerah dapat diartikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas

juga dapat diartikan sebagai modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Secara umum kondisi ekuitas dana menunjukkan tren pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,80 persen dengan nilai ekuitas senilai Rp.2.709.880.640.399,59 pada tahun 2017 dan secara kumulatif jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada tahun 2017 senilai Rp.2.720.033.344.744,61. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi kewajiban dan ekuitas dapat dilihat dalam tabel neraca kewajiban berikut:

Tabel III.3
Neraca Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak
Per 31 Desember 2015 – 31 Desember 2019

NO	URAIAN	TAHUN					R
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II	KEWAJIBAN						
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.954.160,00	7.596.710,00	83.017.278,00	84.037.991,66	279.216.118,00	
1.2	Utang Bunga	89.889.177,41	20.433.510,34	0,00	0,00	0,00	
1.3	Kewajiban Kepada Pihak Lain	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	603.958.638,80	301.979.319,40	0,00	0,00	0,00	
1.5	Pendapatan Diterima di Muka	3.414.285.661,71	4.235.759.541,47	4.593.916.887,28	5.618.801.937,81	4.689.607.801,02	
1.6	Utang Belanja	0,00	525.107.307,00	4.834.996.059,00	9.977.093.468,00	5.163.880.426,00	
1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	23.640.000,00			
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.128.088.437,92	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.132.704.345,02	25,17%
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	319.917.729,80	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	319.917.729,80	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-50,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.448.006.167,72	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.152.704.345,02	22,91%
III	EKUITAS DANA	1.734.733.652.723,17	2.005.019.648.298,38	2.454.307.485.160,60	2.668.946.373.546,61	2.709.880.640.399,59	11,80%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.739.181.658.890,89	2.010.110.524.686,59	2.463.843.055.384,88	2.684.626.306.944,08	2.720.033.344.744,61	11,83%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 2018

C. Analisis Rasio Terhadap Neraca Keuangan Daerah

Dalam tata kelola keuangan daerah, salah satu hal penting untuk mengetahui kemampuan keuangan di masa depan adalah implementasi manajemen keuangan secara ideal. Dalam konteks ini maka pada satu periode tertentu harus dibuat laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan aktivitas yang dijalankan oleh daerah. Dari laporan keuangan tersebut dapat diamati dan dicermati sejauh mana efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara optimal atau seberapa jauh pemakaian dana sendiri maupun dana pinjaman bagi perkembangan dan pertumbuhan daerah.

Pada umumnya dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis rasio yang biasanya antara lain rasio likuiditas dan solvabilitas. Analisa rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan daerah. Analisis rasio dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang relevan dan signifikan antara pos-pos terpilih dari data laporan keuangan daerah. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya.

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah utang di pihak lain, juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di lain pihak. Rasio likuiditas keuangan daerah dapat dilihat dengan cara melihat rasio lancar dan rasio quick.

Rasio Lancar

Penilaian rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan besaran current asset dengan current liabilities untuk melihat tingkat kemampuan aktiva lancar daerah dalam memenuhi hutang jangka pendek secara tepat waktu. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \text{Aktiva Lancar} : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio lancar sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.4

Rasio Lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Aktiva Lancar	110.900.208.266,50	89.769.034.730,13	130.967.898.279,27	133.281.198.221,56	129.932.885.540,71
Kewajiban Jangka Pendek	4.128.088.437,92	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.132.704.345,02
Rasio Lancar	26,86	17,63	13,73	8,50	12,82

Sumber : Hasil Analisa

Rasio Quick

Rasio Quick digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendek sudah dikurangkan dengan jumlah persediaan, yang dinilai kurang liquid untuk membayar utang. Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Quick} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Hasil Perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio quick sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5

Rasio Quick Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2013-2017

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva Lancar (I)	110.900.208.266,50	89.769.034.730,13	130.967.898.279,27	133.281.198.221,56	129.932.885.540,71
Persediaan (II)	18.086.205.032,90	20.648.217.663,57	19.587.627.164,00	18.507.015.978,71	31.116.622.225,53
(I – II)	92.814.003.233,60	69.120.817.066,56	111.380.271.115,27	114.774.182.242,85	98.816.263.315,18
Kewajiban Jangka Pendek	4.128.088.437,92	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.132.704.345,02
Rasio Quick	22,48	13,58	11,68	7,32	9,75

Sumber : Hasil Analisa

Rasio ini sebaiknya tidak kurang dari 1 atau 100% karena apabila kurang dari 1 berarti Pemerintah Daerah tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dari perhitungan rasio quick Kota Pontianak menunjukkan nilai di atas 1 dan setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah Kota Pontianak setelah dikurangi persediaan yang dimiliki sangat liquid untuk menutup semua tagihan jangka pendek

yang dimilikinya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan terhadap rasio lancar dan rasio quick diperoleh nilai yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Pontianak memiliki tingkat investasi persediaan yang cukup rendah.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya maupun jangka pendek. Rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari utang. Rasio Solvabilitas keuangan daerah diwakili oleh Rasio Total Utang terhadap Total Aset dan Rasio Total Utang terhadap Modal.

Rasio Utang terhadap Total Aset

Rasio ini dipakai untuk menunjukkan besarnya bagian dari seluruh aset yang dibiayai dari utang. Formulasi yang dipakai adalah:

$$\text{Rasio Total Utang terhadap Total Aset} = \text{Total Utang} : \text{Total Aset}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio utang terhadap total aset sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.6
Rasio Utang Terhadap Total Aset Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Total Utang	4.448.006.167,72	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.152.704.345,02
Total Aset	1.739.181.658.890,89	2.010.110.524.686,59	2.463.843.055.384,88	2.684.626.306.944,08	2.720.033.344.744,61
Rasio Utang Terhadap Total Aset	0,0025	0,0025	0,0039	0,0058	0,0037

Sumber : Hasil Analisa

Semakin kecil nilai yang didapat dari perhitungan berarti semakin baik rasio utang terhadap total aset. Rasio ini juga dapat mengukur besarnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkan utang nya kepada kreditur. Dari hasil perhitungan didapat rasio total utang terhadap total aset Pemerintah Kota Pontianak sebesar 0,0037 untuk tahun 2017. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak sangat solvabel dan tidak bergantung kepada utang untuk memenuhi aset-asetnya.

Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan Pemerintah Daerah dan menunjukkan kemampuan modal Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Utang Terhadap Modal} = \text{Total Utang} : \text{Total Ekuitas}$$

Hasil perhitungan dengan formula tersebut memberikan gambaran perkembangan nilai rasio utang terhadap modal sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.7

Rasio Utang Terhadap Modal Neraca Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2015 -2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Total Utang	4.448.006.167,72	5.090.876.388,21	9.535.570.224,28	15.679.933.397,47	10.152.704.345,02
Total Ekuitas	1.734.733.652.723,17	2.005.019.648.298,38	2.454.307.485.160,60	2.668.946.373.546,61	2.709.880.640.399,59
Rasio Utang Terhadap Modal	0,0026	0,0025	0,0039	0,0059	0,0037

Sumber : Hasil Analisa

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin sehat kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jika dibandingkan dengan hasil perhitungan terlihat bahwa kecenderungan nilai rasio ini semakin mengecil tiap tahunnya. Kondisi ini memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jikalau memutuskan untuk mengajukan pinjaman kepada kreditur.

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Belanja rutin atau belanja operasional adalah belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu periode anggaran, bersifat jangka pendek, dan sifatnya berulang atau rutin. Belanja rutin diperoleh dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja barang dan jasa. Berbeda dengan belanja pembangunan yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal serta menambah aset daerah, belanja pembangunan atau belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan dan irigasi. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, atau dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola belanja dikatakan baik jika belanja pembangunan lebih besar dari belanja rutin. Secara sederhana, rasio keserasioan itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Adapun perhitungan rasio aktivitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel III.8
Perhitungan Rasio Aktivitas Realisasi Anggaran Pada Kota Pontianak
Periode Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Total APBD	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Rasio Belanja Rutin thd APBD	Rasio Belanja Pembangunan thd APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	1.431.340.707.821,35	978.136.597.946,45	436.643.491.357,53	0,688	0,305
2016	1.437.550.646.777,12	1.025.062.093.199,23	403.855.553.577,89	0,713	0,281
2017	1.543.901.062.493,85	1.067.144.360.584,30	445.331.701.909,55	0,691	0,288
2018*	1.727.204.238.420,18	1.196.072.512.022,51	510.946.726.397,67	0,692	0,296
2019**	1.767.407.259.362,69	1.300.228.836.745,90	437.178.422.616,79	0,736	0,247
Rata-Rata				0,703	0,284

Sumber : hasil analisis (diolah). 2019

Ket: *) Target APBD-P

**) Target APBD Murni

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pendidikan, kesehatan, dan program pembangunan yang mendukung pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Kota Pontianak tahun 2015-2019 sebagaimana telah disampaikan di atas, gambaran proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota Pontianak selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.9
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2015-2019

No.	Uraian	Th. 2015 (%)	Th. 2016 (%)	Th. 2017 (%)	Th. 2018 * (%)	Th. 2019 ** (%)	Proporsi Rata-Rata
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	44,59	44,81	38,93	37,94	38,29	40,91
1	Belanja Pegawai	43,53	43,59	36,67	34,53	36,26	38,92
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00
4	Belanja Hibah	0,64	0,88	1,55	2,71	1,18	1,39
5	Belanja Bantuan Sosial	0,13	0,23	0,27	0,6	0,57	0,36
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,09	0,09	0,42	0,1	0,19	0,18
8	Belanja Tidak Terduga	0,19	0,02	0,02	0	0,09	0,06
B	BELANJA LANGSUNG	55,41	55,19	61,07	62,06	61,71	59,09
1	Belanja Pegawai	4,11	4,18	4,81	5,06	5,63	4,76
2	Belanja Barang dan Jasa	20,43	22,75	26,82	27,07	30,92	25,60
3	Belanja Modal	30,86	28,26	29,44	29,93	25,16	28,73
C	TOTAL BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

*) Target APBD Perubahan

**) Target APBD Murni

Dari data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir proporsi belanja langsung meningkat terus dan di dalam belanja langsung tersebut, proporsi belanja pegawainya lebih kecil dari pada belanja modal.

3.2.1.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Kota Pontianak tahun 2015-2019 sebagaimana tabel III.1, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pontianak
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2015	674.098.594.630,25	1.431.340.707.821,35	47,10%
2.	Tahun Anggaran 2016	682.600.561.837,00	1.437.550.646.777,12	47,48%
3.	Tahun Anggaran 2017	627.347.653.180,00	1.543.901.062.493,85	40,63%
4.	Tahun Anggaran 2018 *	675.708.314.127,50	1.727.204.238.420,18	39,12%
5.	Tahun Anggaran 2019 **	727.729.460.380,90	1.767.407.259.362,69	41,17%
Rata-Rata				43,18%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

*) Target APBD Perubahan

**) Target APBD Murni

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa realisasi belanja Kota Pontianak masih di bawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut, Kota Pontianak mengalami surplus anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018 *	Th. 2019 **
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.435.253.969.108,05	1.418.516.388.060,49	1.545.622.287.316,32	1.694.912.836.258,59	1.762.307.259.362,69
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.414.780.089.303,98	1.428.917.646.777,12	1.512.476.062.493,85	1.707.019.238.420,18	1.737.407.259.362,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.560.618.517,37	8.633.000.000,00	31.425.000.000,00	20.185.000.000,00	30.000.000.000,00
	Surplus/Defisit	3.913.261.286,70	(19.034.258.716,63)	1.721.224.822,47	(32.291.402.161,59)	(5.100.000.000,00)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

*) Target APBD Perubahan

**) Target APBD Murni

Dari tabel III.11 tersebut diatas, tampak bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kota Pontianak mengalami surplus dan defisit anggaran. Surplus anggaran pada periode tahun 2015 sampai 2019 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya, sedangkan defisit anggaran ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pontianak Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018 *	Th. 2019 **
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	31.206.207.178,91	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.402.161,59	5.000.000.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	105.000.000,00	35.086.500,00	24.565.285,00	100.000.000,00	100.000.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

*) Target APBD Perubahan

**) Target APBD Murni

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Pontianak selama periode 2015-2019 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.13
Pembiayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Th. 2015 (Rp.)	Th. 2016 (Rp.)	Th. 2017 (Rp.)	Th. 2018 * (Rp.)	Th. 2019 ** (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.435.253.969.108,05	1.418.516.388.060,49	1.545.622.287.316,32	1.694.912.836.258,59	1.762.307.259.362,69
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.414.780.089.303,98	1.428.917.646.777,12	1.512.476.062.493,85	1.707.019.238.420,18	1.737.407.259.362,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.560.618.517,37	8.633.000.000,00	31.425.000.000,00	20.185.000.000,00	30.000.000.000,00
A	DEFISIT RIIL	3.913.261.286,70	(19.034.258.716,63)	1.721.224.822,47	(32.291.402.161,59)	(5.100.000.000,00)
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	31.206.207.178,91	46.320.964.991,46	29.308.587.153,46	22.191.402.161,59	5.000.000.000,00
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	10.000.000.000,00	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	105.000.000,00	35.086.500,00	24.565.285,00	100.000.000,00	100.000.000,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	TOTAL REALISAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	31.311.207.178,91	46.356.051.491,46	29.333.152.438,46	32.291.402.161,59	5.100.000.000,00
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35.224.468.465,61	27.321.792.774,83	31.054.377.260,93	0,00	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2018 (diolah)

*) Target APBD Perubahan

**) Target APBD Murni

Dengan tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman daerah yang bersumber dari Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana akan disajikan pada Bab VII nanti. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Pontianak terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3.1.3. Proyeksi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil dan Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan

peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari DanaBagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

3.3.1.3. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara

alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Pontianak.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan 5 (lima) tahun ke depan, belanja daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai:

1. Belanja Tidak Langsung, yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial dan sejenisnya;
2. Belanja Langsung, yang dipergunakan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota dalam bentuk belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja operasional lainnya.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak, diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja daerah tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat

efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

3. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan sesuai ketentuan.

4. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

5. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode anggaran 2015-2019, Kota Pontianak mengalami surplus anggaran, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk membayar selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dari belanja, sedangkan surplus terjadi jika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan daerah adalah:

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan;
2. SiLPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program;
3. Komponen penerimaan laba dari BUMD diasumsikan tidak dimasukkan dalam kerangka penerimaan pembiayaan karena akan dimasukkan kembali sebagai bentuk penyertaan modal yang dipisahkan ke dalam neraca keuangan BUMD.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara umum proyeksi anggarandapatan dan belanja daerah tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.14
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.857.547.000.000,00	1.971.547.000.000,00	2.061.547.000.000,00	2.131.547.000.000,00	2.261.547.000.000,00	5,05%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	501.551.000.000,00	521.321.700.000,00	541.211.700.000,00	561.707.700.000,00	583.309.570.000,00	3,85%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	333.766.000.000,00	343.779.000.000,00	354.093.000.000,00	364.716.000.000,00	375.658.000.000,00	3,00%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	41.508.000.000,00	43.809.000.000,00	46.150.000.000,00	48.534.000.000,00	50.963.000.000,00	5,26%
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	19.000.000.000,00	19.700.000.000,00	20.400.000.000,00	21.100.000.000,00	21.800.000.000,00	3,50%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	107.277.000.000,00	114.033.700.000,00	120.568.700.000,00	127.357.700.000,00	134.888.570.000,00	5,89%
1.2	Dana Perimbangan	1.028.949.000.000,00	1.097.465.000.000,00	1.147.177.000.000,00	1.188.129.000.000,00	1.275.370.000.000,00	5,53%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	58.255.000.000,00	69.068.000.000,00	74.896.000.000,00	75.739.000.000,00	81.598.000.000,00	8,97%
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	763.573.000.000,00	811.031.000.000,00	844.162.000.000,00	872.987.000.000,00	942.527.000.000,00	5,42%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	207.121.000.000,00	217.366.000.000,00	228.119.000.000,00	239.403.000.000,00	251.245.000.000,00	4,95%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	327.047.000.000,00	352.760.300.000,00	373.158.300.000,00	381.710.300.000,00	402.867.430.000,00	5,37%
1.3.1	Pendapatan Hibah	65.020.000.000,00	66.496.000.000,00	68.009.000.000,00	69.560.000.000,00	71.149.000.000,00	2,28%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	201.027.000.000,00	225.582.000.000,00	240.615.000.000,00	251.149.000.000,00	267.209.000.000,00	7,41%
1.3.3	Dana Penyesuaian/Dana Insentif Daerah	41.000.000.000,00	40.682.300.000,00	44.534.300.000,00	41.001.300.000,00	44.509.430.000,00	2,33%
1.3.4	Bantuan Keuangan (Subsidi) dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00%
2	BELANJA DAERAH	1.836.597.000.000,00	1.950.597.000.000,00	2.040.597.000.000,00	2.150.597.000.000,00	2.250.597.000.000,00	5,22%
2.1	Belanja Tidak Langsung	700.197.000.000,00	748.460.300.000,00	804.188.300.000,00	849.891.300.000,00	886.899.430.000,00	6,09%
2.1.1	Belanja Pegawai	671.211.000.000,00	719.086.300.000,00	757.406.300.000,00	789.681.300.000,00	856.240.430.000,00	6,29%

No	Uraian	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.4	Belanja Hibah	17.256.000.000,00	17.644.000.000,00	35.052.000.000,00	48.480.000.000,00	18.929.000.000,00	19,57%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00%
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	0,00%
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00%
2.2	Belanja Langsung	1.136.400.000.000,00	1.202.136.700.000,00	1.236.408.700.000,00	1.300.705.700.000,00	1.363.697.570.000,00	4,67%
2.2.1	Belanja Pegawai	102.276.000.000,00	108.192.303.000,00	111.276.783.000,00	117.063.513.000,00	122.732.781.300,00	4,67%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	568.200.000.000,00	601.068.350.000,00	618.204.350.000,00	650.352.850.000,00	681.848.785.000,00	4,67%
2.2.3	Belanja Modal	465.924.000.000,00	492.876.047.000,00	506.927.567.000,00	533.289.337.000,00	559.116.003.700,00	4,67%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(20.950.000.000,00)	(20.950.000.000,00)	(20.950.000.000,00)	19.050.000.000,00	(10.950.000.000,00)	-87,10%
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	35.050.000.000,00	5.050.000.000,00	127,12%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Thn Sebelumnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	-9,62%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
	Volume APBD	1.862.597.000.000,00	1.976.597.000.000,00	2.066.597.000.000,00	2.166.597.000.000,00	2.266.597.000.000,00	5,03%

Sumber : hasil Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. 2019 (diolah)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja daerah serta pengeluaran wajib, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak, disajikan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel III. 15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	Pendapatan	1.857.547.000.000,00	1.971.547.000.000,00	2.061.547.000.000,00	2.131.547.000.000,00	2.261.547.000.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	30.000.000.000,00	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	Penerimaan dari pinjaman	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Total Penerimaan	1.862.597.000.000,00	1.976.597.000.000,00	2.066.597.000.000,00	2.166.597.000.000,00	2.266.597.000.000,00
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	700.197.000.000,00	748.460.300.000,00	804.188.300.000,00	849.891.300.000,00	886.899.430.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.136.400.000.000,00	1.202.136.700.000,00	1.236.408.700.000,00	1.300.705.700.000,00	1.363.697.570.000,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (data diolah)

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam 3 kelompok prioritas, yakni:

- ✓ Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (dua puluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi.misi daerah. Disamping itu, prioritas I juga diperlukan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ✓ Prioritas II, merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- ✓ Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan Partai Politik serta belanja tidak terduga.

Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	1.862.597.000.000,00	1.976.597.000.000,00	2.066.597.000.000,00	2.166.597.000.000,00	2.266.597.000.000,00
	PENDAPATAN	1.857.547.000.000,00	1.971.547.000.000,00	2.061.547.000.000,00	2.131.547.000.000,00	2.261.547.000.000,00
	Penerimaan Pembiayaan	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	35.050.000.000,00	5.050.000.000,00
	BELANJA DAERAH					
	Total Belanja Prioritas I	1.571.069.600.000,00	1.617.714.960.000,00	1.652.012.160.000,00	1.713.205.360.000,00	1.778.757.256.000,00
	Belanja Tidak Langsung Prioritas I	647.997.000.000,00	666.065.000.000,00	684.907.000.000,00	704.443.000.000,00	739.067.000.000,00
	Belanja Langsung Prioritas I	897.072.600.000,00	925.649.960.000,00	941.105.160.000,00	992.762.360.000,00	1.023.690.256.000,00
	Belanja Langsung Urusan Pendidikan dan Kesehatan	348.754.100.000,00	359.433.110.000,00	365.346.310.000,00	385.404.010.000,00	398.671.971.000,00
	Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi	548.318.500.000,00	566.216.850.000,00	575.758.850.000,00	607.358.350.000,00	625.018.285.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Total Belanja Prioritas II	239.327.400.000,00	276.486.740.000,00	295.303.540.000,00	307.943.340.000,00	340.007.314.000,00
	Belanja Langsung Program Prioritas Perangkat Daerah	239.327.400.000,00	276.486.740.000,00	295.303.540.000,00	307.943.340.000,00	340.007.314.000,00
	Total Belanja Prioritas III	700.197.000.000,00	748.460.300.000,00	804.188.300.000,00	849.891.300.000,00	886.899.430.000,00
	Belanja Tidak Langsung	700.197.000.000,00	748.460.300.000,00	804.188.300.000,00	849.891.300.000,00	886.899.430.000,00
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Bantuan Sosial	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	Hibah	17.263.000.000,00	17.652.000.000,00	35.060.000.000,00	48.488.000.000,00	18.938.000.000,00
	Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Total Belanja Prioritas I, II, dan III	1.836.597.000.000,00	1.950.597.000.000,00	2.040.597.000.000,00	2.150.597.000.000,00	2.250.597.000.000,00

Sumber : Hasil Analisis. 2019 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pembangunan daerah harus dilakukan dengan cerdas (smart), yaitu agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas disini adalah dengan menerapkan konsep ekosistem kota cerdas (smart city), yaitu sebuah ekosistem dimana pemerintah, industri, akademisi maupun elemen masyarakat terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik. Dalam konsep kota cerdas, sebuah daerah akan menjadi lebih baik dengan diukur dari kinerja pengelolaan sumber daya sehingga yang lebih efisien, berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat.

Smart City sebagai salah satu solusi cerdas menjadi alternatif baru untuk Kota Pontianak saat ini. Solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses, dan manusia. Berbagai kemudahan diciptakan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia

di dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari. Komponen manusia dibutuhkan karena manusialah penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Layanan Smart City yang dibutuhkan untuk Kota Pontianak merupakan sistem yang besar dan kompleks, sehingga penerapannya memerlukan perencanaan yang baik dan realistis dengan mempertimbangkan semua aspek. Perencanaan yang baik merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan penerapan Smart City di daerah. Jika kita menelisik permasalahan yang ada maka permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Pontianak antara lain adalah:

4.1.1. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat Kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastuktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi , maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik dilingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihimpun di Kota Pontianak antara lain yaitu:

(1) Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktifitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktifitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktifitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke sungai Kapuas menyebabkan kualitas air sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktifitas di badan sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktifitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat

pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktifitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap Pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah- sampah yang terdapat diparit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal.

Oleh sebab itu perlu di lakukan suatu usaha dalam bentuk penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Kota Pontianak dalam menyumbang beban pencemaran bagi Sungai Kapuas di tinjau dari akumulasi beban pencemaran yang akan masuk ke badan air Sungai Kapuas yang dilihat dari sungai atau parit di kawasan Kota Pontianak.

(2) Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 – 1 meter diatas permukaan laut dan sebagian daerah berada dibawah ketinggian air pasang laut yang maksimal sehingga menjadikan daerah- daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang cukup lama dan terjadinya air pasang di sungai Kapuas yang maksimal . Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3 – 7 jam .Hal ini juga dapat dilihat dari kondisi air pasang sungai Kapuas. Sementara untuk system jaringan saluran di Pontianak, telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi tetapi hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang melalui sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami kendala dimana begitu hujan bersamaan dengan air pasang maksimal maka massa surutnya air masih lambat, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak datar dan banyak titik lokasi yang selalu berada dibawah permukaan air pasang yang maksimal, sehingga perlu adanya pembenahan didalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun Kharakteristik unik tersebut seperti topografi yang relative datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung

tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan factor – factor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak.

(3) Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan Kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi Kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Dengan Kondisi kabut asap yang pekat yang disebabkan kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara, Banyak upaya yang telah dilakukan antara lain melibatkan masyarakat serta komunitas aktivitas lingkungan di Kota Pontianak melakukan aksi penanganan maupun pencegahan. Berbagai aktifitas membentuk forum masyarakat anti kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari kumpulan seniman, pengusaha, pemadam kebakaran, organisasi kepemudaan dan pelajar. Permasalahan Kabut dan asap merupakan permasalahan bersama dan tanggung jawab bersama pula. Melihat tipikal lahan gambut, sangat mungkin api sudah menjalar dibawah permukaan. Pemadam kebakaran tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah, tetapi pihak swasta juga mempunyai suatu organisasi pemadam kebakaran yang dengan sukarela mengadakan pemadaman untuk membantu pemerintah mengatasinya. Yang menjadi permasalahannya Pemadam kebakaran baik Pemerintah maupun swasta masih mempunyai Fasilitas maupun peralatan yang sangat minim, disamping itu diupayakan kerjasama yang intens dengan komunitas maupun tenaga sukarela yang telah terbentuk dalam menangani permasalahan kebakaran dan pencegahan kebakaran lahan dan bangunan sehingga permasalahan ini menjadi hal yang sangat penting diatasi mengingat hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup banyak orang baik mengganggu Kesehatan maupun transportasi baik darat dan udara diakibatkan oleh kabut asap. Polusi udara yang terjadi akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor serta diperparah pada musim tertentu disebabkan oleh pembakaran lahan yang terjadi pada Kabupaten Kubu Raya maupun Kabupaten Pontianak yang berdampak pada Kota Pontianak;

(4) Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat (4) maupun roda dua (2).

Melihat kondisi Kota Pontianak yang semakin maju dan mapan hal ini tentu menyiratkan semakin kompleknya permasalahan yang dapat terjadi, salah satunya masalah kehidupan sehari – hari di jalan sehingga tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan di jalan yaitu kemacetan. Kota Pontianak yang dinyatakan dengan Kota Perdagangan dan jasa (Kota yang minim sumber daya alam) sehingga dengan focus memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang tentunya menghasilkan permasalahan baru yaitu kemacetan disana – sini apabila tidak dikendalikan dan disesuaikan dengan kapasitas jalan yang tersedia dengan perangkatnya , sementara kebutuhan akan kendaraan meningkat maka perlu suatu regulasi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada serta yang akan timbul kedepannya. Kemudahan memperoleh kendaraan merupakan hal yang perlu diperhatikan akibat kedepannya, sehingga Kota Pontianak dapat mengupayakan konsep membangun jalan baru menyerupai “ jaring laba – laba “ fungsinya untuk memecah sejumlah titik kemacetan serta perlunya pengembangan system angkutan Umum dengan fasilitas yang aman dan representative untuk dipergunakan secara Umum dengan biaya murah dan berkualitas yang beroperasi dijalur- jalur jalan umum sehingga menimbulkan pemikiran untuk membatasi keinginan pembelian kendaraan pribadi secara besar-besaran oleh masyarakat.

(5) Ketersediaan air Bersih

Air Bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / Kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih. Terkait

pelayanan air bersih untuk seluruh warga Kota Pontianak, masih terdapat kebocoran 28% sehingga untuk Tahun 2019 PDAM menargetkan persentase kebocoran dapat diturunkan menjadi 26,5% dan terus diupayakan sehingga diharapkan untuk Tahun 2020 target cakupan air bersih berada di 94,9 % dan selanjutnya Cakupan air bersih diupayakan terus mencapai 100%.

Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat dari berbagai kalangan, di tahun 2019 PDAM menargetkan penambahan pemasangan sambungan baru sebanyak 9000 (sembilan ribu) sambungan rumah yang terdiri dari pemasangan sambungan reguler sebanyak 5000 (lima ribu) sambungan dan pemasangan melalui program pemasangan Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dikenakan biaya sambungan baru. Untuk pelayanan yang maksimal , Pemerintah bersama dengan PDAM Tirta Khatulistiwa telah melakukan pengembangan jaringan perpipaan 20 Km, dimana dengan adanya pengembangan jaringan perpipaan dimaksud berdasarkan Standard BPKP PDAM dapat menargetkan cakupan pelayanan sampai dengan target yang telah ditetapkan serta dilaksanakan beberapa program untuk mendukungnya antara lain :

- Pengecekan dan perbaikan kebocoran jaringan perpipaan distribusi
- Penyevelan Ulang meter air
- Evaluasi dan penertiban eks pelanggan PDAM
- Evaluasi dan Pengecekan pemakaian 0 - 10 M3
- Rehab jaringan pipa distribusi yang berada di kapling dan penggantian pipa dinas non PE (PE-NISASI)
- Penertiban pipa lama yang telah direhab tetapi masih berfungsi
- Relokasi dan peninggian posisi meter
- Pembentukan Distrik Meter Area (DMA)

(6) Energi Listrik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kota Pontianak dalam Angka (BPS) yang terambil dari PT.PLN (Persero) Cabang Pontianak, bahwa pada kondisi akhir tahun 2017 yakni bulan Desember ada sebanyak 627.417 pelanggan yang meliputi rumah tangga, industry, Perkantoran, Bisnis, sosial, dan Pelanggan prabayar. Produksi listrik PLN yang terjual selama tahun 2017 adalah sebanyak 1.186.791 MWH, dimana golongan pelanggan yang paling banyak menggunakan listrik PLN adalah golongan Rumah Tangga dengan

konsumsi listrik sebanyak 43,79 persen dari total listrik yang diproduksi PLN, sedangkan pelanggan listrik kelas industri hanya mengkonsumsi listrik sebesar 8,27 persen, oleh karena itu dapat digambarkan bahwa kondisi Kota Pontianak antara lain :

- Rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensi layanan energy listrik di kota Pontianak merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industri perkotaan;
- Upaya memanfaatkan angin dan sinar matahari yang berlimpah serta biogas sebagai sumber pembangkit energy listrik terbarukan belum dikembangkan dan belum didukung komitmen kebijakan;

Dilihat dari latar belakang masalah kelistrikan tersebut diatas disebabkan oleh Penyediaan Energi listrik di Kota Pontianak dikategorikan sangat terbatas, dimana PLN Kota Pontianak yang memakai sistem PLTD yang memakai bahan bakar Solar, sementara pasokan Solar Ke Kalimantan Barat secara umum dan di Kota Pontianak secara khusus sangat terbatas. Hal ini tentu mempengaruhi hasil produksi Energi listrik dan tidak sebanding dengan kebutuhan di masyarakat maupun Industri. Ketersediaan Energi Listrik yang terbatas dapat disikapi dengan upaya Energi listrik alternatif dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat serta dapat melakukan pementukan regulasi / pengaturan pemakaian dalam rangka penghematan konsumsi energi listrik.

(7) Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan Limbah dan sampah adalah sebagai berikut ;

Limbah :

- Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;
- Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran flat, ketidak patuhan

terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrim, Pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran disekitar lingkungan baik pengusaha maupun Limbah rumah tangga.

- Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibat cemaran limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas Lingkungan Hidup
- Peningkatan kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman baik kualitas maupun kuantitas.
- Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah)

Sampah

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- Pengelolaan TPA dengan control Landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami urban sprawl menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran; kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke Kabupaten.
- Perkembangan antar kecamatan yang berbeda;
- Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak ;
- Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
- Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;

- Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- Perlunya Implementasi dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis digital yang telah ada sebagai sarana pengelolaan sampah yang efektif dan efisien bagi warga.
- Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat misalnya melalui program bank sampah dan daur ulang sampah.
- Memanfaatkan energi surya yang berlimpah sebagai sumber energi listrik di ruang terbuka atau taman-taman kota dan untuk fasilitas umum.

(8) Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan Ruang terbuka Hijau antara lain:

- Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota.
- Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas ;
- Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya;

(9) Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

a . Keciaptakaryaan

- Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah.
- Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;

- Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
- Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage;

b . Jalan dan Perhubungan

- Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta pertumbuhan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana (Kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut :
 - Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut : banyak oplet yang berubah menjadi pick up (angkutan barang; sampah);
 - Belum terkonsepnya Angkutan umum
 - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - jalur angkutan barang dan orang;
 - Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - jalur angkutan barang dan orang;
 - Belum tersedianya Transportasi massal yang representatif.
 - Kondisi Halte yang kurang memadai.
 - Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
 - Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas.

c. Sarana sumber Daya Air dan Air Bersih

- Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
- Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
- Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
- Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi.
- Penyediaan air baku untuk pemerosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
- Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.

d. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government;
- Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
- Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi.

e. Pembangunan Kota Pontianak sesuai dimensi smart city

Pontianak memiliki misi mewujudkan Smart Governance. Pesatnya perkembangan layanan pemerintahan kepada masyarakat Kota Pontianak yang telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota merupakan hasil komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik sesuai visi misi yang telah dibuat. Dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik ini akan membuat masyarakat

memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dengan begitu pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan dengan dukungan penuh dari masyarakatnya. Dengan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders pembangunan, maka diharapkan elemen lainnya (branding, economy, living, society, envirenment) dapat segera diwujudkan di Kota Pontianak.

Selain pencapaian keberhasilan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Pontianak juga terus berbenah menciptakan kota yang layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakatnya dengan terus membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana dasar perkotaan, salah satunya adalah lebih dari 90 persen jaringan jalan yang ada di kota Pontianak dalam kondisi baik. Begitu juga dengan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang terus dibenahi.

Kebijakan daerah yang telah ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih perlu terus dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi Pontianak Smart City yaitu Pontianak Kota Khatulistiwa, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Berwawasan Lingkungan pada tahun 2029. Beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan sebagai pendukung dalam mengimplementasikan Pontianak Smart City tahun 2029.

(10) Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya el-nina dan la nina. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan jumlah curah hujan di wilayah Kal – Bar dan sekitarnya sehingga membawa dampak negative di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak sebaiknya sudah dapat melakukan antisipasi jauh- jauh hari agar resiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yaitu : Kekeringan, Penyakit, , Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitasi penyediaan air bersih

yang tersedia di masing – masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi kedepan.

4.1.2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

(1) Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut:

- Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.
- Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien

(2) Pengangguran

- Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal;
- Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
- Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada

(3) Kemiskinan

Pada Tahun 2017 terdapat sekitar 5,31 persen penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidak sinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya silpa yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit- penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan inner ringroad) dan membangun jalan- jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

(4) Kesakitan dan Kematian

- Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 627.021 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 248.413 peserta (47,55 %).
- Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dan rumah sakit Sudarso milik Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.
- Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;

- i. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
- ii. Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal
- iii. Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- Masih ditemukannya kasus kematian ibu , kematian bayi dan kasus gizi buruk
- Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat.

(5) Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut :

- Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
- Perlunya mengoptimalkan peran Komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi.

(6) Degradasi Moral dan Budaya

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;
- Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.

(7) Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkoba tentu akan menghadapi tantangan tersendiri, sejalandengan itu BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya dengan menyampaikan informasi dengan Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik dan tidak ada masalah disebabkan adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkoba di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin. Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan PNS Kota Pontianak. Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru yaitu problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu inhalan dan lainnya dengan cara – cara yang baru yang pada akhirnya merusak

generasi penerus .Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.

(8) Gizi Buruk dan Stunting

Gizi buruk atau stunting merupakan persoalan yang tidak bias dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya.Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka Stunting yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

Kota Pontianak mengupayakan agar Kota yang bebas dari Keluarga Stunting dengan berbagai program kerja yang dipadukan dengan segenap elemen masyarakat yang memperdulikan kelangsungan hidup masyarakat miskin maupun keluarga yang terkena Stunting. Program dengan Upaya bebas dari Stunting bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya kader-kader kesehatan mengenai peran masyarakat dalam urusan menjaga kecukupan gizi. Terkait dengan gizi ini sangat diperlukan peran lintas sektoral dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, bagaimana bersama-sama melakukan intervensi terhadap masalah-masalah sensitive seperti masalah stunting. Khusus mengenai stunting di Kota Pontianak, hal ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu untuk usia dua tahun Kota Pontianak sudah mencapai angka standar dan penilaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada anak-anak sudah baik. Tetapi untuk kategori usia anak mencapai lima tahun ke atas terjadi peningkatan kurang gizi hal ini dipengaruhi prilaku hidup dalam keluarga yang kurang memperhatikan pentingnya masalah gizi untuk tumbuh kembang anak-anak ketika anak-anak sudah dikenalkan dengan makanan orang dewasa, dimana angkanya naik terakhir 2018 dengan angka 28 persen, ini menunjukkan bahwa adanya perilaku dalam keluarga kurang sadarnya menjaga pentingnya masalah gizi. Untuk itu perlunya penanganan khusus dalam rangka peningkatan Pengetahuan kepada Keluarga penyediaan Makanan bergizi serta upaya peningkatan kualitas gizi anak balita melalui Posyandu maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanganan Gizi buruk pada masyarakat.

(9) Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh *agent* infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (host) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak baik tertular dari masyarakat Kota Pontianak atau Penularan dari warga yang berkunjung dari Kota Lain antara lain :

- a. Penyakit menular potensial mewabah antara lain : Diare, Demam berdarah (dengue), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena Konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- b. Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu :Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- c. Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain : Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), gonorrhoe (kencing nanah), HIV/ AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular yang setiap tahunnya selalu memakan korban jiwa menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan di Kota Pontianak dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Surveillance penyakit menula
- Antisipasi/ pencegahan penyakit menular
- Penanggulangan wabah/ kejadian luar biasa(KLB)

Perlindungan Kesehatan bagi warga kurang mampu, Pemerintah Kota Pontianak telah mempunyai program jaminan Kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.

(10) Kesejahteraan, Rehabilitasi, jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Garis Kemiskinan tahun 2017 di Kota Pontianak sebesar Rp 439.648 dengan rata-rata 4,39 (4-5) orang dalam satu Keluarga, maka batas pengeluaran konsumsi keluarga layak adalah Rp 1.930.000/ bulan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Pontianak. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terlihat dari data prosentase jumlah penduduk miskin yang dirilis BPS di tahun 2014 tercatat 5,15% (30.93.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 369.079./kap/bulan), 2015 sebesar 5,22% (31.56.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 403.905/kap/bulan) dan di tahun 2016 tercatat sebanyak 5,55% (34.11.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 427.783 /kap/bulan) penduduk dan 2017 sebesar 5,31% (33.18.000 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 439.648/kap/bulan) Kota Pontianak.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk

dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain :

a. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, isu strategis yang harus diperhatikan adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

b. Peningkatan Daya Saing Global

Pontianak sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional Kalimantan Barat dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang

berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Pontianak dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi ASEAN Free Trade Area (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asian Pacific Economic Cooperation (APEC).

c. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sejalan dengan pertambahan penduduk, isu strategis lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, mengingat berdasarkan data penduduk jumlah usia angkatan kerja di Kota Pontianak setiap tahunnya semakin meningkat sehingga tantangan penyediaan lapangan pekerjaan semakin besar. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan SDG's.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat relatif belum merata, hal ini terlihat dari ukuran PDRB per kapita penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Utara dan Timur lebih rendah dibandingkan

dengan wilayah kecamatan lainnya. Begitupula dari indikator angka kemiskinan di dua kecamatan tersebut merupakan angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi khusus diantaranya dengan membuka lapangan pekerjaan dengan akses untuk berusaha di wilayah tersebut serta merancang program-program untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

d. Pengembangan Pariwisata

Kota Pontianak adalah kota yang berkembang karena lokasi strategis dan fungsi yang diembannya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sangat sedikit dikaruniai kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk memacu perkembangannya. Efek positif dari hal tersebut adalah berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi sebagai dynamo pertumbuhan ekonomi kota. Disisi lain dengan beragam keunikan dan potensi lain yang dimilikinya, sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata sebagai katalisator perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu dalam perkembangannya, kedepan sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dalam konsep pembangunan strategis kota Pontianak

e. Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa-jasa merupakan dua sektor teratas yang mendominasi struktur perekonomian kota Pontianak.. Kondisi ini perlu menjadi isu strategis karena kedepan untuk terus memacu dua sektor ini sebagai lokomotif perekonomian kota diperlukan berbagai terobosan baru agar dapat bersaing dalam kompetisi nasional, regional dan internasional.

Disisi lain yang juga perlu diantisipasi adalah kemungkinan kedua sektor ini menjadi jenuh karena kurangnya inovasi untuk terus dapat memacu pertumbuhannya. Oleh karenanya perlu dilakukan terobosan kebijakan-kebijakan dalam bentuk insentif dan

disinsentif yang mampu merangsang perkembangannya. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan sector perdagangan dan jasa perlu terus diusahakan penyediannya.

f. Pemberdayaan

Isu gender merupakan salah satu isu pokok lain yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka memperbesar peran serta perempuan secara aktif dalam pembangunan kota. Potensi perempuan sangatlah besar mengingat rasio penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pontianak di tahun 2017 adalah 99,61 artinya jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Untuk itu perempuan perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan.

Disisi lain peran anak dan pemuda juga tidak dapat dikesampingkan. Anak dan pemuda adalah gambaran masa depan sehingga perlu mendapatkan porsi yang sesuai dalam pembangunan seperti pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, mendesain program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang kreatifitas mereka sehingga terhindar dari aktifitas negatif dan tidak produktif.

(11) Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi OPD yang menangani pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah yang melakukan.

Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tujuan mengatur perilaku merokok utamanya di sarana atau tempat-tempat umum. Namun dalam penerapannya masih ada sarana atau tempat umum yang belum menerapkannya. Adapun yang menjadi fokus permasalahan adalah mengenai implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di setiap instansi Pemerintah dan tempat umum , dimana permasalahannya yakni masih banyak

ditemui perilaku merokok di kawasan tertentu dan juga belum ada himbauan berupa tanda larangan merokok yang dibuat dan dipasang berdasarkan atau mengacu pada Perda Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, belum pernah ada penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum. Dalam upaya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ada 4 faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. menunjukkan dalam proses implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok terlihat bahwa setiap pimpinan suatu organisasi belum maksimal menerapkan PERDA tersebut..Satpol PP kota Pontianak sebagai instansi pengawas dan penegak Perda belum pernah memberikan sanksi kepada perokok yang merokok di kawasan Tanpa Rokok terutama dilingkungan Pendidikan / Kampus yang ada di Kota Pontianak. implementasi Perda Kota Pontianak tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan dengan baik. Disarankan agar pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pembinaan kepada pemilik atau pengelola kawasan serta masyarakat akan bahaya asap rokok bagi kesehatan, serta pentingnya menjaga lingkungan yang sehat tanpa asap rokok. Selain itu masyarakat sendiri didorong agar berperan aktif mewujudkan ruangan serta lingkungan atau Kawasan Tanpa Rokok.Begitu pula Perda yang lainnya perlu ada penegakan yang tegas.

(12) Kerawanan dan Konflik Sosial

Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya . Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan , tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara

bersama- sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

(13) Sengketa Pengusaha-Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepahaman kedua belah pihak, hal ini disebabkan :

- a. Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan-aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja
- b. Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

(14) Keterbatasan Pembentukan Rescue Linmas

Melihat konflik yang pernah terjadi di Kota Pontianak maka perlu dimaksimalkan peran dan kesadaran masing-masing pengurus FKUB dengan meningkatkan serta mencari suatu bentuk atau kegiatan yang dapat dilakukan sehingga keterbatasan Rescue Linmas tidak menjadi penghambat dalam menciptakan kondisi toleran di Kota Pontianak. Perlu adanya selektifitas dalam menjaring dengan menyeleksi pengurus atau anggota yang memahami aturan yang dikeluarkan dengan Peraturan Bersama (PBM). Aturan – aturan Pusat dapat di adopsi kepada aturan yang tercipta di Kota Pontianak sehingga aturan secara nasional tentang pengurus/anggota FKUB yang merangkap pengurus dan anggota partai politik, atau yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dapat ditinjau karena dapat mempengaruhi kinerja pengurus itu sendiri dan citra independensi FKUB sebagai wadah yang netral untuk pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

Pembinaan lembaga FKUB di daerah dilakukan bersama antara Pemerintahan Kota Pontianak melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik dan Kementerian Agama melalui

Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak memfasilitasi dari aspek administrasi Pembuatan Keputusan Walikota Pontianak tentang pembentukan Dewan Penasehat FKUB Kota Pontianak, dan anggaran Pembinaan untuk honorarium Dewan Penasehat dan Keanggotaan FKUB. Sedangkan Kantor Kementerian Agama memfasilitasi pelaksanaan tugas dan Fungsi FKUB, termasuk kesekretariatan FKUB berada di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak.

(15) Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi Perempuan dalam beraktifitas maupun berperan didalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan ;

- a. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- b. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;

(16) Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan

- a. Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- b. Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- c. Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing-masing cabang olahraga;
- d. Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb;
- e. Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga

seperti pelatih yang berkualitas masing sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal.

- f. Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi.
- g. Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

(17) Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- b. Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- d. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa;

(18) Tertib Administrasi Kependudukan

Bagi Kota Pontianak, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan profil perkembangan kependudukan sebanyak 7 (tujuh) kali pada tahun-tahun sebelumnya, dan untuk Tahun Anggaran 2017 ini, adalah ke delapan kalinya. Agar perkembangan kependudukan diketahui oleh lintas sektor terkait, maka diseminasi profil selalu dilakukan melalui beberapa fase, yaitu fase konsolidasi data, fase inisiasi yaitu pembentukan SK Tim berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak, fase pengolahan, fase diseminasi draft profil, dan fase akhir (finalisasi profil). Dinas Kependudukan terus berupaya memberikan layanan serta mengembangkan pola pelayanan prima agar Masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta memangkas birokrasi untuk mempercepat pelayanan.

(19) Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Jalur pedestrian sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Di Kota Pontianak sudah terdapat jalannya yang memiliki jalur pedestrian. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur pedestrian di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, zebra cross, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya. Jalur pedestrian di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur pedestrian, serta minimnya penyediaan prasarana dan sarana pedestrian yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur pedestrian berkurang.

(20) Pedagang Kaki Lima

Pontianak, merupakan Kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti : Perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap kota Pontianak. Namun dikala malam hari kegiatan yang paling dominan di kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu, terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

Pemerintah Kota Pontianak, melalui Satpol PP Kota Pontianak telah melakukan patroli penertiban PKL seminggu dua kali. Fasum yang dipantau kebanyakan bahu jalan yang digunakan sebagai tempat jualan. Untuk kedepannya diharapkan lahan fasum tak lagi dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat jualan. Tindak lanjutnya, mereka juga membuat inovasi dengan ChiPS yaitu cegah kumuh melalui

penertiban subuh. Dalam program ini, petugas melakukan pengawasan pada subuh hari dengan sasaran penertiban lapak, rak gerobak liar yang ditinggal berada di atas fasum dengan tujuan untuk mencegah kekumuhan. Agar inovasi program berjalan, pihaknya juga sudah memberikan pandangan dalam revisi Perda RTRW. Dalam pembahasan, diharapkan ke depan agar ada satu tempat khusus diberikan bagi pedagang informal. Dengan memiliki tempat khusus, diharapkan agar lokasi fasum utamanya badan jalan, tak lagi digunakan masyarakat untuk berjualan.

4.1.3. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

(1) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi:

a. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Kota Pontianak adalah kota yang berkembang karena lokasi strategis dan fungsi yang diembannya sebagai ibukota propinsi Kalimantan Barat. Kota ini sangat sedikit dikaruniai kekayaan alam yang dapat dipergunakan untuk memacu perkembangannya. Efek positif dari hal tersebut adalah berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi sebagai dynamo pertumbuhan ekonomi kota. Disisi lain dengan beragam keunikan dan potensi lain yang dimilikinya, sangat memungkinkan untuk pengembangan pariwisata sebagai katalisator perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Untuk itu dalam perkembangannya, kedepan sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dalam konsep pembangunan strategis kota Pontianak

b. Mahalnya Harga Tanah

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, Humus dan Aluvial dengan karakteristik masing- masing berbeda satu dengan lainnya, Pada wilayah dengan karakteristik masing – masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan

pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 kilometer persegi, di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan.

c. Inflasi

Kota Pontianak terhitung bulan Januari hingga Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 1,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 145,58%. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks semua kelompok pengeluaran. dari tujuh kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, “Ada empat kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 4,43% serta kelompok bahan makanan 1,61% ”

Fenomena yang terjadi bahwa ada persamaan inflasi di bulan Desember 2018 dengan bulan Desember 2017 sebelumnya yaitu 3,99%. Karenanya Pontianak menjadi kota ketiga dengan inflasi tertinggi setelah Kota Tarakan dan Sampit.

Sementara di bulan Desember 2018, sepuluh komoditas mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan yaitu angkutan udara, daging ayam ras, sotong, kacang panjang, rokok kretek, bubur, bawang merah, makanan ringan/snack, emas perhiasan, dan cabe rawit. sedangkan sepuluh komoditas mengalami penurunan tertinggi yaitu bayam, sawi hijau, ikan tongkol, minyak goreng, sepatu, ikan dencis, oyong/gambas, sepeda motor, kol putih/kubis, dan nanas. Dengan Upaya menekan angka inflasi, Kota Pontianak membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah sehingga tim tersebut dapat menggali potensi dalam pengendalian harga – harga di Kota Pontianak.

(2) Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

- Masih lemahnya Daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial.
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
- Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- Akses pemodal bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar.

4.1.4. Bidang Government

- a. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan pengendalian
- b. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur
- c. Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
- d. Kerjasama antar Pemerintah, Maupun antara Pemerintah dengan Pengusaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat
- e. Efektifitas dan Efisiensi Belanja Daerah
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik

- Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan
- Belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dan hambatan;
- Pada unit-unit pelayanan publik masih terkendala dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi sebagai sarana kerja aparatur.
- Masih terjadi kendala koordinasi antar unit kerja penyelenggara pelayanan perijinan sehingga pada beberapa proses jenis perizinan masih terjadi tumpang tindih pekerjaan yang menghambat pelayanan secara optimal.

(1) Smart City

Konsep Pontianak smart city akan berhasil dengan pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak smart city, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “multiple Effect” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak Smart City.

Beberapa konsep pengembangan literasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di adopsi di Kota Pontianak dalam mendukung perwujudan smart city, diantaranya:

- Sosialisasi dan Training of Trainer Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, dan Produktif), bertujuan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.

- Bimbingan Teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi Pemuda, Pelaku Usaha, Guru, Responsif Gender dan Kaum Difable dengan Topik pelatihan berupa Teknologi Website, Jaringan Komputer, Aplikasi dan Konten.
- Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika, yaitu orang yang mampu menggunakan TIK dan Internet dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi konsep pengembangan Pontianak Smart City, juga harus terus dilakukan seiring dengan usaha pemerintah dalam menyiapkan berbagai perangkat dan infrastruktur yang mendukung. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya :

- Sosialisasi berbagai program aplikasi berbasis TIK di lingkungan kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai aparaturnya yang paling dekat hubungannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas yang berkembang di Kota Pontianak.
- Publikasi melalui media massa dan media sosial lokal.
- Sosialisasi dan publikasi melalui berbagai kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas.

(2) Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan perbaikan menyeluruh terhadap birokrasi yang ada. Reformasi birokrasi merupakan konsep perbaikan birokrasi dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Perbaikan bukan hanya mencakup aspek sistem birokrasi belaka akan tetapi juga meliputi budaya kerja dan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Isu penting menyangkut reformasi birokrasi ini adalah penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. Selain itu isu lainnya dalam konteks ini adalah menciptakan sinergitas antar lembaga pemerintah, sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.

Wujud nyata reformasi birokrasi ini dapat berupa berbagai program seperti penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), penyederhanaan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system".

(3) Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih perlu adanya perbaikan dan upaya dalam penyelenggaraan di Pemerintahan di Kota Pontianak, walaupun Kota Pontianak sudah mencapai delapan (8) kali berturut – turut masih diperlukan pembenahan atas setiap permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang ada antara lain :

- Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun;
- Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien;
- Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;

- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
- Belum optimalnya implementasi Good Governance;
- Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal;
- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.
-

Dalam perencanaan kedepan dalam rangka mendukung visi dan Misi Walikota, maka perlu diidentifikasi issue – issue Pembangunan yang berkelanjutan yang telah dikaji pada SDG's yaitu yang tertera di Tabel berikut di bawah ini :

Daftar Panjang issue Pembangunan Berkelanjutan
(RPJMD 2020-2024) Bersumber dari SDGs

Pilar TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	no Issue	Daftar Panjang Issue Strategis (KLHS)	Ekosistem			
				Pemukiman	Lahan terbuka/semak belukar/hutan	lahan pertanian/kebun	perairan
Pilar Pembangunan Sosial	1. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di mana pun	1	Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)				
	2. Mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan	2	Ketahanan pangan dan gizi (Kelaparan/Kemantapan ketersediaan bahan pangan+sayuran+9 bahan pokok)				
	sda	3	Ketersediaan lahan Kebutuhan pangan				
	3. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia	4	kehidupan sehat dan sejahtera				

	4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi	5	kuantitas dan Kualitas Pendidikan masyarakat				
	5. Segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya		sda				
	6. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	6	Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)				
		7	tergesernya budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/				
		8	Human trapicking				
Pilar Pembangunan Ekonomi	7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.	9	Energy listrik yang andal, bersih dan terbarukan (kelistrikan/PLN biar pet) dan BBM				
	8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan	10	kesempatan pekerjaan yang layak				
	9. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.	11	Kuantitas & kualitas infrastruktur (jln, Pelabuhan, saluran drainase , irigasi , sarana angkutan air dan darat yang				
	sda	12	Percepatan dan atau Pemerataan Fisik tepat sasaran				
Pilar Pembangunan lingkungan	10. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.	13	Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokus				
	sda	14	Kepadatan dan keadaan permukiman di perkotaan serta				
	sda	15	Banjir /genangan				
	Sda	16	Kekeringan dan kebakaran lahan/permukiman				

		17	Kemacetan arus lalu lintas darat				
		18	Berkembangnya perdagangan modern & tergesernya perdagangan				
	sda	19	Abrasi bibir sungai				
	11. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang	20	Sampah dan limbah				
	12. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi tanah dan menghentikan kehilangan	21	Rendahnya Pengelolaan potensi perikanan (keramba di sekitar sungai kapuas dan landak)				
	sda	22	Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (kawasan lindung dan kawasan budidaya) agar tercapai keseimbangan kepentingan				
	sda	23	Alih fungsi lahan dan				
	13. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang	24	Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak				
	sda	25	Pencemaran air parit/sungai yang ada di badan sungai/air				
	sda	26	Intrusi air laut (sumber air baku)				
Pilar pembangunan hukum & tata kelola	14. Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab, dan	27	Pelayanan dan Transparansi pengelolaan kelembagaan				

	s d a	28	Kurangterbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan kelembagaan				

Sumber : FGD serta Analisis Ekosistem dan TPB 2019

PERUMUSAN SKENARIO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD	Issue Strategis Teknokratik	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
1. Penataan Perumahan, Permukiman, Bangunan dan Lingkungan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Ketahanan pangan dan gizi (Kelaparan/Kemantapan ketersediaan bahan pangan+sayuran+9	1. B dan limbah
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan	2. Ketersediaan lahan untuk Kebutuhan pangan	2. Pencemaran air parit/sungai yang ada di badan sungai/air
3. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	3. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan	3. Kuantitas & kualitas infrastruktur aln, Pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air dan darat	3. Percepatan dan atau Pemerataan pembangunan Fisik tepat sasaran
3. Penanggulangan Bencana (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya	4. Percepatan dan atau Pemerataan pembangunan Fisik tepat sasaran	4. Terjadinya Alih fungsi lahan dan konflik lahan
4. Peningkatan Aksesibilitas Kawasan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	5. Keseimbangan antara Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota dengan peningkatan dan pelestarian lingkungan	5. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokus tertentu	5. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik & sosial) kawasan kumuh dan sekitar sungai besar dan di lokus tertentu
5. Manajemen Lalu Lintas (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	6. Antisipasi dan Pengendalian Banjir	6. Sampah dan limbah	6. Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan untuk tercapai keseimbangan kepentingan pemanfaatan sumber daya lahan (kawasan lindung dan
6. Pengelolaan Parkir (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	7. Antisipasi kebakaran Lahan dan Kekeringan	7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daratan (kawasan lindung dan kawasan budidaya) agar tercapai keseimbangan	7. Terbatasnya Peluang kesempatan pekerjaan yang layak
7. Pengelolaan Sumber Daya Air, Sampah dan Limbah (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	8. Pestaarian Budaya Lokal	8. Alih fungsi lahan dan konflik lahan	8. Kualitas Pendidikan di masyarakat
8. Pengendalian Banjir dan Genangan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)	9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem	9. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak	9. Kuantitas & kualitas infrastruktur aln, Pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air

	Issue Strategis Teknokratik	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
			yang representatif di!)
9. Penataan dan Pemerataan kawasan Taman an Ruang Terbuka Hijau (bidang fisik	10. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	10. Pencemaran air parit/sungai yang ada di badan sungai/air	10. Belum optimalnya pola kehidupan sehat dan sejahtera
10. Peningkatan infrastruktur guna Mendukung Peran dan Daya Saing (bidang fisik prasarana dan	11. Isu Global dan Nasional serta keterkaitannya dengan Visi Kota	11. kehidupan sehat dan sejahtera	11. Ketahanan pangan dan gizi (Kelaparan/Kemantapan ketersediaan lahan dan bahan pangan+sayuran+9
11. Antisipasi Kebakaran Lahan dan Kekeringan (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		12. kesempatan pekerjaan yang layak	12. Banjir /gena
12. Pengembangan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		13. Kepadatan dan keadaan pemukiman di perkotaan serta infrastrukturnya	13. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak
13. MDG's (bidang fisik prasarana dan infrastruktur)		14. Banjir /genangan	14. Kepadatan dan keadaan pemukiman di perkotaan serta infrastrukturnya
14. Peningkatan Kualitas SDM (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		15. Pelayanan dan Transparansi pengelolaan kelembagaan	15. Kekeringan dan kebakaran lahan/pemukiman
15. Pendataan kependudukan (Bidang sosial budaya dan		16. Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)	16. Kemiskinan dimasyarakat (pendapatan minim)
16. Pengendalian Penduduk (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		17. Kuantitas dan Kualitas Pendidikan masyarakat	17. Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)
17. Penanggulangan Masalah Sosial (Bidang sosial budaya dan		18. Kemacetan arus lalu lintas darat	18. Kemacetan arus lalu lintas darat
18. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		19. Kestaraan Gender (peran perempuan dan anak)	19. Pelayanan dan Transparansi pengelolaan kelembagaan
19. Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		20. tergesernya budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/	20. Pergeseran budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral/
20. Pemberdayaan Masyarakat (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		21. Kekeringan dan kebakaran lahan/pemukiman	21. Intrusi air laut (sumber air baku)

Issue Strategis Hasil Gabungan Forum OPD	Issue Strategis Teknokratik	Issue Strategis SDGs (Alternatif 1)	Rekomendasi Issue Strategis Rancangan Awal RPJMD hasil KLHS
21. Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		22. Human trafficking (Provinsi)	22. Kurang terbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan
22. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		23. Energy listrik yang andal, bersih dan terbarukan (kelistrikan/PLN biar pet) dan BBM (Provinsi)	23. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
23. Pengembangan IPTEK (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		24. Intrusi air laut (sumber air baku)	
24. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (Bidang sosial budaya dan kependudukan)		25. Kurang terbukanya Akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan dan	
25. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya (Bidang sosial budaya dan			
26. Pelestarian Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya serta Budaya Lokal (Bidang sosial budaya dan			
27. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Bidang sosial budaya dan			
28. Penanganan Masalah Kemiskinan (Bidang sosial budaya dan			
29. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum (Bidang sosial budaya dan			
30. Optimalisasi Rescue Linmas (Bidang sosial budaya dan			
31. MDG's (Bidang sosial budaya dan			
32. Peningkatan Daya Saing Daerah (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga			
33. Pembinaan dan pengembangan Kegiatan Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM (Bidang ekonomi, kesejahteraan			
34. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Pariwisata (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga			
35. Pengendalian Inflasi (Bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan tenaga			

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak seiring dengan dinamika dan perkembangan kota, maka rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan guna mewujudkan Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat , serta sebagai Kota Layak Huni dan Kota Masa Depan adalah:

4.2.1. Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

(1) Peningkatan Daya Saing Daerah

Membangun beberapa sector baik peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja, pertanian, Perhotelan, Kuliner dalam rangka penyelesaian masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

(2) Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Dengan di Bangunnya UMKM Centre maka diharapkan agar pembangunan yang dilaksanakan diiringi dengan kualitas hasil UMKM yang dipasarkan dengan melakukan pengembangan produk dan kualitas setiap pelaku Usaha.

(3) Pengendalian Inflasi

Dengan mengefektifkan koordinasi dan kerja tim Pengendalian Inflasi maka harga barang dan komoditi penyumbang inflasi dapat di tekan. Hal tersebut perlu kebijakan yang tepat karena inflasi kadang terjadi bukan dari factor kondisi di Kota Pontianak saja melainkan secara Luas dengan pengaruh Kondisi Nasional. Upaya Kota Pontianak dengan melakukan Sidak Harga Barang di pasar yang beredar dan penyediaan stok barang pengendali, diharapkan pula perlu ditingkatkan penyediaan keragaman jenis produk yang cenderung meningkatkan Inflasi.

(4) Pengembangan dan pembinaan Sektor Pariwisata

Upaya Pengembangan Destinasi wisata diiringi dengan perbaikan Infrastruktur serta pembinaan SDM di wilayah yang menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

(5) Pengembangan Kewirausahaan

Kota Pontianak melakukan pembinaan peningkatan Kemandirian di masyarakat dengan membuka sector usaha yang dapat mengembangkan kualitas setiap pelaku Usaha dan membuka peluang Pelaku Usaha memperoleh Jalan dalam memperoleh modal Usaha dari Perbankan dengan mempermudah Ijin Usaha serta perlu Pembinaan lainnya guna mendukung Kewirausahaan yang pada saat ini masih belum maksimal.

(6) Pengembangan Agribisnis

Dalam Rangka Pengembangan pada Bidang Agribisnis Kota Pontianak melakukan Upaya pengembangan Produk Lidah Buaya sebagai Ikon Produk yang dihasilkan dari Kota Pontianak. Tetapi sering mengalami Gangguan dengan kualitas yang kalah bersaing dengan Produk Luar. Hal ini dianggap perlu Kajian Khusus atas Kendala yang dihadapi dari permasalahan Hilir dan Hulu dalam peningkatan Produksi, Kualitas Barang dan kemasan , Pemasaran, Varian Produk yang ada.

(7) Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Dengan permasalahan yang sering terjadi dimana tenaga kerja yang baru memulai pencarian kerja tidak mempunyai keterampilan sehingga Pemerintah Kota Pontianak perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja atau pencari kerja dengan membuka kursus gratis bahasa asing sehingga dapat menambah keterampilan tenaga kerja dengan melakukan pelatihan bagi calon tenaga kerja maupun pekerja itu sendiri (misalnya : Kursus Satpam, Otomotif dan keterampilan lainnya sesuai kebutuhan lapangan kerja)

(8) Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Dalam rangka Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilakukan upaya penciptaan lapangan kerja yang dilaksanakan melalui kegiatan yang bertujuan

menciptakan keterampilan pencari kerja dalam bentuk pelatihan kerja serta memfasilitasi pengusaha dan pencari kerja melalui kegiatan Pameran Bursa Kerja atau Job Fair Kota Pontianak penyerapan tenaga kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua pencari kerja.

- (9) Peningkatan Investasi (Infrastruktur, SDM, Birokrasi, Keamanan dan Kepastian Hukum)
- (10) Ketersediaan Pasokan Kebutuhan Pokok dan Keterbukaan Informasi Harga Pasar
- (11) Akurasi Data Rumah Tangga Miskin dan Peningkatan Rumah Layak Huni
- (12) Bonus Demografi dan Pelatihan Kerja

Dalam ekonomi kependudukan dikenal dengan istilah transisi demografi, yaitu sebuah konsep mengenai proses penurunan angka kelahiransampai terciptanya tingkat populasi yang stabil. Proporsi usia penduduk 66 tahun keatas atau usia tua membawa dampak akan terjadi Bonus Demografi yang nantinya akan membawa pengaruh dapat mengatasi kesejahteraan dan masuk fase jendela kesempatan dimana jumlah penduduk produktif dapat diakumulasikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan diKota Pontianak

Dengan pemanfaatan Bonus demografi maka Kota Pontianak memaksimalkan kualitas SDM angkatan Kerja yang lebih baik dan membuka seluas- luasnya lapangan pekerjaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

- (13) Subsidi Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin
- (14) Revitalisasi Tata Kelola Pasar Tradisional
- (15) Evaluasi Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah Termasuk Kesesuaian Tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- (16) Pengembangan Ekonomi Kreatif
- (17) SDG's

4.2.2. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

(1) Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas SDM dengan memberlakukan Tukin kepada seluruh Pegawai dalam meningkatkan kualitas SDM di Kota Pontianak.

(2) Pendataan Kependudukan

Dalam Rangka Pendataan Kependudukan yang diperlukan adalah pendataan yang akurat dari tingkat RT sampai ke Capil, sehingga penyajian data yang dilakukan dapat lebih akurat dengan memaksimalkan pemakaian **Early Warning System**.

(3) Pengendalian Kependudukan

Pengendalian Kependudukan dengan mengefektifkan Kampung KB sebagai sarana sosialisasi program pengendalian Kependudukan di Lokasi yang telah terbangun sehingga peningkatan pemakaian dengan metode alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih efektif dan pemberdayaan Forum Anak yang dibentuk disetiap Kelurahan dalam rangka memberikan pendidikan anak untuk mengisi waktu pengembangan karakter dengan menghindari Anak menikah Muda.

(4) Penanggulangan Masalah Sosial

Penyediaan Program Kerja di SKPD terkait dalam penanganan Masalah Sosial di Kota Pontianak.

(5) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Ditinjau dari kualitas lulusan atau nilai rata- rata Ujian Akhir Nasional(UAN) pada Tahun 2017, terdapat masalah penurunan nilai UAN di Wilayah Kota Pontianak yaitu mencapai 5,97 atau 0,36 poin dibandingkan Pada Tahun 2016 yaitu sebesar 6,33 . Begitu pula angka Putus sekolah meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dari masing- masing tingkatan.

(6) Peningkatan Kualitas Kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas Posyandu dengan pembinaan dan peningkatan pengetahuan para kader Posyandu serta pendekatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dimana kader Posyandu disediakan Aplikasi dalam mendeteksi permasalahan yang ada di Masyarakat.

(7) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan memberdayakan komunitas yang peduli terhadap program di Pemerintah dan peduli dengan lingkungan dalam rangka mengakomodir penyelesaian permasalahan di masyarakat baik bidang infrastruktur, Sosial dan Ekonomi.

(8) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dengan Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan baik dibidang Pendidikan maupun akses Lapangan Kerja serta keberadaan di Legeslatif

(9) Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Pembinaan Pemuda dan Olah Raga di Kota Pontianak dalam rangka pemberdayaan Pemuda maka Disporapar melakukan kerjasama dengan Pengcab - Pengcab

(10) Pengembangan IPTEK

(11) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

(12) Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya

(13) Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya serta Budaya Lokal

(14) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

(15) Optimalisasi Rescue Linmas

(16) Penanganan Masalah Kemiskinan

(17) Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum

(18) Peningkatan kapasitas (CAPACITY BUILDING) dalam melaksanakan PUG

(19) Pemberdayaan Komunitas guna menunjang kualitas perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan.

(20) SDG's

4.2.3. Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

(1) Penataan Perumahan, Permukiman, Bangunan dan Lingkungan

(2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(3) Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

(4) Penanggulangan Bencana

(5) Peningkatan Aksesibilitas Kawasan

(6) Manajemen Lalu Lintas

- (7) Pengelolaan parkir
- (8) Pengelolaan Sumber Daya Air, Sampah dan Limbah
- (9) Penataan dan Pemerataan Kaawasan, Taman dan Ruang Terbuka Hijau
- (10) Antasipasi Kebakaran Lahan dan Kekeringan
- (11) Pengembangan Sistem Transportasi dan Angkutan Umum
- (12) Peningkatan Infrastruktur Guna Mendukung Peran dan Daya Saing
- (13) Pengendalian Banjir dan Genangan
- (14) SDG's

4.2.4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- (1) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
- (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- (3) Reformasi Birokrasi Yang Profesional
- (4) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- (5) Transparansi Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan
- (6) Pengembangan Pola Karir Pegawai Berdasarkan Kompetensi
- (7) Peningkatan Kualitas dan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- (8) Peningkatan Kerjasama Lintas Daerah dan Lintas Sektoral
- (9) Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Aparatur

Permasalahan yang masih saja timbul dari tahun ke tahun kondisi Aparatur di Kota Pontianak adalah :

- Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur;
- Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
- Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
- Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian
- Belum Optimalnya pelayanan Informasi Publik di setiap OPD berbasis Tehnologi Informasi dengan rancangan dan terapan system kearsipan, pelayanan pubik daerah dengan menggunakan Teknologi Informasi; sehingga perlu membentuk tim pelayanan informasi pubik disetiap Unit / OPD
- Penerapan Tunjangan kinerja pada tahun 2020 terhadap ASN di Kota Pontianak.

(10) Peningkatan kualitas Smart City

Konsep Pontianak smart city akan berhasil dengan pemahaman seluruh aparaturnya dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak smart city, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luas, sifat literasi yang memiliki “multiple Effect” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk didalam pembangunan Pontianak Smart City.

Beberapa konsep pengembangan literasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat di adopsi di Kota Pontianak dalam mendukung perwujudan smart city, diantaranya:

- Sosialisasi dan Training of Trainer Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif, dan Produktif), bertujuan untuk memfasilitasi, mengedukasi/literasi dan memberikan pemahaman tentang penggunaan internet secara positif tidak hanya sehat dan aman namun juga cerdas, kreatif dan produktif kepada agen perubahan di masyarakat guna mendorong pemberdayaan TIK yang berdaya guna, bernilai tambah dan bermanfaat.
- Bimbingan Teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas yang diperuntukkan bagi Pemuda, Pelaku Usaha, Guru, Responsif Gender dan Kaum Difable dengan Topik pelatihan berupa Teknologi Website, Jaringan Komputer, Aplikasi dan Konten.
- Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Agen Perubahan Informatika, yaitu orang yang mampu menggunakan TIK dan Internet dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Internet Secara Cerdas, Kreatif dan Produktif.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi konsep pengembangan Pontianak Smart City, juga harus terus dilakukan seiring dengan usaha pemerintah dalam menyiapkan berbagai perangkat dan infrastruktur yang mendukung.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diantaranya :

- Sosialisasi berbagai program aplikasi berbasis TIK di lingkungan kecamatan, kelurahan, Rukun Warga (RW)

dan Rukun Tetangga (RT) sebagai aparaturnya yang paling dekat hubungannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- Sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat dan komunitas-komunitas yang berkembang di Kota Pontianak.
- Publikasi melalui media massa dan media sosial lokal.
- Sosialisasi dan publikasi melalui berbagai kegiatan yang berbasis teknologi informasi dan kreatifitas.

(11) Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pembangunan dan Pemerintahan
- Pengembangan basis data yang akurat dan *up to date* sebagai landasan penyusunan rencana dan kebijakan belum dilakukan dengan baik;
 - Sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun;
 - Monitoring pelaksanaan pembangunan belum dijalankan dengan efektif dan efisien;
 - Masih terkendalanya pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah;
 - Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
 - Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
 - Belum optimalnya implementasi Good Governance.
 - Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik.
 - Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan belum optimal.

- Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan;
- b) Sumber Daya Aparatur
 - Kuantitas sumber daya aparatur masih belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur;
 - Masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya;
 - Belum semua sumber daya aparatur yang ada bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
 - Belum optimalnya pemahaman SDM aparatur terhadap peraturan kepegawaian
 - Belum Optimalnya pelayanan Informasi Publik di setiap OPD berbasis Teknologi Informasi dengan rancangan dan terapan system kearsipan, pelayanan publik daerah dengan menggunakan Teknologi Informasi; sehingga perlu membentuk tim pelayanan informasi publik di setiap Unit / OPD
 - Belum Optimalnya system dan mekanisme pengawasan dari masyarakat yang terintegrasi dan terlembaga seperti menyusun system dan mekanisme saluran pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat secara partisipatif dan terintegrasi; memperkuat peran serta masyarakat yang terlembaga dalam pengawasan pelaksanaan program dan kebijakan daerah;
 - Belum optimalnya penerimaan redistribusi dan pajak daerah dalam PAD Kota Pontianak

4.2.5. Isu Global dan Nasional serta keterkaitannya dengan Visi Kota Pontianak

Tahun 2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 (lima) pondasi utama yang meliputi: Manusia, Planet, Kesejahteraan, Perdamaian dan Kemitraan dengan 17 (tujuh belas) target sasaran utama, yakni:



1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.



2. Tanpa Kelaparan

Tidak adalagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.



3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.



4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar dengan pola pengenalan lingkungan dan pembangunan karakter yang positif dan inklusif serta berkeadilan mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang serta Peningkatan mutu Hasil Pendidikan baik ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.



5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan dengan meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.



6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.



7. Energi , Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern dengan mengembangkan pola- pola sumber energi alternatif untuk semua orang.



8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh

dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.



9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri baik kecil, menengah dan besar yang memberdayakan pelaku ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dari segala lini.



10. **Mengurangi Kesenjangan**

Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.



11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.



12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.



13. **Aksi Terhadap Iklim**

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.



14. **Kehidupan Bawah Laut**

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.



15. **Kehidupan di Darat**

Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.



16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk

lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan.



17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Kota Pontianak dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-8 dan ke-9 yaitu bagaimana mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang serta membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri baik industri kecil yang , menengah maupun besar yang yang di support dari pelaku **ekonomi kreatif** yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Namun demikian, sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Pontianak.

4.2.6.ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam Rangka memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, memaksimalkan potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan optimal.

Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

(1) Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan **peluang** dan **tantangan** yang dihadapi kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kota. Tinjauan eksternal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi kota Pontianak baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional sebagaimana dijelaskan dalam analisis posisi (*positioning analysis*) berikut.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km².

Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Kalimantan Barat, Kota Pontianak termasuk ke dalam pola kota Muara Kapuas dengan luas sekitar 18.300 km². Pusat dari pola kota Muara Kapuas ini adalah Kota Pontianak. Dalam pola kota Muara Kapuas, kota-kota lainnya yang merupakan subpusat pelayanan terdiri dari Rasau Jaya, Mempawah, dan Ngabang. Kota Pontianak juga merupakan pusat dari kerangka kerjasama Pokusikarang (Pontianak, Kuala Mandor, Siantan, Sungai Kakap, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang) dan KMP (Kawasan Metropolitan Pontianak).

Dalam **lingkup nasional** dan **internasional**, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, posisi Kota Pontianak diarahkan sebagai berikut:

1. Kota Pontianak sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan peran dan fungsi sebagai berikut :

- Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya. Letak kota Pontianak yang dekat dengan Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunai Darussalam), Singapura memberikan implikasi, aksesibilitas dan kinerja pelabuhan (sungai dan udara), terminal antarnegara, terminal antarprovinsi, maupun dengan wilayah hinterland-nya perlu ditingkat dalam kualitas yang memadai.
 - Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
 - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
 - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
 - Sebagai pusat jasa pemerintahan untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
 - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
2. Sektor unggulan wilayah hinterland Kota Pontianak adalah tanaman pangan, perkebunan, industri, dan perikanan laut. Implikasi dari kondisi ini, dimana di lain pihak Kota Pontianak juga berperan sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan ruang untuk memberikan jasa pelayanan untuk mewadahi kegiatan terkait dengan sektor unggulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sektor unggulan maupun industri pengolahan tanaman pangan/perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).
 3. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat, dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dari Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang. Untuk mewujudkan hal ini, maka mutlak diperlukan terjalinnya integrasi yang saling menguntungkan antara Kota Pontianak dan kota tadi. Oleh karena itu, harus ada aksesibilitas yang tinggi yang menghubungkan Kota Pontianak dengan kota-kota tersebut.

4. Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia sedangkan bandara di Kabupaten Pontianak yang memiliki aksesibilitas tinggi ke kota Pontianak ditetapkan sebagai bandara udara kelas dua. Peran ini dikembangkan berkaitan dengan adanya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) sehingga diharapkan dapat bersaing dan menangkap peluang dalam perdagangan antar Negara khususnya ASEAN.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

A. Peluang

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.
2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

B. Tantangan

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem

DAS Kapuas) memposisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.

2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

(2) Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki akan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kota Pontianak sebagai berikut:

A. Kekuatan

1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin.
2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa, kota tepian sungai, kota seribu parit merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata
3. Status kota Pontianak sebagai ibukota propinsi serta lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar orang dan barang memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.
4. Jumlah penduduk yang cukup besar dan kualitas sumber daya manusia Kota Pontianak yang lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya merupakan sebuah potensi yang besar untuk menopang sekaligus aktor dalam pengembangan perekonomian dan fisik wilayah.
5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.
7. Kewenangan yang dimiliki pemerintah kota semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian.

B. Kelemahan

1. Kondisi geografis kota Pontianak yang berada di kawasan muara Sungai Kapuas dan topografi wilayah yang datar menyebabkannya sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.
2. Keterbatasan lahan dan alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan harga tanah yang tinggi berimplikasi biaya pembangunan yang juga semakin tinggi
3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat

4. Sarana dan prasarana perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi
5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal
6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan tekanan yang tinggi terhadap
7. sistem transportasi kota diperparah tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kemacetan.
8. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
9. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama.
10. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.
11. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.
12. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomidan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya: meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; Sarana dan prasarna fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar

beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien; Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta *hinterland* Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

5.1. VISI

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

- **Pontianak Kota Khatulistiwa**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.

- **Berwawasan Lingkungan**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

- **Cerdas**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

- **Bermartabat**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

5.2. MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			78,53%	78,73%	78,93%	79,13%	79,33%	79,33%
				1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	72,37 tahun	72,42 tahun	72,47 tahun	72,52 tahun	72,57 tahun	72,57 tahun
					2 Angka Stunting Balita	21,00%	20,50%	20,00%	19,50%	19,00%	19,00%
				2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kebudayaan	1. Rata rata lama sekolah	9,92 tahun	9,94 tahun	9,96 tahun	9,98 tahun	10,00 tahun	10,00 tahun
					2. Angka melek huruf	98,86%	99,06%	99,16%	99,26%	99,36%	99,36%
					3. Persentase warisan seni dan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya lokal	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	85,00%
				3. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya peran perempuan dan meningkatnya perlindungan anak	1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	1,71%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
					2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,88%	93,92%	93,98%	94,05%	94,17%	94,17%
					3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
				4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	1. Persentase Peningkatan Jumlah pemuda berprestasi Tingkat Provinsi	4,16%	8,33%	11,53%	13,79%	15,15%	15,15%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
					2 Persentase Peningkatan Jumlah pemuda berprestasi Tingkat Nasional	4,16%	8,33%	11,53%	13,79%	15,15%	15,15%
					3 Persentase peningkatan Jumlah Perolehan medali olah Raga Tingkat Provinsi	8,69%	8,00%	11,11%	13,33%	14,70%	14,70%
					4 Persentase peningkatan Jumlah Perolehan medali olah raga Tingkat Nasional	8,69%	8,00%	11,11%	13,33%	14,70%	14,70%
2.	Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif	1 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan	1 Indeks Infrastruktur			78,55%	80,29%	82,04%	83,79%	85,63%	85,63%
				1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	1. Indeks Infrastruktur Jalan	87,00%	89,00%	91,00%	93,00%	95,00%	95,00%
					2. Indeks Infrastruktur Saluran Drainase	48,00%	50,00%	52,00%	54,00%	56,00%	56,00%
				2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum	1 Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	1 Persentase kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
				4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1 Indeks Infrastruktur Permukiman	88,09%	89,43%	90,78%	92,13%	93,82%	93,82%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
				5. Meningkatnya kualitas transportasi	1 rata-rata waktu tempuh	0,05 Jam	0,05 Jam	0,05 Jam	0,05 Jam	0,05 Jam	0,05 Jam
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas	1 Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	71,74	74,74	77,74	80,74	83,74	83,74
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2 Meningkatnya penerapan akuntabilitas	1 Opini BPK	1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan	1 Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2 Nilai SAKIP	1 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak	A	A	A	A	A	A
		3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1 Nilai LPPD	1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)	Bintang 3 (***)	Bintang 4 (****)	Bintang 4 (****)
4.	Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing	1 Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi			5,20%	5,30%	5,50%	5,80%	6,10%	6,10%
			2. Tingkat inflasi			≤5%	≤5%	≤4%	≤4%	≤4%	≤4%
			3. Gini Ratio			0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
			1 Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	1 Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB		1,33%	1,33%	1,33%	1,34%	1,34%	1,34%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
				2 Meningkatnya sektor perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%
				3 Meningkatnya sektor industri	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,17%	16,25%	16,25%	16,30%	16,30%
				4 Meningkatnya Investasi Daerah	1 Persentase Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
				5 Meningkatnya sektor pariwisata	1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,40%	3,41%	3,42%	3,43%	3,44%	3,44%
				6 Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1 Presentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	4,00%	4,25%	4,50%	4,80%	4,90%	4,90%
			4 Angka Kemiskinan	1 Menurunnya kemiskinan	1 Angka Kemiskinan	4,90%	4,80%	4,50%	4,25%	4,00%	4,00%
			5 Tingkat Pengangguran			9,97%	9,80%	9,00%	8,50%	8,00%	8,00%
				1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1 Rasio Penduduk yang Bekerja	90,03%	90,20%	91,00%	91,50%	92,00%	92,00%
5.	Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan	1 Terwujudnya Kota yang bersih, hijau , nyaman, dan berwawasan lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			66,20%	66,30%	66,50%	66,70%	66,80%	66,80%
				1. Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	54,00%	54,30%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%
					2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00%	84,00%	84,00%	84,70%	85,00%	85,00%
					3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,00%	62,00%	62,00%	62,00%	62,00%	62,00%
				2. meningkatnya kualitas tata ruang	1 persentase pemanfaatan lahan sesuai tata ruang	85,00%	88,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
		2 Terwujudnya kota yang aman dan tertib	1 angka kriminalitas yang di selesaikan			73,80%	75,00%	77,00%	80,00%	85,00%	85,00%
				1 menurunnya jumlah pelanggaran perda dan perkara	1 presentase kasus pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2 Tidak terjadi konflik	1 Meningkatnya Keamanan Stabilitas Daerah	1 Tidak terjadi konflik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			3 persentase kejadian bencana yang ditanggulangi			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				1 Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	1 indeks resiko bencana	83	81	79	77	75	75

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun kedepan.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan penasehat aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk tahun 2020-2024 dan hubungannya dengan visi dan misi Kota Pontianak tahun 2020-2024 secara matrik dalam tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	1. Peningkatan Pelayanan kesehatan maternal, Neonatal, Bayi
			2. Peningkatan Standarisasi Puskesmas dengan Fasilitas Persalinan
			3. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Maternal, Neonatal, Bayi
			4. Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan
		2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja
			2. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Anak Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja
			3. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
		3. Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi
			2. Peningkatan Kewaspadaan Gizi
			3. Peningkatan Penanggulangan Masalah Gizi dan Pengelolaan Konsumsi Gizi
			4. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Perbaikan Gizi Masyarakat
			5. Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		4. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Peningkatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
			2. Peningkatan Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
			3. Peningkatan Pelayanan pengendalian penyakit menular
			4. Peningkatan Kemitraan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (KPA)
			5. Peningkatan Imunisasi
			6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
			7. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
		5. Meningkatnya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
		6. Meningkatnya Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana	2. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Program JKN
			1. Peningkatan Pembangunan puskesmas dan jaringannya
			2. Peningkatan Pembangunan posyandu
			3. Peningkatan Renovasi dan Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya
			4. Peningkatan Renovasi dan Revitalisasi Posyandu
			5. Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Jaringannya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Posyandu
			7. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
			8. Peningkatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
		7. Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Puskesmas
			2. Peningkatan Pendampingan Akreditasi FKTP
			3. Peningkatan Pelaksanaan Survei Akreditasi FKTP
			4. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kesehatan Dasar
			5. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Perorangan
			6. Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
			7. Peningkatan Standarisasi RSUD Tipe D
			8. Peningkatan Penyusunan Standar Pelayanan RSUD (RSUD Kota Ptk.)
			9. Peningkatan Akreditasi RSUD (RSUD Kota Ptk.)
		8. Meningkatnya Distbusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Peningkatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
			2. Peningkatan Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
		9. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD) di 25 UPTD/UPK
			2. Peningkatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan APBD di 24 UPTD/UPK
			3. Peningkatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di 23 UPTD/UPK
			4. Peningkatan Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
			5. Peningkatan Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan BKMM
		10. Meningkatnya Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	1. Peningkatan Dukungan Manajemen Satuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal
			2. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
		11. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi
			2. Peningkatan Penyusunan Profil Kesehatan
		12. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi	1. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
		13. Meningkatnya Pengadaan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1. Peningkatan Pembangunan Prasarana RSUD
			2. Peningkatan Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit
			3. Peningkatan Pengadaan Sarana Penunjang RSUD
			4. Peningkatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga RSUD
			5. Peningkatan Penyediaan Barang Cetak Pelayanan RSUD
			6. Peningkatan Pengadaan Bahan Logistik RSUD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Peningkatan Pengadaan Alat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Tipe D (Dinkes)
			8. Peningkatan Pengadaan Sarana Medis RSUD
			9. Peningkatan Penyediaan barang cetakan Rekam medik yang diadakan
			10. Pembangunan RS Baru
		14. Meningkatnya Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	1. Peningkatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
			2. Peningkatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
			3. Peningkatan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit
		15. Meningkatnya Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Peningkatan Pemeliharaan sarana RSUD
			2. Peningkatan Pemeliharaan Prasarana RSUD
		16. Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (RS Kota, BKMM, RS Siantan	1. Peningkatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan RSUD Tipe D
			2. Peningkatan Pengembangan Pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)
			3. Peningkatan Penyediaan Biaya Operasional Pelayanan RSUD (RSUD Kota Ptk.)
		17. Meningkatnya Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit	1. Peningkatan Penyusunan Profil Kesehatan RSUD Kota Pontianak
			2. Peningkatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD Kota Pontianak
			3. Peningkatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat - RSUD Kota Pontianak
			4. Peningkatan Pengembangan Pelayanan Publik - RSUD Kota Pontianak
			5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - RSUD Kota Pontianak
			6. Peningkatan Angka Kredit ASN di UPTD RSUD Kota Pontianak
			7. Peningkatan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional di RSUD
			8. Peningkatan Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor RSUD
			9. Peningkatan Ketersediaan Alat Tulis Kantor RSUD
			10. Peningkatan Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD
			11. Peningkatan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RSUD
			12. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kesehatan di RSUD
			13. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kebersihan di RSUD
			14. Peningkatan Ketersediaan Tenaga Pengamanan di RSUD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			15. Peningkatan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan RSUD
			16. Peningkatan Ketersediaan Makanan dan Minuman di RSUD
			17. Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi ASN ke Luar Daerah di RSUD
			18. Peningkatan Ketersediaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat di RSUD
			19. Peningkatan Akuntabilitas Dokumen Rencana Kerja dan Penganggaran di RSUD
			20. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja di RSUD
			21. Peningkatan Akuntabilitas LPPD di RSUD
			22. Peningkatan Akuntabilitas Laporan SPIP di RSUD
			23. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja di RSUD
			24. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di RSUD
		18. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. Peningkatan Pelayanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
			2. Peningkatan Pelayanan Pengendalian penyakit Tidak Menular
			3. Peningkatan Pelayanan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
			4. Peningkatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
		19. Meningkatnya Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan Obat Dan Makanan
			2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
			3. Peningkatan Pengawasan Dan Pembinaan Sarana Kefarmasian
		20. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Umum dan Makanan	1. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan tempat - tempat umum
			2. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan tempat pengolahan makanan
		21. Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Peningkatan Kemitraan Pengembangan Lingkungan Sehat
			2. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat
		22. Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Pengembangan Media Promosi, Informasi dan Edukasi
			2. Peningkatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
			3. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
			4. Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan Sekolah
			5. Peningkatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kebudayaan	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	6. Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Menyediakan bantuan operasional sekolah pendidikan dasar 2. Menyediakan sarana prasarana sekolah dasar dan menengah yang baik
		2. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1. Menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas 2. Melaksanakan bimbingan dan workshop bagi peningkatan kualitas tenaga pendidik 3. Mengadakan kompetisi bagi para tenaga pendidik
		3. Meningkatnya pelayanan pendidikan Anak Usia dini	1. Menyediakan bantuan operasional pendidikan PAUD 2. Menyediakan sarana prasarana sekolah PAUD yang baik
		4. Meningkatnya pelayanan pendidikan Non Formal dan Imformal	1. Melaksanakan pelatihan non formal 2. Mengadakan sosialisasi kesehatan bagi remaja 3. Melaksanakan ujian Paket 4. Menyediakan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
		5. Meningkatnya pembinaan dan pelestarian budaya lokal	1. Menyelenggarakan festival seni budaya 2. Memberikan pembinaan kepada sanggar seni dan budaya 3. Memberikan bantuan peralatan kesenian 4. Menyusun dokumen warisan budaya tak benda 5. Pendataan budaya lokal
		6. Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan pembinaan kepada perpustakaan	1. Melakukan penilaian terhadap pengelolaan perpustakaan dan tempat baca yang ada di kota pontianak 2. Melakukan Pembinaan Perpustakaan
		7. Meningkatkan Kualitas pengelolaan kearsipan	1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 2. Melaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan secara rutin
	3. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya peran perempuan dan meningkatnya perlindungan anak	1. Meningkatkan intensitas penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK	1. Peningkatan intensitas penyuluhan Komunikasi Informasi dan Edukasi KKBPK
		2. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
		3. Peningkatan kualitas pelayanan KB	1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
		4. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		5. Peningkatan kapasitas dan kualitas hidup perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya	1. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan 2. Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	1. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot 2. Penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan
		7. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	
		8. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial	
		9. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan	7. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan
		10. Memperkuat lembaga/jejaring PUG	
		11. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);	
		12. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	
		13. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.	1. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.
		14. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	
		15. Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kehidupan	1. Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kehidupan
		16. Meningkatkan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
	4. Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	1. Meningkatkan Peran serta kepemudaan	1. Memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
		2. Meningkatkan prestasi olahraga	2. Melakukan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan
			1. Melakukan pembinaan olahraga
			2. Mengikuti pertandingan olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan	1. Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	1. Membangun jaringan jalan baru dan meningkatkan fungsi jaringan jalan yang ada, serta terus melaksanakan pemeliharaan jalan agar kelancaran dan kenyamanan berlalu-lintas atau aksesibilitas kawasan tercapai	1. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan jalan 'inner ringroad', jalan paralel, jalan penghubung atau jalan-jalan alternatif serta utilitas jalan lainnya, dan memelihara atau memperbaiki jalan yang rusak
		2. Membangun dan meningkatkan kualitas konstruksi saluran drainase, serta memelihara fungsi jaringan drainase untuk melancarkan aliran air	1. Membangun dan meningkatkan konstruksi saluran pada kawasan-kawasan permukiman rawan tergenang, serta kawasan-kawasan baru yang belum mempunyai jaringan saluran drainase yang memadai, dan memelihara saluran drainase dari pendangkalan atau penyumbatan
	2. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap air minum	1. Menjaga sumber air baku dari pencemaran dengan membangun sistem sanitasi yang baik, serta meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih ke kawasan permukiman yang jauh dari sumber air bersih	1. Membangun dan mensosialisasikan sistem sanitasi lingkungan yang baik, serta membangun sistem pengolahan dan pendistribusian air bersih yang mampu mencukupi kebutuhan dan menjangkau seluruh kawasan permukiman penduduk
	3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai dengan ketentuan	1. Membangun, meningkatkan, atau merehabilitasi bangunan-bangunan milik pemerintah serta utilitas dan kelengkapan-kelengkapan bangunan lainnya
	4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman	1. Melakukan perbaikan jalan lingkungan permukiman
			2. Melakukan perbaikan kualitas dan penataan drainase lingkungan permukiman
			3. Melakukan perbaikan kualitas jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada kawasan kumuh
		2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan perumahan	1. Perbaikan/Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
			2. Perbaikan/Penyediaan rumah layak huni bagi warga akibat terkena program Pemerintah Kota Pontianak
			3. Menyediakan dan merehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota
		3. Menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan ruang terbuka hijau	1. Pembelian/ganti rugi lahan masyarakat yang terkena kegiatan pembangunan pemerintah
			2. Penyediaan lahan baru untuk mendukung rencana pembangunan dan untuk penyediaan ruang terbuka hijau
			3. Penyediaan lahan untuk taman pemakaman umum
		4. Peningkatan pemahaman terkait regulasi pertanahan	1. Memfasilitas kasus/masalah pertanahan yang dilaporkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Meningkatnya kualitas transportasi	1. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1. Melakukan pengawasan dan patroli serta penjagaan lalu lintas, parkir dan terminal
			2. Penyusunan rencana dan masterplan transportasi kota pontianak serta pendataan lalu lintas
			3. Meningkatkan koordinasi antar instansi teknis dan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas
		2. Peningkatan Pelayanan ASDP	1. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertiban Dermaga dan Pelabuhan serta Angkutan sungai
			2. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan
		3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Angkutan umum dan barang
			2. Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor
			3. Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor
			4. Meningkatkan kualitas pelayanan

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang berlaku	1. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar memenuhi peraturan perundangan tentang Pelayanan Publik
		2. Meningkatkan Fasilitasi terhadap kebijakan pembangunan	1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka percepatan proses pembangunan
		3. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi layanan pengadaan barang/jasa	1. Melakukan pembinaan kepada para pihak bidang pengadaan barang/jasa
		4. Meningkatkan Fasilitasi terhadap layanan konstruksi dan konsultansi sertafasilitasi terhadap pengadaan barang/jasa lainnya	1. Merealisasikan paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		5. Meningkatkan penyebaran informasi kegiatan Kepala Daerah	1. Melakukan dialog interaktif, jumpa pers, pers release, kerjasama dibidang publikasi dan iklan dengan media cetak dan elektronik
		6. Meningkatkan penyaluran bantuan kepada masyarakat	1. Memfasilitasi Madrasah Non Formal dan Posyandu di Kota Pontianak
		7. Meningkatkan pelayanan kepada Kecamatan, Kelurahan,RW dan RT	1. Memberikan pembekalan kepada Aparatur Kecamatan, Aparatur Kelurahan Pengurus RW dan RT di Kota Pontianak
		8. Meningkatkan Pelayanan Kepada Jamaah Haji Kota Pontianak	1. Memfasilitasi Jamaah Haji, Petugas TPHD dan TKHD selama musim Haji
		9. Meningkatkan Pembinaan Terhadap peningkatan pelayanan BUMD	1. Menyediakan bahan regulasi dan kebijakan data dan informasi guna peningkatan pelayanan BUMD kepada masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		10. Meningkatkan Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	1. Melaksanakan Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah melalui sarana Rekaman Visualisasi dan penerbitan Majalah Warta Kota
		11. Meningkatkan Kemampuan SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1. Melaksanakan Bimtek pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM Pengelola Barang/Jasa
			2. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang/jasa
		12. Meningkatkan Pelayanan Operasional Kepala Daerah	1. Melaksanakan fasilitasi terhadap pelayanan keprotokolan
		13. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan	1. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan sistem dan capacity building bagian layanan pengadaan
		14. Meningkatkan penyaluran bantuan keagamaan kepada masyarakat	1. Melaksanakan fasilitasi kepada guru ngaji, petugas fardhu kifayah, rumah ibadah dan petugas lembaga keagamaan
		15. Meningkatkan daya saing daerah melalui kegiatan promosi	1. Mengikuti berbagai pameran guna mempromosikan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas
		16. Meningkatkan Fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	1. Menerbitkan peraturan Walikota tentang standar biaya dan standar belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku
		17. Meningkatkan kualitas pelayanan prima di kecamatan dan kelurahan	1. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan
			2. Melakukan survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan di kecamatan dan kelurahan
		18. Meningkatkan kualitas pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Fasilitasi lomba-lomba di kelurahan dan kecamatan
			2. Pelaksanaan lomba kelurahan
			3. Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan
			4. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pembangunan di Kecamatan
		19. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan	1. Melaksanakan gotong royong di kecamatan dan kelurahan
			2. Melakukan inovasi unggulan kelurahan dan inovasi kecamatan
			3. Melaksanakan kegiatan HUT RI
			4. Melaksanakan bantuan sarana prasarana dan pemeliharaan untuk fasilitas pendidikan dan kebudayaan masyarakat non komersil di kelurahan
			5. Pemberian Bantuan Meterial untuk Pembangunan Jalan dan Drainase
		20. Meningkatkan kualitas lembaga dan kelompok masyarakat	1. Fasilitasi kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan
			2. Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan kelurahan
			3. Pembinaan posyandu
			4. Pembinaan STQ dan MTQ di kecamatan
			5. Melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan
			6. Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan Berbasis Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		21. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui musrenbang kecamatan dan kelurahan	1. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
		22. Meningkatkan kesadaran hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
		23. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Melakukan Pelayanan Perizinan Proaktif
			2. Melakukan Evaluasi terhadap mekanisme, Prosedur dan Penerbitan Perizinan
			3. Melaksanakan fasilitasi Teknis IMB Pemutihan
			4. Melaksanakan Koordinasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan
			5. Melaksanakan evaluasi dan penagihan piutang retribusi
		24. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Perizinan dan Pengaduan Masyarakat.
		25. Meningkatkan Kebijakan Penanaman Modal	2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
			1. Melakukan Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Perizinan dan Penanaman Modal
		26. Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	1. Melakukan Peningkatan SIMYANDU
		27. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	1. Melakukan Pameran Hari Jadi
		28. Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi	2. Melakukan Penyusunan Data Profil, dan Promosi Investasi
			1. Melakukan Pengelolaan Website
		29. Meningkatkan Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Melakukan Bimbingan dan Pelatihan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPIPISE, LKPM)
		30. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pendaftaran Kependudukan	1. Melakukan pelayanan pembuatan KTP elektronik di tempat-tempat tertentu
			2. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
			3. Melaksanakan perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) (NIK)
			4. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk rentan
			5. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk non permanen
		31. Meningkatkan Kualitas Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	1. Melakukan penerbitan Akta Kelahiran di tempat-tempat tertentu
			2. Melakukan Pendataan data penduduk yang telah dilengkapi dengan data akta pencatatan sipil (NIK)
			3. Melakukan digitalisasi dokumen pencatatan sipil yang dialihmedia menjadi dokumen digital
			4. Melakukan sinkronisasi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian dengan data SIAK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Melakukan pemeliharaan rekondisi dan reproduksi dokumen register akta pencatatan sipil
			6. Melakukan bimbingan teknis administrasi pencatatan sipil terhadap perangkat RT dan Kelurahan
		32. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak Data Warehouse
			2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan konten pada media website
			3. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan SIAK
			4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembaharuan data pada sistem intranet serta penyampain informasi melalui SMS gateway
			5. Melakukan kegiatan verifikasi dan pembersihan database kependudukan dari data ganda dan anomali lainnya (NIK)
			6. Menyusun profil kependudukan berdasarkan informasi kependudukan
			7. Melakukan pembaharuan data kependudukan dari kegiatan kemitraan dengan pihak lain (NIK)
			8. Menyusun Buku Data Agregat Kependudukan
	2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	1. Mengoptimalkan pengelolaan tata kelola pemerintahan berbasis e-government
			2. Meningkatkan pengembangan jaringan informasi pembangunan berbasis e-gavernment
		2. Meningkatkan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat secara online
		3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2. Meningkatkan pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi mendukung Smart City
			1. Meningkatkan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintah Kota Pontianak
		4. Meningkatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika
		5. Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektorial Kota Pontianak	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik sektoral Kota Pontianak
		6. Meningkatkan Kualitas Informasi Pembangunan	1. Mengintegrasikan data statistik sektoral Kota Pontianak kedalam portal satu data
Meningkatnya Penerapatan Akuntabilitas	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Menyusun APBD dan APBD-P tepat waktu	1. Penyusunan APBD sesuai peraturan perundang-undangan
			2. Pembinaan penyusunan APBD kepada Organisasi Perangkat Daerah
			3. Penggunaan teknologi informasi penganggaran yang terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Melaksanakan Penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Meningkatkan penatausahaan penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
			2. Penggunaan teknologi informasi penatausahaan penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah yang terintegrasi
		3. Menyusun Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
			2. Pembinaan penyusunan Laporan Keuangan kepada Organisasi Perangkat Daerah
			3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan terhadap Organisasi Perangkat Daerah
			4. Penggunaan Teknologi Informasi Pelaporan Keuangan yang terintegrasi
		4. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset	1. Penyelenggaraan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan
			2. Pembinaan pengelolaan aset daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah
			3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah
			4. Penggunaan teknologi informasi pengelolaan aset daerah yang terintegrasi
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan aturan berlaku.
			2. Penyelenggaraan musrenbang dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
			3. Peningkatan pengelolaan data perencanaan.
			4. Peningkatan sistem informasi dalam mendukung proses perencanaan.
		2. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan fasilitasi bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.	1. Menyusun dan mereview dokumen perencanaan pembangunan bidang bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang dibutuhkan.
			2. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
			3. Pembinaan dan verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
		3. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan fasilitasi bidang Ekonomi.	1. Menyusun dan mereview dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang dibutuhkan.
			2. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Pembinaan dan verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang ekonomi.
		4. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan fasilitasi bidang Sosial dan Budaya.	1. Menyusun dan mereview dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang akomodatif.
			2. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.
			3. Pembinaan dan verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang sosial dan budaya.
		5. Meningkatkan Kualitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	1. Penyusunan LKPJ dan laporan-laporan evaluasi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			2. Peningkatan kualitas sistem informasi dan mengelola data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
		6. Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan.	1. Peningkatan kapasitas ASN kelitbang dan inovasi daerah.
			2. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kelitbang dan inovasi daerah.
		7. Meningkatkan peran litbang dalam inovasi daerah.	1. Peningkatan koordinasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dengan perangkat daerah.
			2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder bidang kelitbang dan inovasi daerah.
		8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kelembagaan OPD	1. Membina dan memfasilitasi OPD dalam penyusunan LAKIP
		9. Meningkatkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan	1. Membina dan Memfasilitasi OPD dalam pengisian indikator kinerja kunci keberhasilan kegiatan pemerintahan daerah
		10. Membentuk organisasi perangkat daerah yang ideal	1. Melakukan evaluasi secara berkala agar kelembagaan dapat ditata sesuai kondisi ideal suatu organisasi
		11. Memaksimalkan penyusunan analisis jabatan sehingga dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian	1. Membina dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja agar memenuhi standar kebijakan manajemen kepegawaian
		12. Meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum	1. Memberikan pendampingan kasus hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pejabat daerah dan aparatur
		13. Meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum	1. Memberikan pendampingan kasus hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pejabat daerah dan aparatur
		14. Meningkatkan kemampuan aratur perancang produk hukum	1. Membina dan memfasilitasi OPD dan SDM penyusun produk hukum daerah
		15. Meningkatkan efektifitas produk hukum di masyarakat	1. Mengkaji produk hukum yang telah dikeluarkan agar tetap efektif berlaku dimasyarakat
		16. Meningkatkan kerjasama Pemerintah Kota Pontianak dengan Kota-kota lainnya di Indonesia	1. Berpartisipasi penuh dalam kegiatan APEKSI dan Musyawarah koordinasi Wilayah V Kalimantan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		17. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan kinerja	1. Melakukan asistensi dan menghimpun hasil kinerja seluruh bagian secara berkala
		18. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan	1. Membina seluruh PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus dan Penyimpan Barang untuk melaksanakan proses keuangan sesuai peraturan dan prasedur yang berlaku
		19. Meningkatkan kesesuaian target dengan realisasi anggaran	1. Monitoring dan Evaluasi percepatan penyerapan anggaran secara berkala
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Melakukan Audit Kinerja
			2. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu
			3. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			4. Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
			5. Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan
			6. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
			7. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Melakukan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat
			2. Melakukan pemeriksaan khusus
		3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			2. Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			3. Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
		4. Meningkatkan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
			1. Pengembangan pendidikan ASN dengan mengikuti sosialisasi/bimtek/ pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan secara terpusat sebagai bahan pemetaan kompetensi jabatan
		5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di kota Pontianak	2. Optimalisasi Pengembangan Aparatur Secara Berkelanjutan
			1. Penerapan Reward and Punishment Berdasarkan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Kinerja
		6. Meningkatkan Integritas ASN Terhadap Peraturan Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian Yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian Yang Mudah, Cepat dan Tepat Waktu
		8. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	1. Penerapan Teknologi Informasi Guna Menunjang Kinerja Pegawai
		9. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Mengikutsertakan anggota DPRD mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
			2. Menindaklanjuti pengaduan/aspirasi masyarakat
		10. Meningkatkan pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah	1. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi
		11. Meningkatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah	1. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan retribusi
			2. Melaksanakan penagihan PAD terhutang
			3. Melaksanakan penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak patuh
		12. Meningkatkan pendataan dan pengembangan data base PAD	1. Meningkatkan basis data PAD
			2. Penggunaan teknologi Informasi PAD yang terintegrasi
		13. Meningkatkan pemanfaatan aset bernilai ekonomis	3. Pengelolaan pemanfaatan aset bernilai ekonomis sesuai ketentuan

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat	1. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan ketersediaan pengamanan pangan	1. Memberikan bantuan dan pendampingan serta evaluasi kegiatan pertanian.
		2. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan keanekaragaman pangan	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan serta menjamin mutu dan keamanan pangan
		3. Meningkatkan produksi produktivitas dan mutu tanaman hortikultura berkelanjutan	1. Menyediakan bibit unggul tanaman hortikultura.
		4. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Menyediakan bahan sarana dan prasarana pertanian.
		5. Meningkatkan kualitas agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	1. Meningkatkan pelayanan UPTD Agribisnis.
		6. Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	1. Mengadakan pelatihan kepada petani.
		7. Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1. Pembentukan dan pengukuhan kelompok pertanian.
		8. Mewujudkan ketersediaan Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	1. Pemberian bantuan bibit ternak dan pelaksanaan program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9. Mengatasi Penyakit Ternak	1. Mencegah dan menanggulangi penyakit hewan ternak dan peternakan serta mengedukasi masyarakat terkait penyakit hewan menular ternak.
		10. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan	1. Menyediakan sarana dan meningkatkan pelayanan di Kawasan Usaha Ternak
		11. Menjamin Mutu Pangan Asal Hewan	1. Meningkatkan Pelayanan Pemotongan di RPH Sapi.
		12. Meningkatkan keamanan pangan produk hewan	1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pemotongan ternak dan melaksanakan pembinaan tentang higiene dan sanitasi unit usaha peternakan.
		13. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	1. Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan perikanan budidaya.
		14. Meningkatkan Pengembangan, Peningkatan Produksi Perikanan, dan Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal	1. Meningkatkan produksi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Lokal (BBI Lokal)
		15. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	1. Pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil.
	2. Meningkatnya sektor perdagangan	1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Peningkatan Pengawasan barang beredar
			2. Fasilitasi Operasi Pasar barang kebutuhan pokok
			3. Peningkatan operasional, sarana prasarana , pemeliharaan dan verifikasi Peralatan Standar metrologi legal
		3. Meningkatkan pelaku ekspor dan impor yang dibina	1. Peningkatan Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)
		4. Meningkatkan Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	1. Peningkatan manajemen pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pasar rakyat memenuhi standar SNI Pasar
			2. Peningkatan Pengamanan dan Kebersihan Pasar
			3. Peningkatan Pemeliharaan dan Pembinaan pasar rakyat
			4. Peningkatan Registrasi dan Pendataan Objek retribusi
	3. Meningkatnya sektor industri	1. Meningkatkan Industri Kecil Menengah dan Industri Kreatif	1. Peningkatan Sumber daya Manusia Pelaku Industri
			2. Peningkatan Perluasan Penerapan Haki dan Sertifikasi Halal Industri
			3. Peningkatan Pengujian dan Monev Produk Pangan
			4. Peningkatan promosi dan fasilitasi pemasaran produk industri
		2. Meningkatkan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	1. Peningkatan jaringan kluster industri
		3. Meningkatkan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	2. Peningkatan Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri
			1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri unggulan
	4. Meningkatnya Investasi Daerah	1. Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Peningkatan kelancaran Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya
			2. Pemantauan dan pengendalian Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5. Meningkatkan sektor pariwisata	1. Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1. Melakukan analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan pelaku usaha pariwisata
			2. Meningkatkan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
			3. Melakukan promosi pariwisata keluar daerah
			4. Menyelenggarakan event pariwisata
			5. Membuat dan mendistribusikan bahan promosi
			6. Melaksanakan pembangunan, penataan dan pengembangan destinasi wisata
			7. Menyusun peraturan pariwisata
	6. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	1. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian
			2. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
			3. Peningkatan Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi
			4. Peningkatan Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi
		2. Meningkatkan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	1. Peningkatan Sarana/Prasarana KUMKM
			2. Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM
		3. Meningkatkan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi Standarisasi Produk KUMKM
			2. Peningkatan Motivasi dan kewirausahaan pelaku usaha pemula
		4. Meningkatkan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Peningkatan Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM
			2. Peningkatan Pemasaran berbasis IT
			3. Peningkatan Promosi Produk Koperasi dan UMKM
			4. Peningkatan sarana prasarana gedung UMKM
		5. Meningkatkan Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	1. Peningkatan Penataan dan Pengendalian PKL
	7. Menurunnya Kemiskinan	1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dan pemberdayaan sosial bagi PMKS	1. Mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial
			2. Melakukan pendampingan/fasilitasi terhadap program - program
			3. Pendampingan / Fasilitasi Program Pendampingan / Fasilitasi Asistensi
		2. Memberikan bantuan, fasilitasi dan pendampingan kepada PMKS	1. Pendampingan / Fasilitasi Program / Perlindungan Anak-anak Terlantar yang difasilitasi oleh panti asuhan
			2. Pendampingan / Fasilitasi Program Keluarga Harapan
			3. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Sebagai Modal Berusaha
			4. Memberikan Pelatihan Keterampilan / Berusaha bagi anak-anak Panti Asuhan / Panti Sosial
			5. Pendampingan / Fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
			6. Pendampingan / Fasilitasi Program Bantuan Non Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Merehabilitasi Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Memberikan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin dengan pola mengembangkan potensi yang sudah ada di keluarga tersebut
			2. Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Sebagai Modal Berusaha
			3. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
			4. Penyelenggaraan pendidikan Keterampilan keluarga dan Kelompok masyarakat dalam rangka Peningkatan taraf hidup masyarakat
		4. Memberikan Pelatihan kepada PMKS untuk Meningkatkan Kemandiriannya	1. Menyelenggarakan Pelatihan / Keterampilan khusus perempuan kepala keluarga / miskin
		5. Memfasilitasi lembaga kesejahteraan sosial dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan	2. Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
			3. Memberikan pelatihan keterampilan / berusaha bagi penyandang disabilitas
			1. Melakukan monitoring dan evaluasi
			2. Sosialisasi Pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			3. Menyelenggarakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang mudah, murah, cepat dan transparan/satu pintu pelayanan sosial
			4. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
			5. Pemberian bantuan sarana prasarana / Peralatan / Barang Lainnya Sebagai Modal Berusaha
		6. Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi penyandang cacat, eks trauma dan Eks Napza	1. Pemberian pelatihan / Kursus Pelatihan dasar bagi penyandang disabilitas (seperti pelatihan membaca huruf braille, pelatihan bahasa isyarat. Dll
		8. Meningkatkan Penyerapan tenaga Kerja	2. Pendamping / Fasilitas Program Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas
			3. Memberikan bantuan peralatan / sarana / barang bagi penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu
		1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Melakukan Pelatihan Berbasis Kompetensi
		2. Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Melaksanakan Bursa Tenaga Kerja (Job Fair)
		3. Meningkatkan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2. Melaksanakan Penyusunan DataBase Ketenagakerjaan Kota Pontianak
			1. Melakukan Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
			2. Melakukan Pembahasan dan Penyusunan Upah Minimum Kota Pontianak
			3. Melakukan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			4. Melakukan Penyebarluasan Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentan Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh	1. Melakukan Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja
		5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif	1. Melakukan sosialisasi, dan workshop ekonomi kreatif
			2. Menyelenggarakan festival dan pameran ekonomi kreatif
			3. Melakukan analisa, evaluasi, pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif

Visi : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat

Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kota yang bersih, hijau , nyaman, dan berwawasan lingkungan	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Meningkatkan kualitas pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan hidup	1. Melakukan pemantauan kualitas air, udara dan tutupan lahan yang tersebar di kota pontianak
		2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	1. Meningkatkan kinerja pengurangan sampah
	2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah dan operasional kebersihan	1. Meningkatkan kinerja penanganan sampah
		2. Meningkatnya kebersihan lingkungan kota	1. Meningkatkan jumlah ruas jalan yang ditangani
Terwujudnya kota yang aman dan tertib	1. Menurunnya Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
		2. Menegakkan dan memasyarakatkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan/ sosialisasi Perda
	2. meningkatnya keamanan dan stabilitas daerah	1. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat serta memberdayakan Poskamling di Kelurahan
		2. Optimalisasi koordinasi dan pembinaan	1. Pembinaan sosial politik dan wawasan kebangsaan bagi parpol dan kelompok masyarakat
	3. Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi rawan bencana	1. Menyebarkan informasi rawan bencana kepada masyarakat melalui tatap muka, multi media sosial, papan informasi publik dan pameran.
		2. Meningkatkan peran serta kelembagaan terkait penanggulangan bencana	1. Menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi, Pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan, dan penyusunan SOP.
		3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana	1. Dengan membentuk dan melakukan pembinaan kelurahan tangguh bencana di daerah yang rawan bencana
		4. Meningkatkan pelayanan dalam masa tanggap darurat bencana.	1. Melalui respon cepat darurat bencana, menaktifkan sistem komando penanganan daurat bencana, melakukan pertolongan dan evakuasi korban bencana, dan memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan pemadam kebakaran di Kota Pontianak	1. meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran melalui pemeriksaan APR masyarakat
			2. Kesiagaan dan operasional Pemadam Kebakaran
			3. Koordinasi pemadam kebakaran di kota Pontianak
		6. Peningkatan ketersediaan peralatan pemadam dan usia pakai peralatan pemadam	1. Pembelian dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun Pertama (2020)	Tahun Kedua (2021)	Tahun Ketiga (2022)	Tahun Keempat (2023)	Tahun Kelima (2024)
Tahap Konsolidasi	Tahap Percepatan	Tahap Pengembangan	Tahap Pemantapan	Tahap Penguatan
Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kota secara cerdas serta Percepatan Pembangunan kawasan dan sektor strategis yang mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat	Melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor secara seimbang sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah disertai dengan peningkatan aksesibilitas antar kawasan	Memperindah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan serta optimalisasi peran seluruh stakeholder untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 6 (enam) urusan yaitu:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 (delapan belas) urusan yaitu:
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olahraga;

- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 (delapan) urusan yaitu:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Perdagangan; dan
- e. Perindustrian.

Terdapat 3 (tiga) urusan pilihan yang ada dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 namun tidak masuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu (1) urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (2) urusan Kehutanan, dan (3) urusan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak tidak memiliki pemanfaatan langsung terhadap sumber daya alam baik minyak dan gas bumi yang dapat dikelola lebih lanjut, tidak memiliki luasan taman hutan raya yang harus dikelola lebih lanjut, serta Kota Pontianak tidak mengelola secara langsung urusan ketransmigrasian.

Disisi lain, pemerintah daerah dapat melaksanakan program penunjang untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- 1. Perencanaan;
- 2. Keuangan;
- 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- 4. Penelitian dan Pengembangan; dan
- 5. Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Program penunjang fungsi lain penunjang urusan pemerintahan dapat terdiri dari:

- 1. Pelayanan administratif;
- 2. Unsur Staf;
- 3. Pengawasan;
- 4. Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, sasaran dan program pembangunan dapat dilihat pada tabel VI.3 berikut:

Tabel VI.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Pontianak 2020 - 2024

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Misi 1 : MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA																	
1.	1.		TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,93%	78,53%		78,73%		78,93%		79,13%		79,33%			
1.	1.	1.	SASARAN 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	72,32 thn	72,37 thn		72,42 thn		72,47 thn		72,52 thn		72,57 thn			
				2. Angka Stunting Balita	21,54%	21,00%		20,50%		20,00%		19,50%		19,00%			
			DINAS KESEHATAN														
1.	1.	1.	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	97,77%	100%	705.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.329.950.000	100%	1.440.845.000	100%	1.597.879.000		
				2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	99%	100%		100%		100%		100%		100%			
				3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	99,22%	100%		100%		100%		100%		100%			
				4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	5,66%	<5%		<5%		<5%		<5%		<5%			
				5. Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani	103%	100%		100%		100%		100%		100%			
				6. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani	107%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.	1.	1.	2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja	1. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	89,00%	100%	69.675.000	100%	76.642.500	100%	84.120.000	100%	92.158.500	100%	100.813.200		
				2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	117,96%	100%		100%		100%		100%		100%			
				3. Persentase Anak Usia 60 -72 bulan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah sesuai standar	105,26%	98%		99%		99%		100%		100%			
1.	1.	1.	3. Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	1. Terselenggaranya fungsi manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	100%	100%	1.295.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	1.	1.	4.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	68,97%	93,50%	3.053.516.358	94%	3.222.297.800	94,50%	3.310.057.914	95%	3.477.132.090	95,50%	3.477.056.843		
			2. Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap		93,41%	93%		93,5%		94%		94%		94,5%		94,5%		
			3. Persentase terduga TB yang dilakukan Pemeriksaan penunjang		NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			4. Persentase orang yang beresiko mendapatkan VCT dan TIPK		NA	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
			5. Angka Bebas Jentik		70%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
			6. Terkendalinya Angka kesakitan Penyakit Kusta		0,19%	< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		
			7. Cakupan penemuan kasus non folio AFP		100,00%	>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		
			8. Terkendalinya Angka Kesakitan Penyakit Diare		13,39%	<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		
			9. Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Kelurahan yang mengalami KLB		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.	1.	1.	5.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)	37,93%	51,72%	236.775.700	75%	237.650.000	100%	239.600.000	100%	241.996.000	100%	243.000.000		
			2. Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi standar		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.	1.	1.	6.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Umum dan Makanan	1. Persentase Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan	76,83%	80%	690.147.000	82%	695.000.000	85%	701.950.000	88%	465.643.000	90%	470.300.000		
			2. Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan		29,98%	55,00%		60%		65%		70%		75%		75%		
1.	1.	1.	7.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	17,27%	100%	14.045.775.400	100%	14.467.121.662	100%	14.910.098.032	100%	15.366.782.630	100%	15.837.636.848		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	21,26%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		3. Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4. Persentase WUS Usia 30-50 Tahun yang Melakukan Pemeriksaan Deteksi Dini kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	NA	10%		10%		10%		10%		10%		10%	
		5. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	27%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		6. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		7. Persentase masyarakat yang mendapatkan screening kanker payudara dan kanker leher rahim	1,9%	10%		10%		10%		10%		10%		10%	
1.	1.	1.	8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Cakupan Keluarga yang ber PHBS	65,64%	66%	1.090.000.000	67%	1.170.000.000	68%	1.225.000.000	69%	1.290.000.000	70%	1.390.000.000
				2. Persentase Sekolah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
				3. Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS	71,54%	72%		73%		74%		75%		76%	
				4. Persentase Posyandu Purnama Mandiri	59,31%	65%		65%		65%		65%		65%	
				5. Indeks keluarga sehat	NA	21%		22%		23%		24%		25%	
1.	1.	1.	9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Anemia pada ibu Hamil	48,9%	48%	2.521.050.000	47%	2.647.102.500	46%	2.779.457.625	45%	2.918.430.507	44%	3.064.352.032
				2. Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan ASI Eksklusif	59,98%	60%		61%		62%		63%		64%	
				3. Persentase Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR)	1,82%	2%		2%		1%		1%		1%	
				4. Persentase Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)	71,76%	71%		71%		72%		73%		74%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				5. Persentase Remaja Putri dapat tablet tambah darah	55,74%	56%		58%		60%		62%		64%	
				6. persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00%	100%		100%		100%		100%		100%	
				7. Persentase Ibu Hamil KEK dapat makanan tambahan	87,00%	86%		88%		90%		93%		95%	
				8. Persentase Balita kurus dapat makanan tambahan	72,00%	74%		76%		78%		80%		82%	
				9. persentase bayi dengan panjang badan lahir pendek (< 48cm)	11,24%	10,00%		9,00%		8,00%		7,00%		6,00%	
1.	1.	1.	10. Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	100%	14.215.930	100%	162.657.350	100%	173.507.250	100%	174.141.750	100%	187.168.700
				2. Penggunaan obat rasional di Puskesmas	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
				3. Persentase Sarana farmasi sesuai standar	75%	90%		90%		90%		90%		90%	
				4. Jumlah industri pangan Rumah tangga sesuai standar	90 Industri	100 Industri		115 Industri		130 Industri		140 Industri		180 Industri	
1.	1.	1.	11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	6.539.869.120	100%	9.080.574.080	100%	12.624.805.072	100%	13.864.619.139	100%	15.227.978.733
1.	1.	1.	12. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	1. Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat	31,43%	40,00%	16.798.919.900	46%	17.134.898.298	51%	17.476.902.266	57%	17.805.944.065	63%	30.350.029.895
1.	1.	1.	13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	100,00%	100,00%	3.038.270.913	100%	3.317.488.248	100%	3.623.396.829	100%	3.958.604.256	100%	4.325.975.814
				2. Persentase RS di Kota Pontianak yg terakreditasi	96,90%	100,00%		100%		100%		100%		100%	
1.	1.	1.	14. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar	91,30%	100%	12.917.198.887	100%	6.631.019.634	100%	7.624.088.748	100%	8.767.634.122	100%	10.069.248.442
1.	1.	1.	15. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar	100%	25 UPTD/UPK	56.991.661.314	25 UPTD/UPK	53.810.606.485	25 UPTD/UPK	57.178.393.541	25 UPTD/UPK	58.666.975.767	25 UPTD/UPK	60.715.673.221
1.	1.	1.	16. Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1. Persentase kecukupan data dan informasi kesehatan	100%	100%	84.395.500	100%	86.088.855	100%	87.771.320	100%	89.490.988	100%	91.227.170

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.	1.	1.	17.	Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	96%	100%	345.261.600	100%	352.166.832	100%	359.072.064	100%	365.977.296	100%	377.882.529	100%	377.882.529
1.	1.	1.	18.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase Sarana dan prasarana RSUD sesuai standar	96,90%	100%	30.984.461.640	100%	30.503.130.455	100%	25.336.756.468	100%	25.470.030.480	100%	25.621.936.036	100%	25.621.936.036
1.	1.	1.	19.	Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	1. Persentase Sistem Informasi RS sesuai standar	100%	100%	362.270.750	100%	393.627.288	100%	415.575.552	100%	446.430.129	100%	490.972.336	100%	490.972.336
1.	1.	1.	20.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik	100%	100%	1.889.110.500	100%	2.167.739.400	100%	2.348.862.290	100%	2.545.539.416	100%	2.770.526.299	100%	2.770.526.299
1.	1.	1.	21.	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (RS Kota, BKMM, RS Siantan)	1. Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional	100%	100%	90.714.701.538	100%	97.795.932.865	100%	104.756.924.507	100%	112.071.645.732	100%	120.230.326.018	100%	120.230.326.018
1.	1.	1.	22.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit	1. Persentase tenaga kesehatan RS yang profesional, dan memenuhi standar kompetensi	100%	100%	20.498.986.391	100%	20.947.706.706	100%	21.421.000.150	100%	222.523.097.426	100%	23.479.017.834	100%	23.479.017.834
					2. Persentase tata kelola admnistrasi dan manajemen RS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN															
1.	1.	1.	23.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. persentase konsumsi energi perkapita		90,00	1.872.840.000	91,00	2.060.124.000	92,00	2.266.136.400	93,00	2.492.750.040	94,00	2.742.025.044	94,00	2.742.025.044
1.	1.	2.	SASARAN 2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kebudayaan	1. Rata rata lama sekolah	9,79 thn	9,92 thn		9,94 thn		9,96 thn		9,98 thn		10,00 thn		10,00 thn		
				2. Angka melek huruf	98,36%	98,86%		99,06%		99,26%		99,36%		99,36%				
				3. Persentase warisan seni dan budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya lokal	50,00%	50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		85,00%		85,00%		
			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
1.	1.	2.	1.	Program Pendidikan Dasar	1. Rata-rata lama sekolah													
					2. Angka Melek Huruf													
					3. persentase warga 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/MTs) - SPM	80%	100%	29.926.058.592	100%	30.674.210.057	100%	31.441.065.038	100%	32.227.091.941	100%	33.032.769.239	100%	33.032.769.239
					4. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI	119,07%/108,16%	100%	2.243.041.825	100%	2.299.117.871	100%	2.365.792.289	100%	2.434.400.265	100%	2.504.997.873	100%	2.504.997.873
					5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan Angka Paritsipasi Murni SMP/MTs	111,54%/91,06%	100%	1.999.500.000	100%	2.049.487.500	100%	2.108.922.638	100%	2.170.081.394	100%	2.233.013.754	100%	2.233.013.574
					8. Rasio sekolah SD /MI dalam kondisi baik	90,00%	91%	67.297.760.000	92,00%	68.980.204.000	93%	70.704.709.100	94%	72.755.145.664	95%	74.865.044.888	95%	74.865.044.888

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					9. Rasio sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik	90,00%	91%	30.148.855.000	92%	51.285.847.155	93%	28.468.136.722	94,00%	6.655.712.687	95%	6.848.728.355	95%	6.848.728.355
1.	1.	2.	2.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32%	33,00%	6.420.381.500	33,00%	6.606.572.564	34,00%	6.798.163.168	34,00%	6.995.309.900	34,00%	7.198.173.887	34,00%	7.198.173.887
					2. Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	95	98,00%	100.000.000	98,00%	102.900.000	99,00%	105.884.100	99,00%	108.954.739	99,00%	112.114.426	99,00%	112.114.426
1.	1.	2.	3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. persentase warga berusia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	71%	74%	1.559.973.200	75%	1.605.212.423	76%	1.651.763.583	77%	1.699.664.727	78%	1.748.955.004	78%	1.748.955.004
					2. Rasio sekolah PAUD dalam kondisi baik	45%	55%	4.659.973.200	60%	4.795.112.423	70%	4.934.170.683	80%	5.077.261.633	90%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000
1.	1.	2.	4.	Program Pendidikan Non Formal	1. persentase warga 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	5.049.138.000	100%	5.195.563.002	100%	5.346.234.329	100%	5.501.275.125	100%	5.660.812.103	100%	5.660.812.103
1.	1.	2.	5.	Program Pembinaan dan Pelestarian Budaya	1. Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	11,11%	11,11%	2.490.851.350	11,11%	2.490.851.350	13,07%	2.563.086.039	13,07%	2.637.415.534	13,07%	2.713.900.585	13,07	2.713.900.585
					2. Jumlah benda cagar budaya / warisan budaya tak benda yang ditetapkan	1	1	460.200.000	1	473.545.800	1	487.278.628	1	501.409.708	1	515.950.590	1	515.950.590
				DINAS PERPUSTAKAAN														
1.	1.	2.	6.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan dan Rumah Baca Per tahun	558.994	660.994	266.904.225	737.994	275.445.160	847.994	278.722.958	972.994	567.538.191	1.162.994	302.322.821	1.162.994	302.322.821
1.	1.	2.	7.	Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	1. Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	42,3%	46,2%	610.200.000	47,2%	629.726.400	48,2%	637.220.144	49,2%	671.630.032	50%	691.174.466	50%	691.174.466
1.	1.	2.	8.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	0,82	0,84	50.840.000	0,85	52.466.880	86	53.091.236	87	55.958.163	88	57.586.545	88	57.586.545
1.	1.	2.	9.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	1 keg	1 keg	163.349.450	2 keg	168.576.632	2 keg	170.582.694	2 keg	179.794.160	2 keg	185.026.170	2 keg	185.026.170
1.	1.	2.	10.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Lamanya rata - rata waktu Penemuan kembali Arsip (Retrival)	15 menit	15 menit	92.840.000	15 menit	95.810.880	15 menit	98.876.828	10 menit	102.040.887	10 menit	105.306.195	10 menit	105.306.195
1.	1.	2.	11.	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana	Jumlah arsip yang diselamatkan	5481 bungkus	5681 bks	150.000.000	5781 bks	154.800.000	5881 bks	156.642.120	5981 bks	158.506.161	6000 bks	163.118.691	6000 bks	163.118.691
1.	1.	3.		Sasaran 3														
				Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk,	1. Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	1,71%	1,71%		1,65%	1,65%		1,65%		1,65%		1,65%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			meningkatnya peran perempuan dan meningkatnya perlindungan anak	2. Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,68%	93,88%		93,92%		93,98%		94,05%		94,17%		94,17%	
				3. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Pratama	Madya		Nindya		Nindya		Utama		Utama		Utama	
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
1.	1.	3.	1. Program Penyuluhan dan Penggerakan	1. Persentase pencapaian peserta KB baru	73,80%	78,05%	1.051.654.235	78,55%	1.085.938.163	78,61%	1.103.313.174	79,12%	1.124.276.124	79,15%	1.156.880.132	80,00%	1.156.880.132
				2. Presentase Penggunaan MKJP	26,85%	26,90%		26,95%		26,95%		27,05%		27,05%		27,05%	
1.	1.	3.	2. Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	1. persentase data dan informasi keluarga yang dimutakhirkan	100%	100%	253.190.273	100%	261.444.276	100%	265.627.384	100%	270.674.305	100%	278.523.859	100%	278.523.859
				2. Persentase cakupan unmet need	13,75%	13,55%		12,85%		12,75%		12,15%		11,70%		11,70%	
1.	1.	3.	3. Program Keluarga Berencana	1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70,14%	70,67%	3.215.663.148	70,98%	3.320.493.767	71,15%	3.373.621.667	71,45%	3.437.720.479	71,72%	3.537.414.372	71,72%	3.537.414.372
				2. Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.	1.	3.	4. Program Keluarga Sejahtera	1. Persentase cakupan anggota BKB ber-KB	81,95%	82,25%	363.178.657	83,48%	375.018.281	84,15%	381.018.574	84,85%	388.257.927	84,95%	399.517.406	84,95%	399.517.406
				2. Persentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB	86,38%	87,17%		87,21%		87,43%		87,93%		88,06%		88,06%	
1.	1.	3.	5. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	454.535.643	100%	469.353.505	100%	476.863.161	100%	485.923.561	100%	500.015.344	100%	500.015.344
				2. Persentase Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Keahlian	37,5%	37,5%		37,5%		37,5%		37,5%		37,5%		37,5%	
1.	1.	3.	6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100%	100%	28.097.095	100%	29.013.060	100%	29.477.269	100%	30.037.337	100%	30.908.420	100%	30.908.420
1.	1.	3.	7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	447.971.023	100%	462.574.878	100%	469.976.076	100%	478.905.622	100%	492.793.885	100%	492.793.885
				2. Presentase Forum Anak Daerah yang Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.	1.	3.	8. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. jumlah alat TTG yang dihasilkan		2 alat TTG	138.588.303	4 alat TTG	143.106.282	4 alat TTG	145.395.982	4 alat TTG	148.158.506	4 alat TTG	152.455.103	4 alat TTG	152.455.103

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	1.	3.	9.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	1. Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	100%	251.996.148	100%	260.211.222	100%	264.374.602	100%	269.397.719	100%	277.210.253	100%	277.210.253
1.	1.	4.	Sasaran 4 Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda dan olahraga	1. Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi	4,35%	4,16%		8,33%		11,53%		13,79%		15,15%		15,15%		
				2. Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	4,35%	4,16%		8,33%		11,53%		13,79%		15,15%		15,15%		
				3. Persentase Peningkatan Jumlah Perolehan Medali Olah Raga Tingkat Provinsi	8,00%	8,69%		8,00%		11,11%		13,33%		14,70%		14,70%		
				4. Persentase Peningkatan Jumlah Perolehan Medali Olah Raga Tingkat Nasional	8,00%	8,69%		8,00%		11,11%		13,33%		14,70%		14,70%		
			DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA															
1.	1.	4.	1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	23	24	1.442.749.000	25	1.449.478.490	25	1.456.008.477	26	1.462.868.563	26	1.469.796.250	26	1.469.796.250
1.	1.	4.	2.	Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	1. Persentase meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100	100	1.442.749.000	150	1.449.478.490	200	1.456.008.477	250	1.462.868.563	300	1.469.796.250	300	1.469.796.250
1.	1.	4.	3.	Program Pengembangan Kewirausahaan	1. Persentase meningkatnya pengembangan kewirausahaan	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000		-
1.	1.	4.	4.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1. Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	120	120	3.334.446.000	125	3.349.049.000	126	9.357.421.000	127	3.383.471.050	130	3.395.421.000	130	3.395.421.000
1.	1.	4.	5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	50%	2.158.600.000	63%	2.180.186.000	75%	2.201.987.860	88%	2.224.007.739	100%	2.246.247.816	100%	2.268.710.294
1.	1.	4.	6.	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	50%	1.170.519.800	63%	1.173.579.800	75%	1.176.669.900	88%	1.179.790.401	100%	1.182.941.607	100%	1.186.123.826
Misi 2 : MENCIPTAKAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN REPRESENTATIF																		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	1.		Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur dasar perkotaan	1. Indeks Instruktur	76,86%	78,55%		80,29%		82,04%		83,79%		85,63%		85,63%		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.	1.	1.	Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas infrastruktur jalan dan drainase perkotaan	1. Indeks Infrastruktur Jalan	86,60%	87,00%		89,00%		91,00%		93,00%		95,00%		95,00%			
				2. Indeks Infrastruktur Saluran Drainase	46,62%	48,00%		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%			
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
2.	1.	1.	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase peningkatan panjang jalan yang permukaannya aspal	56,86%	57,09	45.034.177.551	57,17	68.845.588.800	57,40	53.909.136.802	57,63	53.550.000.000	57,86	49.020.300.000	57,86	49.020.300.000		
2.	1.	1.	2. Program peningkatan jalan dan jembatan	1. Persentase berkurangnya jalan yang kualitas konstruksinya rendah	26,14%	24,74	5.000.000.000	23,34	5.000.000.000	21,34	5.000.000.000	20,54	5.000.000.000	19,14	10.000.000.000	19,14	10.000.000.000		
2.	1.	1.	3. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase berkurangnya jalan dengan status kondisi rusak SEDANG (karena meningkat statusnya menjadi kondisi BAIK)	21,86	20,11	24.750.000.000	18,36	24.750.000.000	16,61	24.750.000.000	14,86	38.000.000.000	13,11	43.420.261.546	13,11	43.420.261.546		
2.	1.	1.	4. Program pengadaan dan pemeliharaan alat-alat berat	1. Persentase jumlah alat berat siaga / siap dioperasikan	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000		
2.	1.	1.	5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Jalan dan Jembatan	1. Persentase Tersedianya data dan informasi jalan dan jembatan tiap tahun	100,00	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000		
2.	1.	1.	6. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Saluran Drainase	1. Persentase tersedianya data dan informasi saluran tiap tahun	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000		
2.	1.	1.	7. Program pengendalian banjir	1. Persentase bekurangnya lokasi kejadian genangan hujan/pasang tiap tahun	100,00	83,33	530.000.000	66,67	530.000.000	50,00	530.000.000	33,33	530.000.000	16,67	530.000.000	16,67	530.000.000		
2.	1.	1.	8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1. Prosentase meningkatnya panjang turap baru	3,04	3,33	20.000.000.000	3,62	20.000.000.000	3,92	20.000.000.000	4,21	30.000.000.000	4,50	20.000.000.000	4,50	20.000.000.000		
2.	1.	1.	9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / Gorong-gorong	1. Persentase meningkatnya panjang saluran berkonstruksi	46,62	48,23	7.100.000.000	49,84	7.100.000.000	51,45	8.600.000.000	53,06	14.362.655.714	54,67	8.100.000.000	54,67	8.100.000.000		
2.	1.	1.	10. Program pemeliharaan / rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase / koker / gorong-gorong	1. Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	24,03	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000		
2.	1.	1.	11. Program peningkatan saluran drainase / koker / gorong-gorong	1. Persentase berkurangnya saluran kurang baik	59,35	59,19	1.200.000.000	59,03	1.200.000.000	58,87	1.200.000.000	58,71	1.200.000.000	58,55	1.200.000.000	58,55	1.200.000.000		
2.	1.	1.	12. Program Peningkatan Turap/Talud/Bronjong	1. Persentase berkurangnya turap kayu belian	5,97	5,93	15.000.000.000	5,88	15.000.000.000	5,83	15.000.000.000	5,78	15.000.000.000	5,73	15.000.000.000	5,73	-		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.	1.	2.	Sasaran 2 Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap air minum	1. Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	86,00%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
2.	1.	2.	1. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	1. persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	86,00	100,00	21.506.789.116	100,00	4.486.666.667	100,00	21.506.789.116	100,00	4.486.666.667	100,00	21.506.789.116	100,00	21.506.789.116	
				2. Persentase terpenuhinya kapasitas kebutuhan pokok air minum seharihari	86,00	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				3. persentase meningkatnya jumlah KK dilayani sanitasi	91,75	91,82%		91,89%	91,96%		92,03%	92,10%		92,10%	92,10%			
2.	1.	3.	Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1. Persentase kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	50,00%	55,00%		60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
2.	1.	3.	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	1. Jumlah sarana dan prasana ditangani (unit)	15,00	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	75,00	28.736.000.000	
2.	1.	3.	2. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	1. Persentase jumlah peserta dilatih dan dibina	100,00	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	
2.	1.	4.	Sasaran 4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman	1. Indeks Infrastruktur Permukiman	86,36%	88,09%		89,43%	90,78%	92,13%	93,82%	93,82%	93,82%	93,82%	93,82%	93,82%		
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
2.	1.	4.	1. Program pengembangan permukiman	1. Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	83%	85%	21.506.000.000	87%	22.207.095.600	89%	22.582.395.516	91%	23.822.169.029	95%	24.515.394.148	95%	114.633.054.293	
				2. Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	77%	80%		82%	84%	86%	87%	87%	87%	87%	87%	87%		
				3. Persentase Kawasan Tidak Kumuh	99,77%	99,85%		99,87%	99,90%	99,35%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%		
2.	1.	4.	2. Program pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,07%	99,28%	4.046.000.000	99,30%	4.375.507.890	99,35%	4.016.915.558	99,40%	4.237.444.222	99,45%	4.475.753.849	99,45%	21.151.621.520	
				2. Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pontianak yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					3 Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100%		100%		100%		100%		100%			
2.	1.	4.	3.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Persentase tanah asset Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan	95,80%	95,87%	108.609.000.000	95,90%	112.149.653.400	96,00%	114.044.982.542	96,50%	120.306.052.084	97,00%	123.806.958.200	97%	578.916.646.226
2.	1.	4.	4.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	100%	180.000.000	100%	185.868.000	100%	189.009.169	100%	199.385.773	100%	205.187.899	100%	959.450.840
				KECAMATAN (1. BARAT; 2. TIMUR; 3. SELATAN; 4. UTARA; 5. KOTA; 6. TENGGARA)														
2.	1.	4.	5.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	100%	90%	2.023.212.000	90%	2.039.943.047	95%	2.124.351.469	95%	2.239.514.077	100%	2.304.771.236	100%	2.239.514.077
					2 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	100%	90%	2.607.681.000	90%	2.692.691.401	95%	2.738.197.885	95%	2.888.524.949	100%	2.972.581.025	100%	2.972.581.025
					3 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman			2.482.250.000		2.563.171.500		2.606.489.300		2.749.585.500		2.829.598.100		2.984.942.900
					4 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman		95%	757.808.000	95%	782.512.541	95%	795.737.003	95%	839.422.964	95%	863.850.172	95%	863.850.172
					5 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman			2.203.495.000		381.338.800		387.783.100		409.072.000		420.917.600		409.072.000
					6 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman			356.670.000		368.297.442		374.521.669		395.082.908		406.579.821		1.901.151.840
2.	1.	4.	6.	Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan dan Kecamatan	100%	90%	112.850.000	90%	116.528.910	95%	118.498.249	95%	125.003.873	100%	128.641.484	100%	125.003.873

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				2 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan dan Kecamatan	100%	90%	165.340.000	90%	170.730.084	95%	173.615.422	95%	183.146.909	100%	188.476.484	100%	188.476.484	
				3 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang Kelurahan dan kecamatan			140.850.000		145.441.700		147.899.700		156.019.400		160.559.600		169.374.300	
				4 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan		95%	134.180.000	95%	138.554.268	95%	140.895.835	95%	148.631.016	95%	152.956.179	95%	152.956.179	
				5 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang Kelurahan dan kecamatan			137.205.000		141.687.000		144.081.600		151.991.900		156.414.800		151.991.900	
				6 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	85%	85%	224.165.000	85%	231.472.779	85%	235.384.669	85%	248.307.287	85%	255.533.029	85%	1.194.862.765	
2.	1.	5.	Sasaran 5	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	0,05 Jam	0,05 Jam		0,05 Jam		0,05 Jam		0,05 Jam		0,05 Jam				
			Meningkatnya kualitas transportasi															
			DINAS PERHUBUNGAN															
2.	1.	5.	1. Program Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1. Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang		12,94%	26.089.180.000	43,04%	26.604.851.000	73,14%	28.309.389.000	86,57%	26.825.813.000	100%	26.999.904.000	100%		
2.	1.	5.	2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik		19,98%	1.380.000.000	32,62%	1.821.000.000	58,43%	2.095.000.000	80,67%	2.630.000.000	100%	2.066.500.000	100%		
2.	1.	5.	3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik		18,76%	811.000.000	38,94%	866.000.000	59,74%	980.000.000	78,25%	900.000.000	100%	976.000.000	100%		
2.	1.	5.	4. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan	1. Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan		24,52%	476.500.000	49,05%	510.000.000	73,57%	470.000.000	84,40%	255.000.000	100%	320.000.000	100%		
2.	1.	5.	5. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	1. Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai		24,60%	1.745.800.000	49,21%	750.000.000	64,88%	610.500.000	68,06%	196.500.000	100%	3.790.500.000	100%		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD			
							2020		2021		2022		2023		2024					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.	1.	5.	6.	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1. Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar			14,68%	4.199.009.840	33,07%	4.282.298.000	56,49%	4.560.580.000	84,79%	4.940.580.000	100%	4.345.580.000			
2.	1.	5.	7.	Program Peningkatan Pelayanan ASDP	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai			18,81%	761.061.160	38,28%	1.229.722.000	58,24%	1.252.882.000	78,96%	1.257.882.000	100%	1.257.882.000			
2.	1.	5.	8.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR			7,35%	870.000.000	39,75%	2.262.980.000	57,26%	718.607.000	77,32%	4.132.728.000	100%	12.468.607.000			
Misi 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SERTA APARATUR YANG BERINTEGRITAS, BERSIH DAN CERDAS																				
3	1			Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	65,74	71,74		74,74		77,74		80,74		83,74		83,74			
3	1	1		Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	65,74	71,74		74,74		77,74		80,74		83,74		83,74			
				SEKRETARIAT DAERAH																
3.	1.	1.	1.	Program Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal	100%	100%	516.063.000	100%	532.886.654	100%	541.892.438	100%	571.642.333	100%	588.277.125	100%	588.277.125		
3.	1.	1.	2.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	512.800.468	100%	529.517.763	100%	538.466.613	100%	568.028.431	100%	584.558.058	100%	584.558.058		
3.	1.	1.	3.	Program Pembinaan dan Bantuan Hukum	1. Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%	100%	627.020.100	100%	647.460.955	100%	658.403.045	100%	694.549.373	100%	714.760.759	100%	714.760.759		
3.	1.	1.	4.	Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham	1. Persentase produk hukum yang efektif di masyarakat	100%	100%	544.549.650	100%	562.301.969	100%	571.804.872	100%	603.196.959	100%	620.749.991	100%	620.749.991		
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik		Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
3.	1.	1.	5.	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,20%	0,19%	844.634.000	0,15%	872.169.068	0,11%	886.908.726	0,08%	935.600.015	0,04%	962.825.975	0,04%	962.825.975		
3.	1.	1.	6.	Program Pendidikan Kedinasan	1. Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Lulus Diklat Dengan Hasil Baik	94,62%	100%	4.534.795.330	100%	4.682.629.658	100%	6.761.766.099	100%	5.023.187.058	100%	5.160.361.801	100%	5.160.361.801		
3.	1.	1.	7.	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1. Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang Terselesaikan Tepat Waktu		80,00%	718.530.000	80,00%	741.954.078	85,00%	754.493.102	90,00%	795.914.773	100,00%	819.075.893	100,00%	819.075.893		
3.	1.	1.	8.	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		37,84%	3.064.162.870	40,21%	3.164.054.580	42,57%	3.217.527.102	44,94%	3.394.169.340	47,30%	3.492.939.668	47,30%	3.492.939.668		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.	1.	1.	9.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Persentase Pemenuhan Informasi/ Data Kepegawaian Yang Akurat dan Up to Date		100%	514.530.000	100%	531.303.678	100%	540.282.730	100%	569.944.231	100%	586.529.608	100%	586.529.608
3.	1.	1.	10.	Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil	1. Persentase Penempatan Pejabat Administrasi/ Pejabat Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan		100%	936.713.000	100%	967.249.844	100%	983.596.366	100%	1.037.585.807	100%	1.067.789.845	100%	1.067.789.845
3.	1.	1.	11.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas (Cepat, Tepat dan Akurat)	100%	100%	605.588.000	100%	625.330.169	100%	635.598.249	100%	670.809.063	100%	690.329.606	100%	690.329.606
3.	1.	1.	12.	Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Yang Berkualitas Sesuai Formasi		100%	911.463.000	100%	941.176.694	100%	957.082.580	100%	1.009.626.414	100%	1.099.006.542	100%	1.099.006.542
				INSPEKTORAT														
3.	1.	1.	13.	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	134.700.000	100%	139.091.220	100%	140.607.314	100%	148.326.656	100%	152.642.962	100%	152.642.962
3.	1.	1.	14.	Program Penegakan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Persentase OPD yang telah membangun Zona Integritas			641.638.600		559.296.018		565.392.345		596.432.384		613.788.567		613.788.567
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
3.	1.	1.	15.	Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	Prosentase OPD di Pemerintah Kota Pontianak yang telah menerapkan SPBE (eGovernment)	85%	88%	3.031.832.560	91%	3.228.397.000	94%	3.282.205.000	97%	3.412.780.000	100%	3.563.500.000	100%	3.563.500.000
3.	1.	1.	16.	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menguasai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	85%	88,00%	1.329.500.440	91,00%	1.611.908.000	94,00%	1.638.272.500	97,00%	2.390.890.000	100,00%	2.466.930.000	100,00%	2.466.930.000
3.	1.	1.	17.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Pontianak	0%	85,00%	414.410.000	88,00%	427.636.000	92,00%	434.000.000	96,00%	458.000.000	100,00%	427.211.000	100,00%	427.211.000
3	1.	2.		Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pontianak	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				SEKRETARIAT DAERAH														
3	1.	2.	1.	Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM A	100%	100%	640.187.750	100%	661.057.871	100%	672.229.749	100%	709.135.162	100%	729.770.995	100%	729.770.995

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3	1.	2.	2. Program Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	1. Persentase kebijakan pembangunan yang difasilitasi	100%	100%	536.309.050	100%	553.792.725	100%	563.151.822	100%	594.068.857	100%	611.356.261	100%	611.356.261
				2. Persentase layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi	100%	100%	427.706.000	100%	441.649.216	100%	449.113.087	100%	473.769.396	100%	487.556.085	100%	487.556.085
3	1.	2.	3. Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan perundangan	100%	100%	136.352.000	100%	140.797.075	100%	143.176.546	100%	151.036.938	100%	155.432.113	100%	155.432.113
3	1.	2.	4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1. Persentase rata-rata penyebaran informasi kegiatan kepala daerah	100%	100%	1.265.777.540	100%	1.307.041.888	100%	1.329.130.896	100%	1.402.100.182	100%	1.442.901.297	100%	1.442.901.297
3	1.	2.	5. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat	1. Persentase bantuan masyarakat yang tersalurkan	100%	100%	1.148.860.000	100%	1.186.312.836	100%	1.206.361.523	100%	1.272.590.771	100%	1.309.623.162	100%	1.309.623.162
				2. Persentase pelayanan masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	5.503.545.540	100%	5.682.961.125	100%	5.779.003.168	100%	6.096.270.442	100%	6.273.671.911	100%	6.273.671.911
3	1.	2.	6. Program Pelayanan Ibadah Haji	1. Persentase pelayanan ibadah haji yang dipenuhi	100%	100%	1.844.320.000	100%	1.904.444.832	100%	1.936.629.950	100%	2.042.950.934	100%	2.102.400.806	100%	2.102.400.806
3	1.	2.	7. Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD	1. Persentase BUMD yang berkategori sehat	100%	100%	152.812.550	100%	157.794.239	100%	160.460.962	100%	169.270.269	100%	174.196.033	100%	174.196.033
3	1.	2.	8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan	1. Persentase kegiatan kepala daerah yang diinformasikan kepada masyarakat	100%	100%	609.946.460	100%	629.830.715	100%	640.474.854	100%	675.636.923	100%	695.297.958	100%	695.297.958
				2. Persentase peningkatan kemampuan SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	823.162.000	100%	849.997.081	100%	864.362.032	100%	911.815.507	100%	938.349.339	100%	938.349.339
3	1.	2.	9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Persentase layanan keprotokolan yang difasilitasi	100%	100%	504.635.690	100%	521.086.813	100%	529.893.181	100%	558.984.316	100%	575.250.760	100%	575.250.760
3	1.	2.	10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan	1. Persentase peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	100%	100%	424.407.000	100%	438.242.668	100%	445.648.969	100%	470.115.098	100%	483.795.447	100%	483.795.447
3	1.	2.	11. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama	1. Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	100%	100%	1.031.465.000	100%	1.065.090.759	100%	1.083.090.793	100%	1.142.552.477	100%	1.175.800.754	100%	1.175.800.754
3	1.	2.	12. Program Pengembangan Promosi Daerah	Persentase peningkatan kemampuan bersaing UMKM yang dipromosikan	100%	100%	2.337.372.835	100%	2.413.571.189	100%	2.454.360.543	100%	2.589.104.936	100%	2.664.447.890	100%	2.664.447.890
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL														
3	1.	2.	13. Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	87,77	88,00	1.911.885.000	88,50	1.974.212.451	88,75	2.007.576.641	89,00	2.117.792.599	89,50	2.179.420.364	89,50	2.179.420.364

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	87,89	88,00	88,50		88,75		89,00		88,75		88,75	
3	1.	2.	14. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 sd 18 tahun	91,25	91,50	518.191.850	91,75	535.084.904	92,00	544.127.839	92,25	574.000.458	92,50	590.703.871
				2. Rasio pasangan berakta nikah	68,15	52,50		52,75		53,00		53,25		53,50	
				3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	89,90	80,00		80,25		80,50		80,75		81,00	
				4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	0	79,00		79,25		79,50		79,75		78,00	
3	1.	2.	15. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	Ada	572.536.400	Ada	591.201.087	Ada	601.192.385	Ada	634.197.847	Ada	652.653.004
				2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
3	1.	2.	16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	80%	84,00%	1.465.382.100	88,00%	1.511.019.600	92,00%	1.537.700.000	96,00%	1.620.300.000	100%	1.666.870.000
3	1.	2.	17. Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persentase tingkat ketersediaan data statistik sektoral Kota Pontianak yang terupdate	85%	88,00%	1.045.940.000	91,00%	1.194.535.000	94,00%	1.211.099.815	97,00%	1.277.700.000	100,00%	1.314.800.000
			KECAMATAN (1. BARAT; 2. TIMUR; 3. SELATAN; 4. UTARA; 5. KOTA; 6. TENGGARA)												
3	1.	2.	18. Program Peningkatan pelayanan Prima	1 IKM Di Kecamatan	Baik	Baik	291.451.000	Baik	300.952.303	Sangat Baik	305.890.413	Sangat Baik	322.683.796	Sangat Baik	332.073.895
				2 IKM Kelurahan pallima	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				3 IKM Kelurahan sungai jawi dalam	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				4 IKM Kelurahan sungai jawi luar	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				5 IKM Kelurahan sungai belitung	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				6 IKM Di Kecamatan	Baik	Baik	261.160.000	Baik	269.673.816	Sangat Baik	274.231.303	Sangat Baik	289.286.602	Sangat Baik	297.704.842
				7 Kelurahan Saigon	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				8 IKM Kelurahan Tanjung Hulu	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				9 IKM Kelurahan Tanjung Hillir	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				10 IKM Kelurahan Dalam Bugis	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				11 IKM Kelurahan Parit Mayor	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				12 IKM Kelurahan Tambelan Sampit	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
				13 IKM Kelurahan Tambelan Sampit	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik			
				14 Indeks Kepuasan Masyarakatan (IKM) Kecamatan	Baik	Baik	293.555.000	Baik	303.125.000	Baik Sekali	308.248.100	Baik Sekali	325.170.900	Baik Sekali	334.633.500	Baik Sekali	353.005.000
				15 IKM Kantor kecamatan	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	11.354.000	Baik Sekali	11.684.400	Baik Sekali	12.325.900
				16 IKM Kelurahan Akcaya	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300	Baik Sekali	9.265.500
				17 IKM Kelurahan Akcaya	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	6.984.000	Baik Sekali	7.187.200	Baik Sekali	7.581.800
				18 IKM Kelurahan Benua Melayu Laut	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300	Baik Sekali	9.265.500
				19 IKM Kelurahan Kota Baru	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300	Baik Sekali	9.265.500
				20 IKM Kelurahan Parit Tokaya	Baik	Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300	Baik Sekali	9.265.500
				21 IKM Kecamatan		95%	218.965.000	95%	226.103.259	95%	229.924.404	95%	242.547.254	95%	249.605.379	95%	249.605.379
				22 IKM di Kantor Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				23 IKM kelurahan Siantan Hulu	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				24 IKM Kelurhan Siantan tengah	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				25 IKM Kelurahan Siantan Hilir	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				26 IKM Kelurahan Batu Layang	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				27 IKM Di Kecamatan	Baik	Baik	261.010.000	Baik	275.903.500	Baik	280.664.300	Baik	296.391.100	Baik	305.184.700	Baik	296.391.100
				28 IKM Kelurahan Sungai Bangkong	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				29 IKM Kelurahan Sunggai Jawi	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				30 IKM Kelurahan Tengah	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				31 IKM Kelurahan Darat Sekip	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				32 IKM Kelurahan Mariana	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				33 IKM Di Kecamatan Pontianak Tenggara			223.590.000		230.879.034		234.780.890		247.670.361		254.877.568		1.191.797.852
				34 Indeks Kepuasan Masyarakatan (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				35 Indeks Kepuasan Masyarakatan (IKM) Kelurahan Bansir Laut	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
				36 Indeks Kepuasan Masyarakatan (IKM) Kelurahan Bansir Darat	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bangka Belitung Laut	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
					38 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bangka Belitung Darat	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
3	1.	2.	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	90%	940.515.000	90%	1.022.805.789	95%	987.588.660	95%	1.041.807.277	100%	1.072.123.665	100%	1.041.807.277
					2 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	90%	3.518.440.000	90%	3.633.141.144	95%	3.694.541.229	95%	3.897.371.543	100%	4.010.785.055	100%	4.010.785.055
					3 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat			1.129.100.000		1.165.908.600		1.185.612.400		1.250.702.600		1.287.097.900		1.357.759.100
					4 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat		95%	3.238.727.000	95%	3.344.309.500	95%	3.400.828.331	95%	3.587.533.806	95%	3.691.931.040	95%	3.691.931.040
					5 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat			2.206.219.800		2.322.411.400		2.362.689.500		2.492.400.800		2.554.932.500		2.492.400.800
					6 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat			3.189.437.200		3.293.412.853		3.349.071.530		3.532.935.557		3.635.743.982		17.000.601.121
3	1.	2.	20	Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	100%	90%	1.388.405.000	90%	1.433.097.003	95%	1.457.316.666	95%	1.537.364.298	100%	1.582.101.605	100%	1.537.364.298
					2 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	100%	90%	911.740.000	90%	941.462.724	95%	957.373.444	95%	1.009.933.246	100%	1.039.322.304	100%	1.039.322.304
					3 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina			1.833.540.000		1.893.313.400		1.925.309.600		2.031.009.000		2.090.111.700		2.204.858.300
					4 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina		95%	484.694.200	95%	500.495.231	95%	508.953.600	95%	536.895.153	95%	552.518.802	95%	552.518.802
					5 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina			887.530.000		918.302.300		934.615.900		988.504.200		1.018.113.100		988.504.200
					6 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina			621.495.000		641.755.737		652.601.409		688.429.226		708.462.517		3.312.743.889
3.	2.			Tujuan 2														

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas	1. Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
3.	2.	1.	Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
			BADAN KEUANGAN DAERAH														
3.	2.	1.	1. Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	1. Persentase Tahapan Penganggaran Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	2.340.608.000	100%	2.417.010.000	100%	2.457.742.000	100%	2.612.631.000	100%	2.686.382.000	100%	12.514.373.000
				2. Persentase tersedianya dokumen penganggaran	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
3.	2.	1.	2. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Perbendaharaan	1. Persentase Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Yang di validasi	98,71%	100%	1.053.444.000	100%	1.106.370.000	100%	1.118.703.000	100%	1.179.312.000	100%	1.201.934.000	100%	5.659.763.000
3.	2.	1.	3. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	1. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara realtime	-	90%	1.782.417.000	92%	1.847.417.000	95%	1.912.417.000	98%	2.012.417.000	100%	2.092.417.000	100%	9.647.085.000
				2. Persentase tersedianya dokumen akuntansi	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
3.	2.	1.	4. Program Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	2.666.011.000	100%	3.117.680.900	100%	2.997.502.000	100%	3.317.923.000	100%	3.416.231.000	100%	15.515.347.900
				2. Persentase gedung bangunan dan kendaraan dinas roda empat milik daerah diasuransikan	-	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
				3. Persentase aset tanah selain jalan yang bersertifikat	-	53%		63%		72%		82%		100%		100%	
			Tujuan 2 (indikator ke dua)	2. Nilai SAKIP	BB	A		A		A		A		A		A	
3.	2.	2.	Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Pontianak	BB	A		A		A		A		A		A	
			SEKRETARIAT DAERAH														
3.	2.	2.	1. Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja	87%	90%	169.454.000	93%	174.978.200	95%	177.935.332	97%	187.703.982	100%	193.166.168	100%	193.166.168
				2. Persentase analisis jabatan yang dapat dipergunakan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian	100%	100%	444.579.965	100%	459.073.272	100%	466.831.610	100%	492.460.666	100%	506.791.271	100%	506.791.271

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.	2.	2.	2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian target dengan realisasi anggaran	93%	100%	414.016.950	100%	427.513.903	100%	434.738.888	100%	458.606.052	100%	471.951.489	100%	471.951.489
				Persentase Kebijakan Keuangan yang Diterbitkan	100%	100%	537.272.000	100%	554.787.067	100%	564.162.969	100%	595.135.516	100%	612.453.959	100%	612.453.959
			INSPEKTORAT														
3.	1.	1.	3. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Persentase OPD yang memperoleh predikat A atau kategori "Memuaskan" atas penilaian SAKIP	3,33%	50%	270.787.750	70%	279.615.431	80%	282.663.239	90%	298.181.451	100%	306.858.531	100%	306.858.531
				2. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada tingkat maturitas Level 3 atau "Terdefinisi"	56,67%	80%		85%		90%		95%		100%		100%	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
3.	1.	1.	4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja program Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	1.986.776.600	100%	2.491.392.000	100%	2.546.692.000	100%	2.816.192.000	100%	3.909.592.000	100%	3.909.592.000
3.	1.	1.	5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Perangkat Daerah sektor Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terbina perencanaannya	100%	100%	2.229.400.000	100%	1.451.000.000	100%	1.532.000.000	100%	1.333.000.000	100%	1.389.000.000	100%	3.595.000.000
3.	1.	1.	6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Ekonomi yang terbina perencanaannya	100%	100%	1.358.944.800	100%	1.693.086.800	100%	1.844.836.600	100%	1.713.686.800	100%	1.866.236.600	100%	9.625.883.400
3.	1.	1.	7 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Perangkat Daerah Sektor Sosial Budaya yang terbina perencanaannya	100%	100%	1.115.200.000	100%	962.500.000	100%	987.500.000	100%	1.013.500.000	100%	1.040.100.000	100%	2.723.170.000
3.	1.	1.	8 Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	100%	993.300.000	100%	849.087.200	100%	853.087.200	100%	1.039.460.800	100%	861.087.200	100%	3.964.085.600
				persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase tersedianya sistem informasi yang berkualitas untuk mendukung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							2020		2021		2022		2023		2024			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.	1.	1.	9	Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	39,58	39,58%	966.558.000	51,79%	2.742.000.000	59,82%	2.930.400.000	74,17%	3.516.480.000	84,58%	4.419.776.000	84,58%	15.643.256.000
					persentase implementasi rencana kelitbangan	20	20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%			
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33	33%		50%		50%		67%		83%		83%	
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	75	75%		82%		89%		100%		100%		100%	
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	30	30%		35%		40%		50%		55%		55%	
3.	3.			Tujuan 3														
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)		Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)		Bintang 3 (***)		Bintang 4 (****)		Bintang 4 (****)		
3.	3.	1.		Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Pontianak	Bintang 2 (**)	Bintang 2 (**)		Bintang 2 (**)	Bintang 3 (***)		Bintang 3 (***)		Bintang 4 (****)		Bintang 4 (****)		
				SEKRETARIAT DAERAH														
3.	3.	1.	1.	Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan	1. Prestasi LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	366.594.000	Sangat Tinggi	378.544.964	Sangat Tinggi	384.942.374	Sangat Tinggi	406.075.711	Sangat Tinggi	417.892.514	Sangat Tinggi	417.892.514
					2. Persentase peningkatan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	497.963.080	100%	514.196.676	100%	522.886.600	100%	551.593.075	100%	567.644.433	100%	567.644.433
3.	3.	1.	2.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Persentase kegiatan APEKSI dan Muskomwil yang diikuti	100%	100%	225.320.000	100%	232.665.432	100%	236.597.478	100%	249.586.679	100%	256.849.652	100%	256.849.652
					2. Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	100%	100%	189.780.000	100%	195.966.828	100%	199.278.667	100%	210.219.066	100%	216.336.441	100%	216.336.441
3.	3.	1.	3.	Program Kegiatan Kinerja Pemerintah	1. Persentase Kegiatan peringatan dan upacara yang dilaksanakan	100%	100%	480.026.810	100%	495.675.684	100%	504.052.603	100%	531.725.091	100%	547.198.291	100%	547.198.291
				BADAN KEUANGAN DAERAH														
3.	3.	1.	3.	Program Penataan dan Pengembangan Data Base Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase data pajak daerah yang dimutakhirkan	-	60%	1.615.000.000	63%	1.301.950.000	66%	1.555.587.610	69%	1.692.087.610	72%	1.789.087.610	72%	7.953.712.830
3.	3.	1.	4.	Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah	-	B	504.965.000	B	626.322.000	B	636.322.000	B	646.322.000	B	656.322.000	B	3.070.253.000
3.	3.	1.	5.	Program Peningkatan Pengawasan Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar pajak	49%	70%	1.561.079.500	70%	1.637.989.000	70%	1.665.593.000	70%	1.757.006.000	70%	1.808.094.000	70%	8.429.761.500

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					2. Persentase pertumbuhan piutang tertagih		5%		5%		5%		5%		5%			
					3. Persentase pemenuhan wajib pajak atas rekomendasi hasil pemeriksaan pajak daerah		30%		35%		40%		45%		50%			
3.	3.	1.	6.	Program Pemanfaatan Ekonomis Aset Daerah	1. Persentase capaian target Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan ekonomis aset daerah	31,29%	100%	1.316.436.000	100%	1.368.081.000	100%	1.391.136.000	100%	1.467.486.000	100%	1.510.156.000	7.053.295.000	
				INSPEKTORAT														
3.	1.	1.	7.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh	1. Jumlah Hasil Pemeriksaan Menurun	100%	100%	1.026.775.000	100%	1.060.247.865	100%	1.071.804.567	100%	1.130.646.637	100%	1.163.548.455	1.163.548.455	
					2. Persentase temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	77,60%	81%		82%		83%		85%		90%		90%	
3.	1.	1.	8.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat serta Bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP	Level 3	Level 3	614.786.195	Level 3	634.828.225	Level 3	641.747.853	Level 3	676.979.810	Level 4	696.679.922	696.679.922	
				SEKRETARIAT DPRD														
3	8	1		Program peningkatan kapasitas lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal banmus		95%	7.819.693.900	95%	8.073.612.800	95%	8.209.507.400	95%	8.658.424.900	95%	9.239.439.300	9.239.439.300	
					2. Persentase pengaduan /aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		80%		80%		80%		80%		80%			
Misi 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI, KREATIF DAN BERDAYA SAING																		
4.	1.			Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,05%	5,20%		5,30%		5,50%		5,80%		6,10%		6,10%	
					2. Tingkat Inflasi	3,99%	≤ 5%		≤ 5%		≤ 4%		≤ 4%		≤ 4%		≤ 4%	
					3. Gini Ratio	0,36	0,35		0,34		0,33		0,32		0,31		0,31	
4.	1.	1.		Sasaran 1 Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	1,33%	1,33%		1,33%		1,33%		1,34%		1,34%		1,34%	
				DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN														

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	1.	1.	2. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada pangan	1. Peningkatan Persentase Luas Lahan yang ditanami dengan benih yang bersertifikat (Ha)		0,3	1.321.150.000	0,32	1.453.265.000	0,33	1.598.591.500	0,35	1.758.450.650	0,36	1.934.295.715
				2. Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman (IP)		1,18	-	1,2	-	1,21	-	1,23	-	1,24	-
				3. Peningkatan Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk (Ha)		3	-	4	-	5	-	6	-	7	-
				4. Peningkatan Luas pertanaman keladi (Ha)		1	-	2	-	3	-	4	-	5	-
4.	1.	1.	3. Program Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman hortikultura berkelanjutan	1. Persentase Luas Panen Komoditas:			1.329.520.000		1.462.472.000		1.608.719.200		1.769.591.120		1.946.550.232
				a. Sawi (ha)	195	200	-	205	-	210	-	215	-	220	-
				b. Bayam (ha)	172	176	-	180	-	185	-	190	-	195	-
				c. Kangkung (ha)	202	207	-	212	-	217	-	222	-	228	-
				d. Pepaya (ha)	42	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-
				e. Lidah Buaya (m2)	640.142	768.170	-	844.987	-	887.236	-	931.598	-	978.178	-
4.	1.	1.	4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Tersedia		2	578.511.000	4	636.362.100	6	699.998.310	8	769.998.141	10	846.997.956
4.	1.	1.	5. Program Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatan Indeks kepuasan pengunjung di UPTD Agribisnis		93	7.073.600.100	94	1.133.100.000	94	1.152.250.000	95	1.215.500.000	96	1.250.870.000
4.	1.	1.	6. Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	1. Jumlah Penyuluh Bersertifikat		4	511.530.000	5	562.683.000	6	618.951.300	7	680.846.430	8	748.931.074
4.	1.	1.	7. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1. Persentase pengukuhan kelompok tani (kelompok)		35	88.798.000	38	97.677.800	41	107.445.580	44	118.190.138	48	130.009.151
4.	1.	1.	8. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	1. Peningkatan Persentase Pengetahuan Peternak dan Pelaku usaha		0	85.838.000	0	94.421.800	0	103.463.980	0	114.250.378	0	125.675.416
				2. Peningkatan Persentase Kelompok Ternak yang memperoleh Bibit Ternak		0		0	-	0	-	0	-	0	-
				3. Peningkatan Persentase keberhasilan Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)		1		1	-	1	-	1	-	1	-
4.	1.	1.	9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Penyakit Menular Ternak (orang)		20	458.309.000	25	504.139.900	30	554.553.890	35	610.009.279	40	671.010.208
				2. Peningkatan Jasa Medis Veteriner (kali)		120		130	-	140	-	150	-	160	-

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	1.	1.	10.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Peningkatan Pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)		50	675.761.000	55	743.337.100	60	817.670.810	65	899.337.891	70	989.381.680		
					2. Jumlah Pengendalian Hama, Penyakit Ikan, dan Kesehatan Lingkungan Budidaya yang dilaksanakan (kali/tahun)		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		
4.	1.	1.	11.	Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	1. Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (ekor)		300	1.068.750.000	330	1.137.455.000	363	1.289.370.500	400	1.376.320.550	440	1.555.939.606		
4.	1.	1.	12.	Program peningkatan keamanan pangan produk hewan	1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Keamanan Produk Hewan		20	185.306.000	25	203.836.600	30	224.220.260	35	246.642.286	40	271.306.515		
4.	1.	1.	13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	1. Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/ tahun)	207,07	160	877.851.000	162	965.636.100	163	1.062.199.710	164	1.168.419.681	165	1.285.261.649		
4.	1.	1.	14.	Program Pengembangan, Peningkatan Produksi Perikanan, dan Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal	1. Peningkatan Jumlah Produksi Benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan Lokal (ekor/ tahun)		250.000	677.515.000	330.000	745.266.500	363.000	819.793.150	399.300	901.772.465	439.230	991.949.712		
4.	1.	1.	15.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	1. Peningkatan Produksi perikanan tangkap (Ton)			1.105.136.000		1.215.649.600		1.337.214.560		1.470.936.016		1.618.029.618		
					- Produksi tangkap laut	378,18	820		850		890		910		930	4400		
					- produksi perairan umum daratan	50	51,5		53,5		54,64		56,28		57,96	57,96		
4	1	2		Sasaran 2 Meningkatnya sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%		14,61%		14,61%		14,61%		14,61%			
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
4.	1.	2.	1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4%	4%	19.584.150	4%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150		
4.	1.	2.	2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	95%	95%	97.376.800	95%	99.136.800	95%	101.266.800	95%	102.376.830	95%	152.376.830		
4.	1.	2.	3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5,88%	5,88%	22.234.701.200	11,76%	5.620.395.600	11,76%	5.841.396.600	11,76%	5.951.395.600	11,8%	6.061.395.600		
4	1	3		Sasaran 3 Meningkatnya sektor industri	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,17%		16,17%		16,25%		16,25%		16,30%			
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
4.	1.	3.	1.	Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	persentase pertumbuhan industri	90%	90%	284.207.900	90%	676.864.850	92%	751.864.850	92%	916.864.850	92%	901.864.850		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD			
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4.	1.	3.	2.	Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Persentase kelayakan perijinan industri	90%		90%	18.257.600	90%	18.257.600	92%	18.257.600	92%	68.257.600	93%	68.257.600	93%	68.257.600
4.	1.	3.	3.	Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan			25%	-	25%	-	25%	150.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000
4	1	4		Sasaran 4 Meningkatnya Investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)	5,00%		5,00%		5,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%	
				DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU															
4.	1.	4.	1.	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95%		100%	427.629.000	100%	440.077.000	100%	445.784.000	100%	468.505.000	100%	480.824.000	100%	480.824.000
4.	1.	4.	2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penanaman Modal	90%		100%	617.710.000	100%	638.136.500	100%	649.038.300	100%	684.751.100	100%	704.946.220	100%	704.946.220
4.	1.	4.	3.	Program Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Penanaman Modal	100%		100%	103.860.000	100%	107.245.836	100%	109.058.291	100%	115.045.591	100%	118.393.417	100%	118.393.417
4.	1.	4.	4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Persentase Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal	100%		90%	209.170.000	100%	215.508.246	100%	218.837.500	100%	231.062.600	100%	237.349.800	100%	237.349.800
4.	1.	4.	5.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal di Kota Pontianak	100%		100%	123.020.000	100%	126.817.400	100%	128.874.200	100%	135.535.000	100%	139.300.000	100%	139.300.000
4.	1.	4.	6.	Program Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	100%		100%	48.910.800	100%	50.505.292	100%	51.358.832	100%	54.178.431	100%	55.755.024	100%	55.755.024
4	1	5		Sasaran 5 Meningkatnya sektor pariwisata	1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,39%		3,40%		3,41%		3,42%		3,43%		3,44%		3,44%	
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA															
4.	1.	5.	1.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah masyarakat dan pelaku wisata yang memahami pariwisata	220		250	488.381.000	300	488.764.810	350	489.150.000	400	564.500.000	450	600.000.000	450	-

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	1.	5.	2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2	5	892.450.000	6	893.424.500	7	894.408.245	7	895.401.328	8	896.403.841	297.415.879
4.	1.	5.	3.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1.125.000	1.150.000	1.536.875.000	1.200.000	8.773.593.000	1.250.000	8.710.379.000	1.300.000	8.772.233.000	1.400.000	8.884.155.000	81.031.147.377
4.	1.	5.	4.	Program revitalisasi destinasi wisata	jumlah objek wisata yang terawat dan terpelihara	2	3	30.000.000	4	32.000.000	5	35.000.000	6	37.000.000	7	40.000.000	
4.	1.	5.	5.	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	jumlah subsektor ekonomi kreatif berbasis iptek yang difasilitasi	8 subsektor	9 subsektor	455.000.000	10	475.000.000	11	505.000.000	12	558.618.000	13	585.454.180	-
4.	1.	5.	6.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah komunitas / sanggar seni dan budaya yang difasilitasi	30	35	473.139.000	35	476.595.790	40	580.086.648	45	1.086.611.914	45	1.090.171.932	1.099.797.051
4.	1.	5.	7.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	250 Orang	250 Orang	726.341.460	260 Orang	730.654.875	270 Orang	735.011.424	280 Orang	739.411.538	290 Orang	743.855.654	953.344.211
4	1	6		Sasaran 6 Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro												
				DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN													
4.	1.	6.	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	persentase koperasi aktif	95,40%	95,40%	196.335.300	95,50%	233.081.900	95,50%	313.081.900	95,60%	283.081.900	95,60%	273.081.900	298.081.900
4.	1.	6.	2.	Program Peningkatan iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Prosentase Usaha mikro naik kelas	0,13%	0,29%	224.206.500	0,47%	231.876.600	0,61%	261.876.500	0,69%	261.876.500	0,83%	261.876.500	261.876.500
4.	1.	6.	3.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Usaha mikro aktif	86,52%	88,25%	100.000.000	88,25%	200.000.000	89,98%	200.000.000	89,98%	350.000.000	91,71%	350.000.000	350.000.000
4.	1.	6.	4.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase UKM non BPR /LKM aktif		88,25%	334.293.100	88,25%	240.540.000	90%	270.540.000	89,98%	257.540.000	91,71%	287.540.000	287.540.000
4.	1.	6.	5.	Program Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	12%	12%	217.540.000	13%	63.100.000	14%	63.100.000	15%	63.100.000	16%	63.100.000	63.100.000
4	1				2. Angka Kemiskinan	5,00%	4,90%		4,80%		4,50%		4,25%		4,00%		4,00%
4	1	7		Sasaran 7 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,00%	4,90%		4,80%		4,50%		4,25%		4,00%		4,00%
				DINAS SOSIAL													
4.	1.	7.	1.	Program Rehabilitas Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Yang Direhabilitasi	100%	100%	615.602.000	100%	635.670.625	100%	646.413.459	100%	681.901.558	100%	701.744.893	701.744.893

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Persenrase (%) Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi di Luar Panti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase (%) Pelaksanaan Pelayanan Bagi Lanjut Usia Terlantar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase (%) Pelaksanaan Pelayanan bagi Gelandangan dan Pengemis Terlantar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
4.	1.	7.	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Peningkatan Fasilitas kebutuhan sosial anak Panti Asuhan	100%	100%	3.444.100.000	100%	3.556.377.660	100%	3.616.480.442	100%	3.815.025.219	100%	3.926.042.453
			persentase korban bencana alam yang dipenuhi	100%	100%			100%		100%		100%		100%	
4.	1.	7.	3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase (%) Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	783.156.000	100%	709.454.026	100%	721.443.799	100%	748.454.313	100%	770.234.334
4.	1.	7.	4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase (%) Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	100%	100%	1.391.138.000	100%	1.436.489.099	100%	1.460.765.765	100%	1.540.961.805	100%	1.585.803.734
4.	1.	7.	5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase (%) Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	1.687.746.000	100%	1.714.937.950	100%	1.743.920.401	100%	1.839.661.631	100%	1.893.195.784
4.	1.	7.	6. Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma	Presentase (%) Tingkat Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	100%	100%	179.074.000	100%	184.911.812	100%	188.036.822	100%	198.360.044	100%	204.132.321
4	1		3. Tingkat Pengangguran	89,63%	90,03%		90,20%	91,00%		91,50%		92,00%		8,00%	
4	1	8	Sasaran 8 Meningkatnya Penyerapan tenaga Kerja	Rasio Orang Bekerja	89,63%	90,03%	90,20%	91,00%		91,50%		92,00%		8,00%	
			DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
4.	1.	8.	1. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	564.484.900	100%	577.858.900	100%	584.958.900	100%	608.658.900	100%	621.758.900
4.	1.	8.	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan kesempatan kerja	100%	100%	179.605.000	100%	189.910.000	100%	195.410.000	100%	213.710.000	100%	223.910.000
4.	1.	8.	3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan terhadap tenaga kerja	100%	100%	277.160.000	100%	285.884.000	100%	290.584.000	100%	306.184.000	100%	314.984.000

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	1.	8.	Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh	Persentase kepesertaan BPJS tenaga kerja	30%	10%	45.200.000	100%	46.600.000	100%	47.400.000	100%	50.000.000	100%	51.500.000
Misi 5 : MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, HIAU, AMAN, TERTIB, DAN BERKELANJUTAN															
5	1		Tujuan 1 : Terwujudnya Kota yang bersih, hijau, nyaman, dan berwawasan lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,20%	66,20%		66,30%		66,50%		66,70%		66,80%	
5	1	1	Sasaran 1 Menurunnya Pencemaran Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	54,00%	54,00%		54,30%		55,00%		55,00%		55,00%	
				2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00%	84,00%		84,00%		84,00%		84,70%		85,00%	
				3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	62,00%	62,00%		62,00%		62,00%		62,00%		62,00%	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
5.	1.	1.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase pelaku usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup	45%	50%	653.100.000	55%	9.013.497.300	60%	9.532.728.320	65%	10.103.882.442	70%	10.732.151.976
5.	1.	1.	2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Nilai Adipura	69.4	69,6	746.523.000	69.8	821.175.300	71	903.292.830	72	993.622.113	73	1.092.984.324
5.	1.	1.	3. Program Pengendalian Polusi	persentase kegiatan usaha yang mentaati peraturan Lingkungan Hidup	50%	66%	2.202.470.000	67%	2.172.866.550	68%	2.199.093.850	70%	2.227.943.880	72%	2.259.678.913
				persentase permohonan Dokumen lingkungan hidup yang diselesaikan	100%	100%	398.280.000	100%		100%		100%		100%	
5.	1.	1.	4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	persentase pengurangan sampah dari sumber sampah	18%	22%	3.428.584.200	24%	7.638.712.370	26%	8.152.583.607	27%	8.717.841.968	28%	9.339.626.164
5.	1.	1.	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan dalam kondisi baik	45,77%	47,58%	19.756.459.300	49,39%	36.859.219.841	49%	44.745.141.825	49,12%	32.819.656.008	49,18%	38.101.621.608
5.	1.	1.	6. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	persentase penangan sampah perkotaan	73%	75%	35.468.131.910	74%	390.149.451.010	73%	42.916.439.611	72%	47.208.083.572	71%	51.928.891.929
5.	1.	1.	7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan PAD dari sektor persampahan	100%	100%	540.757.000	100%	694.832.700	100%	754.315.970	100%	819.747.567	100%	891.722.324
5.	1.	2.	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Tata Ruang	82,00%	85,00%		88,00%		90,00%		92,00%		95,00%	
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5.	1.	2.	1. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase ruas jalan yang telah ditata RMJ dan GSB	93,02	94,31	800.000.000	95,60	800.000.000	96,89	800.000.000	98,18	1.150.000.000	99,47	1.150.000.000	99,47	1.150.000.000
5.	1.	2.	2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Persentase tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan	100,00	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000
5.	1.	2.	3. Program Pemanfaatan Ruang	1. Persentase tersedianya dokumen penataan	100,00	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000
5.	1.	2.	4. Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Jumlah taman ditingkatkan (unit)		3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	15,00	2.028.333.333
5.	1.	2.	5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Persentase bertambahnya luas RTH dikelola	18,75	18,76	5.170.000.000	18,77	5.170.000.000	18,78	5.170.000.000	18,79	5.170.000.000	18,70	5.170.000.000	18,80	5.170.000.000
5.	1.	2.	6. Program Pengembangan Sistem Persampahan	1. Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA		95,00	143.000.000	92,50	143.000.000	90,00	143.000.000	87,50	143.000.000	85,00	143.000.000	85,00	143.000.000
5	2		Tujuan 2 : Terwujudnya kota yang aman dan tertib	1. Angka Kriminalitas yang diselesaikan		73,80%		75,00%		77,00%		80,00%		85,00%		85,00%	
5	2	1	Sasaran 1 menurunnya jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	persentase kasus pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
			SATUAN POLISI PAMOG PRAJA														
5.	2.	1.	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	1.086.175.000	100%	1.121.584.305	100%	1.140.539.080	100%	1.203.154.675	100%	1.238.166.476	100%	1.238.166.476
5.	2.	1.	2. Program Penerapan dan Penegakan hukum Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	3.026.484.000	100%	3.125.147.378	100%	3.177.962.369	100%	3.352.432.503	100%	3.449.988.289	100%	3.449.988.289
5.	2.	1.	3. Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan Lingkungan Pemukiman (RT) yang telah memiliki sistem keamanan lingkungan	60%	65%	208.000.000	68%	214.780.800	70%	218.410.596	72%	230.401.337	75%	237.106.016	75%	237.106.016
			KECAMATAN (1. BARAT; 2. TIMUR; 3. SELATAN; 4. UTARA; 5. KOTA; 6. TENGGARA)														
5.	2.	1.	4. Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	90%	789.518.000	90%	815.256.287	95%	822.514.118	95%	867.670.142	100%	892.919.343	100%	867.670.142
				2 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	70%	60%	800.000.000	65%	826.080.000	70%	840.040.752	75%	886.158.989	80%	911.946.216	80%	911.946.216

[illegible]

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Tujuan 2 : (lanjutan) Terwujudnya kota yang aman dan tertib	3. persentase kejadian bencana yang ditanggulangi		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
5	2	3	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	83,00%	83,00%		81,00%		79,00%		77,00%		75,00%		75,00%		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
5.	2.	3.	1. Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	100%	148.000.000	100%	134.400.000	100%	141.120.000	100%	159.752.250	100%	155.584.800	100%	155.584.800	
5.	2.	3.	2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	380.000.000	100%	399.000.000	100%	418.950.000	100%	439.897.500	100%	461.892.375	100%	484.986.994	
5.	2.	3.	3. Program Kelurahan Tangguh Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	0%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.313	100%	63.814.078	
5.	2.	3.	4. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	747.000.000	100%	784.350.000	100%	823.567.500	100%	864.745.875	100%	907.983.169	100%	953.382.327	
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
5.	2.	3.	5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	594.390.000	100%	613.767.114	100%	782.329.952	100%	908.717.274	100%	1.021.026.383	100%	1.021.026.383	

an :

x			Kode Misi
x			Kode Tujuan
	x		Kode Sasaran
		y	Nomor Urut Program

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel VII.1 berikut:

Secara umum, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III tentang Gambaran Keuangan Daerah, maka kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai Belanja Daerah secara ringkas dapat dilihat pada table VII.1 di bawah. Khusus untuk anggaran Belanja Langsung pada Tabel VII.1 merupakan gambaran kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan tahun 2020 - 2024.

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
5	BELANJA	1.836.597.000.000,00	1.950.597.000.000,00	2.040.597.000.000,00	2.150.597.000.000,00	2.250.597.000.000,00
5	1 Belanja Tidak Langsung	700.197.000.000,00	748.460.300.000,00	804.188.300.000,00	849.891.300.000,00	886.899.430.000,00
5	1 1 Belanja Pegawai	671.211.000.000,00	719.086.300.000,00	757.406.300.000,00	789.681.300.000,00	856.240.430.000,00

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
		3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
		4	Belanja Hibah	17.256.000.000	17.644.000.000	35.052.000.000	48.480.000.000	18.929.000.000
		5	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
		6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
		7	Belanja Bantuan Keuangan	3.230.000.000	3.230.000.000	3.230.000.000	3.230.000.000	3.230.000.000
		8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5	2		Belanja Langsung	1.136.400.000.000,00	1.202.136.700.000,00	1.236.408.700.000,00	1.300.705.700.000,00	1.363.697.570.000,00
5	2	1	Belanja Pegawai	102.276.000.000,00	108.192.303.000,00	111.276.783.000,00	117.063.513.000,00	122.732.781.300,00
		2	Belanja Barang dan Jasa	568.200.000.000,00	601.068.350.000,00	618.204.350.000,00	650.352.850.000,00	681.848.785.000,00
		3	Belanja Modal	465.924.000.000,00	492.876.047.000,00	506.927.567.000,00	533.289.337.000,00	559.116.003.700,00

7.2. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah Penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dijabarkan dalam tabel VII.2 berikut:

Tabel VII.2
Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan													
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
1.	1.	PENDIDIKAN			159.089.492.767		183.559.897.977		164.179.517.091		146.176.959.103		148.062.680.326		148.062.680.146		
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
1.	1.	1.	Program Pendidikan Dasar	1. Rata-rata lama sekolah													
				2. Angka Melek Huruf													
				3. persentase warga 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/MTs) - SPM	80%	100%	29.926.058.592	100%	30.674.210.057	100%	31.441.065.038	100%	32.227.091.941	100%	33.032.769.239	100%	33.032.769.239
				4. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI	119,07%/108,16%	100%	2.243.041.825	100%	2.299.117.871	100%	2.365.792.289	100%	2.434.400.265	100%	2.504.997.873	100%	2.504.997.873
				5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	111,54%/91,06%	100%	1.999.500.000	100%	2.049.487.500	100%	2.108.922.638	100%	2.170.081.394	100%	2.233.013.754	100%	2.233.013.574
				8. Rasio sekolah SD /MI dalam kondisi baik	90,00%	91%	67.297.760.000	92,00%	68.980.204.000	93%	70.704.709.100	94%	72.755.145.664	95%	74.865.044.888	95%	74.865.044.888
				9. Rasio sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik	90,00%	91%	30.148.855.000	92%	51.285.847.155	93%	28.468.136.722	94,00%	6.655.712.687	95%	6.848.728.355	95%	6.848.728.355
1.	1.	2.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32%	33,00%	6.420.381.500	33,00%	6.606.572.564	34,00%	6.798.163.168	34,00%	6.995.309.900	34,00%	7.198.173.887	34,00%	7.198.173.887
				2. Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	95	98,00%	100.000.000	98,00%	102.900.000	99,00%	105.884.100	99,00%	108.954.739	99,00%	112.114.426	99,00%	112.114.426
1.	1.	3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. persentase warga berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	71%	74%	1.559.973.200	75%	1.605.212.423	76%	1.651.763.583	77%	1.699.664.727	78%	1.748.955.004	78%	1.748.955.004
				2. Rasio sekolah PAUD dalam kondisi baik	45%	55%	4.659.973.200	60%	4.795.112.423	70%	4.934.170.683	80%	5.077.261.633	90%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000
1.	1.	4.	Program Pendidikan Non Formal	1. persentase warga 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	5.049.138.000	100%	5.195.563.002	100%	5.346.234.329	100%	5.501.275.125	100%	5.660.812.103	100%	5.660.812.103
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase peningkatan pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	100%	5.114.603.450	100%	5.262.926.950	100%	5.415.551.832	100%	5.572.602.835	100%	5.734.208.317	100%	5.734.208.317
			Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. Persentase Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor	100%	100%	3.235.712.000	100%	3.329.547.648	100%	3.426.104.530	100%	3.525.461.561	100%	3.627.699.946	100%	3.627.699.946

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum SKPD sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	904.856.000	100%	931.096.824	100%	958.098.632	100%	985.883.492	100%	1.014.474.113	100%	1.014.474.113
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	100%	100%	429.640.000	100%	442.099.560	100%	454.920.447	100%	468.113.140	100%	481.688.421	100%	481.688.421
1.	2.	KESEHATAN		549.130.289.578		584.429.048.027		613.327.536.595		846.098.858.123		694.793.386.691		464.807.270.619		
		DINAS KESEHATAN														
1.	2.	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir	1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	97,77%	100%	705.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.329.950.000	100%	1.440.845.000	100%	1.597.879.000	100%	1.597.879.000
			2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	99,22%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			4. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	5,66%	<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%	
			5. Cakupan komplikasi neonatus yang ditangani	103%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			6. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani	107%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.	2.	2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan Remaja	1. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	89,00%	100%	69.675.000	100%	76.642.500	100%	84.120.000	100%	92.158.500	100%	100.813.200	100%	100.813.200
			2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	117,96%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			3. Persentase Anak Usia 60 -72 bulan mendapatkan Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah sesuai standar	105,26%	98%		99%		99%		100%		100%		100%	
1.	2.	3. Program Peningkatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan	1. Terselenggaranya fungsi manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	100%	100%	1.295.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000	100%	1.297.200.000
1.	2.	4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	68,97%	93,50%	3.053.516.358	94%	3.222.297.800	94,50%	3.310.057.914	95%	3.477.132.090	95,50%	3.477.056.843	95,50%	3.477.056.843

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2. Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93,41%	93%		93,5%		94%		94%		94,5%		94,5%	
		3. Persentase terduga TB yang dilakukan Pemeriksaan penunjang	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4. Persentase orang yang beresiko mendapatkan VCT dan TIPK	NA	80%		80%		80%		80%		80%		80%	
		5. Angka Bebas Jentik	70%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	
		6. Terkendalnya Angka kesakitan Penyakit Kusta	0,19%	< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk		< 1 per 10.000 penduduk	
		7. Cakupan penemuan kasus non folio AFP	100,00%	>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun		>2 per 100.000 penduduk anak < 15 Tahun	
		8. Terkendalnya Angka Kesakitan Penyakit Diare	13,39%	<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk		<214 per 1.000 penduduk	
		9. Persentase Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada Kelurahan yang mengalami KLB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.	2.	5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat													
		1. Persentase Kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)	37,93%	51,72%	236.775.700	75%	237.650.000	100%	239.600.000	100%	241.996.000	100%	243.000.000	100%	243.000.000
		2. Persentase Sarana Air Minum yang memenuhi standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.	2.	6. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Tempat Umum dan Makanan													
		1. Persentase Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan	76,83%	80%	690.147.000	82%	695.000.000	85%	701.950.000	88%	465.643.000	90%	470.300.000	90%	470.300.000
		2. Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan	29,98%	55,00%		60%		65%		70%		75%		75%	
1.	2.	7. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular													
		1. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	17,27%	100%	14.045.775.400	100%	14.467.121.662	100%	14.910.098.032	100%	15.366.782.630	100%	15.837.636.848	100%	15.837.636.848
		2. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	21,26%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		3. Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				4. Persentase WUS Usia 30-50 Tahun yang Melakukan Pemeriksaan Deteksi Dini kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim	NA	10%		10%		10%		10%		10%			
				5. Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	27%	100%		100%		100%		100%		100%			
				6. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	60%	100%		100%		100%		100%		100%			
				7. Persentase masyarakat yang mendapatkan screening kanker payudara dan kanker leher rahim	1,9%	10%		10%		10%		10%		10%			
1.	2.	8.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Cakupan Keluarga yang ber PHBS	65,64%	66%	1.090.000.000	67%	1.170.000.000	68%	1.225.000.000	69%	1.290.000.000	70%	1.390.000.000	70%	1.390.000.000
				2. Persentase Sekolah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				3. Persentase Sekolah yang melaksanakan PHBS	71,54%	72%		73%		74%		75%		76%		76%	
				4. Persentase Posyandu Purnama Mandiri	59,31%	65%		65%		65%		65%		65%		65%	
				5. Indeks keluarga sehat	NA	21%		22%		23%		24%		25%		25%	
1.	2.	9.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Anemia pada Ibu Hamil	48,9%	48%	2.521.050.000	47%	2.647.102.500	46%	2.779.457.625	45%	2.918.430.507	44%	3.064.352.032	44%	3.064.352.032
				2. Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan ASI Ekslusif	59,98%	60%		61%		62%		63%		64%		64%	
				3. Persentase Bayi dengan Berat badan lahir rendah (BBLR)	1,82%	2%		2%		1%		1%		1%		1%	
				4. Persentase Balita yang ditimbang Berat Badannya (D/S)	71,76%	71%		71%		72%		73%		74%		74%	
				5. Persentase Remaja Putri dapat tablet tambah darah	55,74%	56%		58%		60%		62%		64%		64%	
				6. persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				7. Persentase Ibu Hamil KEK dapat makanan tambahan	87,00%	86%		88%		90%		93%		95%		95%	
				8. Persentase Balita kurus dapat makanan tambahan	72,00%	74%		76%		78%		80%		82%		82%	
				9. persentase bayi dengan panjang badan lahir pendek (< 48cm)	11,24%	10,00%		9,00%		8,00%		7,00%		6,00%		6,00%	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan													
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.	2.	10.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%		100%	14.215.930	100%	162.657.350	100%	173.507.250	100%	174.141.750	100%	187.168.700	100%	187.168.700
				2. Penggunaan obat rasional di Puskesmas	100%		100%		100%		100%	100%		100%		100%		
				3. Persentase Sarana farmasi sesuai standar	75%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
				4. Jumlah industri pangan Rumah tangga sesuai standar	90 Industri	100 Industri		115 Industri		130 Industri		140 Industri		180 Industri		180 Industri		
1.	2.	11.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan masyarakat miskin dan kelompok tertentu yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%	6.539.869.120	100%	9.080.574.080	100%	12.624.805.072	100%	13.864.619.139	100%	15.227.978.733	100%	15.227.978.733	
1.	2.	12.	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	1. Persentase Sarana bangunan UPTD/UPK dan jaringannya yang memenuhi syarat	31,43%	40,00%	16.798.919.900	46%	17.134.898.298	51%	17.476.902.266	57%	17.805.944.065	63%	30.350.029.895	63%	30.350.029.895	
1.	2.	13.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	100,00%	100,00%	3.038.270.913	100%	3.317.488.248	100%	3.623.396.829	100%	3.958.604.256	100%	4.325.975.814	100%	4.325.975.814	
				2. Persentase RS di Kota Pontianak yg terakreditasi	96,90%	100,00%		100%		100%		100%		100%		100%		
1.	2.	14.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan sesuai standar	91,30%	100%	12.917.198.887	100%	6.631.019.634	100%	7.624.088.748	100%	8.767.634.122	100%	10.069.248.442	100%	10.069.248.442	
1.	2.	15.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah UPTD/UPK yang memberikan pelayanan sesuai standar	100%	25 UPTD/UPK	56.991.661.314	25 UPTD/UPK	53.810.606.485	25 UPTD/UPK	57.178.393.541	25 UPTD/UPK	58.666.975.767	25 UPTD/UPK	60.715.673.221	25 UPTD/UPK	60.715.673.221	
1.	2.	16.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1. Persentase kecukupan data dan informasi kesehatan	100%	100%	84.395.500	100%	86.088.855	100%	87.771.320	100%	89.490.988	100%	91.227.170	100%	91.227.170	
1.	2.	17.	Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Persentase FKTP yang melaksanakan sistem informasi kesehatan	96%	100%	345.261.600	100%	352.166.832	100%	359.072.064	100%	365.977.296	100%	377.882.529	100%	377.882.529	
1.	2.	18.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase Sarana dan prasarana RSUD sesuai standar	96,90%	100%	30.984.461.640	100%	30.503.130.455	100%	25.336.756.468	100%	25.470.030.480	100%	25.621.936.036	100%	25.621.936.036	
1.	2.	19.	Program Promosi dan Sistem Informasi Rumah Sakit	1. Persentase Sistem Informasi RS sesuai standar	100%	100%	362.270.750	100%	393.627.288	100%	415.575.552	100%	446.430.129	100%	490.972.336	100%	490.972.336	
1.	2.	20.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase Sarana dan prasarana RSUD berfungsi dengan baik	100%	100%	1.889.110.500	100%	2.167.739.400	100%	2.348.862.290	100%	2.545.539.416	100%	2.770.526.299	100%	2.770.526.299	
1.	2.	21.	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan (RS Kota, BKMM, RS Siantan)	1. Persentase Rumah Sakit yang sudah melakukan simulasi Akreditasi Nasional	100%	100%	90.714.701.538	100%	97.795.932.865	100%	104.756.924.507	100%	112.071.645.732	100%	120.230.326.018	100%	120.230.326.018	
1.	2.	22.	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Manajemen Rumah Sakit	1. Persentase tenaga kesehatan RS yang profesional, dan memenuhi standar kompetensi	100%	100%	20.498.986.391	100%	20.947.706.706	100%	21.421.000.150	100%	222.523.097.426	100%	23.479.017.834	100%	23.479.017.834	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			2. Persentase tata kelola admnistrasi dan manajemen RS	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Program peningkatan pelayanan prima	1. Persentase pelayanan publik dengan kategori baik	100%	100%	303.824.600	100%	334.207.000	100%	367.628.000	100%	404.390.800	100%	444.830.500	100%	44.830.500
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	1. Terselenggaranya Diklat Pegawai Berbasis Kompetensi	100%	100%	689.681.650	100%	758.649.900	100%	834.515.000	100%	917.966.500	100%	1.009.763.000	100%	1.009.763.000
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1. Terselenggaranya penegakan Disiplin Aparatur	100%	100%	979.467.500	100%	1.077.414.250	100%	1.185.156.000	100%	1.303.671.600	100%	1.434.038.500	100%	1.434.038.500
		Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja	1. Terselenggaranya LAKIP	100%	100%	207.061.228	100%	227.767.351	100%	250.544.086	100%	275.598.494	100%	303.158.344	100%	303.158.344
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Perlengkapan kantor	1. Persentase terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4.565.820.000	100%	1.942.402.000	100%	2.136.642.200	100%	2.350.306.600	100%	2.585.337.300	100%	2.585.337.300
		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	27.436.123.740	100%	29.416.410.774	100%	31.531.325.203	100%	33.811.331.433	100%	36.224.191.461	100%	36.224.191.461
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. Terselenggaranya Laporan keuangan yang Akuntabel	100%	100%	534.671.651	100%	588.136.816	100%	646.952.698	100%	711.647.967	100%	782.812.764	100%	782.812.764
1.	3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			393.351.300.000		406.900.177.600		414.101.218.501		428.034.311.427		451.364.067.990		399.294.278.874	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.	3.	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase peningkatan panjang jalan yang permukaannya aspal	56,86%	57,09	45.034.177.551	57,17	68.845.588.800	57,40	53.909.136.802	57,63	53.550.000.000	57,86	49.020.300.000	57,86	49.020.300.000
1.	3.	2. Program peningkatan jalan dan jembatan	1. Persentase berkurangnya jalan yang kualitas konstruksinya rendah	26,14%	24,74	5.000.000.000	23,34	5.000.000.000	21,34	5.000.000.000	20,54	5.000.000.000	19,14	10.000.000.000	19,14	10.000.000.000
1.	3.	3. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase berkurangnya jalan dengan status kondisi rusak SEDANG (karena meningkat statusnya menjadi kondisi BAIK)	21,86	20,11	24.750.000.000	18,36	24.750.000.000	16,61	24.750.000.000	14,86	38.000.000.000	13,11	43.420.261.546	13,11	43.420.261.546
1.	3.	4. Program pengadaan dan pemeliharaan alat-alat berat	1. Persentase jumlah alat berat siaga / siap dioperasikan	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000	100,00	1.200.000.000
1.	3.	5. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Jalan dan Jembatan	1. Persentase Tersedianya data dan informasi jalan dan jembatan tiap tahun	100,00	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000	100,00	185.000.000
1.	3.	6. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database dan Monitoring Saluran Drainase	1. Persentase tersedianya data dan informasi saluran tiap tahun	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000
1.	3.	7. Program pengendalian banjir	1. Persentase bekurangnya lokasi kejadian genangan hujan/pasang tiap tahun	100,00	83,33	530.000.000	66,67	530.000.000	50,00	530.000.000	33,33	530.000.000	16,67	530.000.000	16,67	530.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	3.	8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1. Prosentase meningkatnya panjang turap baru	3,04	3,33	20.000.000.000	3,62	20.000.000.000	3,92	20.000.000.000	4,21	30.000.000.000	4,50	20.000.000.000	20.000.000.000
1.	3.	9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Koker / Gorong-gorong	1. Persentase meningkatnya panjang saluran berkonstruksi	46,62	48,23	7.100.000.000	49,84	7.100.000.000	51,45	8.600.000.000	53,06	14.362.655.714	54,67	8.100.000.000	8.100.000.000
1.	3.	10. Program pemeliharaan / rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase / koker / gorong-gorong	1. Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	24,03	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	24,03	7.575.000.000	7.575.000.000
1.	3.	11. Program peningkatan saluran drainase / koker / gorong-gorong	1. Persentase berkurangnya saluran kurang baik	59,35	59,19	1.200.000.000	59,03	1.200.000.000	58,87	1.200.000.000	58,71	1.200.000.000	58,55	1.200.000.000	1.200.000.000
1.	3.	12. Program Peningkatan Turap/Talud/Bronjong	1. Persentase berkurangnya turap kayu belian	5,97	5,93	15.000.000.000	5,88	15.000.000.000	5,83	15.000.000.000	5,78	15.000.000.000	5,73	15.000.000.000	-
1.	3.	13. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	1. persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	86,00	100,00	21.506.789.116	100,00	4.486.666.667	100,00	21.506.789.116	100,00	4.486.666.667	100,00	21.506.789.116	21.506.789.116
			2. Persentase terpenuhinya kapasitas kebutuhan pokok air minum seharihari	86,00	100%		100%		100%		100%		100%		
			3. persentase meningkatnya jumlah KK dilayani sanitasi	91,75	91,82%		91,89%		91,96%		92,03%		92,10%		
1.	3.	14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah	1. Jumlah sarana dan prasana ditangani (unit)	15,00	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	15,00	28.736.000.000	28.736.000.000
1.	3.	15. Program Fasilitas dan Pengembangan Kebijakan Jasa Konstruksi	1. Persentase jumlah peserta dilatih dan dibina	100,00	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	100,00	420.000.000	420.000.000
1.	3.	16. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase ruas jalan yang telah ditata RMJ dan GSB	93,02	94,31	800.000.000	95,60	800.000.000	96,89	800.000.000	98,18	1.150.000.000	99,47	1.150.000.000	1.150.000.000
1.	3.	17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1. Persentase tersedianya dokumen pelaksanaan pengawasan	100,00	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	100,00	830.000.000	830.000.000
1.	3.	18. Program Pemanfaatan Ruang	1. Persentase tersedianya dokumen penataan	100,00	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	100,00	640.000.000	640.000.000
1.	3.	19. Program Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Jumlah taman ditingkatkan (unit)		3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	3,00	2.028.333.333	2.028.333.333
1.	3.	20. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Persentase bertambahnya luas RTH dikelola	18,75	18,76	5.170.000.000	18,77	5.170.000.000	18,78	5.170.000.000	18,79	5.170.000.000	18,70	5.170.000.000	5.170.000.000
1.	3.	21. Program Pengembangan Sistem Persampahan	1. Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA		95,00	143.000.000	92,50	143.000.000	90,00	143.000.000	87,50	143.000.000	85,00	143.000.000	143.000.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Nilai SAKIP : A		A	146.700.000	A	113.000.000	A	146.700.000	A	113.000.000	A	146.700.000	146.700.000
			2. Nilai LPPD		(**)		(**)		(***)		(***)		(***)		(***)
		Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Nilai IKM : Baik		Baik	17.173.000.000	baik	17.173.000.000	Sangat Baik	17.173.000.000	Sangat Baik	17.173.000.000	Sangat Baik	17.173.000.000	17.173.000.000
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. tersedianya Informasi Pohon dan profile dinas (tahun)		1	112.000.000	1	112.000.000	1	112.000.000	1	112.000.000	1	112.000.000	112.000.000

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan	1. Opini BPK terhadap laporan keuangan Dinas PUPR		WTP	23.000.000	WTP	23.000.000	WTP	23.000.000	WTP	23.000.000	WTP	23.000.000	WTP	23.000.000
1.	4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			54.071.500.000		56.228.807.480		56.564.648.308		59.406.282.501		61.365.046.485		274.952.102.117	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1.	4.	1. Program pengembangan permukiman	1. Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	83%	85%	21.506.000.000	87%	22.207.095.600	89%	22.582.395.516	91%	23.822.169.029	95%	24.515.394.148	95%	114.633.054.293
			2. Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	77%	80%		82%		84%		86%		87%		87%	
			3. Persentase Kawasan Tidak Kumuh	99,77%	99,85%		99,87%		99,90%		99,35%		99,50%		99,50%	
1.	4.	2. Program pengembangan Perumahan	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,07%	99,28%	4.046.000.000	99,30%	4.375.507.890	99,35%	4.016.915.558	99,40%	4.237.444.222	99,45%	4.475.753.849	99,45%	21.151.621.520
			2. Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Pontianak yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			3. Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.270.000.000	100%	2.344.002.000	100%	2.383.615.633	100%	2.514.476.132	100%	2.587.647.387	100%	2.587.647.387
		Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor	85%	89%	454.000.000	90%	468.200.400	92%	726.723.126	94%	502.895.226	96%	517.529.477	96%	517.529.477
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1. persentase disiplin aparaturnya berpakaian dinas/sesuai ketentuan berlaku	100%	100%	58.000.000	100%	59.850.800	100%	60.902.954	100%	64.206.526	100%	66.116.100	100%	66.116.100
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparturnya	50%	100%	45.000.000	100%	46.467.000	100%	47.252.292	100%	49.846.443	100%	51.296.974	100%	51.296.974
		Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja	1. persentase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	63.000.000	100%	65.053.800	100%	66.153.209	100%	69.785.020	100%	71.815.764	100%	71.815.764
		Program peningkatan dan Pegembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. persentase kualitas laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	26.000.000	100%	26.847.600	100%	27.301.324	100%	28.800.167	100%	29.638.252	100%	29.638.252
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Nilai Survey kepuasan Masyarakat (IKM)	84,58%	85,35%	8.000.000	85,45%	8.260.800	85,55%	8.400.407	85,60%	8.861.589	85,75%	9.119.462	85,75%	9.119.462
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. persentase kualitas data/informasi Dinas yang update	100%	100%	7.500.000	100%	7.744.500	100%	7.875.382	100%	8.307.740	100%	8.549.495	100%	8.549.495
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. jumlah sistem informasi yang dikelola Dinas	1 sistem	1 sistem	36.000.000	1 sistem	37.173.600	1 sistem	37.801.833	1 sistem	39.877.154	1 sistem	41.037.579	1 sistem	41.037.579

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Kondisi pada akhir periode RPJMD			
					2020		2021		2022		2023		2024							
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1.	5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			38.597.856.070			17.816.945.739			18.894.507.915			20.136.048.714			21.110.062.683			32.486.947.625
		SATUAN POLISI PAMOG PRAJA																		
1.	5.	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	1.086.175.000	100%	1.121.584.305	100%	1.140.539.080	100%	1.203.154.675	100%	1.238.166.476	100%	1.238.166.476				
1.	5.	2. Program Penerapan dan Penegakan hukum Daerah	1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	3.026.484.000	100%	3.125.147.378	100%	3.177.962.369	100%	3.352.432.503	100%	3.449.988.289	100%	3.449.988.289				
1.	5.	3. Program Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Lingkungan Pemukiman (RT) yang telah memiliki sistem keamanan lingkungan	60%	65%	208.000.000	68%	214.780.800	70%	218.410.596	72%	230.401.337	75%	237.106.016	75%	237.106.016				
1.	5.	4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100%	100%	594.390.000	100%	613.767.114	100%	782.329.952	100%	908.717.274	100%	1.021.026.383	100%	1.021.026.383				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.			17.985.495.653														
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor				887.894.000														
		Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				209.115.000														
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja				500.000														
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur				353.740.000														
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
1.	5.	5. Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	100%	148.000.000	100%	134.400.000	100%	141.120.000	100%	159.752.250	100%	155.584.800	100%	155.584.800				
1.	5.	6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	380.000.000	100%	399.000.000	100%	418.950.000	100%	439.897.500	100%	461.892.375	100%	484.986.994				
1.	5.	7. Program Kelurahan Tangguh Bencana	1. Persentase kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	0%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.313	100%	63.814.078				
1.	5.	8. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	747.000.000	100%	784.350.000	100%	823.567.500	100%	864.745.875	100%	907.983.169	100%	953.382.327				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja	1. persentase terlaksananya penyusunan rencana kerja dan capaian kinerja		100%	49.860.000	100%	52.353.000	100%	54.970.650	100%	57.719.182	100%	60.605.142	100%	60.605.142				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan	1000%	11.560.000	100%	12.138.000	100%	12.744.900	100%	13.382.142	100%	14.051.252	100%	14.051.252
		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	734.080.000	100%	770.784.000	100%	809.323.200	100%	849.789.360	100%	892.278.828	100%	892.278.828
		Program Peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. meningkatnya sarana prasarana dan perlengkapan kantor	100%	148.000.000	100%	155.400.000	100%	163.170.000	100%	171.328.500	100%	179.894.925	100%	179.894.925
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya apratur	1. meningkatnya kualitas SDA	100%	80.000.000	100%	84.000.000	100%	88.200.000	100%	92.610.000	100%	97.240.500	100%	97.240.500
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. meningkatnya disiplin klerja aparatur	100%	48.645.000	100%	51.077.250	100%	53.631.113	100%	56.312.668	100%	59.128.302	100%	59.128.302
		Program peningkatan pelayanan prima	1. meningkatnya pelayanan publik	100%	8.780.000	100%	9.129.000	100%	9.679.950	100%	10.163.948	100%	10.672.145	100%	10.672.145
		Program pengembangan Sistem Informasi	1. tersedianya informasi melalui website	100%	47.060.000	100%	49.413.000	100%	51.883.650	100%	54.477.833	100%	57.201.724	100%	57.201.724
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. tersedianya data dan informasi tentang BPBD Kota Pontianak	100%	6.015.000	100%	6.315.750	100%	6.631.538	100%	6.963.114	100%	7.311.270	100%	7.311.270
		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK													
1.	5.	9.	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	1. persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	75%	75%	413.000.000	75%	433.000.000	75%	500.000.000	80%	550.000.000	85%	615.000.000
1.	5.	10.	Program Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	1. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasya-rakatan (ormas) dalam pelaksanaan program pembangunan daerah	70%	72%	20.000.000	74%	25.000.000	76%	30.000.000	78%	30.000.000	80%	35.000.000
1.	5.	11.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. persentase potensi konflik yang dapat ditangani	3%	3%	485.000.000	2%	505.000.000	2%	520.000.000	1%	555.000.000	1%	10.480.000.000
1.	5.	12.	Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) Kepada Aparatur Pemerintah Kota Pontianak	1. Persentase pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pemerintah Kota pontianak	75%	75%	150.000.000	78%	150.000.000	78%	220.000.000	80%	280.000.000	80%	350.000.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.003.592.417								
		Program Peningkatan sarana Prasarana dan perlengkapan Kantor					5.400.000								
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					14.000.000								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					3.000.000								
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur					12.700.000								
		Program Peningkatan Pelayanan Prima					1.000.000								
1.	6.	SOSIAL					20.656.050.900		21.220.963.529		21.579.597.813		22.751.720.986		23.413.796.003
		DINAS SOSIAL													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	6.	1. Program Rehabilitas Sosial	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Yang Direhabilitasi	100%	100%	100%	615.602.000	100%	635.670.625	100%	646.413.459	100%	681.901.558	100%	701.744.893
			2. Persentase (%) Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabilitasi di Luar Panti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			3. Persentase (%) Pelaksanaan Pelayanan Bagi Lanjut Usia Terlantar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			4. Persentase (%) Pelaksanaan Pelayanan bagi Gelandangan dan Pengemis Terlantar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
1.	6.	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase (%) Peningkatan Fasilitas kebutuhan sosial anak Panti Asuhan	100%	100%	100%	3.444.100.000	100%	3.556.377.660	100%	3.616.480.442	100%	3.815.025.219	100%	3.926.042.453
			2. persentase korban bencana alam yang dipenuhi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
1.	6.	3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	783.156.000	100%	709.454.026	100%	721.443.799	100%	748.454.313	100%	770.234.334
1.	6.	4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Persentase (%) Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	100%	100%	100%	1.391.138.000	100%	1.436.489.099	100%	1.460.765.765	100%	1.540.961.805	100%	1.585.803.734
1.	6.	5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Presentase (%) Tingkat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	1.687.746.000	100%	1.714.937.950	100%	1.743.920.401	100%	1.839.661.631	100%	1.893.195.784
1.	6.	6. Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma	1. Presentase (%) Tingkat Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	100%	100%	100%	179.074.000	100%	184.911.812	100%	188.036.822	100%	198.360.044	100%	204.132.321
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	2.770.344.000	100%	2.860.657.214	100%	2.909.002.321	100%	3.068.706.549	100%	3.158.005.909
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. persentase pengembangan data sistem informasi	100%	100%	100%	48.600.000	100%	50.184.360	100%	51.032.476	100%	53.834.159	100%	55.400.733
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. persentase kualitas data/informasi dinas yang di update	100%	100%	100%	22.700.000	100%	23.440.020	100%	23.836.156	100%	25.144.761	100%	25.876.474
		Program peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1. persentase disiplin aparaturnya berpakaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	49.280.000	100%	50.886.528	100%	51.746.510	100%	54.587.394	100%	56.175.887
		Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	100%	100%	100%	2.000.000	100%	20.652.000	100%	21.001.019	100%	22.153.975	100%	22.798.655
		program peningkatan pelayanan prima	1. tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial kota pontianak	100%	100%	100%	210.050.000	100%	216.897.630	100%	220.563.200	100%	232.672.120	100%	239.442.878

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. persentase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	88.050.000	100%	90.920.430	100%	92.456.985	100%	97.532.874	100%	100.371.080	100%	100.371.080
		program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	25.600.000	100%	26.434.560	100%	26.881.304	100%	28.357.088	100%	29.182.279	100%	29.182.279
		program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. terciptanya kelancaran pelayanan aparatur dan masyarakat	100%	100%	891.560.000	100%	920.624.856	100%	936.183.416		987.579.886	100%	1.016.318.460	100%	1.016.318.460
2.		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
2.	1.	TENAGA KERJA			3.909.842.400		4.039.106.760		4.108.430.121		4.336.828.989		4.464.768.627		4.563.768.627	
		DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2.	1.	1. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	564.484.900	100%	577.858.900	100%	584.958.900	100%	608.658.900	100%	621.758.900	100%	621.758.900
2.	1.	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase terlaksananya kegiatan kesempatan kerja	100%	100%	179.605.000	100%	189.910.000	100%	195.410.000	100%	213.710.000	100%	223.910.000	100%	223.910.000
2.	1.	3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Persentase Perlindungan terhadap tenaga kerja	100%	100%	277.160.000	100%	285.884.000	100%	290.584.000	100%	306.184.000	100%	314.984.000	100%	413.984.000
2.	1.	4. Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh	1. Persentase kepesertaan BPJS tenaga kerja	30%	10%	45.200.000	100%	46.600.000	100%	47.400.000	100%	50.000.000	100%	51.500.000	100%	51.500.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase tercukupinya administrasi perkantoran	100%	100%	1.367.052.500	100%	1.412.474.850	100%	1.436.619.700	100%	1.517.290.450	100%	1.560.534.700	100%	1.560.534.700
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Persentase pengembangan sistem informasi	90%	90%	30.540.000	90%	31.322.400	90%	31.740.000	90%	33.040.000	90%	33.740.000	90%	33.740.000
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. Persentase disiplin dan kinerja aparatur	100%	100%	63.810.000	100%	66.110.000	100%	67.310.000	100%	71.410.000	100%	73.710.000	100%	73.710.000
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Persentase terlaksananya Diklat bagi ASN	100%	100%	57.000.000	100%	58.800.000	100%	59.700.000	100%	62.900.000	100%	64.700.000	100%	64.700.000
		Program peningkatan pelayanan prima	1. Persentase pelaksanaan pelayanan prima	100%	100%	102.931.660	100%	107.523.964	100%	110.541.060	100%	116.489.410	100%	122.762.040	100%	122.762.040
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100%	100%	50.002.000	100%	51.500.000	100%	52.200.000	100%	55.000.000	100%	56.500.000	100%	56.500.000
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. Persentase peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	100%	100%	25.350.000	100%	26.180.000	100%	26.580.000	100%	27.980.000	100%	28.780.000	100%	28.780.000
		Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. Persentase Pemeliharaan dan Penyediaan sarana prasarana perlengkapan kantor	100%	100%	286.660.140	100%	296.858.940	100%	302.294.140	100%	321.494.140	100%	331.494.140	100%	331.494.140
2.	2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.663.019.662		1.921.882.887		1.952.633.013		1.989.733.041		2.047.435.299		2.047.435.299	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	2.	1.	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	454.535.643	100%	469.353.505	100%	476.863.161	100%	485.923.561	100%	500.015.344	100%	500.015.344
				2. Persentase Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang Mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Keahlian	37,5%	37,5%		37,5%		37,5%		37,5%		37,5%		37,5%	
2.	2.	2.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100%	100%	28.097.095	100%	29.013.060	100%	29.477.269	100%	30.037.337	100%	30.908.420	100%	30.908.420
2.	2.	3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	1. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	447.971.023	100%	462.574.878	100%	469.976.076	100%	478.905.622	100%	492.793.885	100%	492.793.885
				2. Presentase Forum Anak Daerah yang Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	1. persentase pemenuhan kebutuhan ATK, da keperluan kantor lainnya	100%	100%	5.610.250.840										
			Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100%	100%	130.730.000										
			Program pengembangan data/informasi	1. persentase tersusunnya dokumen profil OPD/updating data profil OPD	100%	100%	7.740.000										
			Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. persentase pakaian dinas pegawai terpenuhi	100%	100%	37.040.000										
			Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. persentase penyelesaian dokumen capaian kinerja	100%	100%	10.314.400										
			Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase tersusunnya dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	5.736.900										
2.	3.	PANGAN					7.789.293.000		8.180.382.300		9.380.846.520		7.614.054.183		11.294.544.603		11.089.958.590
		DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN															
2.	3.	1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. persentase konsumsi energi perkapita		90,00	1.872.840.000	91,00	2.060.124.000	92,00	2.266.136.400	93,00	2.492.750.040	94,00	2.742.025.044	94,00	2.742.025.044
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		28,00%	1.903.108.000	31,00%	2.093.418.800	33,00%	2.302.760.680	36,00%	253.086.748	39,00%	2.786.340.423	39,00%	2.786.340.423
			Program Pengembangan Data/Informasi	1. Peningkatan persentase penyelesaian penyusunan profil OPD		100%	24.896.000	100%	27.385.600	100%	30.124.150	100%	33.136.576	100%	36.450.234	100%	36.450.234

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Peningkatan Persentase Pengembangan Sistem Informasi		100%	91.070.000	100%	100.177.000	100%	110.194.700	100%	121.214.170	100%	133.335.587	100%	133.335.587
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Peningkatan persentase penyelesaian penyusunan laporan/penilaian		100%	9.590.000	100%	10.549.000	100%	11.603.900	100%	12.764.290	100%	14.040.719	100%	14.040.719
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. peningkatan persentase peningkatan kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat		28%	1.436.659.000	31%	1.580.324.900	33%	1.738.357.390	36%	1.912.193.129	39%	2.103.412.442	39%	2.103.412.442
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. peningkatan persentase disiplin pegawai dalam berpakaian		100%	42.330.000	100%	46.563.000	100%	51.219.300	100%	56.341.230	100%	51.975.353	100%	51.975.353
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. peningkatan persentase pengetahuan dan keterampilan aparatur		28%	28.000.000	31%	30.800.000	33%	33.880.000	36%	37.268.000	39%	40.994.800	39%	40.994.800
		Program Pengemangan Kapasitas Sumber daya aparatur	1. peningkatan persentase pengetahuan dan keterampilan aparatur		28%	350.000.000	31%	-	33%	385.000.000	36%	-	39%	423.500.000	39%	423.500.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja	1. Peningkatan persentase penyelesaian laporan capaian kinerja		100%	127.160.000	100%	139.876.000	100%	153.863.600	100%	169.249.960	100%	186.174.956	100%	186.174.956
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. peningkatan persentase penyelesaian laporan keuangan		100%	30.800.000	100%	31.040.000	100%	31.570.000	100%	33.300.000	100%	34.270.000	100%	34.270.000
2.	4.	PERTANAHAN			217.398.000.000		224.485.174.800		228.278.974.254		240.811.489.941		247.819.104.298		1.158.792.743.293	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
2.	4.	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Persentase tanah asset Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai ketentuan	95,80%	95,87%	108.609.000.000	95,90%	112.149.653.400	96,00%	114.044.982.542	96,50%	120.306.052.084	97,00%	123.806.958.200	97%	578.916.646.226
2.	4.	2. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi	100%	100%	180.000.000	100%	185.868.000	100%	189.009.169	100%	199.385.773	100%	205.187.899	100%	959.450.840
2.	5.	LINGKUNGAN HIDUP			126.059.468.804		547.639.821.736		223.462.669.344		245.157.483.215		236.014.155.965		245.226.405.033	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
2.	5.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. persentase pelaku usaha yang memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup	45%	50%	653.100.000	55%	9.013.497.300	60%	9.532.728.320	65%	10.103.882.442	70%	10.732.151.976	70%	10.732.151.976
2.	5.	2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	1. Nilai Adipura	69,4	69,6	746.523.000	69,8	821.175.300	71	903.292.830	72	993.622.113	73	1.092.984.324	73	1.092.984.324
2.	5.	3. Program Pengendalian Polusi	1. persentase kegiatan usaha yang mentaati peraturan Lingkungan Hidup	50%	66%	2.202.470.000	67%	2.172.866.550	68%	2.199.093.850	70%	2.227.943.880	72%	2.259.678.913	72%	2.259.678.913

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2. persentase permohonan Dokumen lingkungan hidup yang diselesaikan	100%	100%	398.280.000	100%		100%		100%		100%		100%	
2.	5.	4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Masyarakat	1. persentase pengurangan sampah dari sumber sampah	18%	3.428.584.200	24%	7.638.712.370	26%	8.152.583.607	27%	8.717.841.968	28%	9.339.626.164	28%	9.339.626.164
2.	5.	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan	1. persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan dalam kondisi baik	45,77%	19.756.459.300	49,39%	36.859.219.841	49%	44.745.141.825	49,12%	32.819.656.008	49,18%	38.101.621.608	49,18%	38.101.621.608
2.	5.	6. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Kebersihan	1. persentase penanganan sampah perkotaan	73%	35.468.131.910	74%	390.149.451.010	73%	42.916.439.611	72%	47.208.083.572	71%	51.928.891.929	71%	51.928.891.929
2.	5.	7. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1. Persentase peningkatan PAD dari sektor persampahan	100%	540.757.000	100%	694.832.700	100%	754.315.970	100%	819.747.567	100%	891.722.324	100%	891.722.324
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas		25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000.000		36.602.500		36.602.500
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. persentase disiplin aparaturnya berpakaian dinas/sesuai ketentuan berlaku		122.300.000		134.530.000		147.983.000		162.781.300		179.059.430		179.059.430
		Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. terciptanya kelancaran pelayanan aparaturnya dan masyarakat		1.089.478.120		1.198.425.932		1.318.268.525		1.450.095.378		1.595.104.915		1.595.104.915
		program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. persentase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku		246.278.400		270.906.240		297.996.864		327.796.550		360.576.205		360.576.205
		Program pelayanan administrasi perkantoran	1. persentase pelayanan administrasi perkantoran		5.435.458.070		5.979.003.877		6.576.904.265		7.234.594.691		7.958.054.160		7.958.054.160
		Program Peningkatan pelayanan prima	1. Persentase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku		13.680.000		15.048.000		16.552.800		18.208.080		20.028.888		20.028.888
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai ketentuan berlaku		22.780.000		25.058.000		27.563.800		30.320.180		33.352.196		33.352.196
		Program pengembangan sistem informasi	1. meningkatnya kualitas data dan informasi yang didukung oleh sistem informasi melalui media elektronik dan internet		109.400.000		120.340.000		132.374.000		145.611.400		160.172.540		160.172.540
		Program pengembangan Data/Informasi	1. persentase kualitas data/informasi Dinas		11.680.000		12.848.000		14.132.800		15.546.080		17.100.688		17.100.688
2.	6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			8.682.514.610		8.974.959.842		9.126.636.663		9.627.743.017		9.914.854.765		9.914.854.765
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.	6.	1. Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	87,77	1.911.885.000	88,50	1.974.212.451	88,75	2.007.576.641	89,00	2.117.792.599	89,50	2.179.420.364	89,50	2.179.420.364
			2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	87,89	88,00	88,50		88,75		89,00		88,75		88,75	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	6.	2. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 sd 18 tahun	91,25	91,50	518.191.850	91,75	535.084.904	92,00	544.127.839	92,25	574.000.458	92,50	590.703.871	590.703.871
			2. Rasio pasangan berakta nikah	68,15	52,50		52,75	53,00		53,25		53,50		53,50	
			3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	89,90	80,00		80,25	80,50		80,75		81,00		81,00	
			4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	0	79,00		79,25	79,50		79,75		78,00		78,00	
2.	6.	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota	Ada	572.536.400	Ada	591.201.087	Ada	601.192.385	Ada	634.197.847	Ada	652.653.004	Ada	652.653.004
			2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah		Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase penyediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.172.442.150	100%	2.243.263.764	100%	2.281.174.922	100%	2.406.411.425	100%	2.473.437.997	2.473.437.997
		Program peningkatan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor	1. persentase penyediaan sarana prasarana peralatan dan gedung kantor	100%	100%	313.308.000	100%	323.521.841	100%	328.989.360	100%	347.050.876	100%	357.150.056	357.150.056
		Program peningkatan disiplin aparatur	1. persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	96.000.000	100%	99.129.600	100%	100.804.890	100%	106.393.079	100%	109.433.546	109.433.546
		Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	1. persentase penyediaan fasilitas pendukung pengembangan kapasitas sumber daya aparatur		20.000.000		20.652.000		21.001.019		22.153.975		22.798.655		22.798.655
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja	100%	100%	56.025.000	100%	57.851.415	100%	58.829.104	100%	62.058.822	100%	73.864.733	73.864.733
		program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase peningkatan sistem pelaporan keuangan	100%	100%	18.502.000	100%	19.105.165	100%	19.428.042	100%	20.494.642	100%	21.091.036	21.091.036
		Program peningkatan pelayanan prima	1. persentase peningkatan pelayanan prima	100%	100%	1.010.960	100%	10.439.173		10.615.595		11.198.391		11.524.264	11.524.264
2.	7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			529.172.754		546.423.786		555.166.566		565.714.731		582.120.458		582.120.458
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.	7.	1. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. jumlah alat TTG yang dihasilkan		2 alat TTG	138.588.303	4 alat TTG	143.106.282	4 alat TTG	145.395.982	4 alat TTG	148.158.506	4 alat TTG	152.455.103	152.455.103
2.	7.	2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	1. Persentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	100%	251.996.148	100%	260.211.222	100%	264.374.602	100%	269.397.719	100%	277.210.253	277.210.253
2.	8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.404.193.699		9.710.770.692		9.866.143.023		10.053.599.741		10.345.154.133		10.345.154.133
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.	8.	1. Program Penyuluhan dan Penggerakan	1. Persentase pencapaian peserta KB baru	73,80%	78,05%	1.051.654.235	78,55%	1.085.938.163	78,61%	1.103.313.174	79,12%	1.124.276.124	79,15%	1.156.880.132	1.156.880.132
			2. Presentase Penggunaan MKJP	26,85%	26,90%		26,95%		26,95%		27,05%		27,05%		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	8.	2. Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	1. persentase data dan informasi keluarga yang dimutakhirkan	100%	100%	253.190.273	100%	261.444.276	100%	265.627.384	100%	270.674.305	100%	278.523.859	278.523.859
			2. Persentase cakupan unmet need	13,75%	13,55%		12,85%	12,75%		12,15%		11,70%		11,70%	
2.	8.	3. Program Keluarga Berencana	1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB Aktif	70,14%	70,67%	3.215.663.148	70,98%	3.320.493.767	71,15%	3.373.621.667	71,45%	3.437.720.479	71,72%	3.537.414.372	3.537.414.372
			2. Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%	
2.	8.	4. Program Keluarga Sejahtera	1. Persentase cakupan anggota BKB ber-KB	81,95%	82,25%	363.178.657	83,48%	375.018.281	84,15%	381.018.574	84,85%	388.257.927	84,95%	399.517.406	399.517.406
			2. Persentase jumlah PUS anggota UPPKS yang ber KB	86,38%	87,17%		87,21%	87,43%		87,93%		88,06%		88,06%	
2.	9.	PERHUBUNGAN			41.560.000.000	42.916.600.000	43.639.839.000	46.034.933.000	57.373.473.000	57.373.473.000					
		DINAS PERHUBUNGAN													
2.	9.	1. Program Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1. Persentase Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang terpasang		12,94%	26.089.180.000	43,04%	26.604.851.000	73,14%	28.309.389.000	86,57%	26.825.813.000	100%	26.999.904.000	26.999.904.000
2.	9.	2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Persentase Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Yang Baik		19,98%	1.380.000.000	32,62%	1.821.000.000	58,43%	2.095.000.000	80,67%	2.630.000.000	100%	2.066.500.000	2.066.500.000
2.	9.	3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Persentase APILL dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Terpelihara Dalam Kondisi Baik		18,76%	811.000.000	38,94%	866.000.000	59,74%	980.000.000	78,25%	900.000.000	100%	976.000.000	976.000.000
2.	9.	4. Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai Danau dan Penyeberangan	1. Persentase Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan		24,52%	476.500.000	49,05%	510.000.000	73,57%	470.000.000	84,40%	255.000.000	100%	320.000.000	320.000.000
2.	9.	5. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	1. Persentase Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai		24,60%	1.745.800.000	49,21%	750.000.000	64,88%	610.500.000	68,06%	196.500.000	100%	3.790.500.000	3.790.500.000
2.	9.	6. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	1. Persentase Lokasi Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan lancar		14,68%	4.199.009.840	33,07%	4.282.298.000	56,49%	4.560.580.000	84,79%	4.940.580.000	100%	4.345.580.000	4.345.580.000
2.	9.	7. Program Peningkatan Pelayanan ASDP	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai		18,81%	761.061.160	38,28%	1.229.722.000	58,24%	1.252.882.000	78,96%	1.257.882.000	100%	1.257.882.000	1.257.882.000
2.	9.	8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR		7,35%	870.000.000	39,75%	2.262.980.000	57,26%	718.607.000	77,32%	4.132.728.000	100%	12.468.607.000	12.468.607.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100,00%	3.150.449.000	100,00%	2.476.049.000	100,00%	2.519.881.000	100,00%	2.600.530.000	100%	2.694.000.000	2.694.000.000
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan perlengkapan kantor	1. terlaksananya kegiatan peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor		100,00%	1.495.000.000	100,00%	1.515.000.000	100,00%	1.505.000.000	100,00%	1.657.400.000	100%	1.790.000.000	1.790.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kinerja aparatur		100,00%	300.000.000	100,00%	330.000.000	100,00%	335.000.000	100,00%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	360.000.000
		program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100,00%	100.000.000	100,00%	85.000.000	100,00%	90.000.000	100,00%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
		program peningkatan pelayanan prima	1. indeks kepuasan masyarakat (IM) dinas perhubungan		SB	22.000.000	SB	22.700.000	SB	25.000.000	SB	25.000.000	SB	27.000.000	SB	27.000.000
		Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan capaian kinerja yang berkualitas		100,00%	120.000.000	100,00%	124.000.000	100,00%	127.000.000	100,00%	130.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000
		Program peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. tersedianya laporan keuangan yang tertip dan akuntabel		100,00%	40.000.000	100,00%	37.000.000	100,00%	41.000.000	100,00%	43.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000
2.	10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.233.333.000		9.745.052.000		36.024.192.500		11.061.166.000		11.438.255.000		21.791.825.000	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.	10.	1. Program Pengembangan Pengelolaan Tata Pemerintahan Berbasis E-Government	Prosentase OPD di Pemerintah Kota Pontianak yang telah menerapkan SPBE (eGovernment)	85%	88%	3.031.832.560	91%	3.228.397.000	94%	3.282.205.000	97%	3.412.780.000	100%	3.563.500.000	100%	3.563.500.000
2.	10.	2. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menguasai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	85%	88,00%	1.329.500.440	91,00%	1.611.908.000	94,00%	1.638.272.500	97,00%	2.390.890.000	100,00%	2.466.930.000	100,00%	2.466.930.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			1.326.964.000		1.367.735.000		1.390.225.000		1.465.800.000		1.509.750.000		1.509.750.000
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan perlengkapan Kantor	1. Persentase tingkat penggunaan sarana dan prasarana			1.848.900.000		753.696.000		763.200.000		807.895.000		828.000.000		828.000.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Persentase jumlah pemenuhan kewajiban penyampaian laporan kinerja			54.900.000		56.600.000		57.550.000		60.000.000		62.000.000		62.000.000
		Program Peningkatan pelayanan prima	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kepuasan masyarakat			17.653.000		18.000.000		18.500.000		19.500.000		20.000.000		20.000.000
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. persentase tingkat kedisiplinan aparatur			50.620.000		52.000.000		53.000.000		56.050.000		57.000.000		57.000.000
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. persentase jumlah aparatur yang mengikuti diklat			77.000.000		79.400.000		80.500.000		84.600.000		87.000.000		87.000.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. persentase jumlah pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan			24.900.000		25.700.000		26.146.000.000		27.500.000		28.300.000		28.300.000
2.	11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			5.152.983.950		5.366.900.655		5.154.091.955		5.334.091.955		5.486.191.955		5.511.191.955	
		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.	11.	1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	persentase koperasi aktif	95,40%	95,40%	196.335.300	95,50%	233.081.900	95,50%	313.081.900	95,60%	283.081.900	95,60%	273.081.900	95,60%	298.081.900
2.	11.	2.	Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	Prosentase Usaha mikro naik kelas	0,13%	0,29%	224.206.500	0,47%	231.876.600	0,61%	261.876.500	0,69%	261.876.500	0,83%	261.876.500	0,83%	261.876.500
2.	11.	3.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase Usaha mikro aktif	86,52%	88,25%	100.000.000	88,25%	200.000.000	89,98%	200.000.000	89,98%	350.000.000	91,71%	350.000.000	91,71%	350.000.000
2.	11.	4.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase UKM non BPR /KM aktif		88,25%	334.293.100	88,25%	240.540.000	90%	270.540.000	89,98%	257.540.000	91,71%	287.540.000	91,71%	287.540.000
2.	11.	5.	Program Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	12%	12%	217.540.000	13%	63.100.000	14%	63.100.000	15%	63.100.000	16%	63.100.000	16%	63.100.000
			Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	1.787.538.650	A	1.657.591.755	A	1.774.783.155	A	1.842.783.155	A	1.859.883.155	A	1.859.883.155
			Program peningkatan sarana Prasarana dan perlengkapan kantor	1. persentase kantor/bangunan milik pemerintah dalam kondisi baik	100%	100,00%	335.250.000	100,00%	735.250.000	100,00%	335.250.000	100,00%	335.250.000	100,00%	335.250.000	100,00%	335.250.000
			program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	13,88%	19,44%	183.860.000	18,44%	220.000.000	27,77%	230.000.000	27,77%	240.000.000	27,77%	250.000.000	27,77%	250.000.000
			Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. jumlah ASN yang terkena sanksi pelanggaran disiplin yang dibina pada tahun berkenaan	100,00%	100,00%	59.590.000	100,00%	79.540.000	100,00%	89.540.000	100,00%	89.540.000	100,00%	89.540.000	100,00%	89.540.000
			Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. Nilai SAKIP Kota Pontianak	A	A	45.250.000	A	40.250.000	A	45.250.000	A	40.250.000	A	45.250.000	A	45.250.000
			Program Pengembangan data/informasi	1. Nilai SAKIP Kota Pontianak	A	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	4.072.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000
			Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan Keuangan	1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000
			Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Persentase WEB Perangkat Daerah dan WEB Unit Kerja di bawah perangkat daerah dalam kondisi baik dan terupdate		100,00%	15.000.000	100,00%	10.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000
2.	12.		PENANAMAN MODAL			1.946.619.800		2.008.182.306		2.040.108.329		2.150.234.860		2.211.145.272		2.211.145.272	
			DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU														
2.	12.	1.	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95%	100%	427.629.000	100%	440.077.000	100%	445.784.000	100%	468.505.000	100%	480.824.000	100%	480.824.000
2.	12.	2.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penanaman Modal	90%	100%	617.710.000	100%	638.136.500	100%	649.038.300	100%	684.751.100	100%	704.946.220	100%	704.946.220

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	12.	3.	Program Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	103.860.000	100%	107.245.836	100%	109.058.291	100%	115.045.591	100%	118.393.417	100%	118.393.417
2.	12.	4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Persentase Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Perizinan Teknis Daerah dan Penanaman Modal	100%	90%	209.170.000	100%	215.508.246	100%	218.837.500	100%	231.062.600	100%	237.349.800	100%	237.349.800
2.	12.	5.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal di Kota Pontianak	100%	100%	123.020.000	100%	126.817.400	100%	128.874.200	100%	135.535.000	100%	139.300.000	100%	139.300.000
2.	12.	6.	Program Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Persentase Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	100%	100%	48.910.800	100%	50.505.292	100%	51.358.832	100%	54.178.431	100%	55.755.024	100%	55.755.024
2.	13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				40.389.920.518		17.064.071.320		29.186.571.044		17.328.381.996		17.436.944.955		13.244.681.740	
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA															
2.	13.	1.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Persentase Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	23	24	1.442.749.000	25	1.449.478.490	25	1.456.008.477	26	1.462.868.563	26	1.469.796.250	26	1.469.796.250
2.	13.	2.	Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	1. Persentase meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda	100	100	1.442.749.000	150	1.449.478.490	200	1.456.008.477	250	1.462.868.563	300	1.469.796.250	300	1.469.796.250
2.	13.	3.	Program Pengembangan Kewirausahaan	1. Persentase meningkatnya pengembangan kewirausahaan	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000		-
2.	13.	4.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1. Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	120	120	3.334.446.000	125	3.349.049.000	126	9.357.421.000	127	3.383.471.050	130	3.395.421.000	130	3.395.421.000
2.	13.	5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	50%	2.158.600.000	63%	2.180.186.000	75%	2.201.987.860	88%	2.224.007.739	100%	2.246.247.816	100%	2.268.710.294
2.	13.	6.	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Persentase Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	50%	1.170.519.800	63%	1.173.579.800	75%	1.176.669.900	88%	1.179.790.401	100%	1.182.941.607	100%	1.186.123.826
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.037.102.718										
			Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor				172.109.200										
			Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000										
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				32.500.000										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur				64.130.000										
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan				5.400.000										
		Program Peningkatan Pelayanan Prima				3.300.000										
2.	14.	STATISTIK			1.045.940.000		1.194.535.000		1.211.099.815		1.277.700.000		1.314.800.000		1.314.800.000	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.	14.	1. Program Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Kota Pontianak	Persentase tingkat ketersediaan data statistik sektoral Kota Pontianak yang terupdate	85%	88,00%	1.045.940.000	91,00%	1.194.535.000	94,00%	1.211.099.815	97,00%	1.277.700.000	100,00%	1.314.800.000	100,00%	1.314.800.000
2.	15.	PERSANDIAN			1.879.792.100		1.938.655.600		1.971.700.000		2.078.300.000		2.094.081.000		2.094.081.000	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.	15.	1. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Pontianak	0%	85,00%	414.410.000	88,00%	427.636.000	92,00%	434.000.000	96,00%	458.000.000	100,00%	427.211.000	100,00%	427.211.000
2.	15.	2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	80%	84,00%	1.465.382.100	88,00%	1.511.019.600	92,00%	1.537.700.000	96,00%	1.620.300.000	100%	1.666.870.000	100%	1.666.870.000
2.	16.	KEBUDAYAAN			2.951.051.350		2.964.397.150		3.050.364.667		3.138.825.242		3.229.851.175		3.229.851.175	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
2.	16.	1. Program Pembinaan dan Pelestarian Budaya	1. Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	11,11%	11,11%	2.490.851.350	11,11%	2.490.851.350	13,07%	2.563.086.039	13,07%	2.637.415.534	13,07%	2.713.900.585	13,07	2.713.900.585
			2. Jumlah benda cagar budaya / warisan budaya tak benda yang ditetapkan	1	1	460.200.000	1	473.545.800	1	487.278.628	1	501.409.708	1	515.950.590	1	515.950.590
2.	17.	PERPUSTAKAAN			5.397.724.450		5.533.475.072		5.655.150.829		6.114.664.543		6.005.383.324		4.205.715.693	
		DINAS PERPUSTAKAAN														
2.	17.	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan dan Rumah Baca Per tahun	558.994	660.994	266.904.225	737.994	275.445.160	847.994	278.722.958	972.994	567.538.191	1.162.994	302.322.821	1.162.994	302.322.821
2.	17.	2. Program Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	1. Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	42,3%	46,2%	610.200.000	47,2%	629.726.400	48,2%	637.220.144	49,2%	671.630.032	50%	691.174.466	50%	691.174.466
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur dan Pelaksanaan tugas kantor	100%	100%	1.962.492.000	100%	2.025.291.744	100%	2.090.101.080	100%	2.156.984.314	100%	2.226.007.812	100%	2.226.007.812
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor	100%	100%	425.180.000	100	403.770.000	100	416.690.640	93%	430.024.740	93%	430.024.740	93%	430.024.740
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat	100%	100%	148.405.000	100%	153.153.960	100%	158.054.887	93%	163.112.643	93%	168.332.248	93%	168.332.248

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan	100%	100%	39.000.000	100%	40.248.000	100%	41.535.936	93%	42.865.086	93%	44.236.769	93%	44.236.769
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor	100%	100%	35.260.000	100%	36.388.320	100%	37.552.746	100%	38.754.434	93%	39.994.576	93%	39.994.576
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. Persentase penyampaian laporan keuangan	100%	100%	12.400.000	100%	10.836.000	100%	13.206.298	100%	13.628.899	100%	14.065.024	100%	14.065.024
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Persentase Penyampaian Laporan	100%	100%	6.900.000	100%	7.120.800	100%	7.348.666	100%	7.583.823	100%	7.826.505	100%	7.826.505
2.	18.	KEARSIPAN			714.558.900		737.424.785		748.125.938		779.754.816		802.741.599		511.037.601	
		DINAS PERPUSTAKAAN														
2.	18.	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	0,82	0,84	50.840.000	0,85	52.466.880	86	53.091.236	87	55.958.163	88	57.586.545	88	57.586.545
2.	18.	2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	1 keg	1 keg	163.349.450	2 keg	168.576.632	2 keg	170.582.694	2 keg	179.794.160	2 keg	185.026.170	2 keg	185.026.170
2.	18.	3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Lamanya rata - rata waktu Penemuan kembali Arsip (Retrival)	15 menit	15 menit	92.840.000	15 menit	95.810.880	15 menit	98.876.828	10 menit	102.040.887	10 menit	105.306.195	10 menit	105.306.195
2.	18.	4. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana	Jumlah arsip yang diselamatkan	5481 bungkus	5681 bks	150.000.000	5781 bks	154.800.000	5881 bks	156.642.120	5981 bks	158.506.161	6000 bks	163.118.691	6000 bks	163.118.691
3.		URUSAN PILIHAN														
3.	1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.215.868.000		4.637.454.800		5.101.200.280		5.611.320.308		6.172.452.340		6.172.452.340	
		DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN														
3.	1.	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	1. Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/ tahun)	207,07	160	877.851.000	162	965.636.100	163	1.062.199.710	164	1.168.419.681	165	1.285.261.649	814	1.285.261.649
3.	1.	2. Program Pengembangan, Peningkatan Produksi Perikanan, dan Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal	1. Peningkatan Jumlah Produksi Benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan Lokal (ekor/ tahun)		250.000	677.515.000	330.000	745.266.500	363.000	819.793.150	399.300	901.772.465	439.230	991.949.712	1.781.530	991.949.712
3.	1.	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	1. Peningkatan Produksi perikanan tangkap (Ton)			1.105.136.000		1.215.649.600		1.337.214.560		1.470.936.016		1.618.029.618		1.618.029.618
			- Produksi tangkap laut	378,18	820		850		890		910		930		4400	
			- produksi perairan umum daratan	50	51,5		53,5		54,64		56,28		57,96		57,96	
3.	2.	PARIWISATA			8.249.892.460		15.670.816.035		15.662.975.701		16.429.572.568		16.650.993.861		164.710.267.774	
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA														
3.	2.	1. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah masyarakat dan pelaku wisata yang memahami pariwisata	220	250	488.381.000	300	488.764.810	350	489.150.000	400	564.500.000	450	600.000.000	450	-
3.	2.	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	2	5	892.450.000	6	893.424.500	7	894.408.245	7	895.401.328	8	896.403.841		297.415.879
3.	2.	3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.	1.125.000	1.150.000	1.536.875.000	1.200.000	8.773.593.000	1.250.000	8.710.379.000	1.300.000	8.772.233.000	1.400.000	8.884.155.000		81.031.147.377

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD		
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3.	2.	4.	Program revitalisasi destinasi wisata	jumlah objek wisata yang terawat dan terpelihara	2	3	30.000.000	4	32.000.000	5	35.000.000	6	37.000.000	7	40.000.000			
3.	2.	5.	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	jumlah subsektor ekonomi kreatif berbasis iptek yang difasilitasi	8 subsektor	9 subsektor	455.000.000	10	475.000.000	11	505.000.000	12	558.618.000	13	585.454.180		-	
3.	2.	6.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah komunitas / sanggar seni dan budaya yang difasilitasi	30	35	473.139.000	35	476.595.790	40	580.086.648	45	1.086.611.914	45	1.090.171.932	45	1.099.797.051	
3.	2.	7.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	250 Orang	250 Orang	726.341.460	260 Orang	730.654.875	270 Orang	735.011.424	280 Orang	739.411.538	290 Orang	743.855.654		953.344.211	
3.	3.	PERTANIAN					26.568.840.200		15.853.664.000		17.326.250.400		18.871.631.440		20.670.628.592		20.670.628.592	
DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN																		
3.	3.	1.	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai swasembada pangan	1. Peningkatan Persentase Luas Lahan yang ditanami dengan benih yang bersertifikat (Ha)		0,3	1.321.150.000	0,32	1.453.265.000	0,33	1.598.591.500	0,35	1.758.450.650	0,36	1.934.295.715	0,38	1.934.295.715	
				2. Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman (IP)		1,18	-	1,2	-	1,21	-	1,23	-	1,24	-	126	-	
				3. Peningkatan Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk (Ha)		3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	
				4. Peningkatan Luas pertanaman keladi (Ha)		1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	
3.	3.	2.	Program Peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman hortikultura berkelanjutan	1. Persentase Luas Panen Komoditas: a. Sawi (ha) b. Bayam (ha) c. Kangkung (ha) d. Pepaya (ha) e. Lidah Buaya (m2)	195 172 202 42 640.142	200 176 207 43 768.170	- - - - -	205 180 212 44 844.987	- - - - -	210 185 217 45 887.236	- - - - -	215 190 222 46 931.598	- - - - -	220 195 228 47 978.178	- - - - -	0 226 200 234 48 1.027.087	1.946.550.232 - - - - -	
3.	3.	3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Tersedia		2	578.511.000	4	636.362.100	6	699.998.310	8	769.998.141	10	846.997.956	10	846.997.956	
3.	3.	4.	Program Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatan Indeks kepuasan pengunjung di UPTD Agribisnis		93	7.073.600.100	94	1.133.100.000	94	1.152.250.000	95	1.215.500.000	96	1.250.870.000	96	1.250.870.000	
3.	3.	5.	Program Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Petani	Jumlah Penyuluh Bersertifikat		4	511.530.000	5	562.683.000	6	618.951.300	7	680.846.430	8	748.931.074	30	748.931.074	
3.	3.	6.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	1. Persentase pengukuhan kelompok tani (kelompok)		35	88.798.000	38	97.677.800	41	107.445.580	44	118.190.138	48	130.009.151	48	130.009.151	
3.	3.	7.	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,Sehat,Utuh,Halal (ASUH)	1. Peningkatan Persentase Pengetahuan Peternak dan Pelaku usaha		0	85.838.000	0	94.421.800	0	103.463.980	0	114.250.378	0	125.675.416	2	125.675.416	
				2. Peningkatan Persentase Kelompok Ternak yang memperoleh Bibit Ternak		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			3. Peningkatan Persentase keberhasilan Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)		1		1	-	1	-	1	-	1	-	3	-
3.	3.	8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Penyakit Menular Ternak (orang)		20	458.309.000	25	504.139.900	30	554.553.890	35	610.009.279	40	671.010.208	150	671.010.208
			2. Peningkatan Jasa Medis Veteriner (kali)		120		130	-	140	-	150	-	160	-	700	-
3.	3.	9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Peningkatan Pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)		50	675.761.000	55	743.337.100	60	817.670.810	65	899.337.891	70	989.381.680	70	989.381.680
			2. Jumlah Pengendalian Hama, Penyakit Ikan, dan Kesehatan Lingkungan Budidaya yang dilaksanakan (kali/tahun)		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
3.	3.	10. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	1. Peningkatan pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (ekor)		300	1.068.750.000	330	1.137.455.000	363	1.289.370.500	400	1.376.320.550	440	1.555.939.606	1833	1.555.939.606
3.	3.	11. Program peningkatan keamanan pangan produk hewan	1. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Keamanan Produk Hewan		20	185.306.000	25	203.836.600	30	224.220.260	35	246.642.286	40	271.306.515	150	271.306.515
3.	4.	PERDAGANGAN			22.467.623.130		5.855.077.530		6.078.208.530		6.189.317.560		6.349.317.560		6.349.317.560	
		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
3.	4.	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4%	4%	19.584.150	4%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150
3.	4.	2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	95%	95%	97.376.800	95%	99.136.800	95%	101.266.800	95%	102.376.830	95%	152.376.830	95%	152.376.830
3.	4.	3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5,88%	5,88%	22.234.701.200	11,76%	5.620.395.600	11,76%	5.841.396.600	11,76%	5.951.395.600	11,8%	6.061.395.600	11,76%	6.061.395.600
3.	7.	PERINDUSTRIAN			979.330.350		1.371.987.300		1.596.987.300		1.911.987.300		1.931.987.300		1.896.987.300	
		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN														
3.	7.	1. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	persentase pertumbuhan industri	90%	90%	284.207.900	90%	676.864.850	92%	751.864.850	92%	916.864.850	92%	936.864.850	92%	901.864.850
3.	7.	2. Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Persentase kelayakan perijinan industri	90%	90%	18.257.600	90%	18.257.600	92%	18.257.600	92%	68.257.600	93%	68.257.600	93%	68.257.600
3.	7.	3. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	Persentase sarana prasarana Master industri produk unggulan	25%	-	25%	-	25%	150.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	
4.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN															
4.	1.	PERENCANAAN			18.665.465.026		20.502.364.103		19.362.897.923		20.007.623.166		25.677.678.457		65.086.076.857	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	1.	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.986.776.600	100%	2.491.392.000	100%	2.546.692.000	100%	2.816.192.000	100%	3.909.592.000	100%	3.909.592.000
4.	1.	2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Perangkat Daerah sektor Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terbina perencanaannya	100%	2.229.400.000	100%	1.451.000.000	100%	1.532.000.000	100%	1.333.000.000	100%	1.389.000.000	100%	3.595.000.000
4.	1.	3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perangkat Daerah Sektor Pembangunan Ekonomi yang terbina perencanaannya	100%	1.358.944.800	100%	1.693.086.800	100%	1.844.836.600	100%	1.713.686.800	100%	1.866.236.600	100%	9.625.883.400
4.	1.	4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Perangkat Daerah Sektor Sosial Budaya yang terbina perencanaannya	100%	1.115.200.000	100%	962.500.000	100%	987.500.000	100%	1.013.500.000	100%	1.040.100.000	100%	2.723.170.000
4.	1.	5. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	993.300.000	100%	849.087.200	100%	853.087.200	100%	1.039.460.800	100%	861.087.200	100%	3.964.085.600
			persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase tersedianya sistem informasi yang berkualitas untuk mendukung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. Persentase disiplin aparatur berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku	100%	63.630.000,00	100%	64.713.000,00	100%	71.184.300,00	100%	78.302.730,00	100%	86.133.033,00	100%	86.133.033,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur	100%	136.000.000,00	100%	137.142.680,00	100%	138.156.948,00	100%	139.172.643,00	100%	140.289.907,00	100%	140.289.907,00
		Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase terpenuhinya kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100.000.000,00	100%	110.000.000,00	100%	121.000.000,00	100%	133.100.000,00	100%	146.410.000,00	100%	146.410.000,00
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase tingkat penyediaan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	100%	375.440.000,00	100%	507.232.000,00	100%	557.955.200,00	100%	613.750.720,00	100%	675.125.792,00	100%	675.125.792,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.202.469.926,00	100%	2.098.259.523,00	100%	2.308.085.475,00	100%	2.538.894.023,00	100%	5.783.280.880,00	100%	5.783.280.880,00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Tingkat ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	100%	140.502.900,00	100%	2.324.012.450,00	100%	244.393.550,00	100%	255.412.760,00	100%	267.133.891,00	100%	267.133.891,00

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Nilai IKM	B	B	24.050.000,00	B	26.455.000,00	B	29.100.500,00	B	32.010.550,00	A	35.211.605,00	A	35.211.605,00
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Tingkat ketersediaan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik	100%	100%	38.200.000,00	100%	218.729.000,00	100%	240.101.900,00	100%	257.612.090,00	100%	281.373.299,00	100%	281.373.299,00
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. Persentase tersedianya buku profil Bappeda	100%	100%	9.688.450,00	100%	40.688.450,00	100%	41.688.450,00	100%	42.688.450,00	100%	43.688.450,00	100%	43.688.450,00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. Persentase tersedianya Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	79.415.950,00	100%	81.000.000,00	100%	83.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	87.000.000,00	100%	87.000.000,00
4.	2.	KEUANGAN			33.971.169.500		35.243.791.900		35.979.348.320		38.147.319.320		39.303.340.320		148.669.275.560	
		BADAN KEUANGAN DAERAH														
4.	2.	1. Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	1. Persentase Tahapan Penganggaran Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	2.340.608.000	100%	2.417.010.000	100%	2.457.742.000	100%	2.612.631.000	100%	2.686.382.000	100%	12.514.373.000
			2. Persentase tersedianya dokumen penganggaran	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4.	2.	2. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Perbendaharaan	1. Persentase Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Yang di validasi	98,71%	100%	1.053.444.000	100%	1.106.370.000	100%	1.118.703.000	100%	1.179.312.000	100%	1.201.934.000	100%	5.659.763.000
4.	2.	3. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	1. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara realtime	-	90%	1.782.417.000	92%	1.847.417.000	95%	1.912.417.000	98%	2.012.417.000	100%	2.092.417.000	100%	9.647.085.000
			2. Persentase tersedianya dokumen akuntansi	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4.	2.	4. Program Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	2.666.011.000	100%	3.117.680.900	100%	2.997.502.000	100%	3.317.923.000	100%	3.416.231.000	100%	15.515.347.900
			2. Persentase gedung bangunan dan kendaraan dinas roda empat milik daerah diasuransikan	-	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
			3. Persentase aset tanah selain jalan yang bersertifikat	-	53%		63%		72%		82%		100%		100%	
4.	2.	5. Program Penataan dan Pengembangan Data Base Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase data pajak daerah yang dimutakhirkan	-	60%	1.615.000.000	63%	1.301.950.000	66%	1.555.587.610	69%	1.692.087.610	72%	1.789.087.610	72%	7.953.712.830
4.	2.	6. Program Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah	-	B	504.965.000	B	626.322.000	B	636.322.000	B	646.322.000	B	656.322.000	B	3.070.253.000
4.	2.	7. Program Peningkatan Pengawasan Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase jumlah wajib pajak terdaftar yang membayar pajak	49%	70%	1.561.079.500	70%	1.637.989.000	70%	1.665.593.000	70%	1.757.006.000	70%	1.808.094.000	70%	8.429.761.500

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2. Persentase pertumbuhan piutang tertagih		5%		5%		5%		5%		5%		5%	
		3. Persentase pemenuhan wajib pajak atas rekomendasi hasil pemeriksaan pajak daerah		30%		35%		40%		45%		50%		50%	
4.	2.	8. Program Pemanfaatan Ekonomis Aset Daerah	1. Persentase capaian target Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan ekonomis aset daerah	31,29%	100%	1.316.436.000	100%	1.368.081.000	100%	1.391.136.000	100%	1.467.486.000	100%	1.510.156.000	7.053.295.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.443.674.600	100	5.533.658.200	100%	5.626.658.200	100%	5.799.568.200	100%	5.968.770.200	5.968.770.200
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. Tingkat pemenuhan data informasi	90%	90%	13.730.000	90%	15.730.000	90%	18.730.000	90%	21.730.000	90%	24.730.000	24.730.000
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Persentase Informasi Kegiatan SKPD dipublikasikan dalam website	80%	80%	24.550.000	80%	24.550.000	80%	24.550.000	80%	31.000.000	80%	33.000.000	33.000.000
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. Tingkat kedisiplinan aparatur berpakaian dinas	90%	90%	118.610.000	93%	118.610.000	96%	118.610.000	98%	165.801.000	100%	170.622.000	170.622.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	82%		201.696.900	84%	201.696.900		201.696.900	88%	201.696.900	90%	201.696.900	201.696.900
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Tingkat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan OPD	100%	100%	99.003.000	100%	99.003.000	100%	99.003.000	100%	99.003.000	100%	99.003.000	99.003.000
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. Tingkat pemenuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	85%	85%	2.314.904.000	86%	2.329.824.000	87%	2.345.015.000	88%	2.383.071.000	90%	2.409.191.000	2.409.191.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Tingkat pemenuhan tersedianya dokumen perencanaan	100%	100%	75.080.000	100%	75.080.000	100%	75.080.000	100%	75.080.000	100%	75.080.000	75.080.000
4.	3.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			14.398.000.000		14.867.374.796		17.107.233.456		15.948.636.411		16.463.752.020		16.463.752.020
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
4.	3.	1. Program Peningkatan Disiplin Pegawai	1. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	0,20%	0,19%	844.634.000	0,15%	872.169.068	0,11%	886.908.726	0,08%	935.600.015	0,04%	962.825.975	962.825.975
4.	3.	2. Program Pendidikan Kedinasan	1. Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Lulus Diklat Dengan Hasil Baik	94,62%	100%	4.534.795.330	100%	4.682.629.658	100%	6.761.766.099	100%	5.023.187.058	100%	5.160.361.801	5.160.361.801
4.	3.	3. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1. Cakupan Pelayanan Kepegawaian Yang Terseselesaikan Tepat Waktu		80,00%	718.530.000	80,00%	741.954.078	85,00%	754.493.102	90,00%	795.914.773	100,00%	819.075.893	819.075.893
4.	3.	4. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		37,84%	3.064.162.870	40,21%	3.164.054.580	42,57%	3.217.527.102	44,94%	3.394.169.340	47,30%	3.492.939.668	3.492.939.668
4.	3.	5. Program Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Persentase Pemenuhan Informasi/ Data Kepegawaian Yang Akurat dan Up to Date		100%	514.530.000	100%	531.303.678	100%	540.282.730	100%	569.944.231	100%	586.529.608	586.529.608

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi pada akhir periode RPJMD		
						2020		2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4.	3.	6.	Program Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil	1. Persentase Penempatan Pejabat Administrasi/ Pejabat Fungsional Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan		100%	936.713.000	100%	967.249.844	100%	983.596.366	100%	1.037.585.807	100%	1.067.789.845	100%	1.067.789.845	
4.	3.	7.	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas (Cepat, Tepat dan Akurat)	100%	100%	605.588.000	100%	625.330.169	100%	635.598.249	100%	670.809.063	100%	690.329.606	100%	690.329.606	
4.	3.	8.	Program Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Yang Berkualitas Sesuai Formasi		100%	911.463.000	100%	941.176.694	100%	957.082.580	100%	1.009.626.414	100%	1.099.006.542	100%	1.099.006.542	
			Program Peningkatan Pengembangan Data/Informasi	1. Persentase database yang up to date, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan		100%	30.675.000	100%	31.675.000	100%	32.210.313	100%	33.978.659	100%	34.967.438	100%	34.967.438	
			Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Persentase Laporan Capaian Kinerja yang disusun tepat waktu		100%	125.360.000	100%	129.446.736	100%	131.634.386	100%	138.861.114	100%	142.901.972	100%	142.901.972	
			Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Nilai IKM Organisasi Perangkat Daerah		B	13.860.000	B	14.311.836	BB	14.553.706	BB	15.352.704	A	15.799.468	A	15.799.468	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.457.096.800	100%	1.504.598.156	100%	1.530.025.865	100%	1.614.024.284	100%	1.660.992.391	100%	1.660.992.391	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Cakupan sarana dan prasarana apartaur yang terpenuhi		100%	603.192.000	100%	622.856.059	100%	622.282.327	100%	668.155.016	100%	687.598.327	100%	687.598.327	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Keuangan	1. Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disusun dan tepat waktu		100%	37.400.000	100%	38.619.240	100%	39.271.905	100%	41.427.933	100%	42.633.486	100%	42.633.486	
4.	4.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				966.558.000		2.742.000.000		2.930.400.000		3.516.480.000		4.419.776.000		15.643.256.000	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
4.	4.	1.	Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	Persentase kesesuaian capaian kinerja Program Pengkajian Dan Penelitian Terapan	39,58	39,58%	966.558.000	51,79%	2.742.000.000	59,82%	2.930.400.000	74,17%	3.516.480.000	84,58%	4.419.776.000	84,58%	15.643.256.000	
				persentase implementasi rencana kelitbangan	20	20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%				
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33	33%		50%		50%		67%		83%		83%		
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	75	75%		82%		89%		100%		100%		100%		
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	30	30%		35%		40%		50%		55%		55%		
4.	5.		PELAYANAN ADMINISTRATIF				54.701.836.141		54.088.932.941		54.470.138.141		55.132.289.041		55.855.553.891		55.785.953.891	
			SEKRETARIAT DPRD															

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4.	5.	1. Program peningkatan kapasitas lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas berdasarkan jadwal banmus		95%	7.819.693.900	95%	8.073.612.800	95%	8.209.507.400	95%	8.658.424.900	95%	9.239.439.300	95%	9.239.439.300	
			2. Persentase pengaduan /aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1. Persentase Fasilitas rapat-rapat DPRD berdasarkan jadwal banmus	100%	100%	959.960.000	100%	991.254.600	100%	1.008.006.800	100%	1.063.346.300	100%	94.289.600	100%	94.289.600	
			2. persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	41.430.759.961	100%	41.765.762.591	100%	41.945.091.191	100%	41.940.357.591	100%	42.886.731.041	100%	42.886.731.041	
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	95%	95%	3.044.702.280	95%	1.734.371.950	95%	1.763.682.650	95%	1.860.508.750	95%	1.914.649.350	95%	1.914.649.350	
		Program peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1. tingkat pelanggaran disiplin	0	0%	215.790.000	0%	222.824.800	0%	226.590.500	0%	239.030.300	0%	245.986.000	0%	245.986.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase pegawai yang pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	34%	46%	96.400.000	59%	96.400.000	71%	96.400.000	83%	96.400.000	95%	96.400.000	95%	96.400.000	
		Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Nilai SAKIP OPD	90	90	45.600.000	90	45.600.000	90	45.600.000	45600000	45.600.000	90	69.600.000	90	100%	
			2. Persentase pegawai dengan nilai SKP baik/sagat baik	92%	100%		100%		100%		100%		100%				
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1. Jumlah pengunjung website		3.000 pengunjung	76.600.000	3.500 pengunjung	116.600.000	4.000 pengunjung	116.600.000	4.500 pengunjung	116.600.000	5.000 pengunjung	116.600.000	5.000 pengunjung	116.600.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. Persentase dokumen data/informasi yang didistribusikan	80%	80%	987.130.000	80%	1.017.306.200	80%	1.033.459.600	80%	1.086.821.200	80%	1.166.658.600	80%	1.166.658.600	
		Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Nilai IKM	B	B	11.600.000	B	11.600.000	B	11.600.000	B	11.600.000	B	11.600.000	B	11.600.000	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu	YA	YA	13.600.000	YA	13.600.000	YA	13.600.000	YA	13.600.000	YA	13.600.000	YA	13.600.000	
4.	6.	UNSUR STAF				64.035.495.316		65.675.352.463		67.240.532.050		70.932.037.259		72.996.159.544		72.996.159.544	
		SEKRETARIAT DAERAH															
4.	6.	1. Program Peningkatan Pelayanan Prima	1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM A	100%	100%	640.187.750	100%	661.057.871	100%	672.229.749	100%	709.135.162	100%	729.770.995	100%	729.770.995	
4.	6.	2. Program Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	1. Persentase kebijakan pembangunan yang difasilitasi	100%	100%	536.309.050	100%	553.792.725	100%	563.151.822	100%	594.068.857	100%	611.356.261	100%	611.356.261	
			2. Persentase layanan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi	100%	100%	427.706.000	100%	441.649.216	100%	449.113.087	100%	473.769.396	100%	487.556.085	100%	487.556.085	
4.	6.	3. Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan perundangan	100%	100%	136.352.000	100%	140.797.075	100%	143.176.546	100%	151.036.938	100%	155.432.113	100%	155.432.113	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	6.	4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1. Persentase rata-rata penyebaran informasi kegiatan kepala daerah	100%		100%	1.265.777.540	100%	1.307.041.888	100%	1.329.130.896	100%	1.402.100.182	100%	1.442.901.297
4.	6.	5. Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat	1. Persentase bantuan masyarakat yang tersalurkan	100%	1.148.860.000	100%	1.186.312.836	100%	1.206.361.523	100%	1.272.590.771	100%	1.309.623.162	100%	1.309.623.162
			2. Persentase pelayanan masyarakat yang difasilitasi	100%	5.503.545.540	100%	5.682.961.125	100%	5.779.003.168	100%	6.096.270.442	100%	6.273.671.911	100%	6.273.671.911
4.	6.	6. Program Pelayanan Ibadah Haji	1. Persentase pelayanan ibadah haji yang dipenuhi	100%	1.844.320.000	100%	1.904.444.832	100%	1.936.629.950	100%	2.042.950.934	100%	2.102.400.806	100%	2.102.400.806
4.	6.	7. Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD	1. Persentase BUMD yang berkategori sehat	100%	152.812.550	100%	157.794.239	100%	160.460.962	100%	169.270.269	100%	174.196.033	100%	174.196.033
4.	6.	8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan	1. Persentase kegiatan kepala daerah yang diinformasikan kepada masyarakat	100%	609.946.460	100%	629.830.715	100%	640.474.854	100%	675.636.923	100%	695.297.958	100%	695.297.958
			2. Persentase peningkatan kemampuan SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100%	823.162.000	100%	849.997.081	100%	864.362.032	100%	911.815.507	100%	938.349.339	100%	938.349.339
4.	6.	9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Persentase layanan keprotokolan yang difasilitasi	100%	504.635.690	100%	521.086.813	100%	529.893.181	100%	558.984.316	100%	575.250.760	100%	575.250.760
4.	6.	10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan	1. Persentase peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa	100%	424.407.000	100%	438.242.668	100%	445.648.969	100%	470.115.098	100%	483.795.447	100%	483.795.447
4.	6.	11. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama	1. Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan	100%	1.031.465.000	100%	1.065.090.759	100%	1.083.090.793	100%	1.142.552.477	100%	1.175.800.754	100%	1.175.800.754
4.	6.	12. Program Pengembangan Promosi Daerah	Persentase peningkatan kemampuan bersaling UMKM yang dipromosikan	100%	2.337.372.835	100%	2.413.571.189	100%	2.454.360.543	100%	2.589.104.936	100%	2.664.447.890	100%	2.664.447.890
4.	6.	13. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal	100%	516.063.000	100%	532.886.654	100%	541.892.438	100%	571.642.333	100%	588.277.125	100%	588.277.125
4.	6.	14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	512.800.468	100%	529.517.763	100%	538.466.613	100%	568.028.431	100%	584.558.058	100%	584.558.058
4.	6.	15. Program Pembinaan dan Bantuan Hukum	1. Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%	627.020.100	100%	647.460.955	100%	658.403.045	100%	694.549.373	100%	714.760.759	100%	714.760.759
4.	6.	16. Program Pengkajian Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham	1. Persentase produk hukum yang efektif di masyarakat	100%	544.549.650	100%	562.301.969	100%	571.804.872	100%	603.196.959	100%	620.749.991	100%	620.749.991
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
4.	6.	17. Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP komponen pelaporan kinerja	87%	169.454.000	93%	174.978.200	95%	177.935.332	97%	187.703.982	100%	193.166.168	100%	193.166.168

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2. Persentase analisis jabatan yang dapat dipergunakan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian	100%	100%	444.579.965	100%	459.073.272	100%	466.831.610	100%	492.460.666	100%	506.791.271	100%	506.791.271
4.	6.	18. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian target dengan realisasi anggaran	93%	414.016.950	100%	427.513.903	100%	434.738.888	100%	458.606.052	100%	471.951.489	100%	471.951.489
			Persentase Kebijakan Keuangan yang Diterbitkan	100%	537.272.000	100%	554.787.067	100%	564.162.969	100%	595.135.516	100%	612.453.959	100%	612.453.959
4.	6.	19. Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan	1. Prestasi LPPD	Sangat Tinggi	366.594.000	Sangat Tinggi	378.544.964	Sangat Tinggi	384.942.374	Sangat Tinggi	406.075.711	Sangat Tinggi	417.892.514	Sangat Tinggi	417.892.514
			2. Persentase peningkatan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100%	497.963.080	100%	514.196.676	100%	522.886.600	100%	551.593.075	100%	567.644.433	100%	567.644.433
4.	6.	20. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Persentase kegiatan APEKSI dan Muskomwil yang diikuti	100%	225.320.000	100%	232.665.432	100%	236.597.478	100%	249.586.679	100%	256.849.652	100%	256.849.652
			2. Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi	100%	189.780.000	100%	195.966.828	100%	199.278.667	100%	210.219.066	100%	216.336.441	100%	216.336.441
4.	6.	21. Program Kegiatan Kinerja Pemerintah	1. Persentase kegiatan peringatan dan upacara yang dilaksanakan	100%	480.026.810	100%	495.675.684	100%	504.052.603	100%	531.725.091	100%	547.198.291	100%	547.198.291
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu	Tepat Waktu	375.173.720	Tepat Waktu	38.704.383	Tepat Waktu	393.951.517	Tepat Waktu	415.579.456	Tepat Waktu	427.672.818	Tepat Waktu	427.672.818
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu	159.489.500	Tepat Waktu	164.688.858	Tepat Waktu	167.472.099	Tepat Waktu	176.666.318	Tepat Waktu	181.807.308	Tepat Waktu	181.807.308
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	100%	5.203.040.410	100%	5.372.659.527	100%	5.463.457.473	100%	5.763.401.289	100%	5.931.116.266	100%	5.931.116.266
			2. Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100%	3.641.497.280	100%	3.760.210.091	100%	3.823.757.642	100%	4.033.681.936	100%	4.151.062.081	100%	4.151.062.081
			3. persentase kebutuhan kepala daerah yang terpenuhi	100%	4.259.221.440	100%	4.398.072.059	100%	4.472.399.477	100%	4.717.934.208	100%	4.855.226.093	100%	4.855.226.093
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1. Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	100%	2.544.672.000	100%	2.627.628.307	100%	2.672.035.226	100%	2.818.729.959	100%	2.900.755.001	100%	2.900.755.001
			2. Persentase sarana dan prasarana dinas kepala daerah yang terpenuhi	100%	2.056.308.900	100%	2.123.344.570	100%	2.159.229.093	100%	2.277.770.771	100%	2.344.053.900	100%	2.344.053.900
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase SDM Sekretariat Daerah yang mempunyai kemampuan sesuai standar	100%	100.000.000	100%	103.260.000	100%	105.005.094	100%	110.769.874	100%	113.993.277	100%	113.993.277
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1. Persentase Kebutuhan Pakaian Dinas yang disediakan	100%	351.520.000	100%	263.979.552	100%	369.113.906	100%	389.378.260	100%	400.709.167	100%	400.709.167
4.	7.	PENGAWASAN			46.719.342.745		44.959.108.743		45.476.283.798		47.921.842.123		49.739.286.654		207.668.438.046
		INSPEKTORAT													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	7.	1. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Persentase OPD yang memperoleh predikat A atau kategori "Memuaskan" atas penilaian SAKIP	3,33%	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada tingkat maturitas Level 3 atau "Terdefinisi"	56,67%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	7.	2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	1. Jumlah Hasil Pemeriksaan Menurun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	77,60%	81%	82%	83%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4.	7.	3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat serta Bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
4.	7.	4. Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	7.	5. Program Penegakan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi	Persentase OPD yang telah membangun Zona Integritas												
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1. persentase terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	1. persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja												
		Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	1. persentase terpenuhinya dokumen laporan keuangan												
		Program peningkatan pelayanan prima	1. persentase terpenuhinya dokumen laporan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan PMPRB												
		Program Pengembangan Data/Informasi	1. Persentase terpenuhinya dokumen Data dan profil OPD												

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	8.	PENUNJANG			144.102.120.618		115.450.398.644		117.289.477.108		123.800.175.666		127.395.130.919		130.263.894.960
		KECAMATAN PONTIANAK BARAT													
4.	8.	1. Program Peningkatan pelayanan Prima	1 IKM Di Kecamatan	Baik	Baik	291.451.000	Baik	300.952.303	Sangat Baik	305.890.413	Sangat Baik	322.683.796	Sangat Baik	332.073.895	Sangat Baik
			2 IKM Kelurahan pallima	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			3 IKM Kelurahan sungai jawi dalam	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			4 IKM Kelurahan sungai jawi luar	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			5 IKM Kelurahan sungai bellung	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
4.	8.	2. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	100%	90%	2.023.212.000	90%	2.039.943.047	95%	2.124.351.469	95%	2.239.514.077	100%	2.304.771.236	100%
4.	8.	3. Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan dan Kecamatan	100%	90%	112.850.000	90%	116.528.910	95%	118.498.249	95%	125.003.873	100%	128.641.484	100%
4.	8.	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	90%	940.515.000	90%	1.022.805.789	95%	987.588.660	95%	1.041.807.277	100%	1.072.123.665	100%
4.	8.	5. Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	100%	90%	1.388.405.000	90%	1.433.097.003	95%	1.457.316.666	95%	1.537.364.298	100%	1.582.101.605	100%
4.	8.	6. Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	90%	789.518.000	90%	815.256.287	95%	822.514.118	95%	867.670.142	100%	892.919.343	100%
		Program Pelayanan Administrasi Pembangunan	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			8.887.286.000		1.981.181.435		2.000.801.112		2.109.499.117		2.171.924.034	
		Program Pengembangan Data/Informasi	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah			134.660.000		113.335.400		115.250.768		121.577.945		125.115.863	
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1 Tingkat ketersediaan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik			16.200.000		44.463.756		45.215.193		47.697.507		49.085.504	
		Program Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur	1 Persentase disiplin aparatur berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku			84.370.000		86.759.052		88.225.279		93.068.846		95.777.149	
		Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			21.000.000		25.815.000		26.521.273		27.962.467		28.776.174	
		Program peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD			80.200.000		61.264.158		62.299.552		65.719.795		67.632.241	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD		56.280.000		25.515.546		25.946.872		27.371.349		28.167.855		28.167.855	
		Program peningkatan Sarana Prasarana dan perlengkapan Kantor	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor		605.201.000		361.021.742		367.123.009		387.278.062		398.547.853		398.547.853	
		KECAMATAN PONTIANAK TIMUR														
4.	8.	7. Program Peningkatan pelayanan Prima	1 IKM Di Kecamatan	Baik	Baik	261.160.000	Baik	269.673.816	Sangat Baik	274.231.303	Sangat Baik	289.286.602	Sangat Baik	297.704.842	Sangat Baik	297.704.842
			2 IKM Kelurahan Saigon	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			3 IKM Kelurahan Tanjung Hulu	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			4 IKM Kelurahan Tanjung Hilir	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			5 IKM Kelurahan Dalam Bugis	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			6 IKM Kelurahan Parit Mayor	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			7 IKM Kelurahan Tambelan Sampit	Sangat Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
			8 IKM Kelurahan Tambelan Sampit	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
4.	8.	8. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	100%	90%	2.607.681.000	90%	2.692.691.401	95%	2.738.197.885	95%	2.888.524.949	100%	2.972.581.025	100%	2.972.581.025
4.	8.	9. Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan dan Kecamatan	100%	90%	165.340.000	90%	170.730.084	95%	173.615.422	95%	183.146.909	100%	188.476.484	100%	188.476.484
4.	8.	10. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	90%	3.518.440.000	90%	3.633.141.144	95%	3.694.541.229	95%	3.897.371.543	100%	4.010.785.055	100%	4.010.785.055
4.	8.	11. Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	100%	90%	911.740.000	90%	941.462.724	95%	957.373.444	95%	1.009.933.246	100%	1.039.322.304	100%	1.039.322.304
4.	8.	12. Program peningkatan Ketentrman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	70%	60%	800.000.000	65%	826.080.000	70%	840.040.752	75%	886.158.989	80%	911.946.216	80%	911.946.216
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			12.179.596.515										
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor			768.715.800										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			20.000.000										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD		18.096.600										
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1 Persentase disiplin aparatur berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku		95.220.000										
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD		2.040.000										
		Program Pengembangan Data/Informasi	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah		26.710.000										
		Program Pengembangan Sistem Informasi	1 Tingkat ketersediaan sistem informasi untuk mendukung pelayanan publik		25.000.000										
		KECAMATAN PONTIANAK SELATAN													
4.	8.	13.	Program Peningkatan pelayanan Prima	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Baik	Baik	293.555.000	Baik	303.125.000	Baik Sekali	308.248.100	Baik Sekali	325.170.900	Baik Sekali	334.633.500
			2 IKM Kantor kecamatan	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	11.354.000	Baik Sekali	11.684.400
			3 IKM Kelurahan Akcaya	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300
			4 IKM Kelurahan Akcaya	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	6.984.000	Baik Sekali	7.187.200
			5 IKM Kelurahan Benua Melayu Laut	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300
			6 IKM Kelurahan Kota Baru	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300
			7 IKM Kelurahan Parit Tokaya	Baik	Baik			Baik		Baik Sekali		Baik Sekali	8.534.900	Baik Sekali	8.783.300
4.	8.	14.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman			2.482.250.000		2.563.171.500		2.606.489.300		2.749.585.500		2.829.598.100
4.	8.	15.	Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang Kelurahan dan kecamatan			140.850.000		145.441.700		147.899.700		156.019.400		160.559.600
4.	8.	16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat			1.129.100.000		1.165.908.600		1.185.612.400		1.250.702.600		1.287.097.900
4.	8.	17.	Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina			1.833.540.000		1.893.313.400		1.925.309.600		2.031.009.000		2.090.111.700
4.	8.	18.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat			667.520.000		689.281.200		700.930.100		739.411.300		760.928.100

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
					2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		10.148.011.803											
		Program peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan kantor	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor		315.720.000											
		Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD		35.470.000											
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1 Persentase disiplin aparatur berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku		86.260.000											
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD		16.500.000											
		Program Pengembangan Data/Informasi	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah		28.097.500											
		KECAMATAN PONTIANAK UTARA														
4.	8.	19.	Program Peningkatan pelayanan Prima	1 IKM Kecamatan	95%	218.965.000	95%	226.103.259	95%	229.924.404	95%	242.547.254	95%	249.605.379	95%	249.605.379
			2 IKM di Kantor Kecamatan	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
			3 IKM Kelurahan Siantan Hulu	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
			4 IKM Kelurahan Siantan tengah	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
			5 IKM Kelurahan Siantan Hilir	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
			6 IKM Kelurahan Batu Layang	Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
4.	8.	20.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	95%	757.808.000	95%	782.512.541	95%	795.737.003	95%	839.422.964	95%	863.850.172	95%	863.850.172
4.	8.	21.	Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	95%	134.180.000	95%	138.554.268	95%	140.895.835	95%	148.631.016	95%	152.956.179	95%	152.956.179
4.	8.	22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	95%	3.238.727.000	95%	3.344.309.500	95%	3.400.828.331	95%	3.587.533.806	95%	3.691.931.040	95%	3.691.931.040
4.	8.	23.	Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina	95%	484.694.200	95%	500.495.231	95%	508.953.600	95%	536.895.153	95%	552.518.802	95%	552.518.802
4.	8.	24.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	10%	531.240.000	10%	548.558.424	10%	557.829.061	10%	588.453.877	10%	605.577.885	10%	605.577.885

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		8.784.543.808		9.070.919.936		9.224.218.483		9.730.628.078		10.013.789.355		10.013.789.355
		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan kantor	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor		776.289.192		801.596.220		815.143.196		859.894.557		884.917.489		884.917.489
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD		85.360.000		88.142.736		89.632.348		94.553.164		97.304.661		97.304.661
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1 Persentase disiplin aparatur berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku		75.630.000		78.095.538		79.415.353		83.775.255		86.213.115		86.213.115
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		10.000.000		10.326.000		10.500.509		11.076.987		11.399.328		11.399.328
		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Keuangan	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD		40.560.000		41.882.256		42.590.066		44.928.261		46.235.673		46.235.673
		Program Pengembangan Data/Informasi	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah		110.935.000		114.551.481		116.487.401		122.882.559		126.458.442		126.458.442
		KECAMATAN PONTIANAK KOTA													
4.	8.	25. Program Peningkatan pelayanan Prima			261.010.000		275.903.500		280.664.300		296.391.100		305.184.700		305.184.700
			1 IKM DI Kecamatan	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			2 IKM Kelurahan Sungai Bangkong	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			3 IKM Kelurahan Sunggal Jawi	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			4 IKM Kelurahan Tengah	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			5 IKM Kelurahan Darat Sekip	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
			6 IKM Kelurahan Mariana	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik
4.	8.	26. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman		2.203.495.000		381.338.800		387.783.100		409.072.000		420.917.600		420.917.600
4.	8.	27. Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang Kelurahan dan kecamatan		137.205.000		141.687.000		144.081.600		151.991.900		156.414.800		156.414.800
4.	8.	28. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat		2.206.219.800		2.322.411.400		2.362.689.500		2.492.400.800		2.554.932.500		2.554.932.500
4.	8.	29. Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina		887.530.000		918.302.300		934.615.900		988.504.200		1.018.113.100		1.018.113.100

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	8.	30.	Program peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	682.925.000	705.217.800	717.136.100	756.507.100	778.521.400	778.521.400					
			<i>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2.119.666.200	2.188.767.318	2.225.757.485	2.347.951.570	2.416.276.960	2.416.276.960					
			<i>Program Pengembangan Data/Informasi</i>	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah	123.525.000	127.551.915	129.707.542	136.828.486	140.810.194	140.810.194					
			<i>Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur</i>	1 Persentase disiplin aparaturnya berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku	67.650.000	69.855.390	71.035.946	74.935.819	77.116.451	77.116.451					
			<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	25.815.000	26.251.273	27.692.467	28.498.317	28.498.317					
			<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</i>	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD	104.450.000	107.855.070	109.677.820	115.699.132	119.065.976	119.065.976					
			<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Keuangan</i>	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD	56.200.000	58.032.120	59.012.862	62.252.668	64.064.220	64.064.220					
			<i>Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor</i>	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor	575.124.000	593.873.042	603.909.496	637.064.127	655.602.693	655.602.693					
			KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA												
4.	8.	31.	Program Peningkatan pelayanan Prima	1 IKM Di Kecamatan Pontianak Tenggara	223.590.000	230.879.034	234.780.890	247.670.361	254.877.568	254.877.568					
				2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pontianak Tenggara	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bansir Laut	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bansir Darat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bangka Belitung Laut	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
				6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelurahan Bangka Belitung Darat	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
4.	8.	32.	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik pada lingkungan permukiman	356.670.000	368.297.442	374.521.669	395.082.908	406.579.821	406.579.821					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)a	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	8.	33.	Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Persentase kelompok masyarakat tingkat kelurahan yang terlibat dalam musrenbang kelurahan	85%	85%	224.165.000	85%	231.472.779	85%	235.384.669	85%	248.307.287	85%	255.533.029
4.	8.	34.	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan kelurahan	1 Persentase RT yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat			3.189.437.200		3.293.412.853		3.349.071.530		3.532.935.557		3.635.743.982
4.	8.	35.	Program pembinaan Lembaga Masyarakat	1 Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang dibina			621.495.000		641.755.737		652.601.409		688.429.226		708.462.517
4.	8.	36.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat			506.880.000		523.404.288		532.249.820		561.470.336		577.809.122
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	1 Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran			1.390.305.800		1.848.669.769		1.879.912.288		1.983.119.473		2.040.828.249
			Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	1 Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan kantor			669.222.000		691.038.637		702.771.190		741.296.364		762.868.088
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			10.000.000		10.326.000		10.500.509		11.076.987		11.399.328
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	1 Persentase terpenuhinya pelaporan capaian kinerja OPD			77.830.000		80.367.258		81.725.465		86.212.193		88.720.967
			Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	1 Persentase disiplin aparaturnya berpakaian dinas/ sesuai ketentuan berlaku			81.560.000		84.218.856		85.642.155		90.343.909		92.972.917
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1 Persentase terpenuhinya pelaporan keuangan PD			47.340.000		48.883.284		49.709.412		52.438.458		53.964.417
			Program Pengembangan Data/Informasi	1 Persentase tersedianya data base Perangkat Daerah			88.505.000		91.390.263		92.934.758		98.036.877		100.889.750

Keterangan :

x		Kode Urusan
	x	Kode Bidang Urusan
		Satuan Kerja Perangkat Daerah
	y	Nomor Urut Program

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Adapun penetapan indikator kinerja utama Kota Pontianak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,53%	78,73%	78,93%	79,13%	79,33%
2.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	Indeks Infrastruktur	78,55%	80,29%	82,04%	83,79%	85,63%
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	71,74	74,74	77,74	80,74	83,74
4.	Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	5,20%	5,30%	5,50%	5,80%	6,10%
		Angka Kemiskinan	4,90%	4,80%	4,50%	4,25%	4,00%
		Tingkat Pengangguran	9,97%	9,80%	9,00%	8,50%	8,00%
5.	Mewujudkan Kota yang bersih, hijau , nyaman, dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,20%	66,30%	66,50%	66,70%	66,80%
6.	Mewujudkan kota yang aman dan tertib	Konflik Sosial yang Terjadi	0	0	0	0	0

Tabel VIII.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05	5,20	5,30	5,50	5,80	6,10	6,10
1.2	Laju Inflasi	%	3,99	≤5	≤5	≤4	≤4	≤4	≤4
1.3	PDRB Per Kapita								
1.3.1	PDRB Per kapita ADHB	Rp.	53.379.302	61.021.673	64.842.858	68.664.043	72.485.229	76.306.414	76.306.414
1.3.2	PDRB Per kapita ADHK 2010	Rp.	36.526.947	38.851.343	40.013.541	41.175.739	42.337.937	43.500.135	43.500.135
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31
1.5	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4200	0,4180	0,4160	0,4140	0,4120	0,4100	0,4100
1.6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	95,00	94,89	94,86	94,83	94,80	94,77	94,77

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.7	Indeks Pembangunan Manusia	%	77,93	78,53	78,73	78,93	79,13	79,33	79,33
Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf	%	98,86	98,96	99,06	99,16	99,26	99,36	99,36
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,91	9,92	9,94	9,96	9,98	10,00	10,00
1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,62	14,62	14,67	14,72	14,77	14,82	14,82
2	Kesehatan								
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,32	72,37	72,42	72,47	72,52	72,57	72,57
2.2	Persentase Balita Gizi Buruk	%	2,10	1,95	1,80	1,65	1,50	1,35	1,35
2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	5,0
3	Ketenagakerjaan								
3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,20	68,97	70,74	72,51	74,28	76,05	76,05
3.2	Tingkat Pengangguran	%	10,37	9,97	9,80	9,00	8,50	8,00	8,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3	RasioPenduduk yang Bekerja	%	89,63	90,03	90,20	91,00	91,50	92,00	92,00
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1	Kebudayaan								
1.1	JumlahKelompokSeniBudaya	Kelompok	137	138	139	140	142	143	143
1.2	CagarBudayadanWarisanBudayaTak Benda yang ditetapkan	Buah	6	8	10	12	14	16	16
1.3	DokumentasiBudaya	Buah	3	7	9	11	13	15	15
1.4	Pagelaran /Festival SeniBudaya yang dilaksanakan	Kegiatan	13	13	13	13	13	13	13
1.5	Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam Pagelaran/Festival	Kelompok	12	13	13	13	14	14	14
2	Kepemudaan dan Olahraga								
2.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	175	185	190	195	200	205	205
2.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Organisasi	37	38	39	40	41	42	42
2.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	9	13	14	15	16	17	17
2.4	JumlahAtlet	Orang	710	716	717	718	719	720	720

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.5	JumlahGedungOlahraga	Unit	36	37	38	39	40	41	41
2.6	JumlahLapanganOlahraga	Unit	118	118	119	120	121	122	122
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PELAYANAN URUSAN WAJIB									
Terkait Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan								
1.1	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,92	9,94	9,96	9,98	10,00	10,00
1.2	Angka melek huruf	%	98,36	98,86	99,06	99,16	99,26	99,36	99,36
2	Kesehatan								
2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,32	72,37	72,42	72,47	72,52	72,57	72,57
2.2	Angka Kematian ibu	per 100.000 KH	49,66	49,50	49,00	48,50	48,00	47,50	47,50
2.3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	2,48	4	3,5	3	2,5	2	2
2.4	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	55,76	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								
2.6	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	30,58	<49	<49	<49	<49	<49	<49
2.7	Prevalensi Penderita Hipertensi di Kota Pontianak	%	32,80	30	28	27	26	25	25
2.8	Prevalensi Penderita Diabetes Melitus di Kota Pontianak	%	2,70	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20	2,20
2.9	Angka Stunting Balita	%	21,54	21,00	20,50	20,00	19,50	19,00	19,00
2.10	Angka wasting Balita	%	14,25	12,00	10,00	8,00	6,00	5,00	5,00
2.11	Angka Underweight Balita	%	15,77	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	10,00
2.12	Akreditasi Fasilitas Kesehatan	%	100 (dasar = 8 puskesmas ; madya = 15 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 1 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 2 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 4 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 5 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 6 puskesmas)	100 (utama/paripurna = 6 puskesmas)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Indeks Infrastruktur Jalan	%	86,60	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	95,00
3.2	Indeks Infrastruktur Saluran Drainase	Unit	46,62	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00
3.3	Persentase warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	%	86,00	100	100	100	100	100	100
3.4	Persentase Kantor Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.5	Kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW	%	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	95,00
3.6	Cakupan pemerataan taman kota pada setiap kecamatan	%	50	50	66,67	83,33	83,33	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	86,36	88,09	89,43	90,78	92,13	93,82	93,82
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Potensi konflik yang dapat di tangani	%	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdata dan per kada	%	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Kejadian bencana yang dapat ditanggulangi	%	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Sosial								
6.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	60,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TidakTerkait Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayan terpadu satu pintu	Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.2	Rasio Penduduk yang Bekerja	Rasio	89,63	91,50	93,05	94,69	95,70	96,83	96,83
1.3	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	(%)	50,00	50,22	52,00	53,30	54,20	56,00	56,00
1.4	Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi peserta program jamsostek aktif	%	52,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Indeks Pembangunan Gender	%	93,68	93,88	93,92	93,98	94,05	94,17	94,17
2.2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak		Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
3	Pangan								
3.1	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita	%	183,53	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2	Persentase peningkatan skor pola pangan harapan	%	96,50	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,00	54,00	54,30	55,00	55,00	55,00	55,00
4.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	84,00	84,00	84,00	84,00	84,70	85,00	85,00
4.3	Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Indeks	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
4.4	Persentase Pengurangan sampah dari sumber sampah	%	15	22	24	26	27	28	28
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.1	Presentase Partisipasi LPM dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Persentase Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
8	Perhubungan								
8.1	Indeks Penerangan Jalan umum	Indeks	87,86	91,09	92,74	94,39	96,03	97,68	97,68
8.2	Tingkat Ketersediaan fasilitas pendukung Transportasi	%	73,87	78,59	80,53	83,33	85,27	87,20	87,20
8.3	Tingkat Kinerja pelayanan Jaringan Jalan		B	B	B	B	A	A	A
9	Komunikasi dan Informatika								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terintegrasi ke e-government	%	32,00	33,69	50,27	66,84	84,42	100	100
9.2	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan	%	84,38	87,50	90,63	93,75	96,88	100	100
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
10.1	Persentase Koperasi berkualitas	%	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00
10.2	Persentase Usaha mikro naik kelas	%	0,13	0,29	0,47	0,61	0,69	0,83	0,83%
11	Penanaman Modal								
11.1	Persentase Peningkatan Investasi daerah (PMA/PMDN)	(%)	5,00%	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Peningkatan Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional	%		4,35	4,17	4,00	3,85	3,70	3,70
12.2	Peningkatan Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	%		4,35	4,17	0,00	4,00	3,85	3,85
13	Statistik								
13.1	Persentase Perangkat Daerah yang data sektoralnya sudah terintegrasi dengan portal data Kota Pontianak	%	34,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100	100
14	Kebudayaan								
14.1	Cakupan pelestarian budaya lokal	%	60,00	60,00	65,00	70,00	73,00	75,00	75,00
14.2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	55,00	55,00	60,00	63,00	67,00	70,00	70,00
15	Perpustakaan								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.1	Persentase peningkatan kunjungan pada perpustakaan dan tempat baca di kota pontianak	%	14,39	7,20	8,30	8,90	8,90	9,00	9,20
16	Kearsipan								
16.1	Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan	Jumlah	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali
Pelayanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,33	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34
2	Pariwisata								
2.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	3,39	3,40	3,41	3,42	3,43	3,44	3,44
2.2.	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68
3	Pertanian								

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	%	1,33	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34
4	Perdagangan								
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61
6.2.	Tingkat Inflasi	%	3,99	≤5	≤5	≤4	≤4	≤4	≤4
5	Perindustrian								
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	16,17	16,17	16,17	16,25	16,25	16,30	16,30
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Pengeluaran per kapita	Rp/bulan	1.169.677	1.175.180	1.180.683	1.186.187	1.191.690	1.197.193	1.197.193
1.2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan perkapita	%	54,20	54,35	54,50	54,65	54,80	54,95	54,95
1.3.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	rasio	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22
1.4.	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum	rasio	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,87	0,87

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah									
1	Perhubungan								
1.1.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	216,142	213,943	216,804	222,525	228,247	233,968	233,968
2.	Penataan Ruang								
2.2.1.	Kesesuaian bangunan dan lingkungan dengan RTRW	%	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00	95,00
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jumlah Bank dan Cabang	unit	51	51	52	52	53	54	54
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Cakupan Pelayanan Air Bersih	%	90,96	100	100	100	100	100	100
4.2	Kapasitas Pengolahan Air Bersih	m ³ /det	1.644	2.578	2.578	2.578	3.078	3.078	3.078
Fokus Iklim Investasi									
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Angka Kriminalitas yang Diselesaikan	%	73,80	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
1.2	Jumlah Surat Izin Usaha yang Diterbitkan	Surat	2.463	2.619	2.775	2.930	3.086	3.242	3.242
Fokus Sumber Daya Manusia									
1	Ketenagakerjaan								
1.1.	Persentase lulusan S1/S2/S3	%	9,80	9,93	10,06	10,19	10,32	10,45	10,45
1.2.	Rasio ketergantungan	%	43,25	43,08	42,91	42,73	42,56	42,39	42,39

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak disusun sebagai upaya untuk menacpai tujuan pembangunan Kota Pontianak selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2020-2024). RPJMD Kota Pontianak ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional selama lima tahun mendatang.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak mulai tahun 2020 hingga 2024. RPJM yang baru selesai disusun, perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RKP Tahun 2020 serta menyelesaikan agenda-agenda pembangunan yang telah digariskan dalam RPJM tahun 2020-2024 ini.

Selanjutnya Kepala Daerah Kota Pontianak yang terpilih pada tahun 2024 tetap mempunyai ruang gerak yang luas dalam menyusun RPJM tahun 2025-2030 disesuaikan dengan visi dan misi yang diusungnya selama kampanye dan disesuaikan dengan agenda-agenda pokok RPJP Kota Pontianak Tahun 2005-2025. Program transisi tahun 2020 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota Pontianak untuk lima tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan walikota Pontianak. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam

RPJMD Tahun 2020-2024 ini, maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat serta segenap stakeholder pembangunan.
2. Konsep program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokok dalam RPJM ini tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas program dan kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
3. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2020-2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Pontianak dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
4. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Pontianak dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak;
5. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar melaksanakan program-program dalam RPJM ini dengan sebaik-baiknya;
6. Setiap Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, tanpa terkecuali, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- Perangkat Daerah) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Dalam hal ini BAPPEDA Kota Pontianak berkewajiban melakukan fasilitasi, asistensi dan pendampingan selama proses penyusunan tersebut;
7. Setiap Satuan Kerja yang ada berkewajiban menjamin konsistensi dan harmoni antara RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
8. Penjabaran lebih lanjut RPJM Tahun 2020-2024 ini untuk setiap tahunnya harus dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
9. Penyusunan RKPD Kota Pontianak harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang

dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota;

10. RKPD Kota Pontianak harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
11. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Pontianak merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
12. Renja- Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA- Perangkat Daerah);
13. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2020-2024 ini, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaannya, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparatur yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat luas;
14. Dalam rangka menjaga konsistensi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Tahun 2020-2024 ini, maka pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Bappeda Kota Pontianak menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 - d. Bappeda Kota Pontianak menyusun evaluasi capaian tahunan RPJM berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
15. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target capaian sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJM ini, maka penyesuaiannya dilakukan melalui

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

16. Apabila terjadi hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Pontianak yang menyebabkan terhambat dan melencengnya berbagai rencana yang telah disusun di dalam RPJM ini, maka strategi, arah kebijakan dan program dan target capaian yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Pontianak untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Sebagai tanggungjawab bersama untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakata, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kota Pontianak, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.



**BAPPEDA
KOTA PONTIANAK**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak
Jl. Zainuddin No. 5 Pontianak Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045
Website: www.bappeda.pontianakkota.go.id